



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2024 NOMOR 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang dapat berjalan efektif, efisien, dan terarah perlu disusun rencana pembangunan jangka panjang daerah sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan arah pembangunan daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor...

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, serta Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
dan
BUPATI WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
8. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan

serta...

serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah periode 2025--2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi, dan program Bupati.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan Daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama periode Pemerintahan Bupati berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode Pemerintahan Bupati berikutnya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 27 Agustus 2024

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Disahkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 27 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

dto

SAIPUL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2024 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN PROVINSI
LAMPUNG: 06/1536/WK/2024

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah akan menopang tujuan pembangunan daerah Provinsi Lampung serta memberikan andil bagi tercapainya tujuan pembangunan Nasional yang merupakan manifestasi dari terwujudnya satu kesatuan dalam sistem pembangunan Nasional. Upaya tersebut diawali dari sebuah proses perencanaan yang meliputi perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek.

Pembangunan daerah adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa depan tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan secara berhasil guna dan berdaya guna diperlukan pedoman yang akan memberikan arah sekaligus acuan sehingga akan terjadi sinkronisasi serta konsistensi tujuan yang telah menjadi kesepakatan bersama seluruh komponen masyarakat dalam jangka panjang berupa RPJPD yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun. Dokumen tersebut akan memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi, dan arah kebijakan daerah.

Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025--2045 merupakan kelanjutan pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, dalam dua puluh tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi Kabupaten Way Kanan untuk melakukan penataan kembali langkah-langkah, antara lain, di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup, dan kelembagaanya, sehingga Kabupaten Way Kanan dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di tingkat regional, nasional, maupun internasional.

Penetapan RPJPD Tahun 2025--2045 sebagai pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dan merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 (dua puluh) tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2045. Pelaksanaan RPJPD Tahun 2025--2045 terbagi ke dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periode perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan.

RPJPD merupakan acuan dalam menyusun dan menjabarkannya ke RPJMD yang memiliki kurun waktu 5 (lima) tahunan untuk selanjutnya dijabarkan ke dalam program 1 (satu) tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan demikian, pembangunan daerah di Kabupaten Way Kanan hingga tahun 2045 menjadi lebih terencana, terarah, efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan, dan saling melengkapi dalam satu pola sikap, pola pikir, dan pola tindak seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 202

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH TAHUN 2025-2045

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara tegas juga menyebutkan bahwa pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).

Berdasarkan Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dijelaskan bahwa tahapan dan tatacara penyusunan dokumen RPJPD meliputi: Persiapan penyusunan RPJPD, Penyusunan Rancangan Awal RPJPD, Penyusunan Rancangan RPJPD, Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, Perumusan Rancangan Akhir RPJPD, dan Penetapan RPJPD.

Dalam proses penyusunan RPJPD Kabupaten Way Kanan 2025-2045 telah diselaraskan dengan Rancangan RPJPN 2025-2045 maupun RPJPD Provinsi Lampung. RPJPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2045 mendukung pembangunan berkelanjutan yang diarahkan pada peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik, peningkatan daya saing daerah dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2045 didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
 16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Nomor 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 25. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
 26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 542);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 189);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 197);

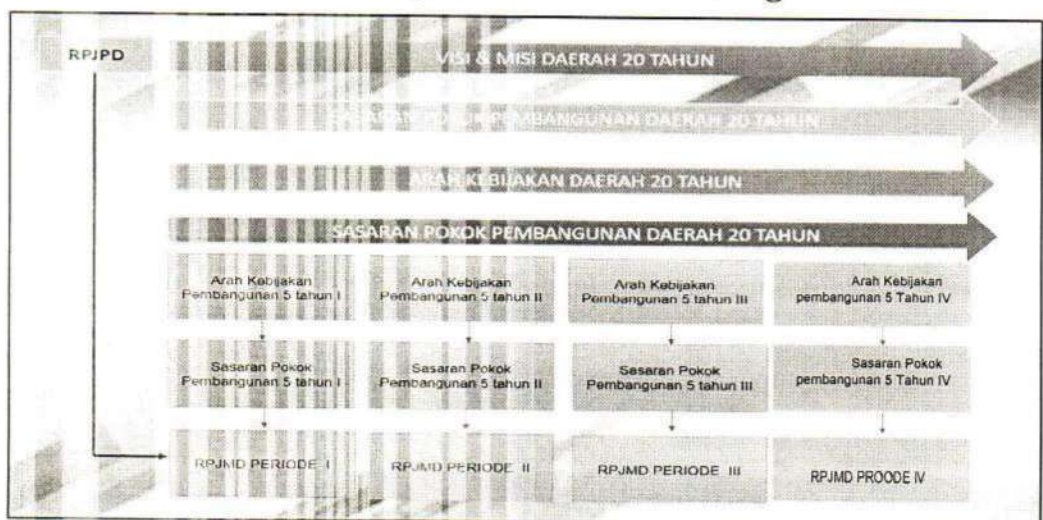
1.3 Hubungan Antar Dokumen

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; secara paralel mengamanatkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun dan disusun dengan berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi dan RTRW Pemerintah kabupaten dan provinsi. Selanjutnya implementasi dari hal tersebut, RPJPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2025- 2045 akan dijabarkan melalui 4 (empat) tahapan rencana pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahunan daerah dan rencana kerja pembangunan daerah tahunan.

Dalam rangka penyusunan RPJPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2045 melihat hasil evaluasi capaian RPJPD 2005-2025 melalui 4 capaian periode yang ada pada dokumen RPJMD Sehingga sinkronisasi dokumen perencanaan dapat terintegrasi dan berkelanjutan. Tentunya arah pembangunan daerah yang ada selaras dengan pembangunan pusat dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Gambar 1. 2 Keterhubungan antara RPJPD dengan RPJMD

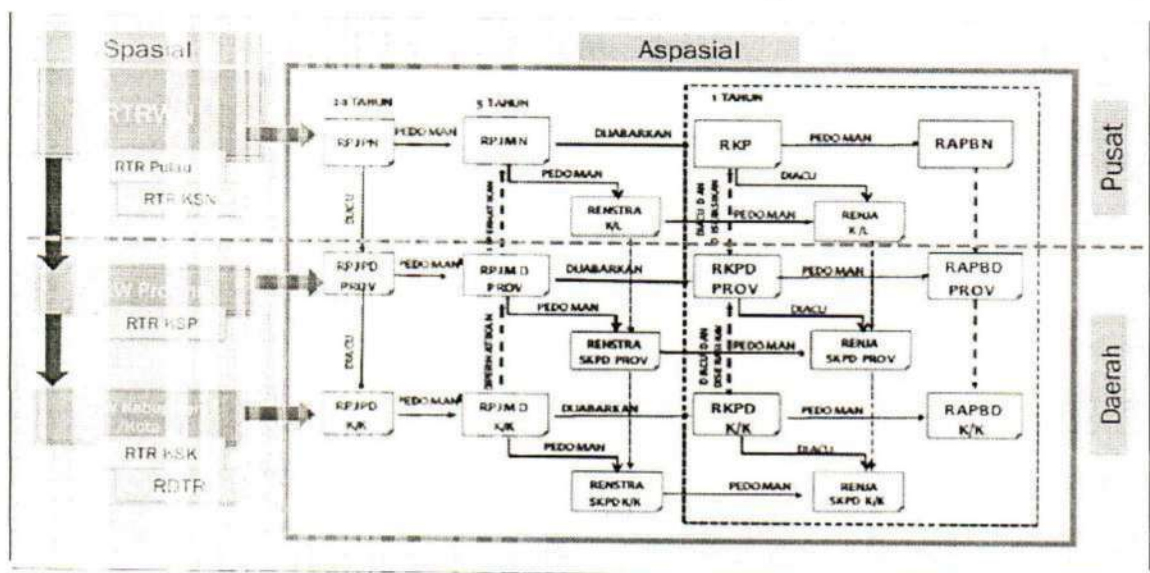


Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017

Kemudian untuk mekanisme dalam penyusunan RPJPD Pemerintah Kabupaten/Kota juga dilaksanakan secara berjenjang; dimana substansi dalam RPJPD Pemerintah Kabupaten/Kota akan berpedoman pada RPJPN dan RPJPD Pemerintah Provinsi, serta RTRW Pemerintah Kabupaten/Kota.

Lebih lanjut, ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD sampai dengan tahap penganggaran daerah. Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan pelaksanaan layanan dasar kepada masyarakat dan rencana pemanfaatan ruang/wilayah dengan rencana pembangunan daerah.

Gambar 1. 3 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah



Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017

1.3.1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

KLHS, yaitu kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan. KLHS RPJPD merupakan analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJPD. Terdapat 6 isu pembangunan berkelanjutan paling strategis, sebagai berikut:

1. Terjadinya degradasi lingkungan dan keanekaragaman hayati akibat alih fungsi lahan, aktifitas industri besar dan pertambangan ilegal;
2. Belum optimalnya penanganan kemiskinan akibat rendahnya pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan, dan kualitas pendidikan;
3. Masih rendahnya kesejahteraan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan;
4. Tingginya risiko bencana hidrometeorologi di Kabupaten Way Kanan;
5. Masih tingginya tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap dana perimbangan dari Pemerintah Pusat; dan
6. Masih kurangnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar.

1.4 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2045, adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman kepada Pemerintah Kabupaten Way Kanan serta seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam melaksanakan pembangunan untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan, yang dijabarkan melalui tahapan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun maupun tahunan.
2. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar jenjang pemerintahan.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan secara efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Mengoptimalkan ruang bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
5. Menyediakan satu bahan tolok ukur untuk melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka perwujudan kesejahteraan masyarakat.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada Bab I Pendahuluan berisikan mengenai latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah

Pada Bab II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah berisikan mengenai aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, dan aspek pelayanan umum, evaluasi hasil RPJPD 2005-2025, Trend Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik, Pusat Pertumbuhan Wilayah.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Pada Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Daerah berisikan mengenai permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah.

BAB IV Visi dan Misi Daerah

Pada Bab IV Visi dan Misi Daerah berisikan mengenai visi dan misi daerah Kabupaten Way Kanan pada tahun 2025-2045.

BAB V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah

Pada BAB V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah berisikan mengenai arah kebijakan dan sasaran pokok Kabupaten Way Kanan pada tahun 2025-2045.

BAB VI Penutup

Pada Bab VI Penutup berisikan mengenai penutup dokumen RPJPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2045.

BAB II
GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

Kabupaten Way Kanan merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Lampung. Kabupaten Way Kanan berdiri pada tanggal 27 April 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Utara. Kabupaten Way Kanan memiliki luas sekitar 3.521,1 Km² atau 352.211,37 Ha yang merupakan kabupaten terluas keempat dari 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Geografi

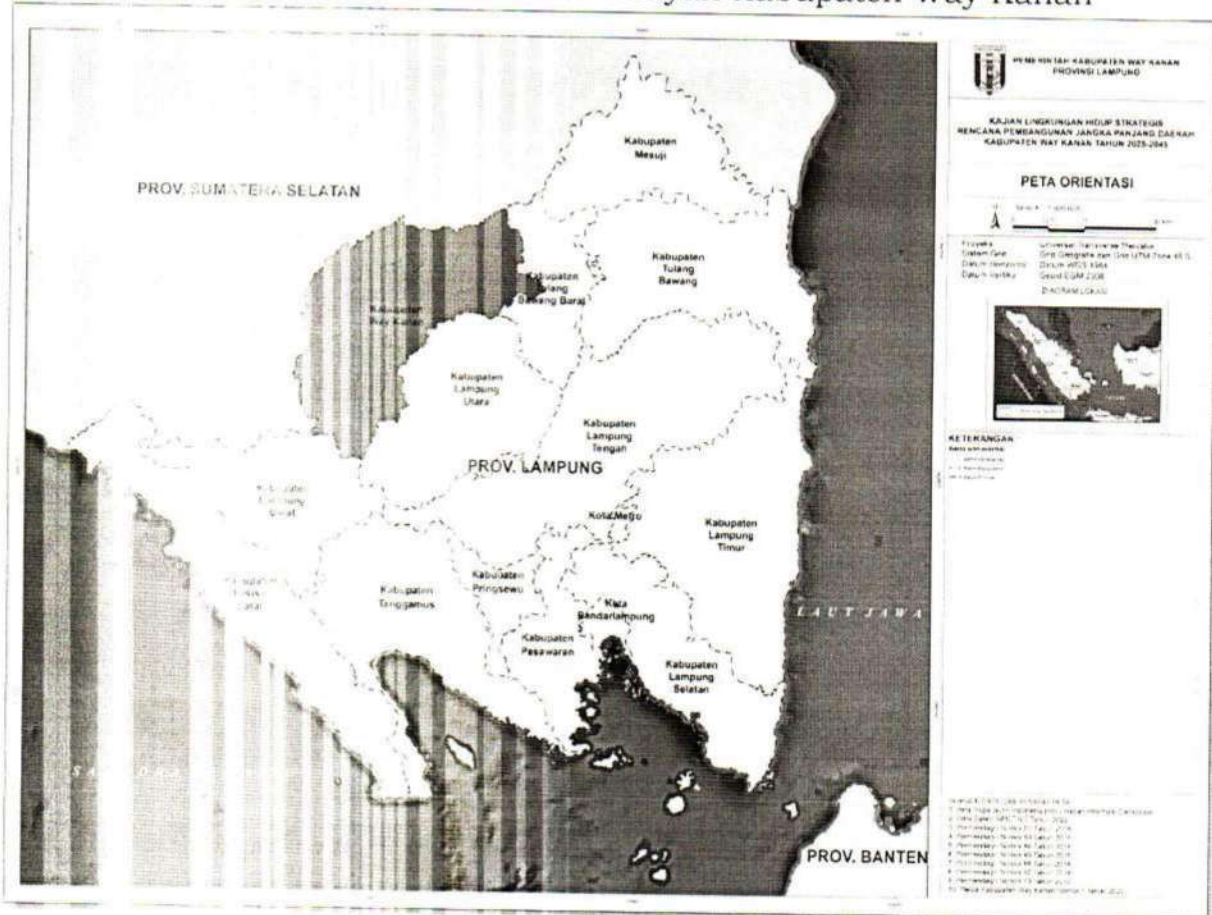
Kabupaten Way Kanan terdiri dari 15 kecamatan yaitu Kecamatan Blambangan Umpu, Kecamatan Way Tuba, Kecamatan Bahuga, Kecamatan Banjit, Kecamatan Baradatu, Kecamatan Gunung Labuhan, Kecamatan Kasui, Kecamatan Negara Batin, Kecamatan Negeri Agung, Kecamatan Negeri Besar, Kecamatan Pakuan Ratu, Kecamatan Rebang Tangkas, Kecamatan Buay Bahuga, Kecamatan Bumi Agung, dan Kecamatan Umpu Semenguk. Untuk Ibukota Kabupaten Way Kanan berada di Kecamatan Blambangan Umpu yang merupakan salah satu kampung tua di Kabupaten Way Kanan, yang secara geografis terletak pada koordinat 104⁰17' - 105⁰04' Bujur Timur dan 04⁰12' - 04⁰58' Lintang Selatan. Secara administrasi Kabupaten Way Kanan dibatasi oleh:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dan Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan dan Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 2.1 Luas Kecamatan di Kabupaten Way Kanan

No	Nama Kecamatan	Ibukota	Luas (Ha)	
			(Ha)	(%)
1	Blambangan Umpu	Blambangan Umpu	52.965,688	15,04
2	Way Tuba	Way Tuba	20.938,678	5,94
3	Bahuga	Mesir Ilir	9.507,398	2,70
4	Banjit	Pasar Banjit	28.443,885	8,08
5	Baradatu	Tiuh Pasar Balak	12.274,813	3,49
6	Gunung Labuhan	Gunung Labuhan	13.978,570	3,97
7	Kasui	Jaya Tinggi	23.439,651	6,65
8	Negara Batin	Negara Batin	27.664,874	7,85
9	Negeri Agung	Negeri Agung	22.662,131	6,43
10	Negeri Besar	Negeri Besar	18.461,938	5,24
11	Pakuan Ratu	Pakuan Ratu	63.528,292	18,04
12	Rebang Tangkas	Gunung Sari	11.731,349	3,33
13	Buay Bahuga	Bumi Harjo	11.841,672	3,36

Gambar 2.2 Peta Orientasi Wilayah Kabupaten Way Kanan



Sumber: RTRW Kabupaten Way Kanan Tahun 2023-2043

2.1.1.1 Peran Strategis Kabupaten Way Kanan

Peran strategis Kabupaten Way Kanan sesuai tujuan penataan ruang wilayah, yaitu mewujudkan ruang yang kondusif, produktif, berkualitas, dan berkelanjutan dalam rangka pemerataan pembangunan wilayah dengan mendorong pembangunan sektor pertanian dan industri berbasis pertanian. Dari 35.211,37 ha luas Kabupaten Way Kanan sebagian besar berupa kawasan pertanian seluas 218.122 ha (61,93%) terdiri dari (1) kawasan tanaman pangan seluas 17.899 ha, (2) kawasan hortikultura seluas 20.858 ha, dan (3) kawasan perkebunan seluas 99.365 ha.

2.1.1.1.1 Kawasan Pertanian

Kawasan Pertanian adalah Kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk didedikasikan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

1. Tanaman Pangan

Tanaman pangan merupakan tanaman yang memiliki fungsi tanaman utama yang dikonsumsi manusia sebagai makanan konsumsi, kelompok yang termasuk kedalam komoditas pangan ini seperti tanaman pangan, hortikultura non tanaman klas, dan kelompok tanaman lain penghasil bahan baku produk pangan. Tanaman pangan dapat dikelompokkan berdasarkan umur yaitu tanaman semusim dan tanaman tahunan. Tanaman semusim adalah tanaman yang berada pada masa panen dalam satu musim yaitu 3-4 bulan, sedangkan tanaman tahunan adalah tanaman yang terus tumbuh atau berproduksi dalam jangka waktu lebih dari 2 tahun. Tanaman pangan juga dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis yaitu serelia, kacang-kacangan dan umbi-umbian.

Tabel 2.2 Produksi Jagung dan Kedelai Menurut Kecamatan dan di Kabupaten Way Kanan (ton) Tahun 2022 dan 2023

Kecamatan	Produksi Jagung		Produksi Kedelai
	2022	2023	2023
Banjit	18.342	13.644	132
Baradatu	20.275	26.610	323
Gunung Labuhan	11.019	19.734	906
Kasui	1.159	174	-
Rebang Tangkas	1.722	2.508	194
Blambangan Umpu	2.802	3.450	45
Way Tuba	1.292	510	19
Negeri Agung	2.577	414	89
Umpu Semenguk	3.733	3.522	48
Bahuga	622	1.578	-
Buay Bahuga	-	414	44
Bumi Agung	1.257	1.140	81
Pakuan Ratu	6.336	402	194
Negara Batin	1.681	354	194
Negeri Besar	4.368	3.915	-
Way Kanan	77.815	78.369	2.269

Sumber: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kab. Way Kanan 2023

Berdasarkan tabel diatas, produksi jagung dan produksi kedelai per kecamatan di Kabupaten Way Kanan, tersebar merata di kecamatan- kecamatan yang ada di Kabupaten Way Kanan dengan jumlah produksi jagung pada tahun 2022 dan 2023 yaitu berjumlah 77.815 ton pada tahun 2022, dan 78.369 ton pada tahun 2023. Pada produksi kedelai tidak tersebar merata di Kabupaten Way Kanan, Kecamatan seperti Banjit, Baradatu, Gunung Labuhan,Rebang Tangkas, Blambangan Umpu, Way Tuba, Negeri Agung, Umpu Semenguk, Buay Bahuga, Bumi Agung, Negara Batin dan Negeri Besar menghasilkan kedelai dengan total produksi pada tahun 2021 yaitu 2.269 ton sedangkan pada tahun 2023 tidak mengalami produksi.

2. Perkebunan

Perkebunan merupakan suatu ekosistem dengan kegiatan penanaman komoditas tertentu pada suatu tanah atau media tumbuh lainnya. Karet masih menjadi primadona tanaman perkebunan di Kabupaten Way Kanan. Pada tahun 2023, produksi karet mencapai 54.388 ton dengan luas area tanam 37.032 Ha.

Tabel 2.3 Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Way Kanan (ton) Tahun 2022 dan 2023

Kecamatan	Kelapa Sawit		Kelapa	
	2022	2023	2022	2023
Banjit	6.528	6.528	105	110
Baradatu	205	205	287	287
Gunung Labuhan	515	615	115	115
Kasui	331	331	144	144
Rebang Tangkas	7.390	7.090	107	107

Kecamatan	Kelapa Sawit		Kelapa	
	2022	2023	2022	2023
Blambangan Umpu	725	625	638	638
Way Tuba	924	924	308	310
Negeri Agung	298	298	148	148
Umpu Semenguk	-	856	-	-
Bahuga	3.935	3.535	138	138
Buay Bahuga	1.577	1.577	60	60
Bumi Agung	4.035	4.033	104	105
Pakuan Ratu	986	789	423	423
Negara Batin	151	151	434	434
Negeri Besar	225	225	46	46
Way Kanan	27.825	27.779	3.057	3.065

Sumber: Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2023

Berdasarkan data perkebunan mengenai produksi kelapa sawit dan kelapa di Kabupaten Way Kanan per kecamatan pada tahun 2022 dan 2023, bahwa produksi kelapa sawit dan kelapa tersebar merata di Kabupaten Way Kanan dengan nilai produksi kelapa sawit pada tahun 2022 yaitu sebesar 27.825 ton, dan 27.779 ton pada tahun 2023, sedangkan untuk produksi kelapa di Kabupaten Way Kanan pada tahun 2022 yaitu dengan total produksi 3.057 ton, dan 3.065 ton pada tahun 2023.

Tabel 2.4 Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Way Kanan (ton) Tahun 2022 dan 2023

Kecamatan	Karet		Kopi	
	2022	2023	2022	2023
Banjit	1.525	1.525	3.310	3.310
Baradatu	1.243	1.243	176	180
Gunung Labuhan	952	952	412	412
Kasui	3.831	3.831	2.611	2.700
Rebang Tangkas	1.786	1.763	1.104	1.104
Blambangan Umpu	6.919	6.919	735	735
Way Tuba	6.708	6.708	34	40
Negeri Agung	6.872	6.872	25	25
Umpu Semenguk	-	1.796	-	210
Bahuga	6.895	6.895	-	-
Buay Bahuga	3.784	3.780	-	-
Bumi Agung	3.851	3.851	7	7
Pakuan Ratu	5.519	5.519	75	75
Negara Batin	1.798	1.778	18	20
Negeri Besar	956	956	-	-

Kecamatan	Karet		Kopi	
	2022	2023	2022	2023
Way Kanan	52.639	54.388	8.507	8.818

Sumber: Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2023

Berdasarkan data perkebunan mengenai produksi karet dan kopi di Kabupaten Way Kanan, bahwa produksi karet dan kopi di kabupaten ini cukup tersebar merata, namun masih terdapat beberapa kecamatan yang tidak memproduksi komoditas perkebunan karet dan kopi. Pada produksi komoditas karet di Kabupaten Way Kanan pada tahun 2022 yaitu sebesar 52.639 ton, dan 54.388 ton pada tahun 2023, sedangkan produksi kopi di Kabupaten Way Kanan ini yaitu dengan total produksi pada tahun 2022 yaitu sebesar 8.507 ton, dan 8.818 ton pada tahun 2023.

Tabel 2.5 Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Way Kanan (ton) Tahun 2022 dan 2023

Kecamatan	Kakao		Tebu	
	2022	2023	2022	2023
Banjit	21	21	-	-
Baradatu	9	9	-	-
Gunung Labuhan	42	42	-	-
Kasui	62	62	-	-
Rebang Tangkas	85	85	-	-
Blambangan Umpu	45	45	-	-
Way Tuba	54	54	-	-
Negeri Agung	21	21	7.450	7.450
Umpu Semenguk	-	...	-	-
Bahuga	9	9	2.572	2.572
Buay Bahuga	35	35	-	-
Bumi Agung	85	85	-	-
Pakuan Ratu	10	10	35.738	35.738
Negara Batin	29	29	47.381	47.381
Negeri Besar	32	32	10.035	10.894
Way Kanan	539	539	104.035	104.035

Sumber: Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2023

Berdasarkan data perkebunan mengenai produksi kakao dan tebu di Kabupaten Way Kanan pada tahun 2022 dan 2023 untuk produksi kakao cukup tersebar merata di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Way Kanan sedangkan untuk produksi tebu tidak tersebar merata di kecamatan- kecamatan yang ada di Kabupaten Way Kanan, hanya kecamatan Negeri Agung, Pakuan Ratu, Negara Batin dan Negara Besar yang menghasilkan produksi komoditas tebu. Pada tahun 2022 komoditas kakao yaitu sebesar 539 ton tahun 2022, dan 539 ton pada tahun 2023, sedangkan untuk komoditas tebu di Kabupaten Way Kanan pada tahun 2022 yaitu sebesar 104.035 ton, dan 104.035 ton pada tahun 2023.

3. Tanaman Hortikultura

Tanaman hortikultura merupakan salah satu komoditas yang ada di Kabupaten Way Kanan, produksi tanaman hortikultura di Kabupaten Way Kanan ini masih relatif rendah. Produk tanaman hortikultura yang ada di Kabupaten Way Kanan ini masih mengandalkan kiriman dari produk tanaman hortikultura kabupaten lainnya seperti Lampung Barat, Lampung Timur dan kabupaten lainnya.

Tabel 2.6 Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Way Kanan (kuintal) Tahun 2022 dan 2023

Kecamatan	Cabai Besar		Cabai Rawit	
	2022	2023	2022	2023
Banjit	-	-	509	236
Baradatu	-	-	446	281
Gunung Labuhan	-	-	241	217
Kasui	-	-	32	29
Rebang Tangkas	-	-	83	18
Blambangan Umpu	12	32	112	142
Way Tuba	-	-	44	105
Negeri Agung	-	-	-	83
Umpu Semenguk	-	-	24	76
Bahuga	112	146	112	94
Buay Bahuga	36	-	105	2.208
Bumi Agung	-	-	79	62
Pakuan Ratu	-	-	397	138
Negara Batin	-	-	245	262
Negeri Besar	-	-	112	58
Way Kanan	160	178	2.032	3.878

Sumber: Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2023

Berdasarkan data tanaman hortikultura mengenai produksi bawang merah dan cabai besar di Kabupaten Way Kanan. Untuk Komoditas Tanaman Cabai Besar tersebar beberapa kecamatan di Kabupaten Way Kanan. Pada tahun 2022 untuk komoditas cabai besar di Kabupaten Way Kanan yaitu sebesar 160 Kuintal, dan 178 Kuintal pada tahun 2023. Kemudian mengenai produksi cabai rawit tahun 2022 dan 2023 di Kabupaten Way Kanan, bahwa produksi komoditas cabai rawit di kabupaten ini tersebar merata, Total produksi cabai rawit pada tahun 2022 yaitu sebesar 2.032 kuintal, dan 3.878 kuintal pada tahun 2023.

Tabel 2.7 Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Way Kanan (kuintal) Tahun 2022 dan 2023

Kecamatan	Tomat	
	2022	2023
Banjit	161	78
Baradatu	15	69
Gunung Labuhan	-	10
Kasui	226	44
Rebang Tangkas	-	-

Kecamatan	Tomat	
	2022	2023
Blambangan Umpu	3	86
Way Tuba	-	-
Negeri Agung	203	-
Umpu Semenguk	-	-
Bahuga	47	91
Buay Bahuga	-	-
Bumi Agung	-	-
Pakuan Ratu	91	63
Negara Batin	79	7
Negeri Besar	-	-
Way Kanan	825	448

Sumber: Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2023

Berdasarkan data tanaman hortikultura mengenai produksi kubis dan tomat di Kabupaten Way Kanan, produksi tomat di Kabupaten Way Kanan cukup tersebar di 6 Kecamatan dengan total produksi pada tahun 2022 yaitu sebesar 825 kuintal, dan 448 kuintal pada tahun 2023.

Tabel 2.8 Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Way Kanan (kuintal) Tahun 2022 dan 2023

Kecamatan	Kacang Panjang		Kangkung	
	2022	2023	2022	2023
Banjit	442	127	53	110
Baradatu	275	125	237	67
Gunung Labuhan	47	43	52	42
Kasui	196	8	130	103
Rebang Tangkas	86	15	141	96
Blambangan Umpu	120	137	135	88
Way Tuba	12	-	63	8
Negeri Agung	72	13	40	15
Umpu Semenguk	90	12	100	62
Bahuga	75	96	22	41
Buay Bahuga	526	188	-	-
Bumi Agung	409	67	105	100
Pakuan Ratu	452	121	266	242
Negara Batin	108	88	128	420
Negeri Besar	114	40	4	36
Way Kanan	3.024	1.080	1.476	1.430

Sumber: Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2023

Berdasarkan data tanaman hortikultura produksi bawang putih, kacang panjang dan kangkung di Kabupaten Way Kanan pada tahun 2022 dan tahun 2023 cukup tersebar merata untuk komoditas kacang panjang dan komoditas kangkung. Total komoditas kacang panjang di Kabupaten ini pada tahun 2022

yaitu sebesar 3.024 kuintal dan 1.080 Kuintal pada tahun 2023, sedangkan komoditas kangkung di Kabupaten Way Kanan pada tahun 2022 yaitu dengan total komoditas sebesar 1.476 kuintal pada tahun 2022, dan 1430 ton pada tahun 2023.

4. Peternakan

Peternakan merupakan suatu kegiatan pengembangan dan budidaya hewan ternak yang meliputi proses pengolahan, pemeliharaan, produk dan lainnya. Produksi ternak di Kabupaten Way Kanan didominasi oleh kambing dan sapi potong. Selain dua komoditas tersebut, Way Kanan menjadi pemasok babi dengan target penjualan untuk pasar di luar Kabupaten (Tangerang dan Sumatra Selatan). Produksi daging sapi tahun 2023 sebesar 875.250 kg sedangkan produksi kambing dan babi masing- masing 101.266 kg dan 73.301 kg.

Tabel 2.9 Populasi Unggas Menurut Kecamatan dan Jenis Unggas di Kabupaten Way Kanan (Ekor) Tahun 2023

Kecamatan	Ayam Pedaging	Ayam Petelur	Ayam Buras	Itik
Banjit	516	96.614	150.896	1.566
Baradatu	598.861	80.661	280.618	2.348
Gunung Labuhan	12.211	-	263.587	782
Kasui	27.221	-	69.128	2.661
Rebang Tangkas	-	95.736	112.302	268
Blambangan Umpu	-	-	116.185	658
Way Tuba	-	-	280.947	1.252
Negeri Agung	-	-	151.946	1.096
Umpu Semenguk	9.769	-	95.053	517
Bahuga	736	-	61.333	1.463
Buay Bahuga	-	-	97.492	2.818
Bumi Agung	-	-	137.567	9.822
Pakuan Ratu	-	4.683	146.993	1.394
Negara Batin	-	3.122	390.911	1.926
Negeri Besar	-	-	128.766	1.190
Way Kanan	694.314	280.816	2.483.724	29.761

Sumber: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kab. Way Kanan 2023

Berdasarkan data peternakan Kabupaten Way Kanan pada tahun 2023 mengenai populasi unggas menurut kecamatan di Kabupaten Way Kanan yaitu unggas ayam pedaging, ayam petelur, ayam beras dan itik. Populasi ayam pedaging di kabupaten ini tidak dilakukan oleh semua kecamatan pada tahun 2023, kecamatan Baradatu merupakan kecamatan dengan populasi ayam pedaging tertinggi di Kabupaten Way Kanan dengan total populasi yaitu 598.861 ekor.

Unggas ayam petelur di Kabupaten Way Kanan ini tidak memiliki populasi yang merata di semua kecamatan, Kecamatan Banjit merupakan kecamatan dengan populasi unggas ayam petelur tertinggi pada tahun 2023 dengan jumlah yaitu 96.614 ekor. Populasi unggas jenis ayam beras di Kabupaten ini tersebar merata di semua kecamatan dengan total populasi ayam buras di Kabupaten ini yaitu sebesar 2.483.724 ekor pada tahun 2023. Populasi unggas jenis itik di

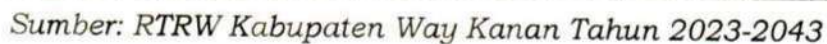
Kabupaten Way Kanan tersebar merata di semua kecamatan Kabupaten Way Kanan dengan total populasi 29.761 ekor pada tahun 2023.

Tabel 2.10 Populasi Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak (Ekor) di Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

Kecamatan	Sapi Potong	Kerbau	Kambing	Domba	Babi
Banjit	7.541	79	4.393	187	3.180
Baradatu	5.219	21	2.295	355	1.472
Gunung Labuhan	70	1	2.219	260	-
Kasui	1.259	12	2.338	92	583
Rebang Tangkas	783	-	6.780	42	-
Blambangan Umpu	2.275	34	4.847	9	-
Way Tuba	2.600	16	1.687	184	-
Negeri Agung	3.880	174	4.900	40	827
Umpu Semenguk	1.860	40	3.966	-	541
Bahuga	1.487	294	1.440	31	112
Buay Bahuga	2.843	20	1.054	22	273
Bumi Agung	3.205	16	982	69	485
Pakuan Ratu	2.935	151	10.716	20	707
Negara Batin	5.946	159	3.973	478	-
Negeri Besar	2.917	32	3.050	16	-
Way Kanan	44.820	1.049	54.640	1.805	8.180

Sumber: Dinas Tanaman pangan Hortikultura dan Peternakan Kab. Way Kanan Tahun 2023

Populasi ternak menurut kecamatan di Kabupaten Way Kanan terbagi menjadi populasi sapi potong, kerbau, kambing, domba dan babi. Populasi sapi potong pada tahun 2023 yaitu 44.820 ekor, populasi kerbau pada tahun 2023 yaitu 1.049 ekor, populasi kambing 54.640 ekor pada tahun 2023, populasi domba dengan total 1.805ekor pada tahun 2023 dan populasi babi 8.180 ekor tahun 2023. berikut adalah peta kawasan pertanian kabupaten way kanan.



Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023-2043 terdapat dua kecamatan yang ditetapkan sebagai Kawasan Peruntukan Industri yaitu di Kecamatan Bumi Agung dan Kecamatan Way Tuba, dengan luas ± 1.351 Ha.

Berdasarkan data Kabupaten Way Kanan Dalam Angka 2024 tercatat terdapat sepuluh jenis industri yang berkembang di Kabupaten Way Kanan. Dominasi jenis industri berdasarkan banyaknya perusahaan yang ada di Kabupaten Way Kanan ialah keberadaan jenis industri makanan dan minuman. Selengkapnya mengenai jenis industri di Kabupaten Way Kanan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.11 Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja di Sektor Industri menurut Jenis Industri di Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

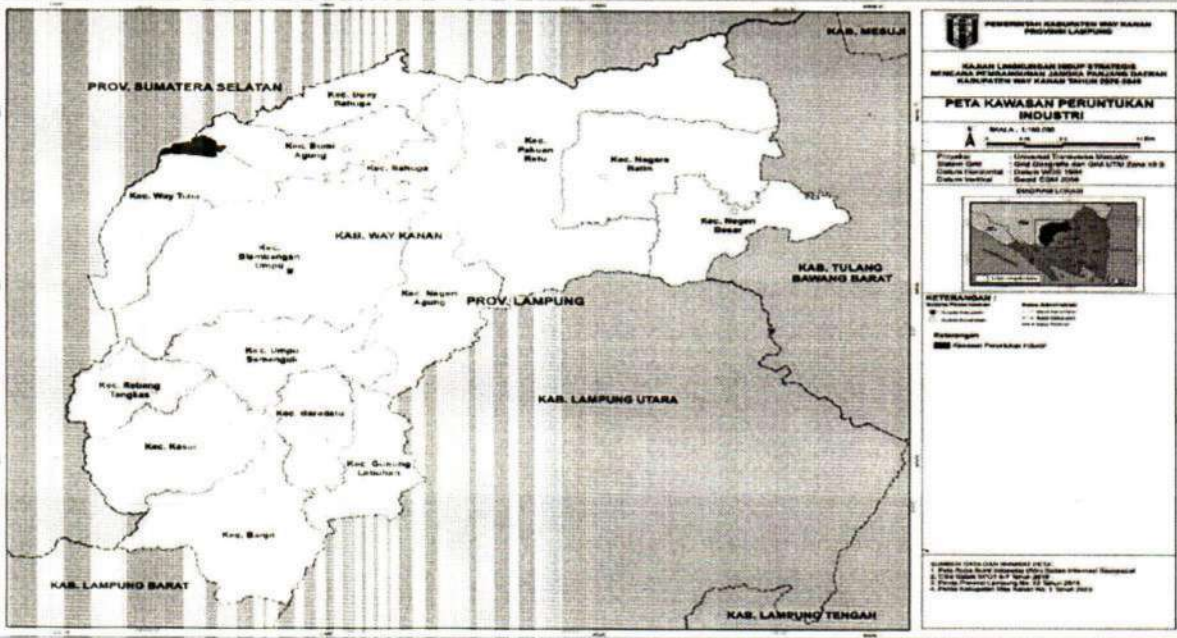
Jenis Industri	Jumlah Perusahaan	Tenaga Kerja
Industri Makanan & Minuman	2.164	6.492
Industri Tekstil	64	192
Industri Pakaian Jadi	315	945
Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus, dan Barang dari Bambu dan Rotan	177	531
Industri Percetakan & Reproduksi Media	24	72
Industri Karet Barang dari Karet	2	16
Industri Barang Galian Bukan Logam	210	630
Industri Barang Logam, Bukan Mesin	101	303
Industri Furniture	265	795
Industri Pengolahan Lainnya	11	33
Industri Jasa Reparasi	485	1.455
Total	3.818	11.464

Sumber: Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2024

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari sepuluh jenis industri yang ada di Kabupaten Way Kanan terdapat total 3.818 perusahaan industri dengan total tenaga kerja sebanyak 11.464 tenaga kerja. Industri makanan dan minuman merupakan industri yang memiliki jumlah perusahaan terbanyak yang ada di Kabupaten Way Kanan dan dapat menampung 6.492 tenaga kerja. Sementara, industri dengan perusahaan tersedikit ialah industri karet yang hanya terdapat 2 perusahaan dengan menampung 16 tenaga kerja. Industri unggulan yang ada di Kabupaten Way Kanan merujuk pada rencana pembangunan industri Kabupaten Way kanan Tahun 2021-2040 terdiri dari lima industri unggulan meliputi:

1. Industri Pangan;
2. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik;
3. Industri Furnitur Kayu/Barang dari Kayu;
4. Industri Bahan Galian Bukan Logam; dan
5. Industri Textil/Pakaian Jadi.

Gambar 2.4 Peta Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Way Kanan



Sumber: RTRW Kabupaten Way Kanan Tahun 2023-2043

2.1.1.1.3 Pariwisata

Adapun kondisi pariwisata di Kabupaten Way Kanan obyek wisata dengan sarana dan prasarana dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.12 Daftar Objek Wisata Kabupaten Way Kanan

No	Daerah Potensi Wisata	Kecamatan	Kampung	Jarak tempuh dari	
				Kabupaten	Kecamatan
1.	Kampung Wisata	Blambangan Umpu	Gedung Batin	±23 km	±23 km
2.	Makam Tua Siti	Blambangan Umpu	Gedung Batin	±25 km	±25 km
3.	Batu Mahligai	Blambangan Umpu	Gedung Batin	±25 km	±25 km
4.	Curup Japon	Blambangan Umpu	Negeri Baru	±25 km	±25 km
5.	Curup Kereta	Blambangan Umpu	Rambang Jaya	±25 km	±25 km
6.	Curup Penyandingan	Blambangan Umpu	Panca Negeri	±25 km	±25 km
7.	Curup Aji	Blambangan Umpu	Blambangan	±8 km	±8 km
8.	Water Park Bedeng	Blambangan Umpu	Sidoarjo	±15 km	±15 km
9.	Kencana Resort	Blambangan Umpu	Umpu Kencana	±6 km	±6 km
10.	Curup Putri Malu (Wisata Ala)	Banjit	Kawasan KPH Bukit	±60 km	±15 km
11.	Suplesi Way Besai	Banjit	Bonglai	±60 km	±20 km
12.	Danau Randing (Wisata Alam)	Banjit	Kawasan KPH Bukit	±60 km	±20 km
13.	Curup Kembar Bukit Duduk (Wisata Alam)	Banjit	Kawasan KPH Bukit	±70 km	±25 km
14.	Sialang Badas (Wisata Alam)	Banjit	Juku Batu	±70 km	±20 km
15.	Bendungan Irigasi Way Umpu	Banjit	Rantau Temiang	±47 km	±7 km

No	Daerah Potensi Wisata	Kecamatan	Kampung	Jarak tempuh dari	
				Kabupaten	Kecamatan
16.	Curup Bukit Duduk	Banjit	Kawasan KPH Bukit	±70 km	±18 km
17.	Air Panas Serasan	Banjit	Juku Batu	±60 km	±18 km
18.	Air Terjun Putri Kembar	Banjit	Juku Batu	±70 km	±18 km
19.	Paronama Indah Bukit Duduk (Panorama)	Banjit	Kawasan KPH Bukit	±70 km	±20 km
20.	Kampung Tua Juku Batu	Banjit	Juku Batu	±60 km	±15 km
21.	Kampung Wisata Bali Sadar	Banjit	Bali Sadar	±45 km	±5 km
22.	Curup Pematang Rindu	Banjit	Menanga Siamang	±60 km	±18 km
21.	Curup Gangsa	Kasui	Kotawai	±60 km	±20 km
22.	Curup Cangkah Kidau	Kasui	Kedaton	±55 km	±15 km
23.	Curup Pengantin	Kasui	Tanjung Kurung	±65 km	±25 km
24.	Curup Ranggau	Kasui	Kedaton	±55 km	±15 km
25.	Curup Susukan	Kasui	Kedaton	±55 km	±15 km
26.	Curup Talang Sembilan	Kasui	Suka Jadi	±65 km	±25 km
27.	Curup Layang-Layang	Kasui	Juku Kemuning	±35 km	±15 km
28.	Curup Way Bujukan	Rebang Tangkas	Medang Jaya	±70 km	±20 km
29.	Curup Pinang Indah	Rebang Tangkas	Gunung Sari	±75 km	±25 km
30.	Curup Maria	Rebang Tangkas	Medang Jaya	±70 km	±20 km
31.	Goa Batu Grobok	Rebang Tangkas	Lebak Peniangan	±70 km	±10 km
32.	Curup Way Pangkalan	Rebang Tangkas	Medang Jaya	±75 km	±25 km
33.	Curup Tahmi Besar	Rebang Tangkas	Medang Jaya	±70 km	±20 km
34.	Bendungan Way Mencar	Way Tuba	Mencar Jaya	±50 km	±20 km
35.	Goa Kelelawar	Way Tuba	Bukit Harapan	±49 km	±20 km
36.	Villa Beringin Tujuh	Way Tuba	Bukit Harapan	±50 km	±20 km
37.	Villa Masin/Villa Guci	Way Tuba	Vila Indah	±50 km	±20 km
38.	Waterboom Galaxi	Gunung Labuan	Gunung Labuhan	±50 km	±10 km
39.	Curup Kinciran	Gunung Labuan	Bengkulu Tengah	±55 km	±15 km
40.	Curup Anggal	Gunung Labuan	Suka Negri	±55 km	±20 km
41.	Curup Patah	Gunung Labuan	Curup Patah	±50 km	±20 km
42.	Waterpark Rizki	Baradatu	Tiuh Balak	±30 km	±8 km
43.	Curup Semarang	Baradatu	Semarang	±35 km	±10 km
44.	Rumah Adat Peserian Ryachudu	Bahuga	Mes Irrilir	±90 km	±2 km

Sumber: Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata, 2023

Penguatan Peran strategis ini didukung kondisi topografi, klimatologi, geologi, jenis tanah, hidrologi, daya dukung, daya tampung dan lain-lain.

2.1.1.2 Topografi dan Ketinggian

Secara topografi, Kabupaten Way Kanan dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis topografi, yaitu: daerah topografi berbukit sampai bergunung dan daerah River Basin.

1. Topografi Berbukit Sampai Bergunung

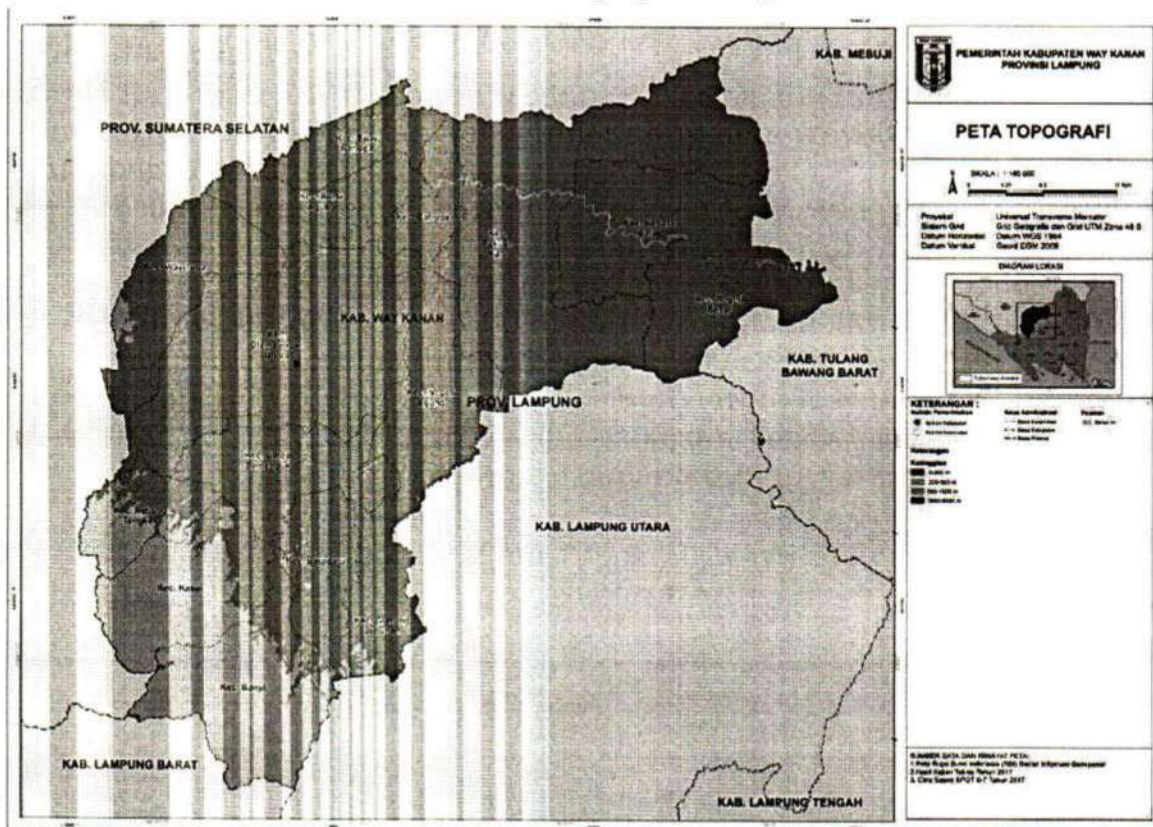
Lereng-lereng yang curam atau terjal dengan ketinggian bervariasi antara 450 – 1500 m dari permukaan laut. Daerah ini meliputi Bukit Barisan yang umumnya ditutupi oleh vegetasi hutan primer atau sekunder dengan puncak-puncaknya antara lain: Bukit Barisan dan Bukit Pesagi.

2. Daerah River Basin

Di Kabupaten Way Kanan terdapat river basin sungai-sungai kecil. Pada umumnya bentuk medan topografi Kabupaten Way Kanan terbagi atas 2 (dua) bagian, yaitu:

- Sebelah Barat lebih kurang 7 persen dari luas wilayah Kabupaten Way Kanan merupakan rangkaian pegunungan Bukit Barisan, yang terdiri dari lereng-lereng yang curam atau terjal dengan ketinggiannya bervariasi antara 450 – 1500 m dari permukaan laut, dan pada umumnya ditutupi oleh vegetasi hutan primer atau sekunder.
- Sebelah Timur lebih kurang 93 persen dari luas wilayah Kabupaten Way Kanan terbentang dataran yang sebagian besar tertutup vulkanis awan gelap dan terbentang sawah serta perkebunan dataran rendah.

Gambar 2.5 Peta Topografi Way Kanan



Sumber: RTRW Kabupaten Way Kanan Tahun 2023-2043

2.1.1.2.1 Klimatologi

Daerah Kabupaten Way Kanan memiliki iklim tropis dengan 2 (dua) musim yang selalu berganti sepanjang tahun, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Temperatur rata-rata di daerah ini pada 30° C. Secara umum Wilayah Kabupaten Way Kanan terbagi menjadi dua tipe iklim, yaitu pada bagian barat memiliki curah hujan cukup tinggi, berkisar antara 3000 mm – 3500 mm per tahun dan bagian timur memiliki curah hujan yang cukup rendah, berkisar antara 2000 mm – 3000 mm per tahun.

Sementara itu jika diklasifikasikan ke dalam iklim menurut R. Oldeman, maka Wilayah Kabupaten Way Kanan terbagi menjadi 3 iklim, yaitu:

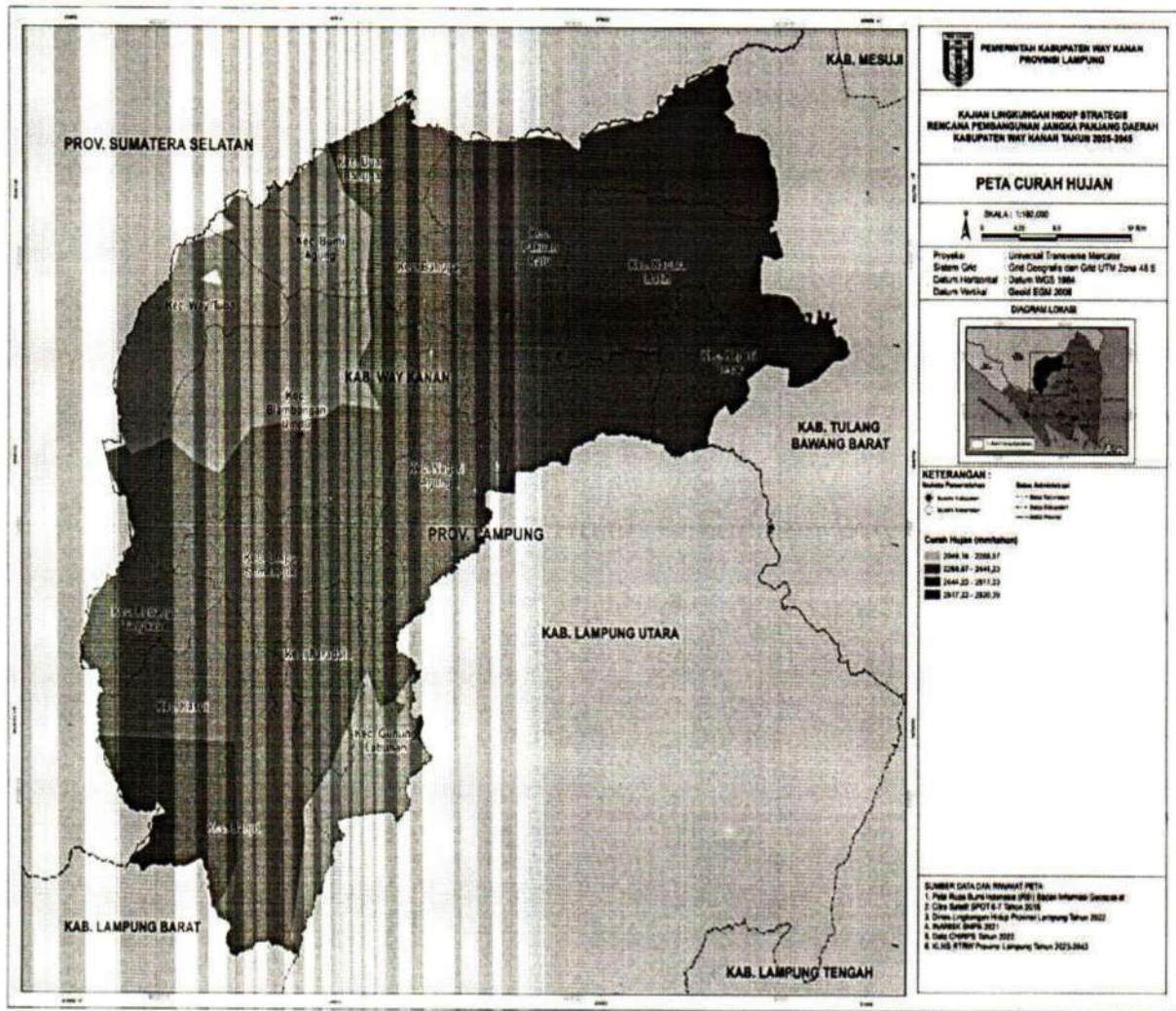
- 1. Iklim B: Bulan basah 7-9 bulan, bulan kering < 2 bulan Wilayah yang memiliki iklim B ini terdapat di sebagian Kecamatan Banjit, Kasui, Blambangan Umpu, dan Bahuga.
- 2. Iklim C1: Bulan basah 5-6 bulan, bulang kering < 2 bulan Wilayah yang memiliki iklim C1 ini terdapat di beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Bahuga, Blambangan Umpu, Pakuan Ratu, Banjit, dan Baradatu
- 3. Iklim C2: Bulan basah 5-6 bulan, bulan kering 2-3 bulang Wilayah yang memiliki iklim C2 ini terdapat di Kecamatan Pakuan Ratu dan sekitarnya.

Tabel 2.13 Rata-Rata Curah Hujan Tahunan Kabupaten Way Kanan

Stasiun	Total Curah Hujan					Rata-Rata Curah Hujan Tahunan
	2018	2019	2020	2021	2022	
Purwa Negara	3722,0	3331,0	2354,0	2156,5	2559,0	2824,5
Negeri Besar	1504,0	1754,0	2883,0	1971,5	2891,0	2200,7
Kasui Pasar 1	2301,5	2446,0	3188,9	4335,0	4177,5	3289,8
Way Tuba	2212,0	2140,6	2655,3	2509,3	2203,9	2344,2
Tulung Buyut	2422,0	2002,5	3358,0	3877,5	3329,2	2997,8
Bengkulu Rejo	2138,0	2184,0	2707,0	2363,0	2832,0	2444,8
Blambangan Umpu 1	2792,0	2601,5	2107,0	2253,1	3824,2	2715,6
Setia Negara	2236,0	1539,0	3101,0	2388,1	2848,5	2422,5
Tanjung Raya	2869,0	2655,0	3175,0	3011,0	2282,0	2798,4

Sumber: BMKG Stasiun Klimatologi Lampung Tahun 2023

Gambar 2.6 Peta Curah Hujan Kabupaten Way Kanan



Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat dan Pelaksana KLHS RPJPD Tahun 2023

2.1.1.2.2 Jenis Tanah

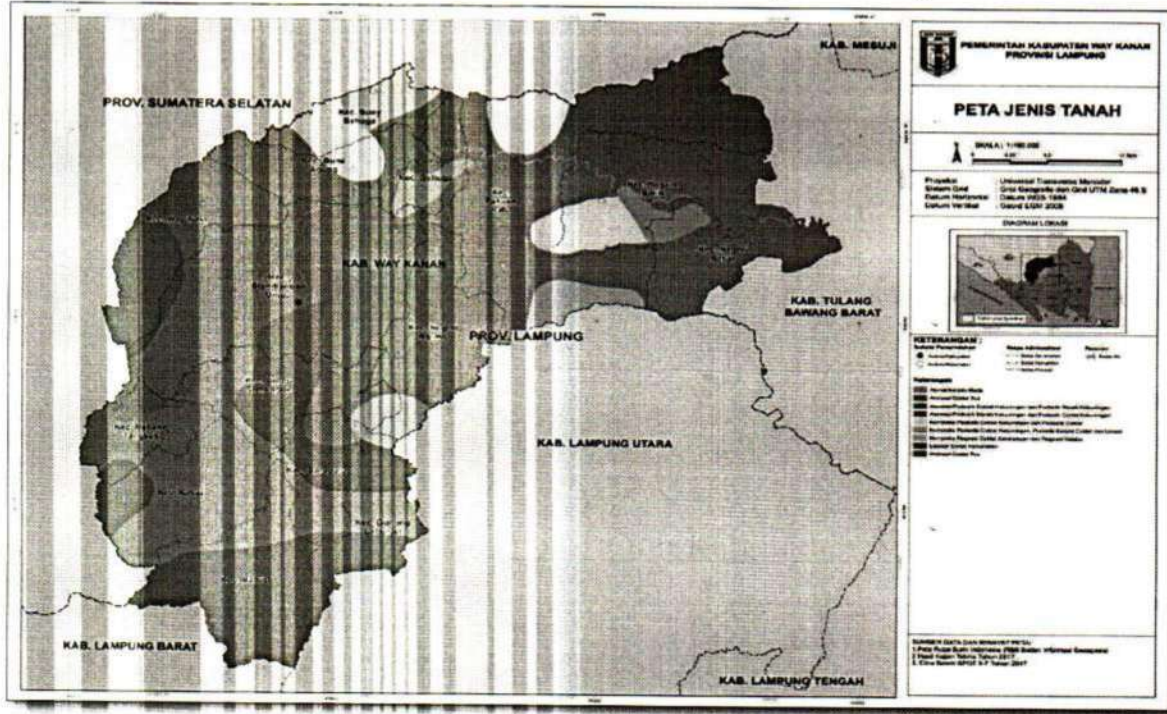
Sebaran jenis tanah di Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut:

1. Wilayah Utara dan Timur Kabupaten Way Kanan
Di bagian utara wilayah ini dijumpai asosiasi *podzolik* merah kekuningan lainnya, sedangkan di wilayah timurnya merupakan kompleks asosiasi *podzolik* coklat kekuningan dan *podzolik* coklat.
2. Wilayah Barat dan Selatan Kabupaten Way Kanan
Di bagian Barat ditemukan sebagian besar lahannya mempunyai jenis tanah asosiasi *podzolik* coklat kekuningan dan merah kekuningan, selain itu juga di Kecamatan Kasui serta Kecamatan Banjit merupakan wilayah penyebaran *andosol* coklat tua dari batuan *intermedier*, sedangkan di Selatan topografinya merupakan penyebaran utama dari asosiasi ataupun kompleks *podzolik* merah kuning lainnya dengan *latosol*.

Pada umumnya kedalaman efektif tanah bervariasi dari dangkal sampai dalam dan biasanya dipengaruhi oleh jenis dan sifat tanah yang bersangkutan. Kedalaman efektif tanah di Kabupaten Way Kanan antara lain:

- a. Kedalaman efektif tanah > 90 cm, yang umumnya terdapat di Kabupaten Way Kanan.
- b. Kedalaman efektif 60 – 90 cm, yang tersebar disebagian besar Kecamatan Blambangan Umpu, Negeri Agung dan Way Tuba.
- c. Tekstur tanah sedang tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Way Kanan, kecuali Kecamatan Kasui, sedangkan tekstur halus tersebar di beberapa kecamatan yaitu Blambangan Umpu, Kasui, Banjit dan Baradatu.

Gambar 2. 7 Peta Jenis Tanah Kabupaten Way Kanan



Sumber: RTRW Kabupaten Way Kanan Tahun 2023-2043

2.1.1.2.3 Geologi

Keadaan formasi geologi di Wilayah Kabupaten Way Kanan terdiri dari Formasi Aluvium, Tufa Lempung yang bersifat masam, Palembang Anggota Atas dan Tengah, dan Lava Andesit Gunung Mapas. Deskripsi dari masing - masing formasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Formasi Aluvium membentuk formasi marin dan aluvial. Daerah ini umumnya datar sampai berombak. Tanah yang terbentuk di daerah ini didominasi oleh tanah - tanah Aluvial dan Regosol. Tanah - tanah ini lebih kurang setara dengan *Dystropept Trophortent* pada sistem taksonomi tanah. Formasi *aluvium* banyak ditemukan di Kecamatan Bahuga, Pakuon Ratu dan sekitarnya.
2. Formasi Telesa Anggota Atas dan Tengah, formasi Telesa Anggota Atas umumnya membentuk fisiografi dataran. Daerah ini umumnya datar, berombak sampai bergelombang. Tanah - tanah yang dibentuk di daerah ini didominasi oleh tanah - tanah Podsolik Merah Kuning yang lebih kurang setara dengan Hapludult, *Dystropept* pada sistem taksonomi tanah. Formasi ini ditemukan di Kecamatan bahuga, Pakuan Ratu, Blambangan Umpu dan sekitarnya.
3. Formasi Tufa Lempung umumnya membentuk fisiografi vulkanik, yaitu dataran vulkan. Fisiografi ini pada umumnya terdiri dari daerah datar, berombak sampai bergelombang, dan pada tempat - tempat tertentu sering dijumpai daerah berbukit - bukit kecil. Tanah yang terbentuk di daerah ini umumnya adalah Podsolik Coklat, Podsolik Merah Kuning, dan Latosol.
4. Formasi Andasit Tua dan Andasit Gunung Mapas umumnya membentuk fisiografi perbukitan dan pegunungan. Tanah - tanah yang terdapat di daerah ini adalah *Latosol*, *Andosol* dan *Podsolik Coklat* yang lebih kurang setara dengan tanah *Kandiudult*, *Dystraudept* dan *Dystopept* pada sistem taksonomi tanah. Untuk Kabupaten Way Kanan ini banyak ditemukan di Kecamatan Blambangan Umpu, Kasui, Banjit dan Baradatu.

2.1.1.2.4. Hidrologi dan Hidrogeologi

Kabupaten Way Kanan memiliki potensi yang tinggi untuk pengembangan di sektor pertanian. Sebagian besar sungai-sungainya mengalir dari arah barat yang berbukit-bukit menuju ke arah timur yang landai, hal ini sangat potensial untuk pengembangan irigasi. Sungai - sungai tersebut merupakan bagian dari DAS Tulang Bawang dengan total Daerah Aliran Sungai (DAS) seluas 339.500 Ha. Way Umpu memiliki Sub DAS terbesar (91.300 Ha) dengan pola aliran dendritik dan mengalir wilayah - wilayah Kecamatan Banjit, Bahuga, Blambangan Umpu, Kasui dan Pakuan Ratu. DAS kritis berada di sekitar wilayah Timur Kabupaten Way Kanan yang mencakup kecamatan Blambangan Umpu dan Pakuan Ratu.

Tabel 2.14 Panjang Sungai dan Luas DAS di Kabupaten Way Kanan

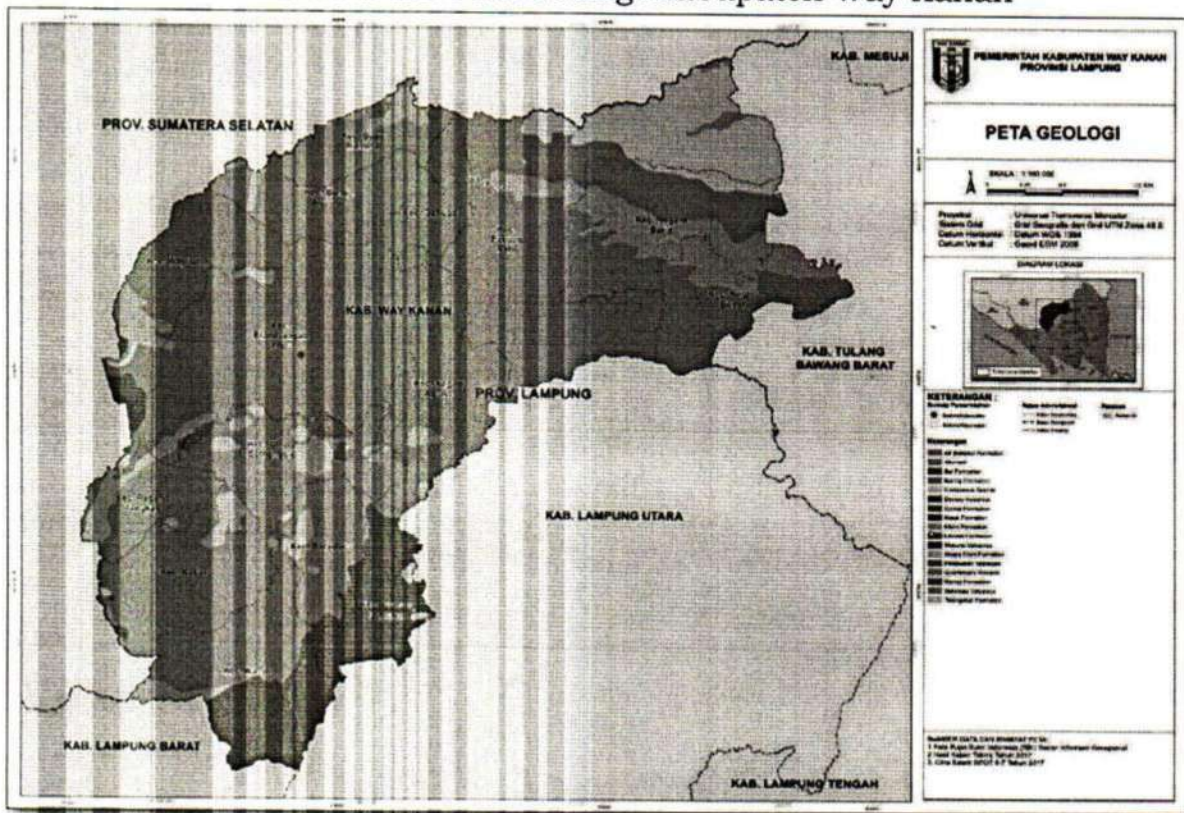
No	Nama Sungai	Panjang (Km)	Area (Km ²)
1.	Way Kanan	51	1.198
2.	Way Pisang	50	386
3.	Way Umpu	100	1.179
4.	Way Besai	113	870
5.	Way Giham	80	506
6.	Way Tahmi	60	448

Sumber: Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2023

Sementara itu ditinjau dari hidrogeologinya, Kabupaten Way Kanan terdiri dari 2 cekungan air tanah, yaitu Cekungan Air Tanah Metro - Kotabumi dan Cekungan Air Tanah Baturaja. Kedua cekungan tersebut memiliki akuifer produktif sedang yang menyebar, dan dapat menyediakan air bersih dalam

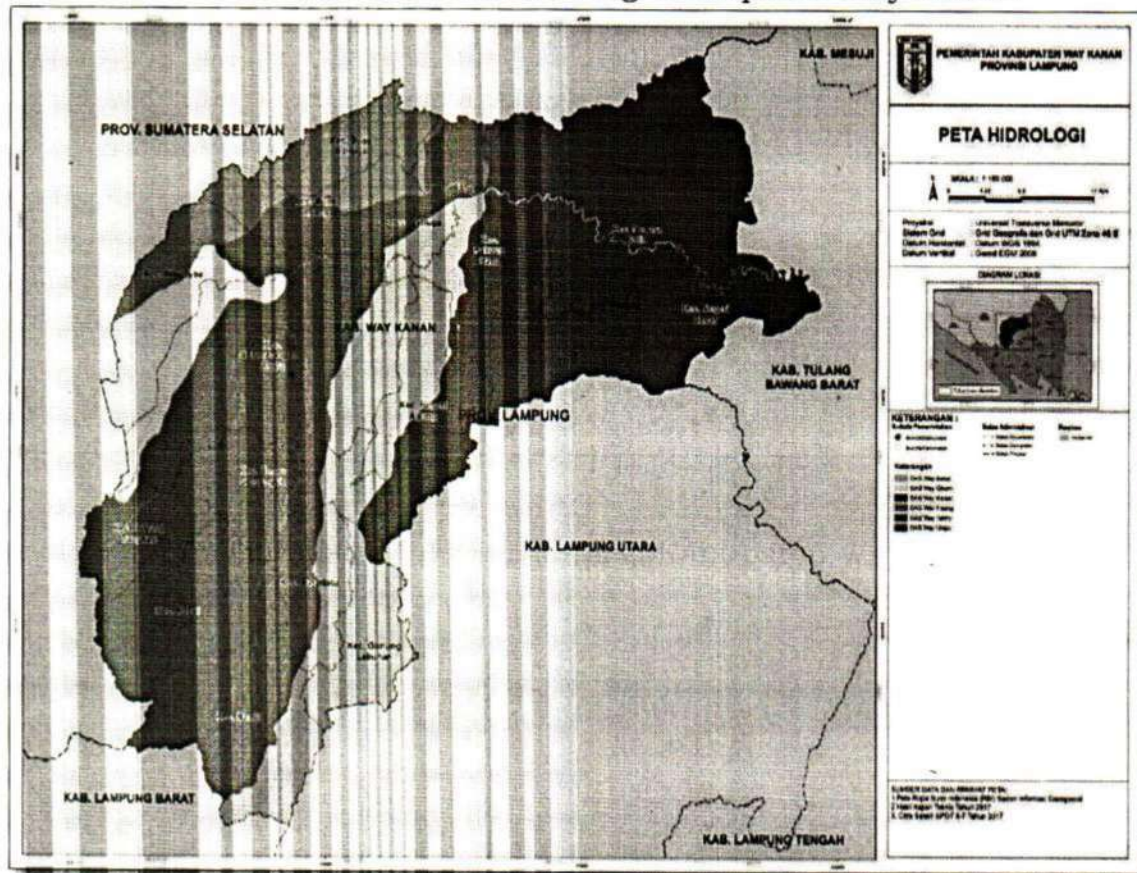
memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Way Kanan.

Gambar 2.8 Peta Geologi Kabupaten Way Kanan



Sumber : RTRW Kabupaten Way Kanan Tahun 2023-2043

Gambar 2.9 Peta Hidrologi Kabupaten Way Kanan



Sumber : RTRW Kabupaten Way Kanan Tahun 2023-2043

2.1.1.2.5. Daya Dukung dan Daya Tampung

A. Daya Dukung Air

1. Daya Dukung Air Permukaan

Konsep siklus hidrologi adalah bahwa jumlah air di suatu luasan tertentu di hamparan bumi dipengaruhi oleh masukan (*input*) dan keluaran (*output*) yang terjadi. Proses perubahan bentuk air terjadi dengan adanya sinar matahari pada siang hari yang menyebabkan air di permukaan Bumi mengalami evaporasi (penguapan) maupun transpirasi menjadi uap air. uap air akan naik hingga mengalami pengembunan (kondensasi) membentuk awan. Akibat pendinginan terus-menerus, butir-butir air di awan bertambah besar hingga akhirnya jatuh menjadi hujan (presipitasi). Selanjutnya, air hujan ini akan meresap ke dalam tanah (menjadi air tanah) atau mengalir menjadi air permukaan yang akhirnya membentuk sungai, danau atau rawa. Adapun uas dan koefisien tutupan lahan Kabupaten Way Kanan sebagai berikut.

Tabel 2.15 Luas dan Koefisien Tutupan Lahan Kabupaten Way Kanan

No	Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Ci
1	Bandara	90,20	0,8
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	3.791,06	0,18
3	Perkebunan	92.751,51	0,3
4	Permukiman	19.426,85	0,6
5	Permukiman Transmigrasi	685,20	0,6
6	Pertanian Lahan Kering	72.473,41	0,3
7	Pertanian Lahan Kering Campur Semak	153.638,63	0,3
8	Sawah	6.727,91	0,3

No	Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Ci
9	Semak Belukar	129,06	0,35
10	Semak Belukar Rawa	111,85	0,35
11	Tanah Terbuka	1.092,35	0,21
12	Tubuh Air	1.293,34	1
Total		352.211,37	

Sumber : Direktorat IPSDH KLHK melalui BPKHTL Wilayah XX Bandar Lampung Tahun 2020

Ketersediaan Air Kabupaten Way Kanan dihitung dengan menggunakan koefisien limpasan tertimbang yang dihitung pada masing-masing tutupan lahan di tiap kecamatan. Koefisien limpasan tertimbang di Kabupaten Way Kanan cukup variatif berkisar dari 0,3-0,34, karena sebaran tutupan lahan pada masing-masing kecamatan berbeda. Kemudian curah hujan tahunan Kabupaten Way Kanan berkisar antara 1500-3500 mm/tahun, hasil ini yang kemudian dikalikan dengan jumlah luasan masing-masing kecamatan untuk mendapat jumlah ketersediaan air di Kabupaten Way Kanan. Perhitungan dibantu dengan analisis menggunakan sistem informasi geografis (SIG) agar dapat memetakan daya dukung air permukaan pada masing-masing wilayah kecamatan. Kebutuhan air Kabupaten Way Kanan menggunakan standar kebutuhan air dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009 sebesar 1.600 m³/tahun. Kebutuhan perkapita untuk air bersih domestik dan non domestik tersebut kemudian dikalikan dengan jumlah penduduk pada setiap kecamatan di Kabupaten Way Kanan. Hasil perhitungan daya dukung air Kabupaten Way Kanan berdasarkan jumlah penduduk 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.16 Daya Dukung Air (DDA) Kabupaten Way Kanan

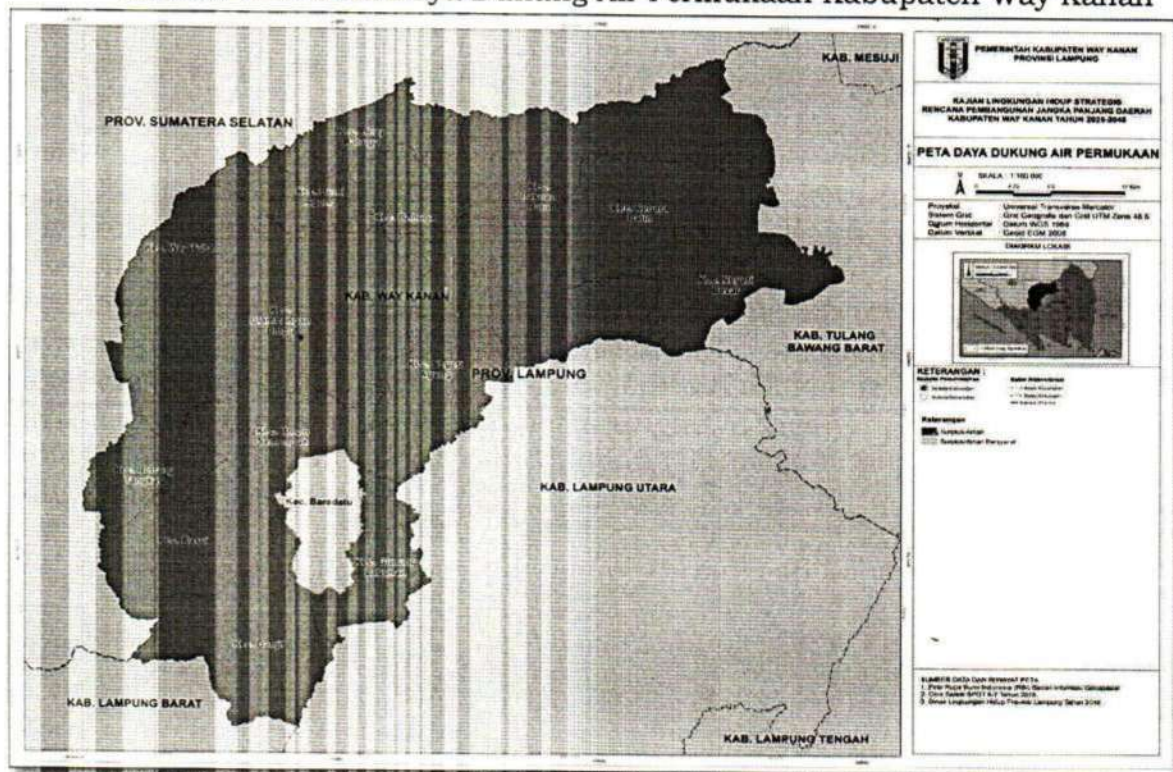
Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kebutuhan Air (m ³ /tahun)	Ketersediaan Air (m ³ /tahun)	Rasio	Status
Bahuga	11.501	18.401.600	72.761.271,93	3,95	Surplus/Aman
Banjit	46.265	74.024.000	217.595.717,96	2,94	Surplus/Aman
Baradatu	44.092	70.547.200	106.348.628,68	1,51	Surplus/Aman Bersyarat
Blambangan Umpu	36.914	59.062.400	437.672.051,06	7,41	Surplus/Aman
Buay Bahuga	21.162	33.859.200	102.226.908,57	3,02	Surplus/Aman
Bumi Agung	28.075	44.920.000	123.632.976,37	2,75	Surplus/Aman
Gunung Labuhan	31.260	50.016.000	106.388.559,72	2,13	Surplus/Aman
Kasui	32.514	52.022.400	195.341.122,27	3,75	Surplus/Aman
Negara Batin	36.843	58.948.800	209.200.386,98	3,55	Surplus/Aman
Negeri Agung	38.519	61.630.400	178.902.262,21	2,90	Surplus/Aman
Negeri Besar	21.890	35.024.000	137.669.282,12	3,93	Surplus/Aman
Pakuan Ratu	45.020	72.032.000	464.984.663,34	6,46	Surplus/Aman

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kebutuhan Air (m ³ /tahun)	Ketersediaan Air (m ³ /tahun)	Rasio	Status
Rebang Tangkas	24.580	39.328.000	115.718.317,02	2,94	Surplus/Aman
Umpu Semenguk	32.786	52.457.600	178.590.015,40	3,40	Surplus/Aman
Way Tuba	25.450	40.720.000	168.972.698,55	4,15	Surplus/Aman
Total	476.871	762.993.600	2.816.004.862,19	3,69	Surplus/Aman

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat dan Pelaksana KLHS RPJPD Tahun 2023

Berdasarkan perhitungan ketersediaan dan kebutuhan air di Kabupaten Way Kanan tahun 2021 status daya dukung air di Kabupaten Way Kanan secara keseluruhan berada pada kondisi Surplus, artinya masih mampu mendukung kegiatan domestik dan pertanian. Namun untuk kecamatan Baradatu status daya dukung air berada pada kondisi aman bersyarat yang berarti diperlukan beberapa penanganan agar tidak menjadi defisit ketersediaan air dikemudian hari. Hal ini didasarkan pada perhitungan dengan membandingkan antara kebutuhan air minimum perorang dengan volume ketersediaan air di Kabupaten Way Kanan.

Gambar 2.10 Peta Daya Dukung Air Permukaan Kabupaten Way Kanan



Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat dan Pelaksana KLHS RPJPD Tahun 2023

2. Daya Dukung Daya Tampung (DDDT) Air berbasis Ambang Batas

Berdasarkan SK MenLHK No.297/MenLHK/Setjen/PLA.3/4/2019 mengenai Daya Dukung Daya Tampung Air Nasional, DDDTT Air didapat dari hasil perhitungan selisih antara ketersediaan air yang dianalisis dari nilai jasa lingkungan hidup sebagai penyedia air dibandingkan dengan jumlah pemanfaatan air termasuk untuk kebutuhan rumah tangga sesuai dengan jumlah penduduk.

Analisis antara jasa lingkungan hidup sebagai penyedia air dan kebutuhan pembangunan akan menghasilkan selisih ketersediaan air. Penetapan DDDT Air ditetapkan berdasarkan kondisi penutupan lahan pada tahun yang dianalisis, nilai selisih tersebut menghasilkan total kebutuhan air berada di atas atau di

bawah ambang batas ketersediaan air. Secara umum, hasil perhitungan DDDT Air diinterpretasikan menjadi dua kelompok status, yaitu:

1. Belum Terlampaui adalah kondisi dimana ketersediaan sumber daya lebih besar dibandingkan kebutuhan;
2. Terlampaui adalah kondisi dimana ketersediaan sumber daya jauh lebih sedikit dibandingkan kebutuhan.

Dihimpun dari dokumen daya dukung daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH) Provinsi Lampung Tahun 2019, input yang digunakan sebagai dasar analisis DDDT Air meliputi data spasial dan non spasial, data spasial berupa data administrasi, data ekoregion, data tutupan lahan dan jalan, dan sistem grid skala ragam. Sedangkan data non spasial berupa data populasi penduduk, data indeks jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air sebagai bobot pendistribusian potensi dalam sistem grid, data ketersediaan air, dan standar kebutuhan air per kapita.

Langkah penghitungan DDDT Air adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi jasa lingkungan hidup sebagai penyedia air dan pengatur air
2. Perhitungan ketersediaan air tiap grid
3. Perhitungan kebutuhan air tiap grid
4. Identifikasi status DDDT air tiap grid Penentuan ambang batas penduduk yang dapat didukung selanjutnya Analisis kecenderungan kinerja jasa lingkungan hidup sebagai pengaturan air.
5. Penetapan Daya Dukung Dan Daya Tampung (DDDT) air mempertimbangkan selisih ketersediaan air dan kecenderungan kinerja jumlah sebagai pengatur air. Berikut sebaran status DDDT Air berbasis ambang batas di Kabupaten Way Kanan.

Tabel 2.17 Status DDDT Air Kabupaten Way Kanan

Kecamatan	Ketersediaan Air	Kebutuhan Air	Selisih	Status
Bahuga	135.008.919,20	29.861.110,00	105.147.809,19	Belum Terlampaui
Banjit	322.598.015,10	155.588.274,25	167.009.740,86	Belum Terlampaui
Baradatu	163.659.848,11	76.377.353,08	87.282.495,03	Belum Terlampaui
Blambangan Umpu	627.476.854,18	235.507.628,14	391.969.226,04	Belum Terlampaui
Buay Bahuga	176.703.299,40	134.143.260,15	42.560.039,24	Belum Terlampaui
Bumi Agung	211.192.508,28	117.813.603,29	93.378.904,99	Belum Terlampaui
Gunung Labuhan	196.385.341,84	93.377.028,56	103.008.313,27	Belum Terlampaui
Kecamatan Kasui	276.077.269,36	136.569.143,39	139.508.125,97	Belum Terlampaui
Negara Batin	334.928.188,34	113.498.288,91	221.429.899,43	Belum Terlampaui
Negeri Agung	263.158.616,35	130.883.473,19	132.275.143,15	Belum Terlampaui
Negeri Besar	242.802.121,82	52.116.026,02	190.686.095,80	Belum Terlampaui
Pakuan Ratu	770.058.994,52	299.820.638,79	470.238.355,73	Belum Terlampaui

Kecamatan	Ketersediaan Air	Kebutuhan Air	Selisih	Status
Rebang Tangkas	162.771.644,14	78.719.679,92	84.051.964,22	Belum Terlampaui
Umpu Semenguk	258.019.000,08	130.337.726,48	127.681.273,60	Belum Terlampaui
Way Tuba	258.490.620,27	139.499.613,09	118.991.007,17	Belum Terlampaui
Total	4.399.331.240,97	1.924.112.847,28	2.475.218.393,69	Belum Terlampaui

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung

Secara keseluruhan Kabupaten Way Kanan memiliki status DDDT Air yang belum terlampaui atau status ketersediaan air masih lebih banyak daripada kebutuhan air. Namun demikian terdapat beberapa area atau wilayah di Kabupaten Way Kanan dengan status DDDT terlampaui, adapun sebaran dan luasan DDDT Air yang telah terlampaui di Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut:

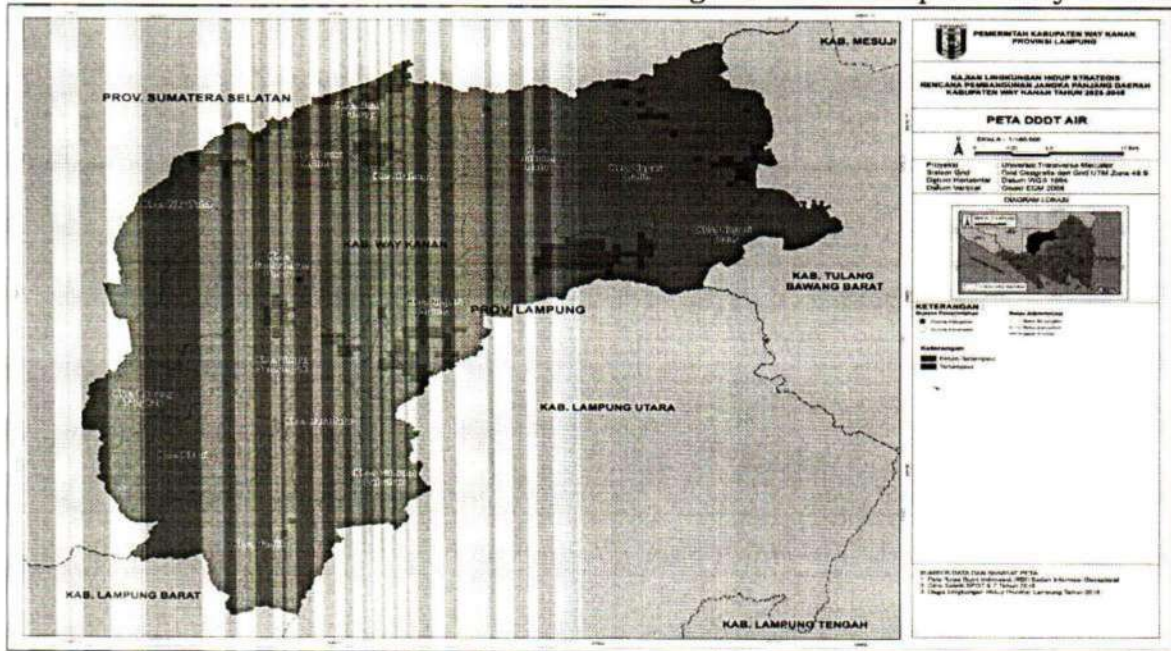
Tabel 2.18 Sebaran Status DDDT Air di Kabupaten Way Kanan

Kecamatan	Belum Terlampaui	Terlampaui	Total (Ha)
Bahuga	9.508,89	-	9.508,89
Banjit	28.273,86	170,03	28.443,88
Baradatu	12.274,93	-	12.274,93
Blambangan Umpu	51.493,72	1.471,95	52.965,67
Buay Bahuga	8.925,79	2.915,88	11.841,67
Bumi Agung	12.118,72	2.581,09	14.699,81
Gunung Labuhan	13.978,57	-	13.978,57
Kasui	23.439,65	-	23.439,65
Negara Batin	26.065,42	1.599,45	27.664,87
Negeri Agung	17.698,52	3.584,86	21.283,37
Negeri Besar	18.444,24	17,69	18.461,94
Pakuan Ratu	58.728,49	6.177,71	64.906,20
Rebang Tangkas	11.731,36	-	11.731,36
Umpu Semenguk	18.817,34	1.486,52	20.303,86
Waytuba	19.463,93	1.243,50	20.707,44
Total	330.963,45	21.248,69	352.212,14

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung

Berdasarkan data diatas, Kabupaten Way Kanan memiliki area dengan status DDDT Air terlampaui seluas 21.248,69 Ha yang tersebar di 10 Kecamatan. Kecamatan dengan status terlampaui paling luas berada di Kecamatan Pakuan Ratu dengan luas area 6.177,71 Ha dari total 64.906,20 Ha.

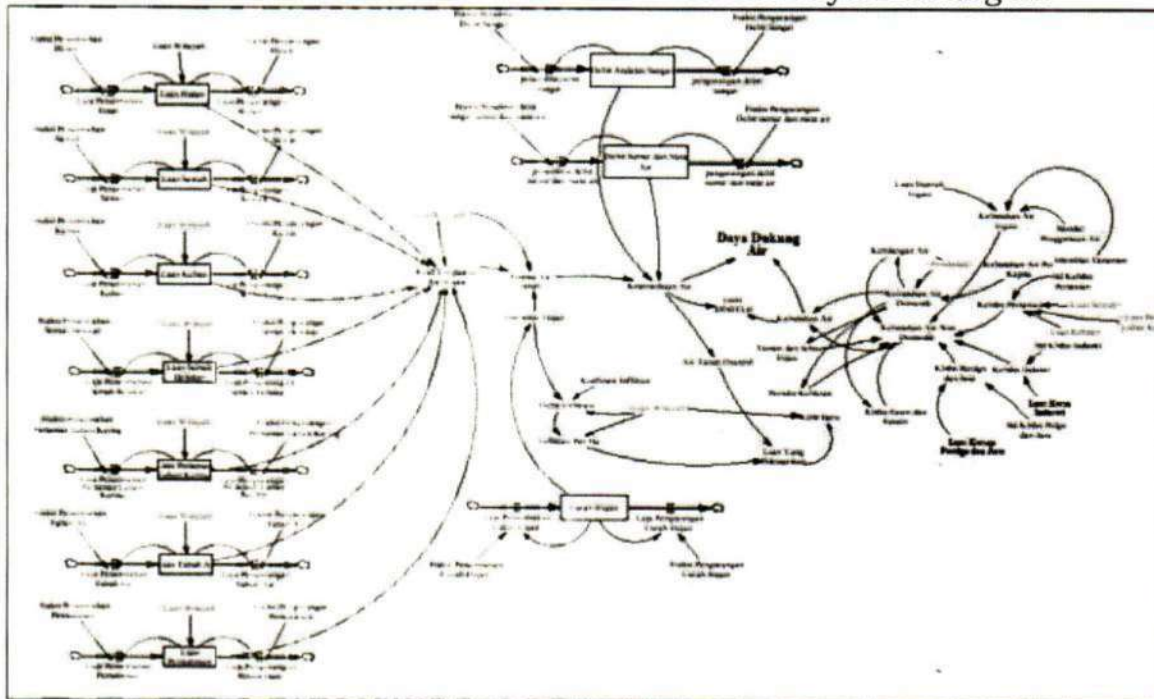
2.11 Peta DDDT Air berdasarkan Ambang Batas di Kabupaten Way Kanan



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung

Kemudian dengan asumsi bahwa ketersediaan air adalah tetap, maka status daya dukung air Kabupaten Way Kanan dapat dilihat sampai 20 tahun mendatang. Perhitungan proyeksi daya dukung air menggunakan model sistem dinamik. Berikut adalah model sistem dinamik untuk melihat kebutuhan dan ketersediaan air pada tahun 2045.

Gambar 2.12 Model Sistem Dinamik Daya Dukung Air



Sumber : Hasil Analisis Tim Pembuat dan Pelaksana KLHS RPJPD Tahun 2023

Berdasarkan model sistem dinamik diatas, perhitungan daya dukung air dengan mempertimbangkan banyak faktor. Dari sisi ketersediaan, daya dukung air sangat dipengaruhi oleh kondisi tutupan lahan, curah hujan dan juga debit air permukaan. Sedangkan dari sisi kebutuhan daya dukung air selain dipengaruhi oleh penduduk, kebutuhan air juga mempertimbangkan lahan pertanian, daerah irigasi, kebutuhan air untuk industri, perdagangan dan jasa dan lain-lain. Berikut hasil analisis kondisi daya dukung air Kabupaten Way Kanan tahun 2022-2045.

Tabel 2.19 Kebutuhan dan Ketersediaan Air Kabupaten Way Kanan
Tahun 2022-2045

Time (Year)	Ketersediaan Air (M ³ /Tahun)	Rasio DDA	Kebutuhan Air (M ³ /Tahun)
2022	2.812.855.808	2,31	1.215.150.336
2023	2.812.855.808	2,30	1.221.272.960
2024	2.812.855.808	2,29	1.227.451.008
2025	2.812.855.808	2,28	1.233.684.992
2026	2.812.855.808	2,27	1.239.975.168
2027	2.812.855.808	2,26	1.246.322.304
2028	2.812.855.808	2,25	1.252.726.784
2029	2.812.855.808	2,23	1.259.189.120
2030	2.812.855.808	2,22	1.265.709.824
2031	2.812.855.808	2,21	1.272.289.536
2032	2.812.855.808	2,20	1.278.928.768
2033	2.812.855.808	2,19	1.285.627.904
2034	2.812.855.808	2,18	1.292.387.584
2035	2.812.855.808	2,17	1.299.208.448
2036	2.812.855.808	2,15	1.306.090.880
2037	2.812.855.808	2,14	1.313.035.520
2038	2.812.855.808	2,13	1.320.042.880
2039	2.812.855.808	2,12	1.327.113.728
2040	2.812.855.808	2,11	1.334.248.320
2041	2.812.855.808	2,10	1.341.447.424
2042	2.812.855.808	2,09	1.348.711.680
2043	2.812.855.808	2,07	1.356.041.600
2044	2.812.855.808	2,06	1.363.437.696
2045	2.812.855.808	2,05	1.370.900.608

Sumber : Hasil Analisis Tim Pembuat dan Pelaksana KLHS RPJPD Tahun 2023

Berdasarkan hasil kondisi daya dukung air di Kabupaten Way Kanan masih surplus dengan rasio masih diatas satu. Namun setiap tahun DDA semakin menurun, untuk itu Pemerintah Kabupaten Way Kanan sangat penting untuk tetap menjaga kualitas tutupan lahan khususnya lahan hutan untuk menjaga ketersediaan air di masa mendatang.

B. Daya Dukung Lahan

Daya dukung lahan merupakan ukuran kemampuan suatu lahan untuk mendukung seluruh kegiatan manusia, baik pembangunan infrastruktur, ekonomi, sosial dan budaya. Klasifikasi daya dukung lahan adalah sebagai berikut:

- Lahan limit merupakan kawasan hutan lindung atau kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi serta wilayah dengan tingkat kelerengan diatas 40%;
- Lahan kendala adalah lahan dengan kriteria kelerengan 15-40%, memiliki morfologi berbukit dan bergelombang dan merupakan kawasan hutan produksi. Lahan ini dapat dikembangkan dengan persyaratan dan kriteria tertentu.
- Lahan potensial adalah lahan yang potensial dijadikan sebagai kawasan budi daya dengan kriteria tingkat kelerengan 0-15 dan tidak berada pada kawasan hutan.

Daya dukung lahan adalah kondisi lahan untuk mendukung perikehidupan manusia, pembangunan, kegiatan ekonomi dan keseimbangan. Daya dukung lahan mengindikasikan karakteristik lahan berdasarkan kemampuannya untuk menampung berbagai kegiatan sehingga keluaran dari analisis ini berupa klasifikasi lahan yang potensial, lahan yang memiliki kendala untuk pembangunan, dan lahan yang dibatasi agar tidak dilakukan kegiatan pembangunan.

Metode Penentuan Daya Dukung Lahan hampir identik dengan kemampuan lahan, analisis ini juga menggunakan data kondisi fisik lingkungan namun dengan metode ambang batas boleh dan tidak bolehnya dilakukan pembangunan dengan Teknik Boolean, tidak berdasarkan skoring seperti analisis kemampuan lahan sehingga hasil analisis dapat dijadikan bahan dalam menganalisis lebih lanjut yaitu daya tampung lahan pada lahan potensi dan kendala. Namun mutlak untuk mengeleminasi lahan limitasi agar pembangunan kedepannya tidak mengarah ke lahan limitasi.

Adapun variabel yang menjadi pembatas yaitu lahan yang bukan ketinggiannya di atas 2.000 mdpl, kemiringan lereng di atas 40 % dan merupakan kawasan lindung seperti hutan, sempadan sungai, sempadan mata air dan lainnya. Penentuan daya dukung lahan Kabupaten Way Kanan menggunakan data peta kawasan hutan, peta topografi dan kelerengan serta peta kawasan lindung lainnya. Berikut adalah sebaran daya dukung lahan Kabupaten Way Kanan.

Tabel 2.20 Daya Dukung Lahan Kabupaten Way Kanan

Kecamatan	Luas (Ha)			
	Limit	Kendala	Potensial	Total
Bahuga	0	273,56	9.235,34	9.508,89
Banjit	14.547,31	1.421,72	12.474,86	28.443,88
Baradatu	0	1.467,33	10.807,60	12.274,93
Blambangan Umpu	785,82	23.877,20	28.302,65	52.965,67
Buay Bahuga	0	106,39	11.735,28	11.841,67
Bumi Agung	0	154,48	14.545,33	14.699,81
Gunung Labuhan	0	375,42	13.603,15	13.978,57
Kasui	10.800,04	4.370,04	8.269,56	23.439,65
Negara Batin	0	553,79	27.111,09	27.664,87
Negeri Agung	0	456,42	20.826,95	21.283,37
Negeri Besar	0	356,29	18.105,65	18.461,94
Pakuan Ratu	0	31.380,05	33.526,15	64.906,20

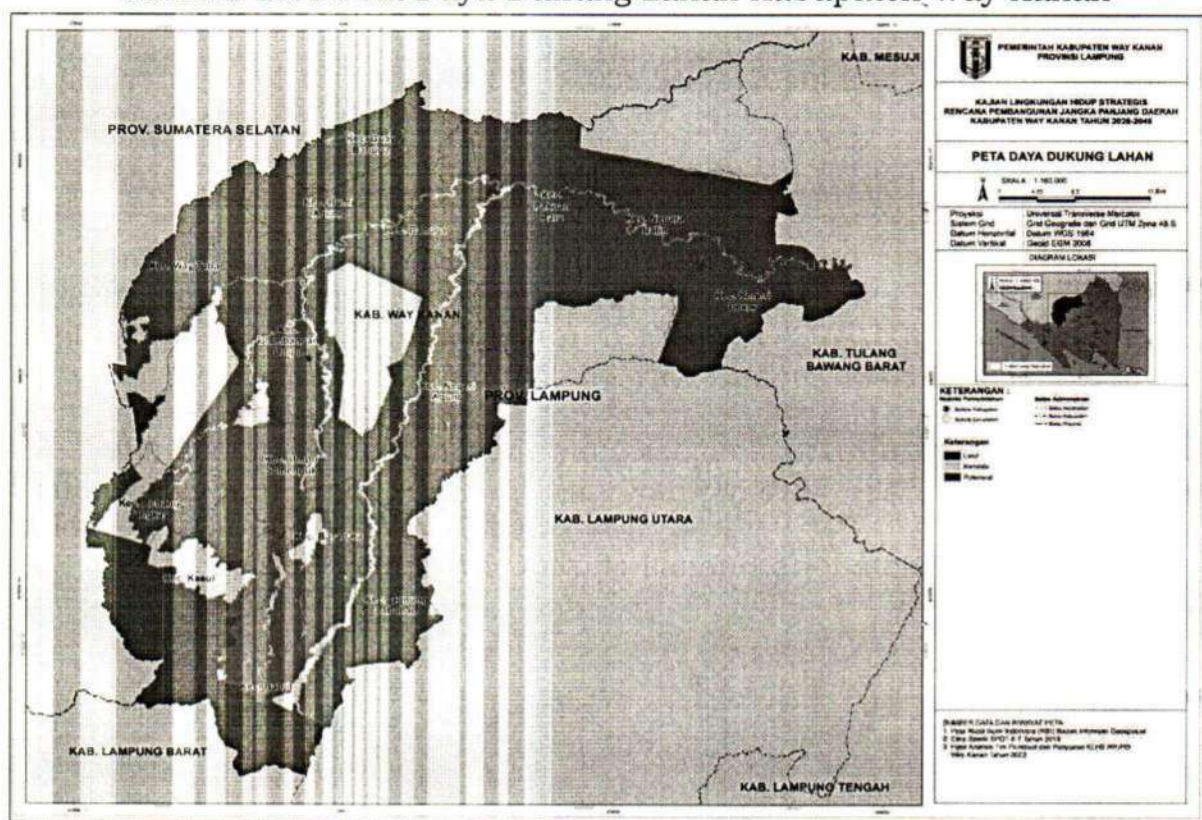
Rebang Tangkas	1.704,47	2.889,92	7.136,97	11.731,36
Kecamatan Umpu Semenguk	0	1.222,95	19.080,91	20.303,86
Way Tuba	354,12	3.038,51	17.314,81	20.707,44
Total	28.191,76	71.944,06	252.076,32	352.212,14

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat dan Pelaksana KLHS RPJPD Tahun 2023

Daya dukung lahan (DDL) Kabupaten Way Kanan tahun 2022 didominasi oleh kelas lahan potensial dengan luas 252.076,32 Ha atau sekitar 71,56 % dari total luas wilayah. Data ini tidak jauh berbeda dengan data daya dukung lahan Provinsi Lampung untuk Kabupaten Way Kanan dengan persentase lahan potensial adalah 74,37%.

Lahan potensial adalah lahan yang sangat baik untuk dilakukan budidaya, sebaliknya lahan limit adalah lahan yang harus dilarang untuk kegiatan budidaya di Kabupaten Way Kanan.

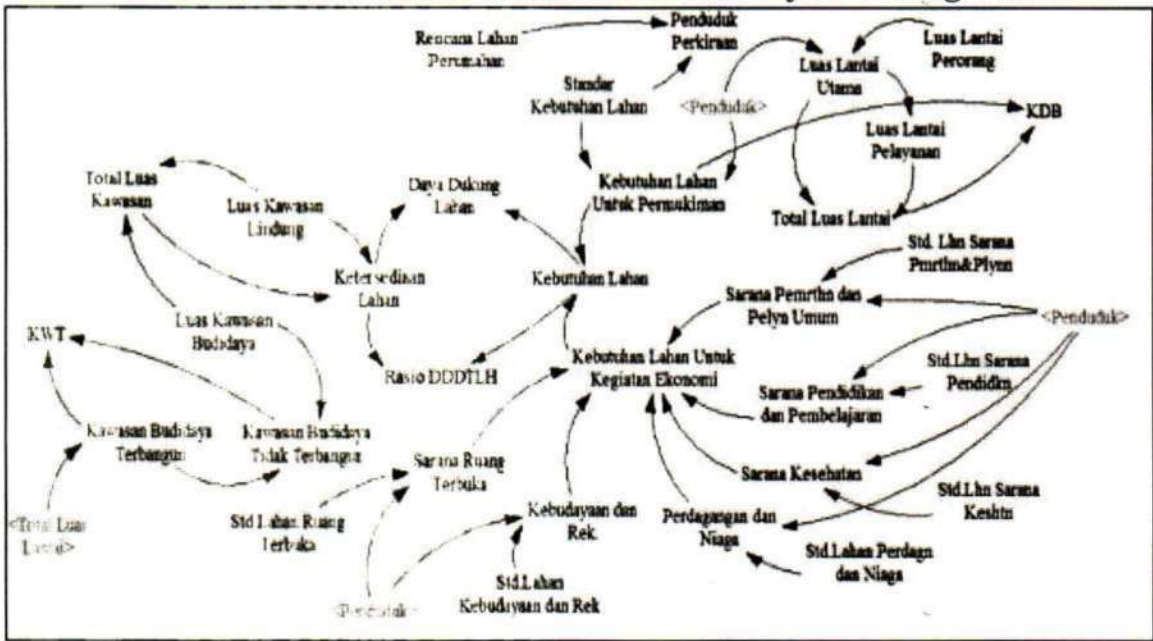
Gambar 2.13 Peta Daya Dukung Lahan Kabupaten Way Kanan



Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat dan Pelaksana KLHS RPJPD Tahun 2023

Kemudian daya dukung lahan dihitung dengan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan lahan untuk kegiatan diatasnya sampai 20 tahun mendatang. Perhitungan proyeksi daya dukung lahan menggunakan model sistem dinamik. Berikut adalah model sistem dinamik untuk melihat kebutuhan dan ketersediaan lahan pada tahun 2045.

Gambar 2.14 Model Sistem Dinamik Daya Dukung Lahan



Sumber : Hasil Analisis Tim Pembuat dan Pelaksana KLHS RPJPD Tahun 2023

Berdasarkan model sistem dinamik diatas, perhitungan daya dukung lahan dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Ketersediaan lahan diukur dari ketersediaan kawasan budidaya yang ada di Kabupaten Way Kanan, sedangkan kebutuhan lahan dipengaruhi banyak faktor seperti kebutuhan lahan untuk permukiman, sarana kesehatan, pelayanan umum, kegiatan ekonomi dan lain-lain. Berikut hasil analisis kondisi daya dukung air Kabupaten Way Kanan tahun 2022-2045.

Tabel 2.21 Rasio Daya Dukung Lahan Kabupaten Way Kanan Tahun 2022-2045

Tahun	2022	2025	2030	2035	2040	2045
Rasio DDDLH	264,23	257,19	245,88	235,06	224,72	214,84

Sumber : Hasil Analisis Tim Pembuat dan Pelaksana KLHS RPJPD Tahun 2023

Berdasarkan hasil proyeksi diatas, daya dukung lahan di Kabupaten Way Kanan masih sangat baik dalam mendukung pembangunan. Baik dari ketersediaan lahan dan rasio nya jauh diatas satu sehingga masih dikatakan surplus.

C. Daya Dukung Fungsi Lindung

Berdasarkan pedoman perhitungan daya dukung dan daya tampung (KLH, 2014). Daya dukung fungsi lindung dapat diidentifikasi dari luas guna lahan yang memiliki fungsi lindung, koefisien lindung untuk guna lahan, dan luasan wilayah keseluruhan. Hasil perhitungan daya dukung fungsi lindung kemudian diklasifikasikan untuk mengetahui tingkat kualitas daya dukung fungsi lindung sebagai berikut:

Tabel 2.22 Klasifikasi Daya Dukung Fungsi Lindung

Tingkat Kualitas Daya Dukung Fungsi Lindung	Rentang Nilai
Sangat Rendah	0,0 - 0,2
Rendah	0,2 - 0,4
Sedang	0,4 - 0,6
Baik	0,6 - 0,8

Sangat Baik	0,8 - 1,0
-------------	-----------

Daya dukung fungsi lindung di Kabupaten Way Kanan dapat ditentukan dengan mengalikan koefisien tutupan lahan dengan luas tutupan lahan kemudian dibagi dengan total luas wilayah. Koefisien tutupan lahan ditentukan berdasarkan nilai koefisien tutupan lahan menurut Rusthon (1993) dalam buku daya tampung lingkungan untuk perencanaan dan pengembangan wilayah (Muta'ali, 2012). Tutupan lahan di Kabupaten Way Kanan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.23 Luas dan Koefisien Tutupan Lahan Kabupaten Way Kanan

No	Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Koef Fungsi Lindung	Koef x Luas (Ha)
1	Bandara	90,2	0,18	16,24
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	3.791,06	1	3.791,06
3	Perkebunan	92.752,27	0,42	38.955,95
4	Permukiman	19.426,85	0,18	3.496,83
5	Permukiman Transmigrasi	685,2	0,18	123,34
6	Pertanian Lahan Kering	72.473,41	0,21	15.219,42
7	Pertanian Lahan Kering Campur Semak	153.638,63	0,21	32.264,11
8	Sawah	6.727,91	0,46	3.094,84
9	Semak Belukar	129,06	0,28	36,14
10	Semak Belukar Rawa	111,85	0,28	31,32
11	Tanah Terbuka	1.092,35	0,01	10,92
12	Tubuh Air	1.293,34	0,98	1.267,47
Total		352.212,14	0,28	98.307,64

Sumber: BPKHTL Wilayah XX Bandar Lampung Tahun 2020

$$\text{Daya Dukung Fungsi Lindung} = \frac{98.307,64 \text{ Ha}}{352.212,14 \text{ Ha}} = 0,28$$

Berdasarkan nilai diatas maka tingkat kualitas daya dukung fungsi lindung di Kabupaten Way Kanan berada dalam kelas rendah. Hal ini dipengaruhi oleh tutupan lahan Kabupaten Way Kanan yang didominasi oleh lahan dengan fungsi lindung yang sedikit. Untuk itu diperlukan langkah lebih konkret untuk meningkatkan kualitas tutupan lahan seperti meningkatkan lahan hijau dan mencegah terjadinya alih fungsi lahan hijau menjadi lahan terbangun.

D. Daya Dukung Lahan Terbangun

Daya dukung lahan terbangun ditentukan berdasarkan perhitungan koefisien luas lahan terbangun, luas wilayah, serta luas lahan terbangun. Hasil dari perhitungan tersebut nantinya akan diterjemahkan menjadi tiga kategori, dimana jika nilai DDLB < 1 maka daya dukung lahan permukiman terlampaui atau buruk, sementara jika nilai DDLB antara 1 hingga 3 maka daya dukung

lahan permukiman bersyarat atau sedang, dan jika nilai DDLB > 3 maka daya dukung lahan permukiman dapat dikategorikan baik.

Lahan terbangun di Kabupaten Way Kanan berdasarkan tutupan lahan terbangun memiliki total luas 20.202,25 Ha terdiri dari Bandara 90,20 Ha, Permukiman 19.426,85 Ha dan Permukiman Transmigrasi 685,20 Ha. Kemudian luas lahan untuk infrastruktur diasumsikan sebesar 20% dari total luas lahan terbangun, yang jika dijumlahkan luas lahan terbangun menjadi sebesar 24.242,70 Ha. Maka daya dukung lahan terbangun Kabupaten Way Kanan dapat dihitung sebagai berikut :

$$DDL B = \frac{60\% \times 352.212,14 \text{ Ha}}{4.242,70 \text{ Ha}} = 8,72$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa daya dukung lahan terbangun Kabupaten Way Kanan berada dalam kategori BAIK.

E. Daya Tampung Lahan

Daya dukung suatu wilayah dengan wilayah lain dalam suatu negara tidaklah sama. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya persebaran penduduk dalam suatu wilayah negara. Dalam hal ini kapasitas lahan untuk menampung kegiatan budidaya yaitu kapasitas dari lahan potensial per kecamatan. Kapasitas lahan potensial ini dapat disebut juga sebagai ketersediaan lahan atau *supply of land* (SL). Setelah mengetahui ketersediaan lahan, analisis daya tampung lahan juga memerlukan angka dari luas kebutuhan lahan pada masa mendatang yaitu proyeksi pada 30 tahun kedepan sebagai *demand* atau permintaan dari lahan (DL). Kebutuhan lahan per keluarga (4 jiwa) dapat diasumsikan sebesar 36 m² dan hasil akhir daya tampung lahan didapat dari rasio SL/DL. Berikut adalah perhitungan daya tampung lahan di Kabupaten Way Kanan.

Tabel 2.24 Daya Tampung Lahan Kabupaten Way Kanan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Ketersediaan Lahan Potensial (Ha)	Kebutuhan Lahan Permukiman (Ha)	Rasio	Status Daya Tampung Lahan Permukiman
1	Bahuga	11.501	9.235,34	10,35	892,23	Surplus
2	Banjit	46.265	12.474,86	41,64	299,60	Surplus
3	Baradatu	44.092	10.807,60	39,68	272,35	Surplus
4	Blambangan Umpu	36.914	28.302,65	33,22	851,91	Surplus
5	Buay Bahuga	21.162	11.735,28	19,05	616,16	Surplus
6	Bumi Agung	28.075	14.545,33	25,27	575,65	Surplus
7	Gunung Labuhan	31.260	13.603,15	28,13	483,51	Surplus
8	Kasui	32.514	8.269,56	29,26	282,60	Surplus
9	Negara Batin	36.843	27.111,09	33,16	817,62	Surplus
10	Negeri Agung	38.519	20.826,95	34,67	600,77	Surplus
11	Negeri Besar	21.890	18.105,65	19,70	919,02	Surplus
12	Pakuan Ratu	45.020	33.526,15	40,52	827,44	Surplus

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Ketersediaan Lahan Potensial (Ha)	Kebutuhan Lahan Permukiman (Ha)	Rasio	Status Daya Tampung Lahan Permukiman
13	Rebang Tangkas	24.580	7.136,97	22,12	322,62	Surplus
14	Umpu Semenguk	32.786	19.080,91	29,51	646,65	Surplus
15	Way Tuba	25.450	17.314,81	22,91	755,94	Surplus
Total		476.871	252.076,32	429,18	587,34	Surplus

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat dan Pelaksana KLHS RPJPD Tahun 2023

Berdasarkan perhitungan ketersediaan dan kebutuhan lahan untuk permukiman tahun 2021 status daya tampung lahan di Kabupaten Way Kanan secara keseluruhan berada pada kondisi surplus, artinya masih mampu menampung kebutuhan lahan manusia dan kegiatannya.

2.1.1.2.6 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

1. Indeks Kualitas Air (IKA)

Air merupakan sumber kehidupan, yang perlu dijaga kualitasnya nya demi keberlangsungan kehidupan manusia dan alam sekitarnya. Kualitas air adalah suatu ukuran kondisi air yang dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi dan biologisnya. Selain itu, kualitas air juga menunjukkan ukuran kondisi air relatif terhadap kebutuhan biota air dan manusia.

Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2021 menggunakan dasar pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Perhitungan yang dilakukan dalam menilai Indeks Kualitas Air (IKA) menggunakan 8 parameter yaitu pH, TSS, DO, BOD, COD, NO3-N, Total Fosfat, dan Fecal Coliform.

Berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) yang dilakukan di Sungai Way Kanan, Way Pisang, Way Umpu, Way Besay, Way Giham, dan Way Tahmi diketahui bahwa nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Way Kanan pada 4 (empat) tahun terakhir fluktuatif. Tahun 2019 nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Way Kanan sebesar 53,33 dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 58,89. Namun pada tahun 2021 nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Way Kanan mengalami penurunan menjadi 50 dan meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi 68,33, dan kembali turun pada tahun terbaru yaitu 2023 menjadi 63,33. Untuk Indeks kualitas air selama 5 (lima) Tahun 2019-2023 disajikan pada gambar 2.14 berikut.

Gambar 2. 14 Indeks Kualitas Air Kabupaten Way Kanan



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

Penurunan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) di Kabupaten Way Kanan disebabkan oleh faktor fisika, faktor kimia dan faktor biologi. Menurunnya nilai Indeks Kualitas Air (IKA) juga disebabkan oleh menurunnya kualitas air sungai di Kabupaten Way Kanan. Hal tersebut disebabkan adanya Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di sepanjang Sungai Way Umpu dan Way Tahmi dan pencemaran yang ditimbulkan dari limbah rumah tangga yang tidak diolah serta sampah yang masuk ke badan sungai. Selain itu, adanya penangkapan ikan dengan bahan kimia beracun juga mengakibatkan rusaknya lingkungan.

Gambar 2. 15 Peta Aliran Sungai Way Kanan



Sumber: Citra SPOT 6 - 7 Kabupaten Way Kanan

2. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Kabupaten Way Kanan menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang memiliki permasalahan pada pencemaran udara. Pencemaran udara yang terjadi di Kabupaten Way Kanan diakibatkan karena adanya peningkatan jumlah penduduk yang selaras dengan peningkatan penggunaan transportasi dan konsumsi energi. Lebih dari itu, pencemaran udara yang terjadi di Kabupaten Way Kanan juga disebabkan oleh adanya peningkatan Sulfur Dioksida (SO₂) dan Nitrogen Dioksida (NO₂). Peningkatan SO₂ akan menyebabkan iritasi sistem pernafasan, iritasi mata, serta menjadi kontributor utama terjadinya hujan asam. Sedangkan NO₂ akan menyebabkan kesulitan bernafas pada penderita asma, batuk-batuk pada anak-anak dan orang tua, serta menurunkan visibilitas.

Dalam perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) di Kabupaten Way Kanan menggunakan metodologi *Passive Sampler*. Kemudian perhitungan dilakukan pada 4 (empat) lokasi yaitu area transportasi, industri, permukiman dan perkantoran. Berikut merupakan hasil nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) pada Kabupaten Way Kanan selama 5 tahun terakhir.

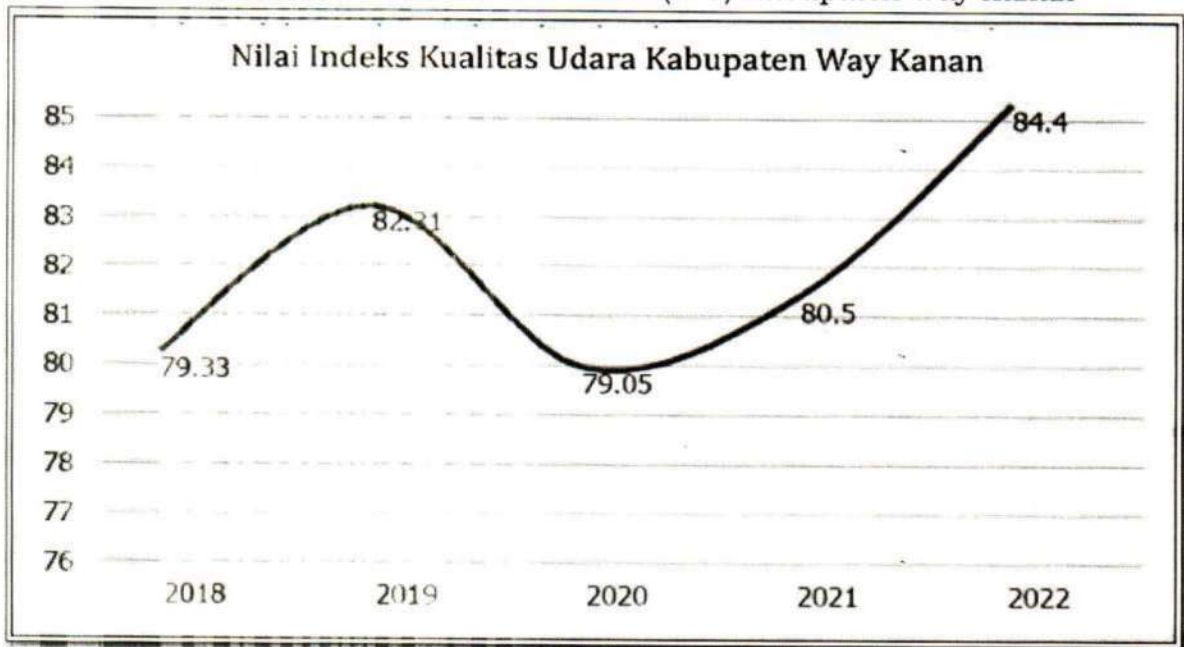
Tabel 2.25 Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Way Kanan 2019-2023

Tahun	Perhitungan Indeks					IKU
	Rataan Per Parameter		Indeks Dibagi Baku Mutu		Rataan	
	NO2	SO2	NO2	SO2	Indeks	
	(Âµg/m3)	(Âµg/m3)	(Âµg/m3)	(Âµg/m3)		
2019	10	11,73	0,25	0,58	0,42	82,31
2020	12,34	12,91	0,31	0,64	0,48	79,05
2021	11,62	12,22	0,29	0,61	0,45	80,5
2022	10,24	10,11	0,26	0,51	0,38	84,4
2023	8,06	7,81	6,4	5,72	0,26	91,94

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

Berdasarkan dari perhitungan yang dilakukan selama 5 tahun terakhir, diketahui bahwa nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Way Kanan mengalami peningkatan dan penurunan (fluktuatif). Kenaikan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Way Kanan terjadi pada tahun 2019, 2021 dan 2022. Penurunan Indeks Kualitas Udara Kabupaten Way Kanan terjadi pada tahun 2020. Penurunan tersebut diakibatkan karena asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor.

Gambar 2.16 Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Way Kanan



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

3. Indeks Kualitas Lahan (IKL)

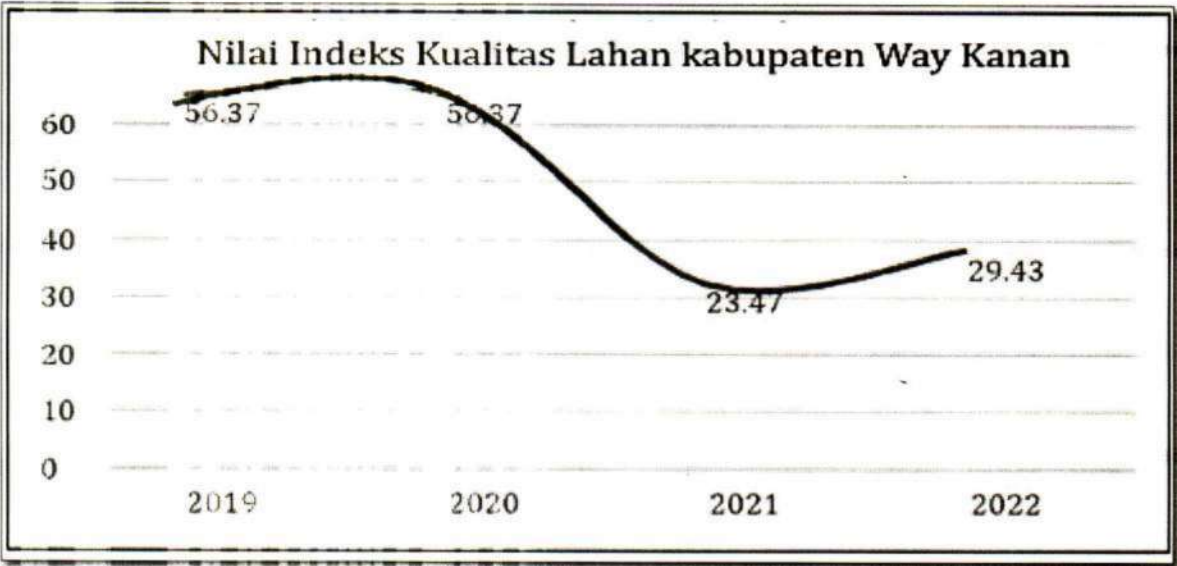
Tutupan lahan merupakan perwujudan fisik dari vegetasi, benda alam, dan sensor budaya yang ada di permukaan bumi. Tutupan lahan akan berubah seiring berjalannya waktu. Perubahan tutupan lahan diakibatkan karena meningkatnya kebutuhan akan lahan yang dipacu oleh pertumbuhan jumlah penduduk.

Pada tahun 2022 tutupan lahan di Kabupaten Way Kanan terbagi menjadi 15 tutupan lahan, yaitu bandara tni, bangunan permukiman/campuran, danau/situ, empang, hutan lahan rendah, hutan lahan tinggi, ladang/tegalan hortikultura, lahan terbuka lain, landas pacu, perkebunan, rawa, saluran drainase, sawah, semak belukar dan sungai.

Indeks Kualitas Lahan (IKL) merupakan indikator yang mewakili isu hijau dalam penilaian kebijakan pengelolaan kualitas lingkungan hidup. Perhitungan Indeks Kualitas Lahan (IKL) terdiri dari dua yaitu Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG).

Pada perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) menggunakan dua parameter yaitu kondisi tutupan vegetasi hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Tutupan vegetasi hutan meliputi hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder/bekas tebangan, hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder/bekas tebangan, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder/bekas tebangan, dan hutan tanaman. Sedangkan tutupan vegetasi non hutan meliputi semak belukar, ruang terbuka hijau, kebun raya dan taman keanekaragaman hayati. Sedangkan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) adalah nilai yang menggambarkan ekosistem gambut pada wilayah tertentu yang meliputi ekosistem gambut dengan fungsi lindung dan ekosistem gambut dengan fungsi budidaya. Indeks Kualitas Lahan Kabupaten Way Kanan Tahun 2019-2022 sebagaimana pada gambar 2.17

Gambar 2. 17 Indeks Kualitas Lahan Kabupaten Way Kanan Tahun 2019-2022



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan Tahun 2022

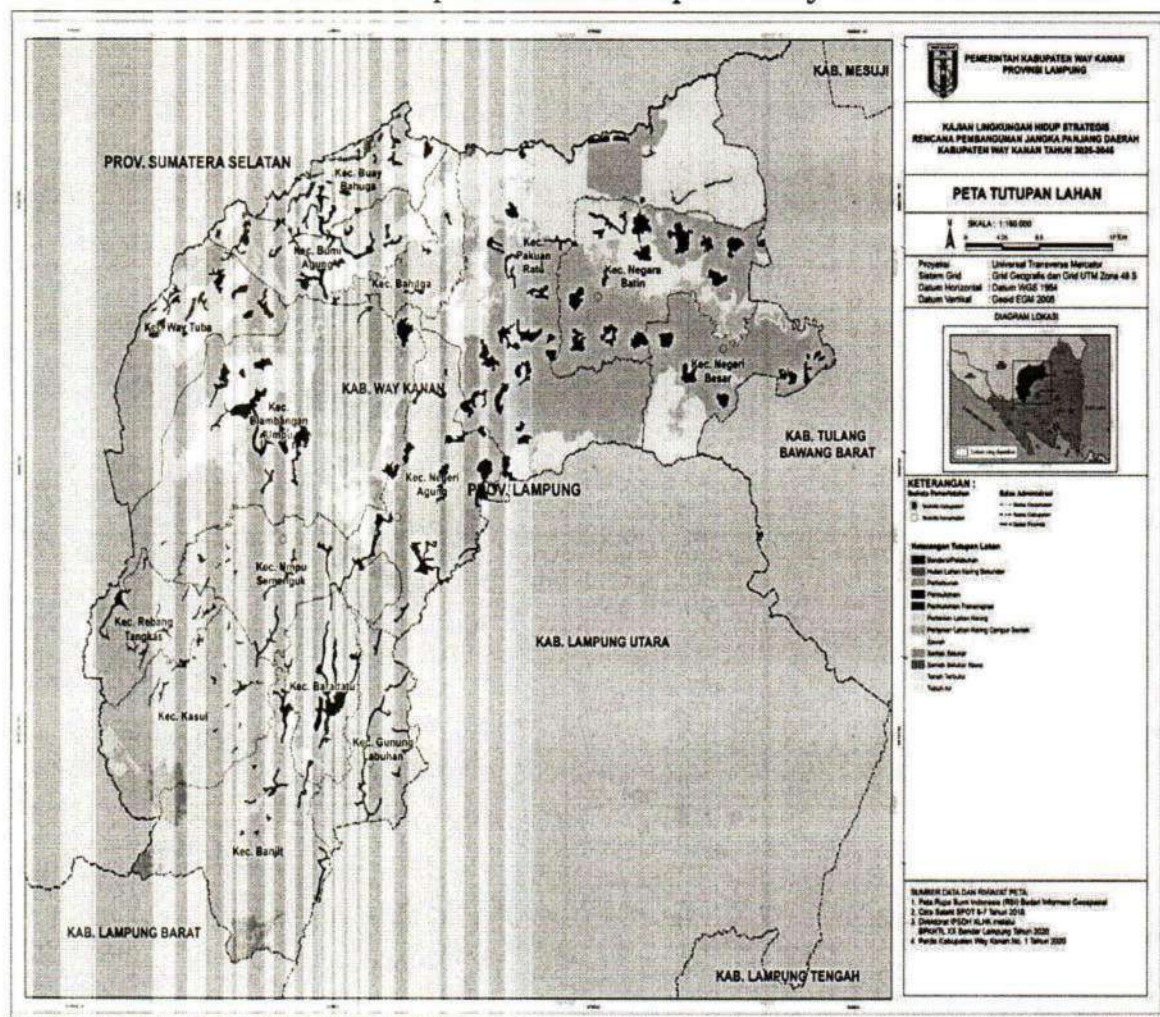
Berdasarkan perhitungan yang dilakukan 4 tahun terakhir, diketahui bahwa nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kabupaten Way Kanan statis pada tahun 2019 dan 2020 yaitu sebesar 56,37. Kemudian nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kabupaten Way Kanan mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 23,47 dan kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 29,43. Selain itu juga terdapat lahan kritis di Kabupaten Way Kanan sebagai berikut:

Tabel 2.26 Lahan Kritis Di Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

No.	Lahan Kritis di Kabupaten Way Kanan	Luas (Ha)
1	Tidak Kritis	132.183,71
2	Potensial Kritis	109.795,20
3	Agak Kritis	88.239,17
4	Kritis	20.008,59
5	Sangat Kritis	53,39

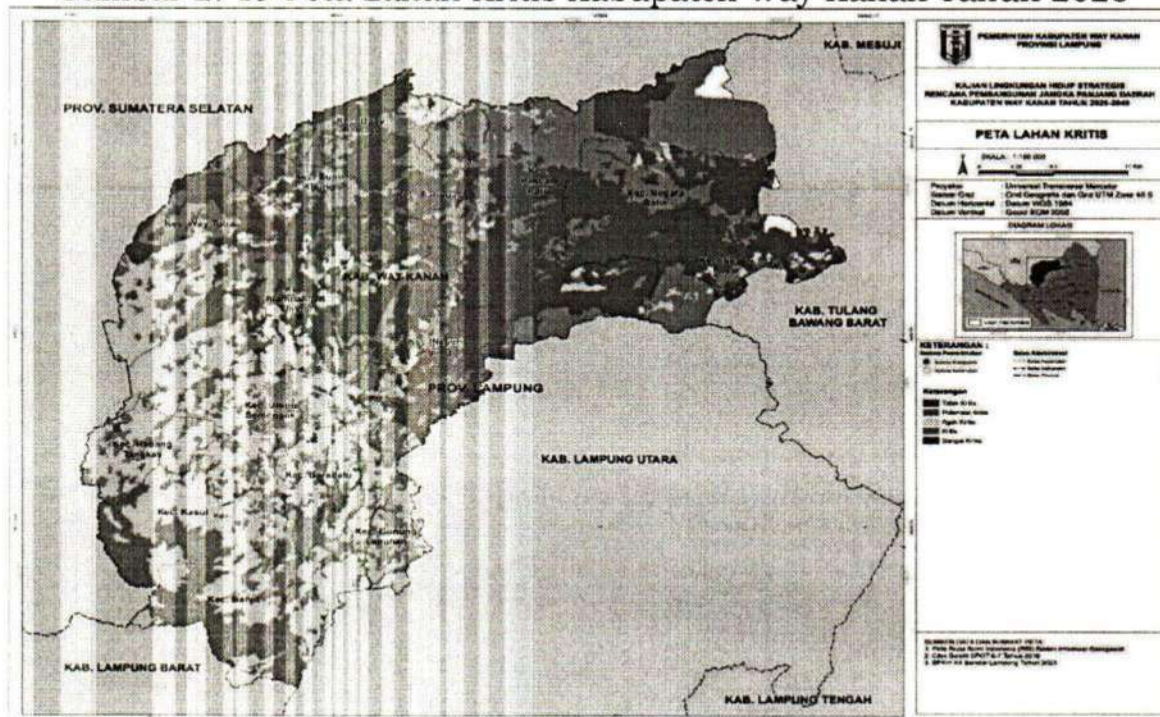
Sumber: BPKHTL Wilayah XX Bandar Lampung Tahun 2023

.Gambar 2. 18 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Way Kanan Tahun 2020



Sumber: Direktorat IPSDH KLHK melalui BPKHTL Wilayah XX, Bandar Lampung

Gambar 2. 19 Peta Lahan Kritis Kabupaten Way Kanan Tahun 2023



Sumber: BPKHTL Wilayah XX Bandar Lampung Tahun 2023

4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup (LH) dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA),

Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. (IKLH) memiliki sifat komparatif yang berarti nilai satu Kabupaten relatif terhadap Kabupaten lainnya. Dalam perspektif IKLH, angka indeks ini bukan semata-mata peringkat, tetapi adalah suatu dorongan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup.

Pemerintah Kabupaten Way Kanan menjadikan IKLH sebagai titik referensi untuk menuju angka ideal yaitu 100. Semakin jauh dengan angka 100 mengindikasikan harus semakin besar upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilakukan.

Data series IKLH Kabupaten Way Kanan selama kurun waktu 5 tahun terakhir fluktuatif. Pada tahun 2019 nilai IKLH adalah 63,84, fluktuatif nilai IKLH juga tergantung dengan metode pengukurannya. Untuk data IKLH tahun 2023, perkiraan nilainya adalah 67,20 (kriteria sedang). Secara lengkap nilai IKLH Kabupaten Way Kanan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.27 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan Tahun 2019-2023

No	Parameter	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	55,33	58,89	50,00	68,33	63,33
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	82,31	79,05	80,39	84,40	91,94
3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	56,37	56,37	23,43	29,43	28,10
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,84	63,93	56,49	66,32	67,20

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

Keterangan Kategori Nilai IKLH:

Sangat Baik: 90 - 100

Baik: 70 - 89

Sedang: 50 - 69

Buruk: 25 - 49

Sangat Buruk : < 25

2.1.1.2.7 Gas Rumah Kaca (GRK)

Emisi gas rumah kaca diperkirakan akan terus meningkat seiring adanya peningkatan jumlah penduduk, pertumbuhan aktivitas industri, penggunaan energi, penggunaan bahan bakar, pupuk pertanian, dan alih fungsi hutan. Kondisi emisi gas rumah kaca Provinsi Lampung dari tahun 2010 hingga tahun 2020 secara umum mengalami kenaikan yang signifikan, di sisi lain untuk Kabupaten Way Kanan masih belum memiliki dokumen Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK).

Berdasarkan perhitungan *Business as Usual* (BAU) dapat diketahui bahwa besar emisi pada Provinsi Lampung tanpa aksi mitigasi pada tahun 2030 dari aktivitas di Provinsi Lampung diproyeksikan sebesar 27.629.786,24 ton CO₂ eq. Penghasil emisi gas rumah kaca terbesar secara berurutan berasal dari sektor energi dan transportasi (93,06%), sektor pengelolaan limbah (6,39%), sektor pertanian (0,53%), sektor kehutanan dan lahan gambut (0,02%). Adapun hasil kompilasi dan perhitungan oleh Pokja RAD GRK Provinsi Lampung, estimasi penurunan emisi GRK pada tahun 2030 adalah sebesar 8,40% dari BAU baseline tahun 2030, sehingga dengan estimasi penurunan emisi GRK Provinsi Lampung yang menurun sebesar 8,40% pada tahun 2030, Kabupaten Way Kanan melakukan beberapa upaya-upaya berikut untuk mendukung penurunan emisi GRK.

1. Menyusun dokumen Rencana Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK).
2. Pemanfaatan energi baru terbarukan.
3. Kebijakan pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor penggunaan lahan dan perubahan tata guna lahan kehutanan.
4. Perbaiki sistem pengelolaan limbah rumah tangga dan industri.

Meningkatkan teknologi pengelolaan limbah dengan mengkonversi TPA *controlled landfill* menjadi *sanitary landfill* dan menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, and Recycle*).

2.1.1.2.8 Potensi Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati merupakan istilah yang digunakan untuk keanekaragaman sumber daya alam. Potensi Keanekaragaman hayati Kabupaten Way Kanan dapat dilihat dari Kekayaan Flora dan Fauna yang berada pada Kawasan Hutan di Kabupaten Way Kanan. Berdasarkan SK.6618/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Lampung tahun 2020, Kabupaten Way Kanan Kawasan hutan dengan total luas 79.594,20 Ha yang terbagi dalam 4 fungsi yaitu (1) Kawasan Hutan Lindung, (2) Kawasan Hutan Produksi Tetap, (3) Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan (4) Suaka Margasastwa. Untuk lebih jelasnya luas Kawasan Hutan di Kabupaten Way Kanan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.28 Luas Kawasan Hutan Kabupaten Way Kanan

Fungsi Kawasan Hutan	Luas (Ha)	Uraian
Hutan Lindung	22.580,46	Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
Hutan Produksi Tetap	53.793,33	Kawasan Hutan dengan faktor - faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing - masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan, suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
Hutan Produksi Terbatas	2,56	Kawasan Hutan dengan faktor - faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing - masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
Suaka Margasatwa	3.217,85	Kawasan suaka alam yang mempunyai kekhasan /keunikan jenis satwa liar dan/atau keanekaragaman satwa liar yang untuk kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya
Total	79.594,20	

Sumber: SK.6618/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa fungsi kawasan hutan di Kabupaten Way Kanan didominasi oleh fungsi kawasan hutan produksi dengan luas 53.793,33 Ha. Kemudian terdapat juga Suaka Margasatwa di Kabupaten Way Kanan dengan luas 3.217,85 Ha. Kemudian berdasarkan data yang dihimpun bahwa terdapat kekayaan flora dan fauna yang tersebar di beberapa kawasan hutan di Kabupaten Way Kanan yang terpelihara dengan baik, berikut merupakan data kekayaan flora dan fauna di Kabupaten Way Kanan yang dikelola oleh KPH Muara Dua dan KPH Bukit Punggur.

Tabel 2.29 Luas Kawasan Hutan Dengan Fungsi Lindung

No	Kawasan Hutan	Luas (Ha)
1.	HL Bukit Punggur Reg 24	21.176,30
2.	HP S. Muara Dua REG 44	18.972,97
3.	HP Way Hanakau REG 46	12.319,87
Grand Total		52.469,14

Sumber: BPKHTL Wilayah XX Bandar Lampung Tahun 2022

Tabel diatas merupakan lokasi dimana terdapat potensi keanekaragaman hayati flora dan fauna. Kawasan hutan dengan luas terbesar yang didalamnya terdapat potensi keanekaragaman hayati flora dan fauna adalah HL Bukit Punggur Register 24, kemudian di ikuti oleh HP Sungai Muara Dua Register 44 dan HP Way Hanakau Register 46.

Tabel 2.30 Data Flora Di Register 46 Way Hanakau Dan Register 44 Sungai Muara Dua

No	Flora	Nama Latin
1	Karet	<i>Hevea brasiliensis</i>
2	Mahoni	<i>Swietenia mahagoni</i>
3	Meranti	<i>Shorea sp</i>
4	Kayu Bawang	<i>Azadirachta excels</i>
5	Akasia	<i>Acacia mangium</i>
6	Sengon	<i>Albizia sengon</i>
7	Gelam	<i>Melaleuca leucadendron</i>
8	Kayu Putih	<i>Melaleuca leucadendra</i>
9	Tembesu	<i>Fragarea fragrans</i>
10	Gaharu	<i>Aquilaria malaccensis</i>
11	Eukaliptus	<i>Eucalyptus sp</i>

Sumber: KPH Muara Dua Tahun 2022

Tabel 2.31 Data Fauna Di Register 46 Way Hanakau Dan Register 44 Sungai Muara Dua

No	Fauna	Nama Latin
1	Burung cendet	<i>Lanius schach</i>
2	Burung ciblek	<i>Prinia familiaris</i>
3	Burung kutilang	<i>Pycnobotus aurigaster</i>
4	Burung tekukur	<i>Spilopelia chinensis</i>
5	Burung perenjok	<i>Prinia familiaris</i>
6	Burung raja udang	<i>Alcedines</i>

Sumber: KPH Muara Dua Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dalam register 44 dan 46 terdapat fauna meliputi burung cendet, burung ciblek, burung kutilang, burung tekukur, burung perenjok dan burung raja hutan. Kelestarian terhadap fauna ini perlu dijaga dalam keseimbangan ekosistem.

Tabel 2.32 Data Flora Di Register 24 Bukit Punggur

No	Flora	Nama Latin
1	Cemara Sumatera	<i>Texsus sumatrana</i>
2	Kamenyan Toba	<i>Styrax sumatrana</i>
3	Pohon Ara	<i>Ficus racemesa</i>
4	Beringin Hutan	<i>Ficus benjamina</i>
5	Rasamala	<i>Altingi excelsa</i>
6	Pasang	<i>Auercus sundaica</i>
7	Kenanga	<i>Cananga odorata</i>
8	Kayu Manis	<i>Cinnamomum zeylanicum</i>
9	Matoa	<i>Pometia pinnata</i>
10	Pulasan/Rambutan Hutan	<i>Nephelium mutabile</i>
11	Terentang	<i>Camptosperma</i>
12	Suren	<i>Toona sureni</i>
13	Mahang	<i>macaranga</i>
14	Manggis hutan	<i>Garnicia mangostana linn</i>
15	Merawan	<i>Hopea mengarawan</i>
16	Kayu putih/Gelam	<i>Melaleuca leucadendra</i>
17	Balam merah	<i>Paladium burchii</i>
18	Kentawang	<i>Paladium gutta</i>
19	Anggrek macan	<i>Grammatophyllum speciosum</i>
20	Anggrek bulan	<i>Phalaenopsis amabilis</i>
21	Anggrek larat	<i>D bigibbum</i>
22	Anggrek tanduk kerbau	<i>D schomburgkia tibicinis</i>
23	Anggrek merpati	<i>D crumenatum</i>
24	Anggrek wangi	<i>D heterocarpum</i>
25	Bunga bangkai	<i>Amarphopalus titanium</i>
26	Bunga rafflesia	<i>Nephantes sp</i>
27	Kantong semar	<i>Nephantes sp</i>
28	Kantong semar trambanan	<i>Nephantes sp</i>
29	Kantong semar kukusan	<i>Nephantes sp</i>
30	Kantong semar bibir merah	<i>Nephantes sp</i>
31	Kantong semar malai	<i>Nephantes sp</i>
32	Bunga kenanga hutan	<i>Cananga odorota</i>

Sumber: KPH Muara Dua Tahun 2023

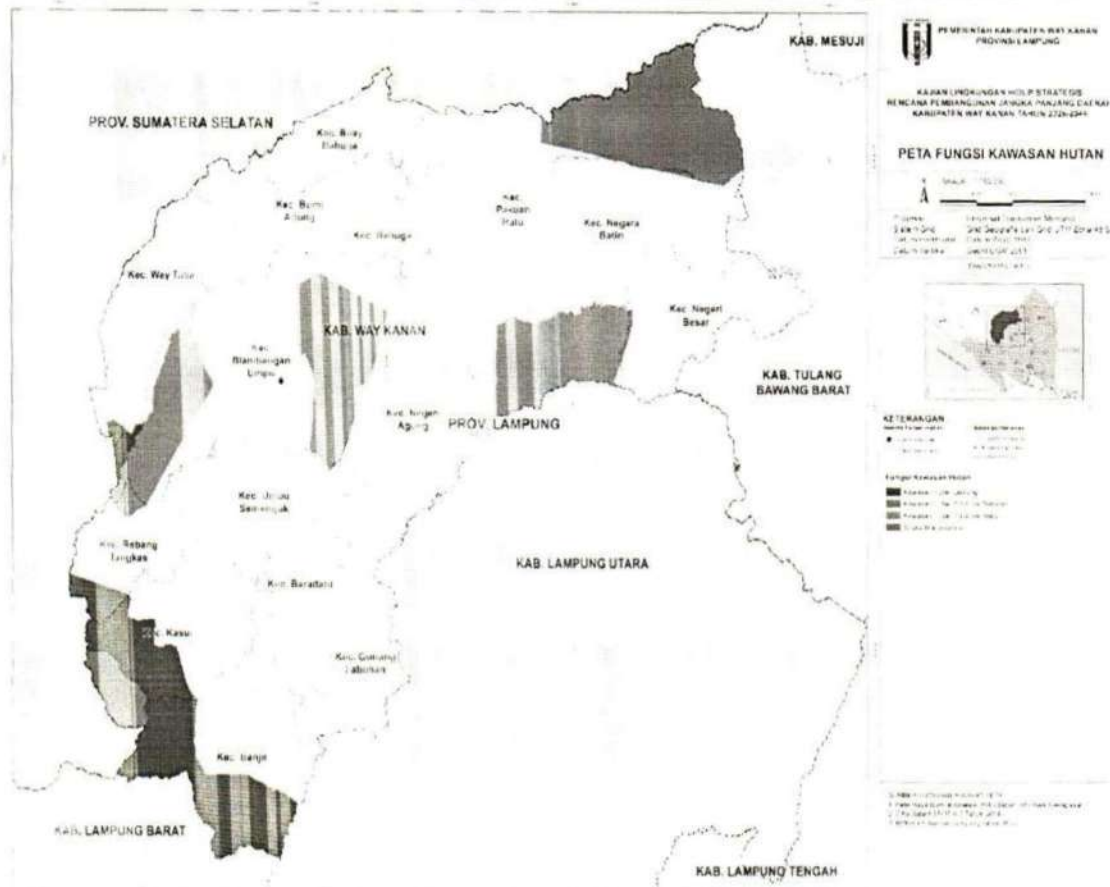
Di Register 24 Bukit Punggur terdapat setidaknya 24 flora, beberapa diantaranya: Beringin hutan, kayu manis, suren, kayu putih, kantong semar, anggrek macan, anggrek bulan, anggrek larat, anggrek tanduk kerbau, buang rafflesia bunga kenanga hutan dal lain sebagainya.

Tabel 2.32 Data Fauna Di Register 24 Bukit Punggur

No	Fauna	Nama Latin
1	Burung kuau kerdil	<i>Polyplectron schleiermaheri</i>
2	Burung poksai jambul	<i>Garrulax leucolophus</i>
3	Elang brontok	<i>Nisaetus cirrhatus</i>
4	Elang hutan	
5	Cucak hijau	<i>Chloropsis sonnerati</i>
6	Rangkong Gading	<i>Rangkong gading</i>
7	Rangkong badak	<i>Buceros rhinoceros</i>
8	Cililin	<i>Playtoplophus galericulatus</i>
9	Tali pocong	<i>Terpsiphone paradisis</i>
10	Puyuh ganggang	<i>Arborophila jaanica</i>
11	Burung Kopi-kopi	<i>Pomatorhinus montanus</i>
12	Kinal	
13	Srigunting	<i>Dicrurus sp</i>
14	Cucak Ranting	<i>Chloropsis cochinchinensis</i>
15	Srindit	<i>loriculus</i>
16	Sikatan	
17	Ciung	<i>Myophonus caeruleus</i>
18	Burung kacamata	<i>Zosterops sp</i>
19	Tukur bukit	<i>Megalaima oorti</i>
20	Luntur kepala merah	<i>oortiharpactes erythrocephalus</i>
21	Sempidan	<i>Lophura sp</i>
22	Landak	<i>erinaceinae</i>
23	Harimau sumatera	<i>Panthera tigris sumatrae</i>
24	Orangutan	<i>Pongo sp</i>
25	Tapir	<i>Tapirus indicus</i>
26	Kambing Hutan Sumatera	<i>Capricornis sumatraenis</i>
27	Kelinci sumatera	<i>Nesolagus nestcheri</i>
28	Beruang madu	<i>Helarctos malayanus</i>
29	Beruk	<i>Macaca nemestrina</i>
30	Jelarang	<i>Ratufa bicolor</i>
31	Kera hitam	<i>Macaca nigra</i>
32	Kijang	<i>Muntiacus sp</i>
33	Kucing Hitam	<i>Felis bengalensis</i>
34	Monyet ekor panjang	<i>Macaca fascicularis</i>
35	Musang lawak	<i>Paradoxurus hermaprodhitus</i>
36	Siamang	<i>Symphalangusnsyndactylus</i>

Sumber: KPH Bukit Punggur Tahun 2022

Gambar 2.20 Peta Fungsi Kawasan Hutan Kabupaten Way Kanan



Sumber:

SK.6618/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021

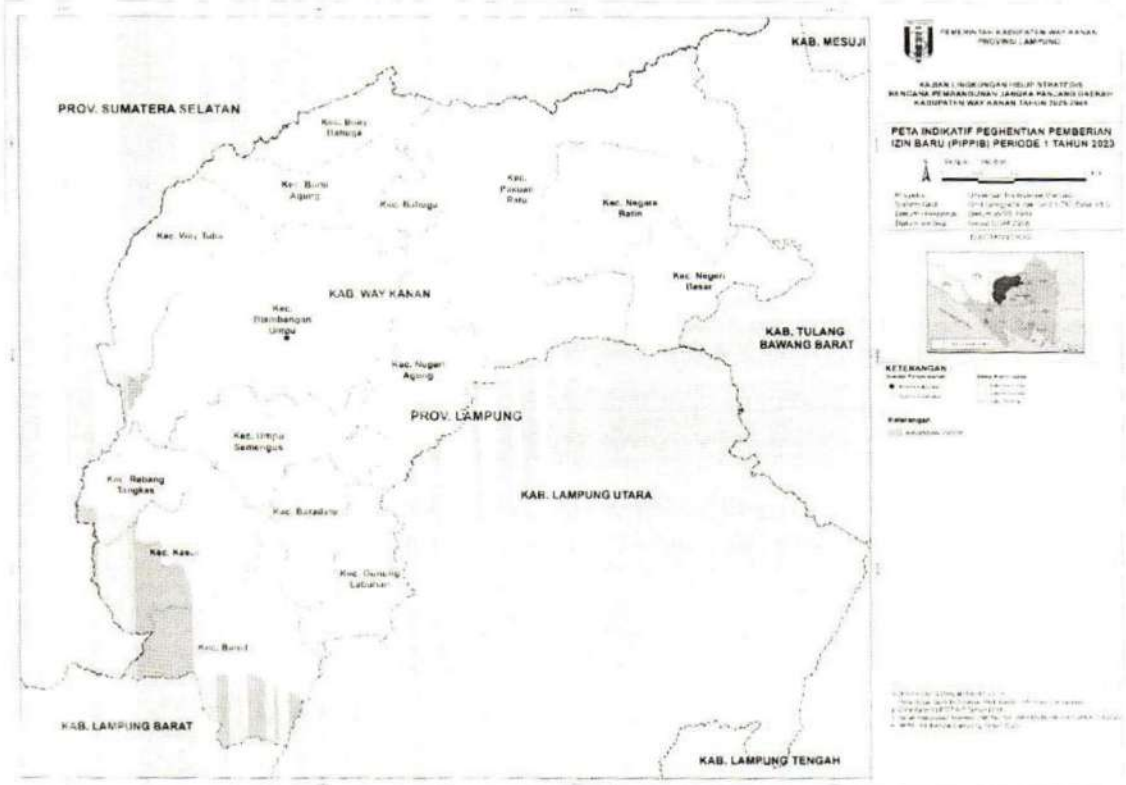
2.1.1.2.9 Kawasan Penghentian Pemberian Izin Baru (PPIB)

Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.3554/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/3/2023 tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru Pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2023 telah menetapkan PIPPIB Tahun 2023 Periode I dengan skala 1: 250.000 yang meliputi:

- Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Produksi;
- Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Lindung;
- Perizinan Berusaha di Areal Penggunaan Lain;
- Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan; dan/atau
- Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dalam rangka Perubahan
- Peruntukan Kawasan Hutan.

Luas Peta Indikatif Pemberhentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru Pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2023 Periode I di Kabupaten Way Kanan adalah seluas 25.775,89 Ha.

Gambar 2. 21 Peta Indikatif Peghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) Periode 1 Tahun 2023



Sumber:

BPKHTL XX Wilayah Bandar Lampung Tahun 2023

2.1.1.2.10 Kawasan Pertambangan

Kawasan Pertambangan di Kabupaten Way Kanan saat ini belum diketahui secara pasti mengenai potensinya. Namun berdasarkan data Dinas ESDM Provinsi Lampung tahun 2021, dan data revisi Rencana Tata Ruang Kabupaten Way Kanan Tahun 2023-2043 terdapat beberapa perusahaan yang telah memiliki izin usaha operasi (IUP) pertambangan. Berdasarkan komoditasnya kawasan pertambangan yang telah memiliki izin usaha operasi (IUP) adalah sebagai berikut:

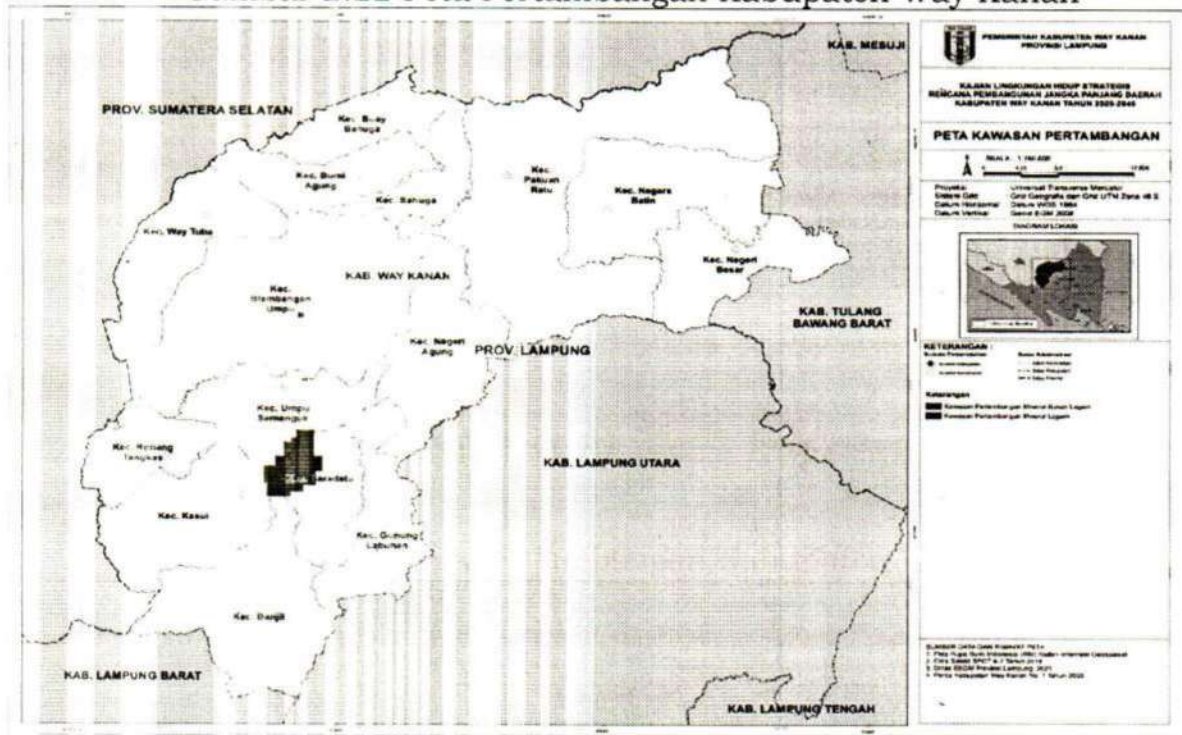
Tabel 2.33 Komoditas Pertambangan Di Kabupaten Way Kanan

No	Komoditas	Luas/Ha
1	Andesit	53,56
2	Emas	3.598,65
3	Mangan	25,26
Total		3.677,47

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Lampung Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat ada 3 komoditas yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP) yang ada di Kabupaten Way Kanan adalah Andesit, Emas dan juga Mangan dengan luasan masing masing Andesit memiliki luas 53,56 Ha, lalu Emas dengan luasan 3.598,65 Ha dan juga Mangan 25,26 Ha dengan total luasan 3.677,47 Ha dan komoditas yang memiliki luasan terbesar adalah Emas dengan total luasan 3.598,65 Ha.

Gambar 2.22 Peta Pertambangan Kabupaten Way Kanan



Sumber: Dinas ESDM Provinsi Lampung Tahun 2022

2.1.1.2.11 Tingkat Kerentanan dan Adaptasi Perubahan Iklim

Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca yang terjadi secara alami atau disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pemanasan global. Perubahan iklim dapat menyebabkan dampak terhadap lingkungan seperti banjir, kekeringan, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Tingkat kerentanan dan adaptasi perubahan iklim adalah konsep yang penting dalam memahami bagaimana masyarakat dan ekosistem dapat berinteraksi dengan perubahan iklim. Tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim diukur sebagai rasio antara tingkat sensitivitas dan kapasitas adaptasi, semakin tinggi tingkat sensitivitas, semakin tinggi tingkat kerentanan. Adaptasi adalah upaya untuk mengurangi dampak negatif perubahan iklim dan meningkatkan ketahanan terhadap perubahan tersebut. Kemampuan adaptasi dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, infrastruktur. Berdasarkan data Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tingkat kerentanan dan adaptasi perubahan iklim di Kabupaten Way Kanan, sebagai berikut:

Tabel 2.33 Tingkat Kerentanan dan Adaptasi Perubahan Iklim di Kabupaten Way Kanan

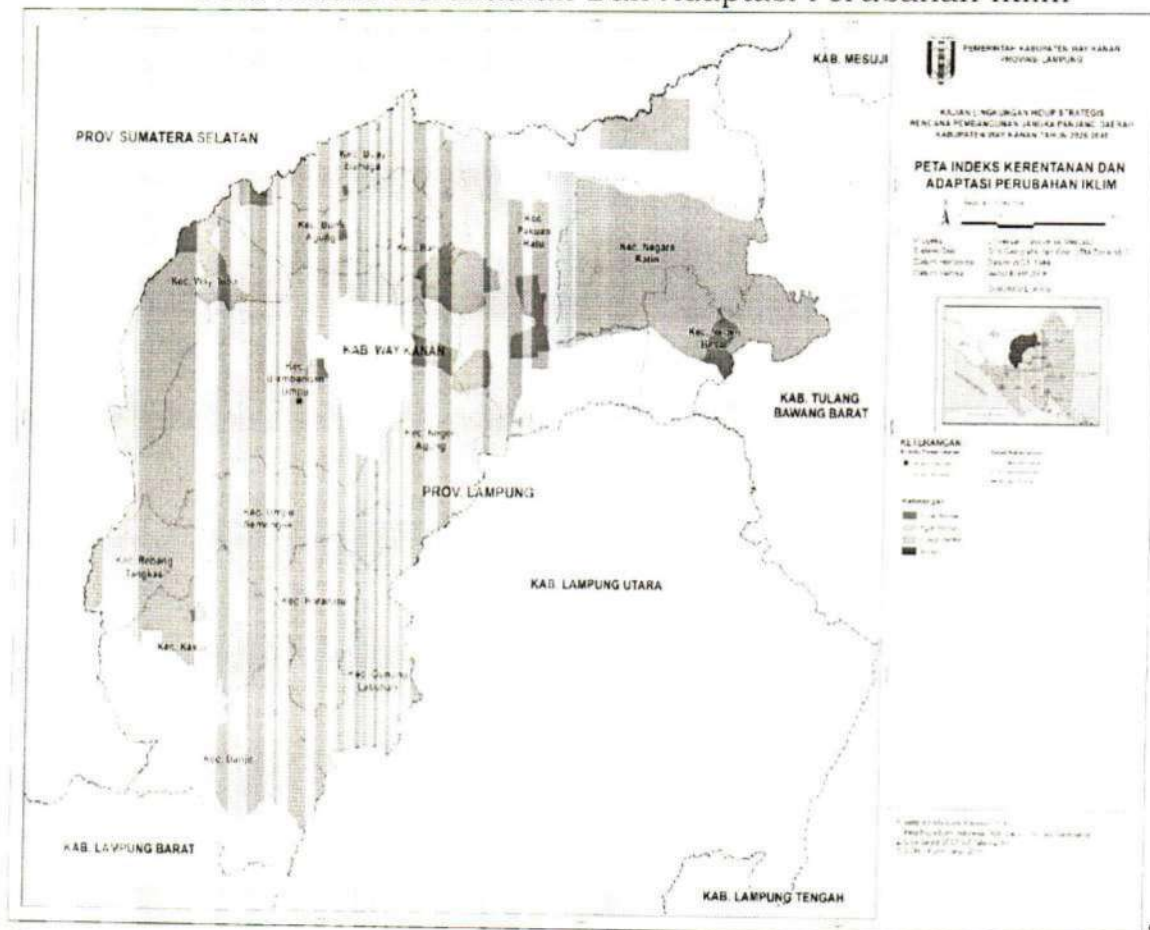
No	Kelas Indeks	Lokasi	Luas (Ha)
1	Tidak Rentan	<ul style="list-style-type: none">Kec. BahugaKec. Blambangan UmpuKec. Buay BahugaKec. Bumi AgungKec. KasuiKec. Negara BatinKec. Negeri AgungKec. Negeri BesarKec. Pakuan RatuKec. Way Tuba	17.712,06

No	Kelas Indeks	Lokasi	Luas (Ha)
2	Agak Rentan	<ul style="list-style-type: none"> • Kec. Banjit • Kec. Baradatu • Kec. Blambangan Umpu • Kec. Gunung Labuhan • Kec. Negara Batin • Kec. Negeri Besar • Kec. Pakuan Ratu • Kec. Way Tuba 	12.885,35
3	Cukup Rentan	<ul style="list-style-type: none"> • Kec. Bahuga • Kec. Banjit • Kec. Baradatu • Kec. Blambangan Umpu • Kec. Buay Bahuga • Kec. Bumi Agung • Kec. Gunung Labuhan • Kec. Kasui • Kec. Negara Batin • Kec. Negeri Agung • Kec. Negeri Besar • Kec. Pakuan Ratu • Kec. Rebang Tangkas • Kec. Umpu Semenguk • Kec. Way Tuba 	250.800,4
4	Rentan	<ul style="list-style-type: none"> • Kec. Banjit 	0,026

Sumber. Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan Kementerian KLHK Tahun 2023

Berdasarkan data diatas, dalam lingkup wilayah Kabupaten Way Kanan terdapat indeks kerentanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim, didominasi oleh kelas cukup rentan dengan luasan 250.800,4 Ha. Untuk kelas rentan dengan luasan 0,26 Ha, kemudian kelas agak rentan dengan luasan 12.885,35 Ha dan kelas tidak rentan dengan luasan 17.712,06 Ha.

Peta Indeks Kerentanan Dan Adaptasi Perubahan Iklim



Sumber:

Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan Kementerian LHK Tahun 2023

2.1.1.2.12 Indeks Risiko Bencana

Kabupaten Way Kanan merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Lampung yang tidak lepas dari bahaya terjadinya bencana. Dalam catatan IRBI Kabupaten Way Kanan memiliki skor indeks risiko sebesar 108,08 termasuk dalam kategori kelas sedang. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor diantaranya, kondisi geografis Kabupaten Way Kanan sebagian berbukit, lembah dan dilewati sungai menjadikan beberapa kawasan di kabupaten ini masuk dalam kawasan rawan bencana seperti gempa bumi, banjir, kebakaran hutan, longsor dan kekeringan. Secara topografi, Kabupaten Way Kanan dapat dibagi menjadi 2 (dua) unit topografis, yaitu: daerah topografis berbukit sampai bergunung dan daerah River Basin. Sebagian besar wilayahnya adalah daerah yang dialiri sungai. Saat musim penghujan tiba, dengan intensitas curah hujan yang tinggi, daerah ini mengalami laju aliran limpasan air dengan cepat, sehingga dapat menyebabkan terjadinya banjir. Menurut BNPB tercatat sejak akhir tahun 2010 banjir di Kabupaten Way Kanan mengalami penurunan luasan terdampak dari tahun 1994 seluas 1500 Ha menjadi 1000 Ha. Namun, pada tahun 2016 terjadi ledakan luasan banjir di sekitar DAS Way Umpu dan Way Besai yaitu lebih dari 3500 Ha luasan daerah terdampak.

Selain bahaya banjir, secara geologis Daerah Kabupaten Way Kanan juga menghadapi bahaya gerakan tanah, atau yang pada umumnya dikenal sebagai tanah longsor yang terjadi pada gerakan tanah jenis aliran bahan rombakan atau banjir bandang, hal ini diperburuk lagi oleh curah hujan yang tinggi. Terkait dengan bahaya tingkat kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Way Kanan yang merupakan bahaya serius bagi lingkungan dan masyarakat setempat.

Kebakaran Hutan dan Lahan yang sering terjadi sebagian besar diakibatkan oleh kegiatan manusia dalam rangka membuka lahan, baik untuk usaha pertanian, kehutanan maupun perkebunan dan ditunjang oleh adanya

fenomena alam El Nino Southern Oscillation (ENSO) yang menimbulkan kekeringan, selain mengancam produksi tanaman pangan juga kian mempermiskin penduduk yang mata pencahariannya tergantung pada pertanian, perkebunan dan peternakan.

Sedangkan bahaya cuaca ekstrim seperti angin puting beliung juga hampir setiap tahun terjadi di Daerah Kabupaten Way Kanan. Bahaya yang paling sering terjadi adalah angin puting beliung yang umumnya terjadi pada musim pancaroba atau peralihan dari musim hujan ke musim kemarau maupun dari musim kemarau ke musim hujan. Dan tingginya kecepatan angin puting beliung dapat menimbulkan kerusakan dalam bentuk robohnya atap bangunan ringan, baliho, tiang listrik, pohon-pohon ataupun benda-benda lainnya.

Tabel 2.33. Pemetaan Kecamatan, Kampung Rawan Banjir di Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

I. Kecamatan Negara Batin <ul style="list-style-type: none">Negara MulyaKertajayaNegara Batin	II. Negeri Besar <ul style="list-style-type: none">Negri BesarTiuh BaruKaliawiKiling-kilingTanjung Mas	III. Kecamatan Pakuan Ratu <ul style="list-style-type: none">Pakuan RatuGunung WarasTanjung RatuGunung CahyaRumbihNegara RatuNegara Sakti
IV. Kecamatan Bahuga <ul style="list-style-type: none">Dewa AgungBumi AgungTulang BawangMesir UdikMesir ilir	V. Kecamatan Bumi Agung <ul style="list-style-type: none">KaranganTanjung Dalom	III. Kecamatan Negeri Agung <ul style="list-style-type: none">Negeri AgungPulau BatuPenengahanSungsangKotabaruKotabumiGedung Meneng

Sumber: Data diolah, BPBD Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

Tabel 2.34 Indeks Kapasitas Daerah Tahun 2020-2023

Kabupaten	Nilai Indeks				Kelas Indeks			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Way Kanan	-	0,20	0,45	0,53	-	Rendah	Sedang	Sedang

Sumber : BPBD Kabupaten Way Kanan, 2024

Tabel tersebut menunjukkan bahwa perolehan nilai indeks kapasitas daerah sebesar 0,53 dengan kelas indeks sedang. Hal ini berarti bahwa pembangunan atau kemajuan daerah semakin baik. Kemudian untuk indeks resiko bencana sebagaimana terlihat pada tabel 2.38.

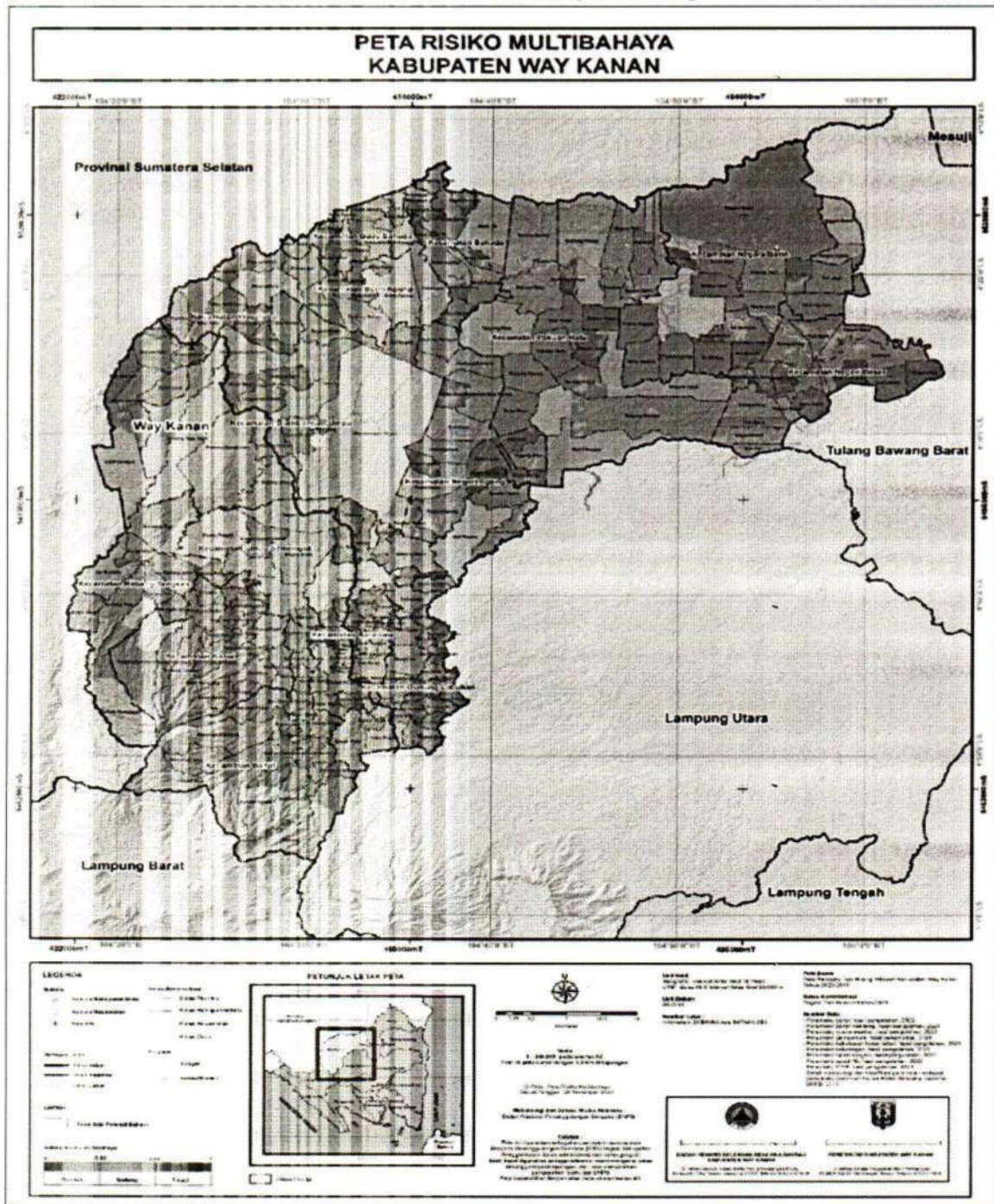
Tabel 2.35 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Way Kanan Tahun 2020-2023

Kabupaten	Indeks Resiko Bencana				Kelas Indeks			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Way Kanan	-	131,19	120,07	108,00	-	Sedang	Sedang	Sedang

Sumber : BPDB Kabupaten Way Kanan Tahun 2024

Indeks Resiko Bencana di Kabupaten Way Kanan selama 3 Tahun terakhir menunjukkan penurunan dari 131,19 poin menjadi 108 poin dengan kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja indeks resiko bencana semakin baik.

Gambar 2.24 Peta Risiko Multibahaya Kabupaten Way Kanan



Sumber : Dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Way Kanan 2022

2.1.1.2.13 Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro; tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan. Berdasarkan hasil

perhitungan Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2023, Kabupaten Way Kanan Mendapatkan Skor 79,31 dan berada pada peringkat 171 dari 416 Kabupaten.

Tabel 2.36 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU) di Kabupaten Way Kanan Tahun 2019-2023

Tahun	Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (%)
2019	10,62
2020	10,19
2021	10,33
2022	12,65
2023	7,11

Sumber: RPJPD Provinsi Lampung, data diolah 2023

2.1.2 Demografi

2.1.2.1 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten Way Kanan pada tahun 2023 mencapai 489.773 jiwa dengan Kecamatan Banjit merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi sebesar 47.919 Jiwa, kecamatan dengan jumlah penduduk terendah yaitu berada pada Kecamatan Bahuga dengan jumlah penduduk yaitu 12.311 Jiwa.

Untuk jumlah penduduk menurut jenis kelamin perempuan berjumlah 239.125 jiwa, dengan angka tertinggi berada pada Kecamatan Banjit dengan jumlah 23.323 Jiwa, sedangkan pada jumlah penduduk perempuan terendah berada pada Kecamatan Bahuga dengan jumlah sebesar 6.052 Jiwa. Berdasarkan kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Way Kanan berada pada Kecamatan Baradatu dengan kepadatan penduduk sebesar 298,66 Jiwa/Km², pada kepadatan penduduk terendah berada pada Kecamatan Negeri Besar dengan kepadatan penduduk sebesar 59,54 Jiwa/Km². Untuk rincian jumlah penduduk Kabupaten Way Kanan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.37 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Berdasarkan Registrasi Penduduk di Kabupaten Way Kanan
Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
		LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML
1	Banjit	23.638	22.312	45.950	24.266	22.785	47.051	24.374	22.946	47.320	24.371	23.062	47.433	24.596	23.323	47.919
2	Baradatu	19.763	19.299	39.062	22.664	21.890	44.554	22.779	21.945	44.724	22.817	22.055	44.872	23.068	22.338	45.406
3	Gunung Labuhan	15.131	14.777	29.908	16.000	15.599	31.599	15.893	15.444	33.731	15.891	15.441	31.332	16.063	15.623	31.686
4	Kasui	16.039	15.622	31.661	16.869	15.906	32.775	17.028	16.086	33.114	17.099	16.239	33.338	17.262	16.332	33.594
5	Rebang Tangkas	11.518	10.634	22.152	12.882	12.040	24.922	12.472	11.641	24.113	12.330	11.562	23.892	12.409	11.691	24.100
6	Blambangan Umpu	34.143	32.518	66.661	36.161	34.218	70.379	19.061	17.953	37.014	19.177	18.170	37.347	19.549	18.527	38.076
7	Negeri Agung	19.536	18.496	38.032	19.989	18.995	38.984	19.665	18.640	38.305	19.522	18.548	38.070	19.665	18.618	38.283
8	Way Tuba	12.132	11.313	23.445	13.168	12.521	25.689	13.314	12.641	25.955	13.540	12.942	26.482	13.733	13.159	26.892
9	Bahuga	4.934	4.811	9.745	5.992	5.756	11.748	6.055	5.828	11.883	6.182	5.987	12.169	6.259	6.052	12.311
10	Buay Bahuga	9.952	9.361	19.313	10.994	10.496	21.490	11.049	10.608	21.657	11.157	10.700	21.857	11.206	10.823	22.029
11	Bumi Agung	13.348	12.580	25.928	14.638	13.814	28.452	14.764	14.001	28.765	14.937	14.215	29.152	15.008	14.349	29.357
12	Pakuan Ratu	21.342	19.278	40.620	22.656	21.388	44.044	22.903	21.712	44.615	23.294	22.143	45.437	23.645	22.367	46.012
13	Negara Batin	20.751	18.904	39.655	18.587	17.668	36.255	18.892	17.964	36.856	19.335	18.485	37.820	19.743	18.877	38.620
14	Negeri Besar	9.267	8.710	17.977	11.171	10.589	21.760	10.881	10.319	21.200	10.920	10.323	21.243	11.061	10.516	21.577
15	Umpu Semenguk							16.983	16.201	33.184	17.135	16.305	33.440	17.381	16.530	33.911
Jumlah		231.494	218.615	450.109	246.037	233.665	479.702	246.113	233.929	480.042	247.707	236.177	483.884	250.648	239.125	489.773

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2021 Per 31 Desember 2021 , Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan
Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2024

Tabel 2.38 Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk Per Km Persegi (km²) Rasio Jenis Kelamin Penduduk Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km persegi (km ²)	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Banjit	47,919.00	1.02	9.78	145	105.5
Baradatu	45,406.00	1.19	9.27	299	103.3
Gunung Labuhan	31,686.00	1.13	6.47	275	102.8
Kasui	33,594.00	0.77	6.86	224	105.7
Rebang Tangkas	24,100.00	0.87	4.92	116	106.1
Blambangan Umpu	38,076.00	1.95	7.77	107	105.5
Way Tuba	26,892.00	1.55	5.49	130	104.4
Negeri Agung	38,283.00	0.56	7.82	68	105.6
Umpu Semenguk	33,911.00	1.41	6.92	101	105.2
Bahuga	12,311.00	1.17	2.51	89	103.4
Buay Bahuga	22,029.00	0.79	4.5	216	103.5
Bumi Agung	29,357.00	0.7	5.99	223	104.6
Pakuan Ratu	46,012.00	1.27	9.39	79	105.7
Negara Batin	38,620.00	2.12	7.89	111	104.6
Negeri Besar	21,577.00	1.57	4.41	60	105.2
Way Kanan	489,773.00	1.22	100	125	104.8

Sumber: Way kanan Dalam Angka Tahun 2024

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Way Kanan untuk pertama kalinya sejak tahun 2011 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,16 persen pada tahun 2020 setelah beberapa tahun sebelumnya mampu mencatatkan pertumbuhan positif diatas 5 persen, ini sebagai dampak dari adanya pandemi, Meskipun terkontraksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Way Kanan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung, Sumatera dan Nasional yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 1,67 persen, 1,19 persen dan 2,07 persen. Setelah itu pada tahun 2021 kembali menunjukkan tren positif yaitu tumbuh sebesar 2,90 persen kemudian pada tahun 2022 tumbuh sebesar 4,41 persen dan pada tahun 2023 tumbuh sebesar 4,63 persen. Sejak tahun 2020 sampai tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Way Kanan sudah lebih tinggi dari Provinsi Lampung.

Tabel 2.39 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional Tahun 2019-2023

WILAYAH	PERTUMBUHAN EKONOMI				
	2019	2020	2021	2022	2023
Lampung Timur	3,81	-2,29	0,24	2,02	3,51
Pesisir Barat	5,37	-1,17	2,07	2,88	3,42
Lampung Utara	5,33	-1,45	2,82	3,16	4,22
Mesuji	5,26	-1,35	2,84	3,49	4,06
Tulang Bawang	5,41	-1,36	2,88	3,85	4,27
Lampung Barat	5,19	-1,14	2,58	4,09	4,69
Tanggamus	5,02	-1,77	2,30	4,16	4,70
Provinsi Lampung	5,26	-1,67	2,79	4,28	4,55
Pringsewu	5,04	-1,21	2,91	4,37	4,78
Way Kanan	5,17	-1,16	2,90	4,41	4,63
Tulang Bawang Barat	5,36	-1,32	2,89	4,49	4,53
Metro	5,58	-1,79	2,91	4,51	4,86
Pesawaran	5,00	-1,26	2,08	4,55	4,49
Lampung Tengah	5,35	-1,02	2,88	4,65	4,70
Lampung Selatan	5,13	-1,73	2,68	4,81	4,82
Bandar Lampung	6,21	-1,85	3,07	4,93	4,99
Nasional	5,02	-2,07	3,70	5,31	5,11

Sumber: BPS Kabupaten Way Kanan, BPS Provinsi Lampung Tahun 2024

Untuk data pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se-Provinsi Lampung tahun 2023, menunjukkan bahwa selain Kabupaten Way Kanan terdapat 7 (tujuh) kabupaten/kota lain yang memiliki pertumbuhan ekonomi di atas provinsi, yaitu Kabupaten Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Pringsewu, Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro Timur. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Way Kanan pada Tahun 2023 berada pada urutan ke delapan di Provinsi Lampung.

Indikator ekonomi makro lainnya yang digunakan untuk memberikan gambaran kondisi perekonomian suatu daerah adalah nilai Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB). Besaran PDRB dapat digunakan sebagai indikator dalam menilai kinerja perekonomian suatu wilayah pada suatu periode tertentu, terutama yang dikaitkan dengan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui nilai produk yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi, besarnya laju pertumbuhan ekonomi dan struktur perekonomian pada satu periode di suatu daerah tertentu.

Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto diperoleh dari perhitungan PDB atas dasar harga konstan. Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Way Kanan terus mengalami peningkatan dari tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 9.102.879,7,- juta rupiah menjadi sebesar Rp 10.165.597,7 juta rupiah pada tahun 2022. Adapun Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Way Kanan Pada tahun 2018 PDRB ADHB Kabupaten Way Kanan adalah sebesar Rp. 13.055.240,5 Juta kemudian pada tahun 2022 terjadi peningkatan pendapatan yang mencapai sebesar Rp. 16.152.949,2 Juta dan pada tahun 2023 kembali terjadi peningkatan pendapatan yang mencapai 17.473.412,64 Juta. Jika dilihat dari kontribusi sektor lapangan usaha pembentuk PDRB ADHK, perekonomian Kabupaten Way Kanan di tahun 2018 sampai dengan 2023 masih didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 34,64 % dan sektor industri pengolahan sebesar 20,54 %. Sedangkan berdasarkan PDRB ADHB menurut sisi pengeluaran, di tahun 2022 nilainya mencapai Rp 16.152.949 juta. Untuk gambaran kondisi PDRB selengkapnya dapat terlihat sebagai berikut ini.

Tabel 2.40 PDRB Kabupaten Way Kanan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2019 – 2023

Lapangan Usaha	PDRB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)									
	Atas Dasar Harga Konstan 2010									
	2019	%	2020	%	2021	%	2022 *)	%	2023 **)	%
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.245 707,1	1,12	3.257 026,2	0,35	3.263.311,3	0,19	3.358.479,3	2,92	3.358.712,2	0,01
B. Pertambangan dan Penggalian	433.447,7	6,14	448.233,0	3,41	447 804,0	-0,10	473.497,8	5,74	512.890	8,32
C. Industri Pengolahan	2.151.853,2	9,03	1.986.556,9	-7,68	2.101.490,5	5,79	2.138.234,1	1,75	2.183.400	2,11
D. Pengadaan Listrik dan Gas	9.881,7	7,38	10.778,8	9,08	11 225,0	4,14	11.871,8	5,76	12.610	6,26
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.213,6	7,00	5.439,5	4,33	5 621,2	3,34	5.832,4	3,76	5.860	0,56
F. Konstruksi	846.010,2	5,61	825.743,1	-2,40	888.113,5	7,55	898.845,5	1,21	977.140	8,71
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	1.013.186,2	6,15	1.004.179,6	-0,89	1.030.045,9	2,58	1.153.233,6	11,96	1.308.200	13,44
H. Transportasi dan Pergudangan	273.238,6	8,91	261.189,8	-4,41	267.365,7	2,36	328.083,4	22,71	391.210	19,24
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan	79.190,6	8,33	76.041,5	-3,98	74.740,6	-1,71	79.257,5	6,04	89.780	13,28
J. Informasi dan Komunikasi	439.855,1	7,96	475.131,5	8,02	507.423,5	6,80	537.705,1	5,97	579.860	7,84
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	88.830,5	3,33	93.160,5	4,87	96.062,9	3,12	94.727,1	-1,39	98.970	4,48
L. Real Estate	242.311,4	6,73	238.722,6	-1,48	241.845,0	1,31	241.893,3	0,02	243.500	0,66
M, N. Jasa Perusahaan	4.881,3	3,97	4.811,5	-1,43	4.862,1	1,05	4.862,4	0,01	5.100	4,97
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	307.267,0	4,78	321.923,6	4,77	335.447,7	4,20	335.726,8	0,08	338.510	0,83
P. Jasa Pendidikan	281.817,8	8,75	293.992,4	4,32	298.085,2	1,39	327.565,9	9,89	338.900	3,46
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	96.018,3	7,81	106.734,0	11,16	111.405,8	4,38	110.106,8	-1,17	115.280	4,70
R,S,T,U. Jasa Lainnya	55.110,5	8,28	52.644,6	-4,47	51.650,2	-1,89	65.674,8	27,15	75.990	15,72
JUMLAH	9.573 820,9	5,17	9.462 309,2	-1,16	9.736.500,0	2,90	10.165.597,	4,41	10.635.970	4,63

Sumber: PDRB Kabupaten Way Kanan Tahun 2024

* Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

PDRB Kabupaten Way Kanan pada tahun 2019 yaitu sebesar 5,18 persen, nilai ini bila dibandingkan dengan tahun 2022 lebih besar yaitu 4,41 persen. Hal ini disebabkan adanya faktor covid-19 yang terjadi selama 3 tahun terakhir sehingga pertumbuhan Way Kanan mengalami perlambatan khususnya pada tahun 2020 yang mengalami penurunan yaitu -1,16. kemudian pada tahun 2023 perkembangan ekonomi dapat berada di 4,63 persen.

Tabel 2.41 PDRB Kabupaten Way Kanan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha	PDRB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)									
	Atas Dasar Harga Berlaku									
	2019	%	2020	%	2021	%	2022*)	%	2023**)	%
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.857.836,1	34,75	4.965.974,6	35,51	5.086.220	34,70	5.769.670,0	35,72	6.052.960	34,64
B. Pertambangan dan Penggalan	640.026,2	4,58	675.102,6	4,83	682.509,0	4,65	740.935,2	4,59	860.300	4,92
C. Industri Pengolahan	3.287.333,6	23,51	3.061.283,5	21,89	3.333.340	22,73	3.479.731,2	21,54	3.588.880	20,54
D. Pengadaan Listrik dan Gas	12.369,9	0,09	13.427,0	0,10	14.467,0	0,10	15.418,4	0,10	16.830	0,10
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.772,3	0,06	8.140,6	0,06	8.500,0	0,06	8.905,3	0,06	9.040	0,05
F. Konstruksi	1.172.850,9	8,39	1.142.815,5	8,17	1.256.034,0	8,57	1.310.749,9	8,11	1.462.700	8,37
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi	1.379.020,2	9,86	1.397.068,8	9,99	1.458.795,0	9,95	1.702.806,7	10,54	2.011.500	11,51
H. Transportasi dan Pergudangan	381.206,2	2,73	371.597,3	2,66	388.232,7	2,65	518.972,4	3,21	683.880	3,91
I. Penyediaan Akomodasi dan	132.354,4	0,95	127.866,2	0,91	126.545,7	0,86	136.188,5	0,84	159.020	0,91
J. Informasi dan Komunikasi	548.830,3	3,93	589.488,1	4,21	611.852,0	4,17	650.411,8	4,03	721.940	4,13
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	135.723,7	0,97	141.795,7	1,01	153.865,2	1,05	161.950,4	1,00	170.280	0,97
L. Real Estate	315.254,1	2,25	316.982,8	2,27	323.350,0	2,21	326.224,9	2,02	335.450	1,92
M, N. Jasa Perusahaan	7.112,5	0,05	7.148,7	0,05	7.269,2	0,05	7.353,6	0,05	8.040	0,05
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	464.376,1	3,32	492.115,4	3,52	511.328,0	3,49	536.225,1	3,32	538.260	3,08

Lapangan Usaha	PDRB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)									
	Atas Dasar Harga Berlaku									
	2019	%	2020	%	2021	%	2022*)	%	2023**)	%
P. Jasa Pendidikan	424.837,2	3,04	448 451,5	3,21	464 248,0	3,17	515.256,3	3,19	546.840	3,13
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan	134.858,9	0,96	151 179,4	1,08	161 095,0	1,10	175.010,6	1,08	189.390	1,08
R,S,T,U. Jasa Lainnya	79.428,7	0,57	75 084,0	0,54	74 230,0	0,51	97.136,9	0,60	118.040	0,68
PDRB	13.981.191,2	100,00	13.985.521,7	100,00	14.661.891,5	100,00	16.152.949,2	100,00	17.473.410	100,00

Sumber: PDRB Kabupaten Way Kanan Tahun 2024

* Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Tabel 2.42 PDRB Kabupaten Way Kanan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2022 (Juta upiah)

Komponen Pengeluaran	Tahun				
	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	8.078.966	8.775.546	8.940.775	9.360.541	10.288.969
2. Pengeluaran Kosumsi LNPRT	194.807	216.404	214.898	225.701	239.490
3. Pengeluaran Kosumsi Pemerintah	1.083.345	1.132.341	1.129.511	1.150.636	1.189.632
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4 185 379	4 559 731	4 506 260	4 754 153	5 129 679
4.a. Bangunan					
4.b. Non-Bangunan					
5. Perubahan Inventori	16 476	2 692	26 640	13 808	16 878
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	(503 733)	(705 523)	(832 562)	(842 947)	(711 699)
PDRB	13 055 241	13 981 191	13 985 522	14 661 892	16 152 949

Sumber: PDRB Kabupaten Way Kanan Tahun 2024

* Angka Sementara '

**Angka Sangat Sementara

Tabel 2.43 PDRB Kabupaten Way Kanan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	Tahun				
	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5.330.367	5.612.334	5.575 965	5.689.479	5.962.223
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	124.135	136.226	132.820	136.148	138.760
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	651.929	669.895	654.945	658.879	669.288
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.048.296	3.218.432	3.119 839	3.229.957	3.343.652
5. Perubahan Inventori	3.799	1.299	11.889	11.416	13.775
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	(55.647)	(64.365)	(33.149)	10.621	37.900
PDRB	9.102.880	9.573.821	9.462.309	9.736.500	10.165.598

Sumber: PDRB Kabupaten Way Kanan Tahun 2024

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Struktur Ekonomi Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di Kabupaten Way Kanan pada tahun 2023 masih didominasi oleh sektor pertanian dan industri pengolahan. Hal ini menandakan bahwa sektor pertanian dan industri pengolahan masih menjadi andalan masyarakat di Kabupaten Way Kanan. Sebagai gambaran lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.44 Struktur Ekonomi Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Way Kanan Tahun 2019-2023(%)

SEKTOR	2019	2020	2021	2022*)	2023**)
Pertanian, Perikanan, Kehutanan	34,75	35,51	34,70	35,72	34,64
Pertambangan dan Penggalian	4,58	4,83	4,65	4,59	4,92
Industri Pengolahan	23,51	21,89	22,73	21,54	20,54
Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05
Konstruksi	8,39	8,17	8,57	8,11	8,37
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,86	9,99	9,95	10,54	11,51
Transportasi dan Pergudangan	2,73	2,66	2,65	3,21	3,91
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,95	0,91	0,86	0,84	0,91
Informasi dan Komunikasi	3,93	4,21	4,17	4,03	4,13
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,97	1,01	1,05	1,00	0,97
Real Estat	2,25	2,27	2,21	2,02	1,92
Jasa Perusahaan	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,32	3,52	3,49	3,32	3,08
Jasa Pendidikan	3,04	3,21	3,17	3,19	3,13
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,96	1,08	1,10	1,08	1,08
Jasa Lainnya	0,57	0,54	0,51	0,60	0,68
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: PDRB Kabupaten Way Kanan Tahun 2024

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

2.2.1.2 Laju Inflasi Daerah

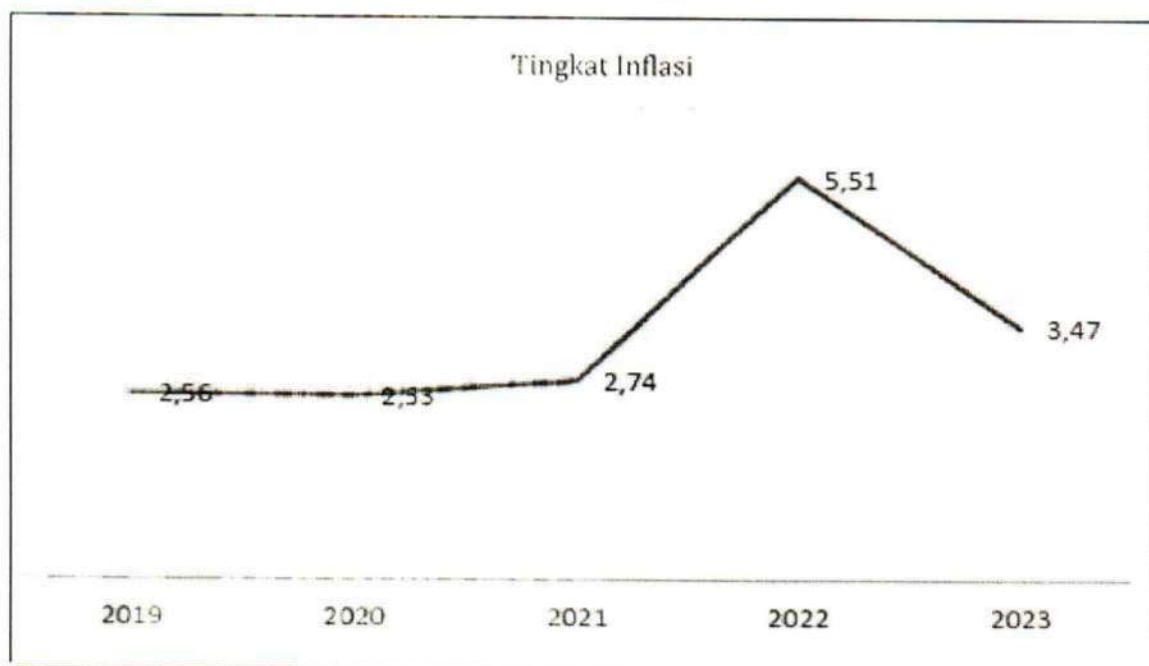
Secara umum inflasi merupakan kondisi meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus yang ditimbulkan karena adanya tekanan dari sisi *supply (cost push inflation)*, dari sisi permintaan (*demand pull inflation*), dan dari ekspektasi inflasi. BPS menggunakan pengelompokan inflasi berdasarkan pengelompokan Inflasi Inti dan Inflasi non Inti. Pengelompokan ini disebut disagregasi inflasi. Inflasi Inti merupakan komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten (*persistent component*) di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti interaksi permintaan- penawaran,

lingkungan eksternal (nilai tukar, harga komoditi internasional, inflasi mitra dagang), Ekspektasi Inflasi dari pedagang dan konsumen. Sedangkan Inflasi Non Inti merupakan komponen inflasi yang cenderung tinggi volatilitasnya karena dipengaruhi oleh selain faktor fundamental.

Komponen inflasi non inti terdiri dari Inflasi Komponen Bergejolak (*Volatile Food*) dan Inflasi Komponen Harga yang diatur Pemerintah (*Administered Prices*). *Volatile Food* merupakan komponen inflasi yang dominan dipengaruhi oleh *shocks* (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional. Sedangkan *Administered Prices* merupakan komponen inflasi yang dominan dipengaruhi oleh *shocks* (kejutan) berupa kebijakan harga Pemerintah, seperti harga BBM bersubsidi, tarif listrik, tarif angkutan, dan lain-lain.

Laju inflasi di Kabupaten Way Kanan selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami perlambatan, hal ini karena covid-19 dan pasca covid. Akan tetapi pada tahun 2022 sempat melonjak pada kisaran sebesar 5,51 persen dan kemudian akhirnya turun menjadi 3,47 persen ditahun 2023. Secara rinci tren inflasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.25 Tingkat Inflasi Kabupaten Way Kanan
Tahun 2019-2023

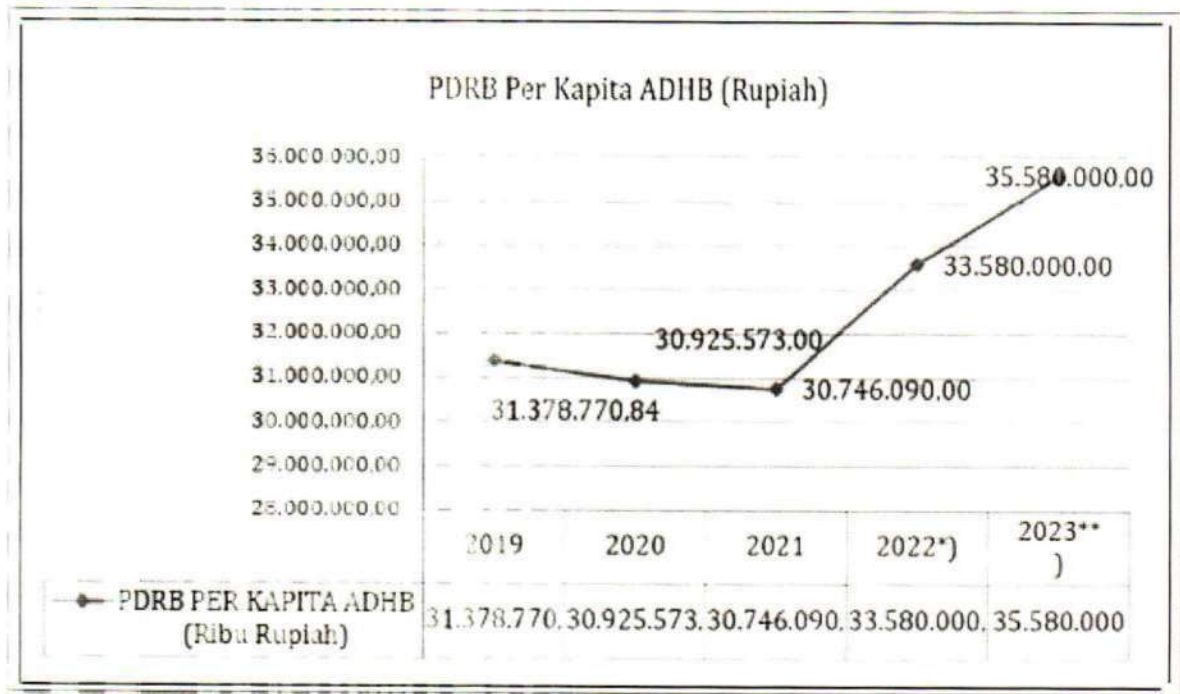


Sumber: BPS Way Kanan Tahun 2024

2.2.1.3 PDRB Perkapita

Kondisi makro ekonomi Kabupaten Way Kanan juga dapat tercermin dari nilai PDRB per kapita yang merupakan hasil pembagian PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB Per Kapita Kabupaten Way Kanan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2019-2023 secara rinci terdapat pada grafik berikut:

Gambar 2.26 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019-2023



Sumber: Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2024

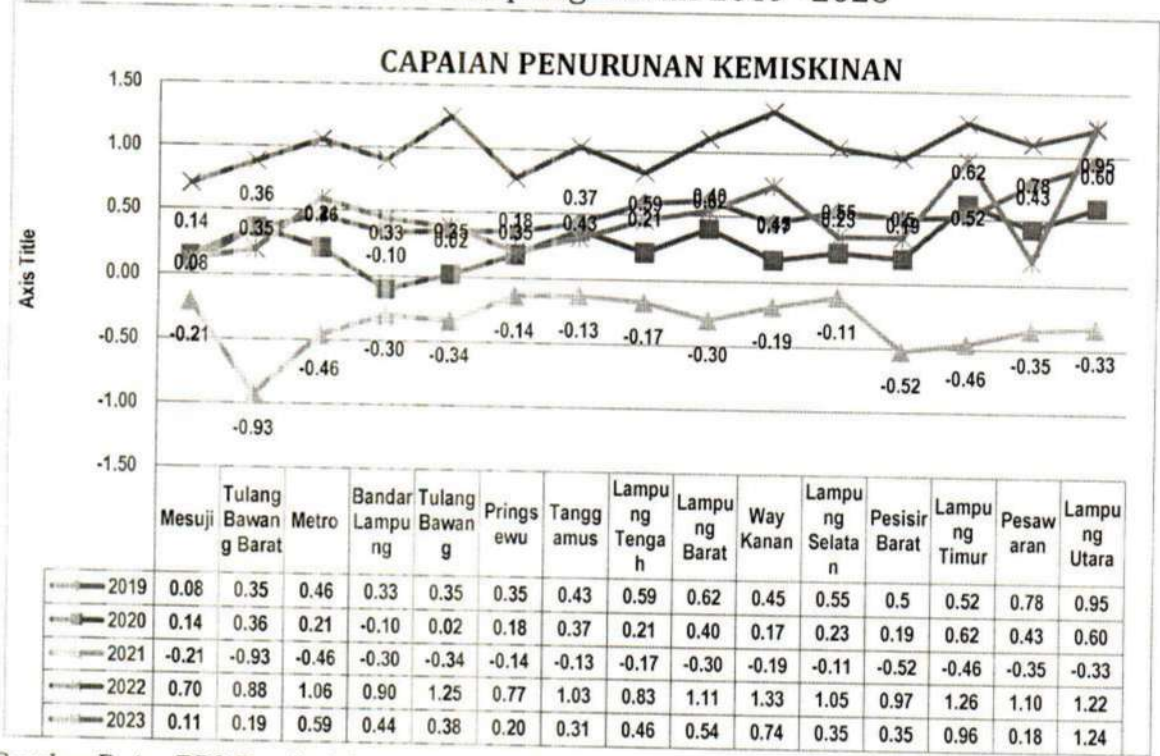
*Angka Sementara, **Angka Sangat Sementara

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per kapita sering menjadi acuan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi PDRB Per kapita suatu daerah, maka semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut, walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Way Kanan atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 PDRB per kapita tercatat sebesar Rp. 31.378,770,-. Secara nominal mengalami kenaikan hingga tahun 2021 mencapai Rp 30.746,090,-, Dan naik Kembali di tahun 2023 menjadi Rp 35.580,000,-.

2.2.1.4 Tingkat Kemiskinan

Persentase kemiskinan Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 sebesar 11,02 persen mengalami penurunan 0,74 persen dari tahun 2022 sebesar 11,76 persen, Kabupaten Way Kanan berada pada urutan ke 9 di bawah Kabupaten Lampung Barat.

Gambar 2.27 Capaian Penurunan Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota se - Provinsi Lampung Tahun 2019 -2023



Sumber Data: BPS Provinsi Lampung dan BPS Kabupaten Way Kanan Tahun 2024

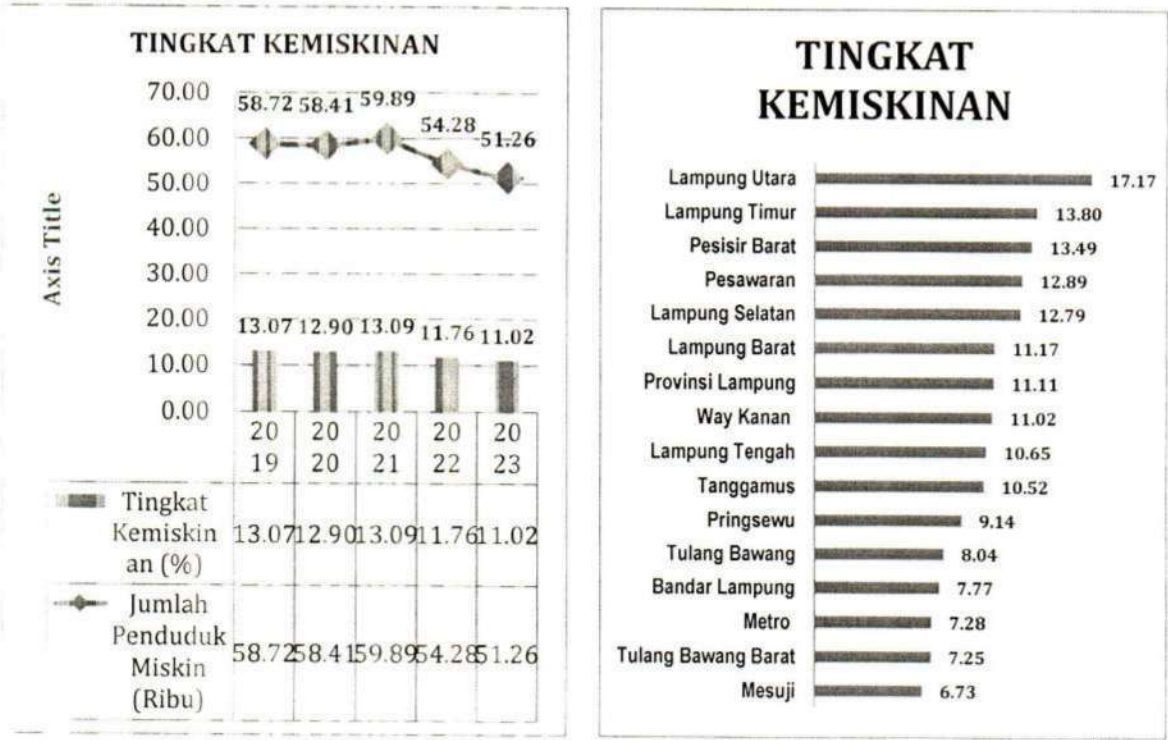
Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap wilayah, termasuk Way Kanan pasti memiliki warga/penduduk miskin. Di Kabupaten Way Kanan, persentase penduduk miskin tahun demi tahunnya terus mengalami penurunan. Pada tahun 2023 persentase penduduk miskin sebesar 11,76 persen dengan garis kemiskinan Rp.433.471,-. Untuk Gini ratio Kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.45 Gini Ratio Kabupaten/Kota di Provinsi lampung Tahun 2023

Wilayah	Gini Ratio Kabupaten/Kota
Lampung Barat	0.274
Tanggamus	0.256
Lampung Selatan	0.257
Lampung Timur	0.315
Lampung Tengah	0.285
Lampung Utara	0.3
Way Kanan	0.281
Tulang Bawang	0.284
Pesawaran	0.287
Pringsewu	0.306
Mesuji	0.285
Tulang Bawang Barat	0.274
Pesisir Barat	0.315
Bandar Lampung	0.381
Metro	0.289
Provinsi Lampung	0.324

Sumber : Way Kanan Dalam Angka Tahun 2024

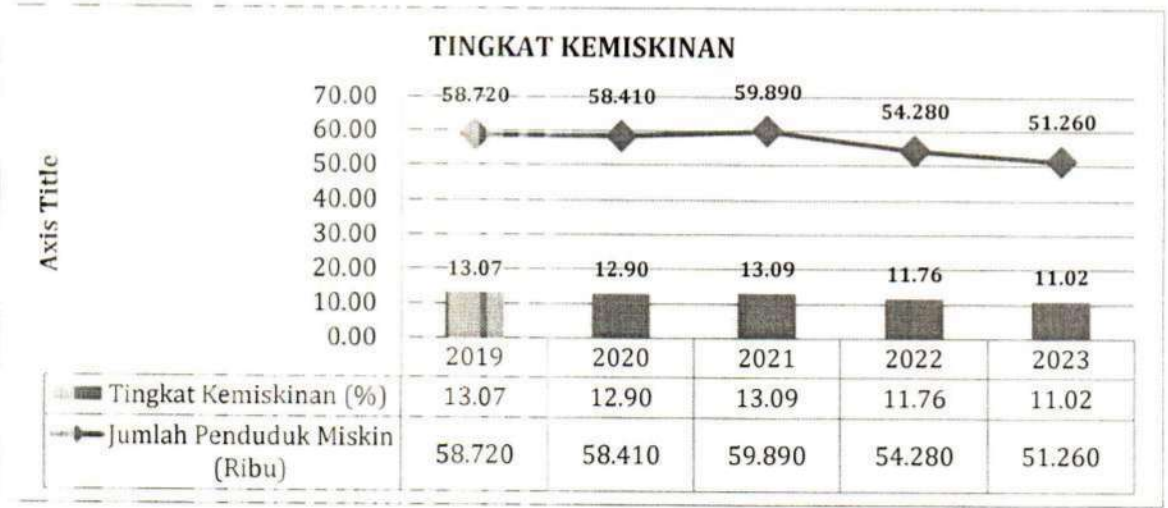
Gambar 2.28 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Way Kanan Tahun 2019-2023



Sumber Data: BPS Provinsi Lampung dan BPS Kabupaten Way Kanan Tahun 2024

Upaya penanganan kemiskinan merupakan salah satu agenda penting yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Way Kanan. Langkah yang telah dilaksanakan antara lain yaitu dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup dengan memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah salah satu bentuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Way Kanan.

Gambar 2.29 Perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten Way Kanan Tahun 2019-2023



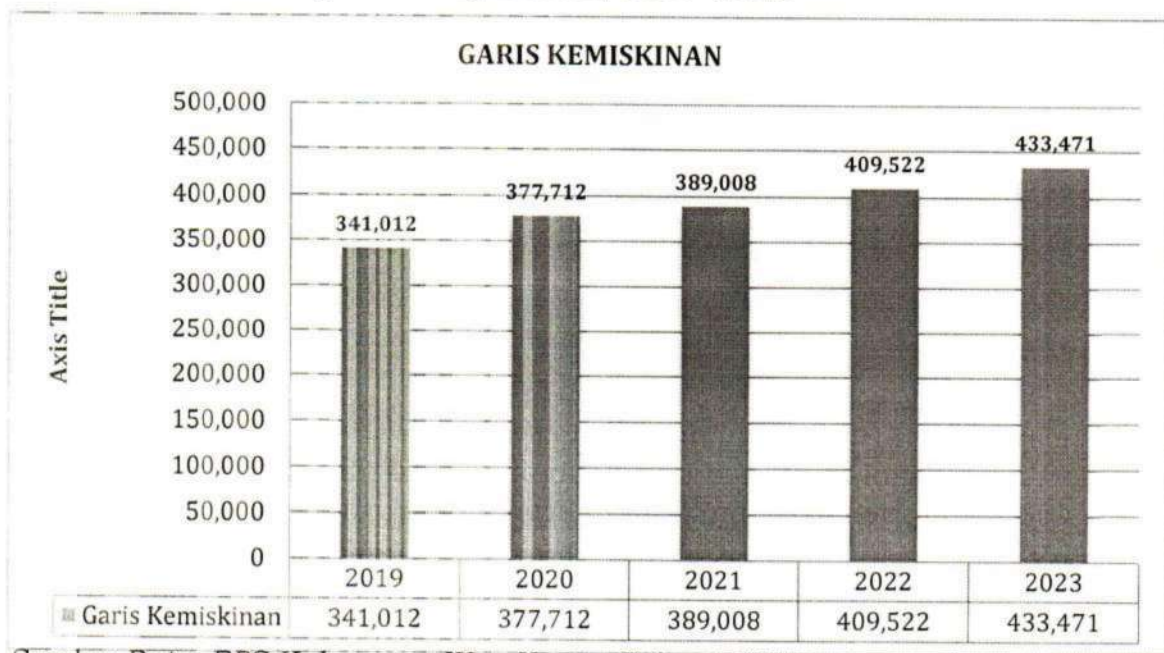
Sumber Data: BPS Kabupaten Way Kanan Tahun 2024

Secara Umum, Persentase penduduk miskin terhadap jumlah seluruh penduduk Kabupaten Way Kanan menunjukkan tren menurun selama periode 2019-2023. Berbeda pada Tahun 2021 kemiskinan mengalami kenaikan disebabkan pandemi covid-19 yang berdampak pada ekonomi masyarakat, sedangkan di Tahun 2022 pasca covid-19 recovery atau pemulihan ekonomi,

tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 11,76 persen dan pada tahun 2023 penurunan tingkat kemiskinan berada di kisaran 11,02 persen.

Gambar 2.30 Perkembangan Garis Kemiskinan Rp/Perkapita/Bulan)

Kabupaten Way Kanan, 2019-2023



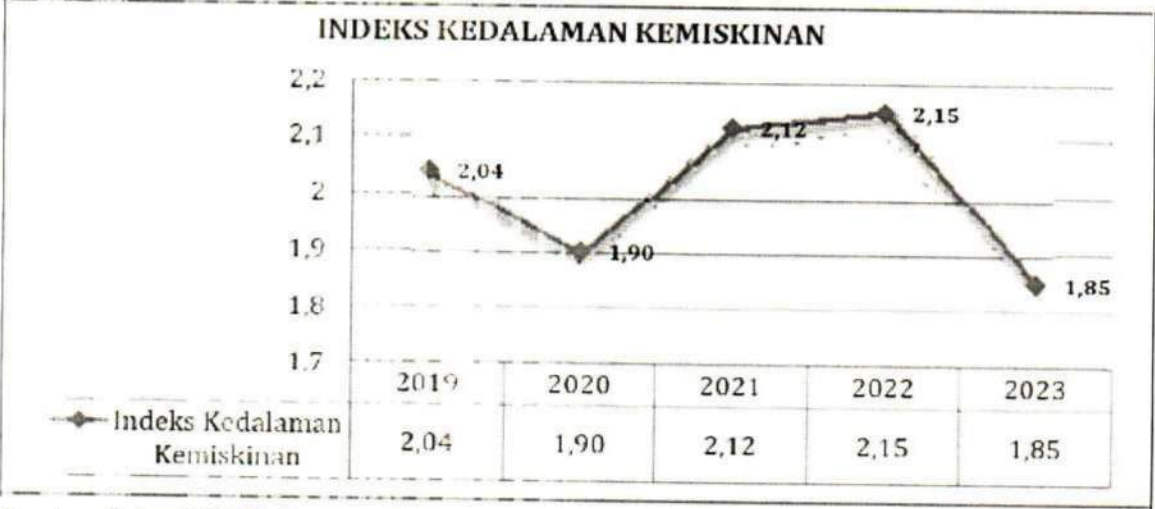
Sumber Data: BPS Kabupaten Way Kanan Tahun 2024

Garis Kemiskinan Kabupaten Way Kanan tahun 2023 meningkat Rp 433.522,- perkapita perbulan. Meskipun Garis Kemiskinan meningkat, jumlah penduduk miskin pada periode yang sama justru berkurang. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pendapatan sebagian penduduk miskin khususnya mereka yang berada di sekitar garis kemiskinan mampu mengimbangi kenaikan harga barang. Adapun garis kemiskinan per rumah tangga adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan miskin.

2.1.1.5 Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Tahun 2023 indeks kedalaman kemiskinan sebesar 1.85 mengalami kenaikan sebesar 0.3, artinya semakin dekat rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan.

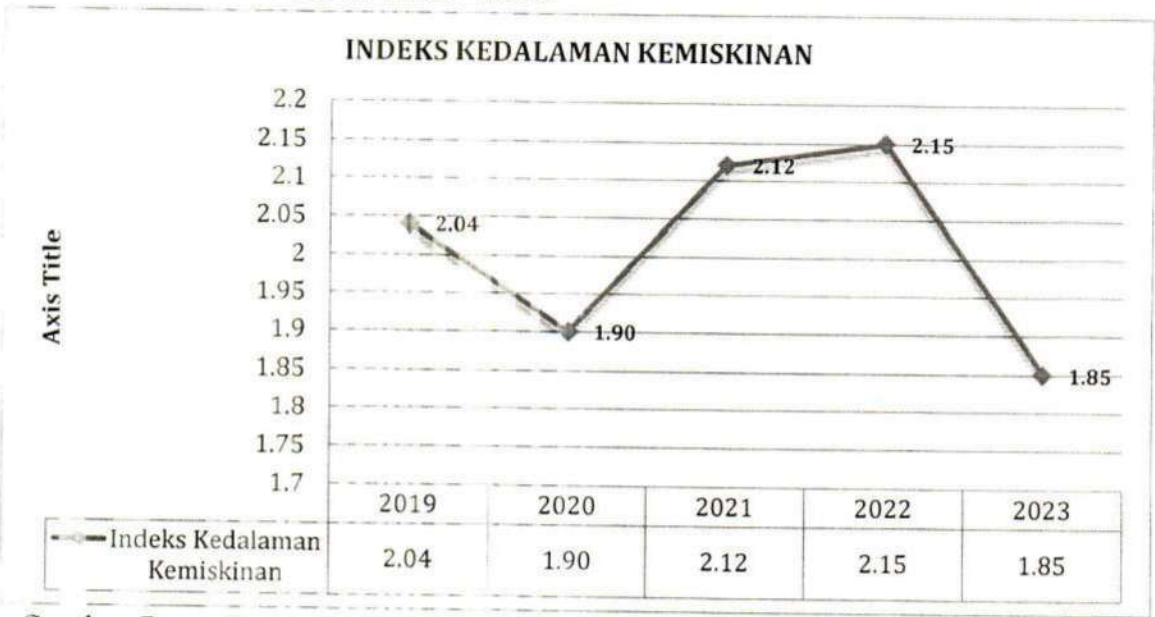
Gambar 2.31 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Tahun 2019 – 2023



Sumber Data: BPS Kabupaten Way Kanan Tahun 2024

Indeks Keparahan (P2) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Way kanan tahun 2023 sebesar 0,42 persen turun 0,08 persen dari tahun 2022, artinya jarak rata-rata pengeluaran antar penduduk miskin semakin homogen kondisinya.

Gambar 2.32 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Way Kanan Tahun 2019-2023

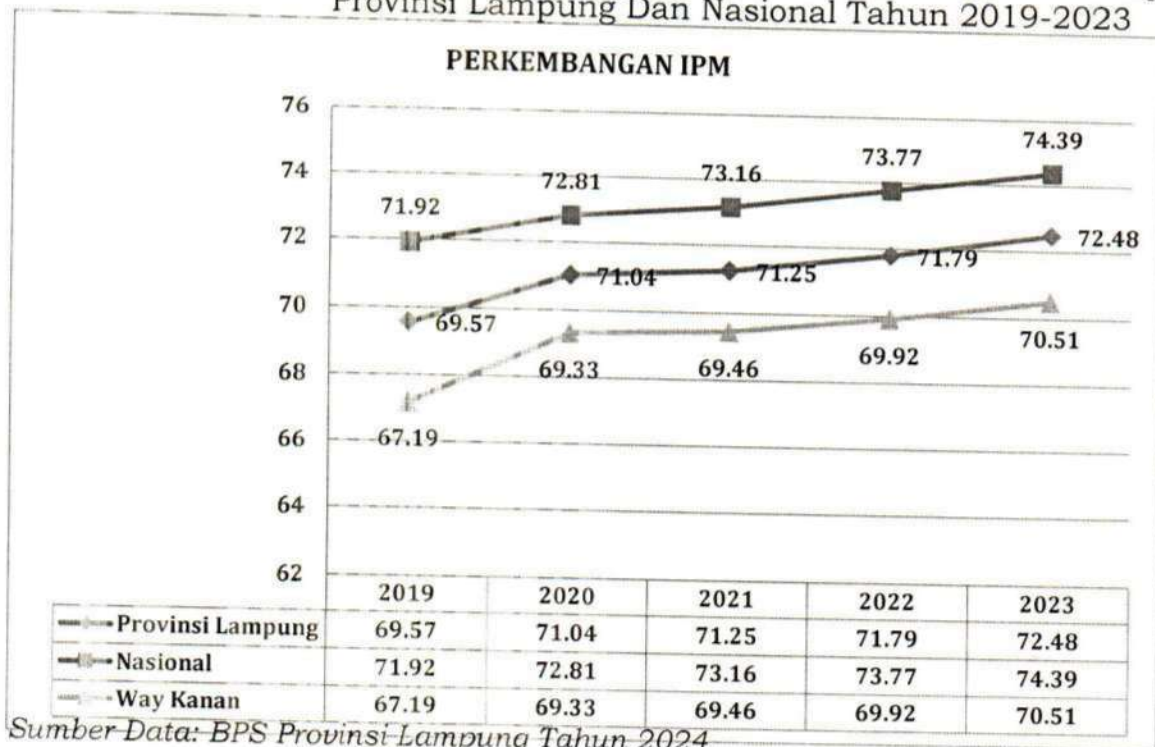


Sumber Data: BPS Kabupaten Way Kanan Tahun 2024

2.2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dsb. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: Umur Panjang dan hidup sehat (umur harapan hidup); pengetahuan (Rata-rata lama sekolah); dan standar hidup layak (Pengeluaran Perkapita per tahun). Pada tahun 2023 IPM Way Kanan sebesar 70,51 atau tumbuh 0,58 persen. Pertumbuhan tahun ini lebih tinggi dibanding tahun 2022 sebesar 0,46 persen. Rata-rata pertumbuhan IPM periode 2018-2022 sebesar 0,53 persen.

Gambar 2.33 Perkembangan IPM Kabupaten Way Kanan Terhadap Provinsi Lampung Dan Nasional Tahun 2019-2023



Indeks Pembangunan Manusia Way Kanan pada tahun 2023 berada pada angka 70,51 atau berstatus TINGGI. dibandingkan pada tahun 2022 IPM Kabupaten Way Kanan Berada pada angka 69,92 atau berstatus SEDANG.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup waktu lahir, selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (Purchasing Power Parity). Gambaran kondisi Komponen IPM Kabupaten Way Kanan tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.46 Kondisi Komponen IPM Kabupaten Way Kanan Tahun 2019-2023

NO	KOMPONEN IPM	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Angka Harapan Hidup (Tahun)	69,27	69,40	73,73	73,93	74,11
2.	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,35	12,36	12,37	12,42	12,43
3.	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	7,39	7,70	7,71	7,72	7,74
4.	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Ribuan Rp)	9.292	9.102	9.173	9.450	9.887

Sumber: Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2024

Angka Harapan Hidup Kabupaten Way Kanan pada lima tahun terakhir (2018- 2023) terus mengalami kenaikan dimana pada tahun 2018 mencapai 68,95 naik menjadi 74,11 di tahun 2023. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Way Kanan pada lima tahun terakhir (2018- 2023) juga mengalami kenaikan dimana pada tahun 2018 mencapai 12,33 tahun naik menjadi 12,43 Tahun di Tahun 2023. Rata-Rata Lama Sekolah mengalami kenaikan dari tahun 2018-

2023 yaitu pada Tahun 2018 mencapai 7,35 tahun, naik menjadi 7,74 Tahun di tahun 2023 Pengeluaran Perkapita mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar Rp. 8.979.000 naik menjadi Rp. 9.887.000 di Tahun 2022.

2.2.1.7 Angka Melek Huruf

Tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Way Kanan secara umum dapat terukur melalui indikator tertentu, salah satu diantaranya adalah angka melek huruf. Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk kelompok umur tertentu yang dapat membaca dan menulis.

Pada tahun 2019 angka melek huruf di Kabupaten Way Kanan mencapai 96,14 persen naik menjadi 96,90 persen pada tahun 2020, namun mengalami penurunan menjadi 96,08 pada tahun 2021, dan naik kembali menjadi 96,35 pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 Angka Melek Huruf Kabupaten Way Kanan menurun menjadi 95,37 persen. Perkembangan angka melek huruf setiap tahunnya, dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.34 Perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Way Kanan Tahun 2019-2023

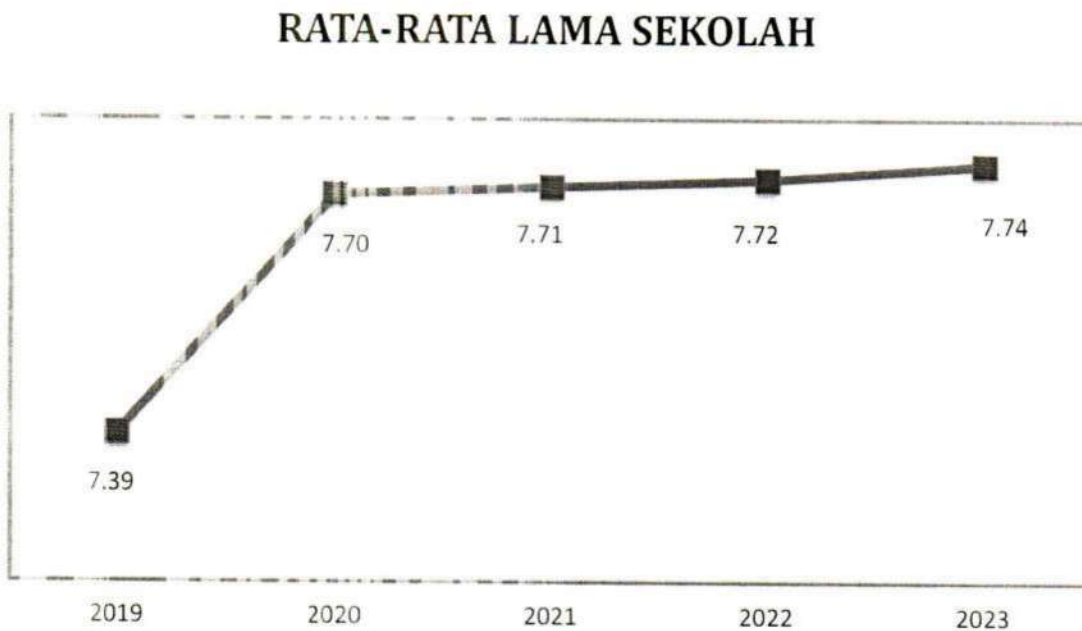


Sumber Data: Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2024

2.2.1.8. Rata-Rata Lama Sekolah

Angka Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Way Kanan dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2019-2023 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2019 baru mencapai 7,39 tahun terus meningkat menjadi 7,74 tahun pada tahun 2023, yang berarti bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Way Kanan pada tahun 2023 baru mampu menempuh pendidikan sampai dengan kelas 7,74 atau putus sekolah di kelas 8. Perkembangan rata- rata lama sekolah di Kabupaten Way Kanan dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.35 Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Way Kanan Tahun 2019-2023



Sumber Data: Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2024

2.1.1.9 Umur Harapan Hidup (UHH)

Umur Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Way Kanan terus mengalami kenaikan dalam lima tahun terakhir, terus mengalami kenaikan menjadi 74,11 tahun pada tahun 2023. Ini menandakan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, dimana dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2.36 Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Way Kanan Tahun 2019-2023



Sumber Data: Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2024

2.2.1.10 Jumlah Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Salah satu indikator kesehatan yang dinilai keberhasilan pencapaiannya dalam MDGs adalah status gizi balita. Status gizi balita dapat diukur berdasarkan umur, berat badan (BB), dan tinggi badan/panjang badan (TB). Variabel Umur (BB/U), tinggi badan menurut umur (TB/U), dan berat badan

menurut tinggi badan (BB/TB). Status Gizi Balita merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2019 jumlah balita gizi buruk ada 6 kasus yang tersebar di wilayah kerja Puskesmas Blambangan Umpu 1 kasus, Puskesmas Negeri Baru 1 kasus, Puskesmas Rebang Tangkas 1 kasus, Puskesmas Serupa Indah 1 kasus, Puskesmas Pisang Baru 1 kasus dan Puskesmas Negeri Agung 1 kasus.

Tabel 2.47 Jumlah Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan	6	6	6	6	\14

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

2.2.1.11 Cakupan Desa Siaga Aktif

Cakupan Desa Siaga Aktif adalah desa yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, surveillance berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dibandingkan dengan jumlah desa siaga yang dibentuk. Jumlah desa siaga di Kabupaten Way Kanan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.48 Jumlah Cakupan Desa Siaga Aktif Tahun 2018-2023

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan Desa Siaga Aktif	227	227	227	227	227	227

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

2.2.1.12 Tingkat Pengangguran Terbuka

Menurut jenis kegiatan utama, persentase penduduk 15 tahun keatas di Kabupaten Way Kanan dari tahun 2019-2023, baik jenis angkatan kerja, bukan angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.49 Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kabupaten Way Kanan Tahun 2019-2023

Jenis Kegiatan Utama	2019 (Jumlah)	2020 (Jumlah)	2021 (Jumlah)	2022 (Jumlah)	2023 (Jumlah)
Angkatan Kerja	247.645	253.931	255.721	248.708	264.069
Bekerja	238.736	244.888	247.123	240.541	255.970
Pengangguran	8.909	9.043	8.598	8.167	8.099
Bukan Angkatan Kerja	77.469	83.650	86.233	97.377	96.088
Sekolah	16.051	16.578	14.244	20.680	22.523
Mengurus Rumah Tangga	53.944	53.372	60.538	66.749	64.386

Lainnya	7.474	13.700	11.451	9.948	9 179
TPAK (%)	76,17	75,22	74,78	71,86	73,32
TPT (%)	3,59	3,56	3,36	3,28	3,07

Sumber: Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2023

Angkatan Kerja Kabupaten Way Kanan tahun 2019 adalah 247.645 usia kerja/angkatan kerja, dengan tingkat pengangguran terbuka yang dimiliki adalah 3,59 persen pada tahun 2019. Pada tahun 2023 Angkatan Kerja Kabupaten Way Kanan adalah 264.069 penduduk usia kerja/angkatan kerja, dengan tingkat pengangguran terbuka yang dimiliki adalah 3,07 persen.

2.2.1.13 Persentase PAD Terhadap Pendapatan

Persentase kontribusi PAD terhadap Pendapatan didapat dari PAD dibagi jumlah pendapatan. Rasio realisasi PAD terhadap realisasi APBD dari tahun 2018 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan, diawali 4,10 % di tahun 2018 terus meningkat hingga 5,95 % di tahun 2023. Hal ini dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.50 Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018-2023

No	Tahun	Realisasi Pendapatan (Audited)	Realisasi PAD (Audited)	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan (%)
1	2018	1.385.711.587.665,59	56.764.985.088,23	4,10
2	2019	1.398.937.422.542,40	62.353.560.983,81	4,46
3	2020	1.289.460.561.990,25	64.617.681.616,75	5,01
4	2021	1.297.840.346.750,74	70.125.340.980,24	5,40
5	2022	1.315.923.276.417,44	77.207.443.440,44	5,87
6	2023	1.335.032.575.065,75	79.453.552.185,75	5,95

Sumber: BPKAD Kabupaten Way Kanan (LRA) Tahun 2018-2023

2.2.1.14 Nilai Opini BPK

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Pemberian opini merupakan bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan, disamping pemberian rekomendasi lainnya. Laporan keuangan yang disusun oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah merupakan media akuntabilitas keuangan yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Tabel 2.51 Nilai Opini BPK di Kabupaten Way Kanan

Indikator	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPKAD Kabupaten Way Kanan 2023

Kabupaten Way Kanan memantapkan komitmennya untuk mencapai *good governance* dalam pengelolaan pemerintahan. Kerja keras ini membuahkan hasil dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama 14 tahun berturut-turut (tahun 2010-2023). Dengan pencapaian ini Pemerintah Kabupaten Way Kanan berharap bisa menjadikan informasi yang ada dalam LKPD ini sebagai dasar pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga dari LKPD yang ada saat ini dapat dinilai kinerja Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkesinambungan.

2.2.1.15 Penguatan Cadangan Pangan

Keberhasilan pembangunan bidang ketahanan pangan yang dicapai Pemerintah Kabupaten Way Kanan dapat dilihat dari pencapaian terhadap indikator berikut ini:

a. Regulasi ketahanan pangan

Regulasi Ketahanan Pangan adalah ada/tidak peraturan tentang kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk perda, perkara, dan sebagainya. Data menunjukkan bahwa regulasi ketahanan pangan mulai ada pada Tahun 2013 yaitu Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Kabupaten Way Kanan masih berlaku sampai saat ini.

b. Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan utama adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman, dan keamanannya. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, dapat dilihat bahwa Ketersediaan Pangan Utama di Way Kanan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 2.50 Data Ketersediaan Bahan Pangan Kabupaten Way Kanan Tahun 2019-2023 (Ton)

No	Komoditas	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Padi (GKP)	627.548	1.102.850	1.894.045	165.642	160.772
	Beras	368.444,70	597.215,36	983.237	97.994	59.597,45
2	Jagung	132.982,59	70.090,43	119.591	80.588	56.478,82
3	Kedelai	2.063,98	590,04	133	613	2.256,66
4	Kc. Tanah	1.217,56	879,58	196	295	285,57
5	Kacang Hijau	-3,81	30,78	51	6	4,97
6	Ubi Kayu	393.925,78	454.625,77	386.682	432.278	244.914,34
7	Ubi Jalar	170,48	418,91	801	282	223,29
8	Buah-buahan	-9.586,97	0,00	0	297.515	574.141,59
9	Sayuran	-23.541,38	0,00	0	12.994	91.320,57
10	Daging	88.965,64	181.687,00			
	- Sapi	72.660,87	72.660,87	76.256	846.455	870.873,75
	- Kerbau	1.239,77	1.239,77	128	1.296	1.302,46
	- Babi	7.082,41	7.082,41	7.281	73.301	75.997,11
	- Kambing	9.848,51	98.482,12	9.957	99.770	100.760,67
	- Domba	221,89	2.221,84	153	1.545	1.555,19
	- Unggas	16.083,82	554.151,32	57.751	594.588	609.094,23
11	Telur	60.466,97	700.958,99			-
	- Ayam Kampung	59.204,58	700.175,12	44.761	464.728	480.525,98
	- Ayam Petelur	495,63	495,63	152.472	1.548.368	2.328.047,70
	- Itik	79,75	288,24	18.785	188.926	189.260,18
12	Ikan	5.249,50	1.376,15	1.812	1.884	1.907.725,35

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Way Kanan, tahun 2023

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

2.2.2.1 Pembangunan Gender

Upaya Pembangunan gender di kabupaten way kanan selama beberapa tahun terakhir semakin membaik. Hal terlihat dari capaian kinerja Indeks Pembangunan Gender, indeks ketimpangan gender dan Pemberdayaan gender.

Tabel 2.51 Pembangunan Gender Kabupaten Way Kanan
Tahun 2020-2023

Indikator	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Indeks Pembangunan Gender	88,57	88,73	88,91	89,21
Indeks Pemberdayaan Gender	60,72	61,82	60,36	-
Indeks Ketimpangan Gender	0,873	0,568	0,574	0,554

Sumber: BPS Kabupaten Way Kanan Tahun 2024

2.2.2.2 Pembangunan Keluarga

Upaya pembangunan keluarga selama dua tahun terakhir terus mengalami peningkatan dimana Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga) tahun 2022 sebesar 56,11 poin menjadi 58,91 pada tahun 2023 dengan 3 Dimensi penilaian masing-masing : Dimensi Ketentraman sebesar 55,92, dimensi Kemandirian sebesar 52,82 dan dimensi Kebahagiaan

2.2.2.3 Budaya

Keragaman budaya di Kabupaten Way Kanan cukup bervariasi, terdapat beberapa keberagaman budaya di Kabupaten Way Kanan yang nampak menunjukkan perkembangan yang cukup positif diantaranya jumlah grup kesenian, budaya lokal, penyelenggaraan seni dan budaya, sarana penyelenggaraan seni dan budaya, benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Keberagaman budaya tersebut dapat menjadi salah satu potensi besar bagi Kabupaten Way Kanan apabila dikelola dengan baik. Adapun perkembangan kebudayaan Kabupaten Way Kanan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.52 Perkembangan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah grup kesenian	-	350	350	350	350
2	Jumlah budaya Lokal	-	-	-	-	-
3	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (event)	6	6	6	6	6
4	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya (unit)	6	6	6	6	6
5	Benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan:					
	Benda Cagar Budaya (buah)	14	14	14	14	14
	Bangunan Cagar Budaya (unit)	3	3	3	3	3
	Situs Cagar Budaya (Lokasi)	17	17	17	17	17
	Kawasan Cagar Budaya (kawasan)	8	8	8	8	8

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

2.3. Aspek Daya Saing

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

2.3.1.1 PDRB dan PDRB Per-Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kapita per kepala atau per satu orang penduduk.

Tabel 2.53 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Way Kanan Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**)
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
a. ADHB	13 981,19	13 985,52	14 661,87	16 152, 92	17.473,41
b. ADHK 2010	9 573,82	9 462,30	9 736,50	10 165, 60	10.635,97
PDRB per kapita (Ribu Rp)					
a. ADHB	31.022, 091	29.594, 040	30.641,179	33.315,086	35.579,572
b. ADHK 2010	21.242, 821	20.022, 703	20.347,877	20.966,350	21.657,094
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010	4,1	-5,7	1,6	3,0	3,3
Jumlah Penduduk (ribu orang)	450.109	473.575	476.870	483.884	489.773
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)	0,90	1,51	0,93	0,90	1,22
Pertumbuhan	5,17	-1.16	2,90	4,41	4,63

Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2024

Perekonomian Kabupaten Way Kanan secara umum terus bergerak ke arah peningkatan. Pada tahun 2023 perekonomian Kabupaten Way Kanan yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 17.473,41 miliar atau meningkat sebesar Rp. 1.284,49 miliar dari PDRB tahun 2022. Sedangkan berdasarkan harga konstan Tahun 2010, PDRB Kabupaten Way Kanan naik dari Rp. 10.635,97 miliar Pada Tahun 2023 yang awalnya Rp. 10.165, 60 miliar pada tahun 2022 atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 470,37 miliar.

Peningkatan nilai PDRB Kabupaten Way Kanan ini diikuti pula dengan peningkatan PDRB perkapita. Meskipun nilai PDRB perkapita belum mampu menunjukkan peningkatan yang sebenarnya dari daya beli masyarakat, PDRB perkapita menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum. Semakin tinggi rata-rata PDRB perkapita suatu wilayah, semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Pada tahun 2022 PDRB per kapita tercatat sebesar Rp. 33.315,086,- secara nominal mengalami kenaikan pada tahun 2023 menjadi Rp. 35.579,572.

1. Klasen Tipologi

LAPANGAN USAHA ANDALAN TAPI TERTEKAN	LAPANGAN USAHA ANDALAN
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2. Industri Pengolahan	1. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 2. Konstruksi
LAPANGAN USAHA TERTINGGAL	LAPANGAN USAHA BERKEMBANG
1. Pengadaan Listrik dan Gas 2. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1. Pertambangan dan Penggalian 2. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
3. Jasa Keuangan dan Asuransi 4. Real Estat 5. Jasa Perusahaan 6. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan , dan Jaminan Sosial Wajib	3. Informasi dan Komunikasi 4. Transportasi dan Pergudangan 5. Jasa Lainnya
7. Jasa Pendidikan 8. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	

Berdasarkan analisis terhadap hubungan antara laju pertumbuhan dan kontribusi suatu sektor lapangan usaha, kita dapat mengidentifikasi beberapa skenario yang menggambarkan karakteristik dan potensi sebuah wilayah atau sektor tertentu.

Pertama, saat sebuah sektor lapangan usaha menunjukkan laju pertumbuhan yang rendah namun memiliki kontribusi yang tinggi, hal ini menandakan bahwa sektor tersebut memiliki potensi besar dan merupakan keunggulan kompetitif dari wilayah tersebut. Meskipun pertumbuhannya mungkin tidak secepat sektor lain, kontribusi yang signifikan yang dihasilkan oleh sektor ini menjadikannya sebagai pilar ekonomi yang penting. Oleh karena itu, pengembangan dan peningkatan kualitas serta efisiensi sektor ini menjadi sangat penting untuk memaksimalkan potensi kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah.

Kedua, dalam situasi di mana laju pertumbuhan rendah dan kontribusi juga rendah, hal ini menunjukkan bahwa sektor lapangan usaha tersebut mungkin menghadapi tantangan dalam mengembangkan potensinya atau mungkin tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi wilayah. Oleh karena itu, diperlukan strategi revitalisasi atau transformasi untuk meningkatkan kinerja dan relevansi sektor ini dalam mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah.

Ketiga, jika sektor lapangan usaha menunjukkan laju pertumbuhan yang tinggi dan kontribusi yang tinggi pula, maka sektor ini merupakan mesin penggerak utama ekonomi wilayah. Keberhasilan sektor ini harus dipertahankan dan diperkuat melalui inovasi, investasi, dan dukungan kebijakan yang memadai untuk memastikan kelangsungan pertumbuhannya yang berkelanjutan. Terakhir, pada situasi di mana laju pertumbuhan tinggi namun kontribusi rendah, hal ini mungkin menandakan bahwa sektor tersebut sedang dalam fase awal pengembangan atau pertumbuhan cepat namun belum

memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi wilayah. Dalam hal ini, sektor tersebut memerlukan strategi pendukung dan pendorong untuk menjadikannya sebagai pilar ekonomi yang kuat di masa depan.

A. PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA PER KAPITA

Untuk melihat perkembangan kesejahteraan rakyat dari sisi ekonomi salah satunya dapat dilihat dari perkembangan tingkat pendapatan rata-rata masyarakat. Masyarakat yang dengan tingkat pendapatan lebih tinggi, secara umum akan lebih sejahtera dibanding mereka yang pendapatannya lebih rendah. Sejalan dengan pendapatan, pengeluaran atau konsumsi masyarakat juga mencerminkan tingkat kesejahteraan.

Tabel 2.54 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita di Kabupaten Way Kanan Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun			
	2018	2019	2020	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (Rp.)	753.307	847.500	895.889	959.578

Sumber : inkesra Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2023

Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Way Kanan tahun 2018-2022 terus mengalami peningkatan. Rp. 753.307 per kapita tahun 2018 menjadi Rp 959.578 per kapita tahun 2022. Dengan rincian 547.480 makanan dan 412.098 bukan makanan. Peningkatan pengeluaran konsumsi penduduk ini salah satunya juga dikarenakan adanya peningkatan upah gaji yang mereka terima, seperti adanya kenaikan gaji pegawai, upah buruh dan lain lain. Hal lain yang juga mendorong peningkatan konsumsi adanya peningkatan inflasi atas barang dan jasa, pada akhirnya memaksa penduduk untuk membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

B. PENGELUARAN KONSUMSI NON PANGAN PERKAPITA

Pola pengeluaran seseorang merupakan salah satu alat ukur untuk melihat tinggi rendahnya tingkat kesejahteraannya. Semakin tinggi tingkat pendapatan atau kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan cenderung menurun, namun sebaliknya proporsi untuk non makanan akan meningkat.

Tabel 2.55 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita di Kabupaten Way Kanan Tahun 2019-2022

Indikator	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Non PanganPerkapita (%)	43,91	43,93	45.40	42, 95

Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2023

Selama kurun waktu lima tahun terakhir (2019 – 2022) pengeluaran rata-rata per kapita penduduk Way Kanan untuk kebutuhan non makanan proporsinya relatif stabil yaitu kisaran antara 42 - 45 persen. Ini mengindikasikan, bahwa kesejahteraan masyarakat Way Kanan semakin meningkat. Kondisi ini tercermin dari pola konsumsi penduduk seperti lebih besarnya proporsi pengeluaran untuk kebutuhan makanan dibandingkan pengeluaran untuk kebutuhan non makanan.

2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.3.2.1 Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja. Dari Tabel dibawah dapat diketahui bahwa terjadi jumlah penduduk yang bekerja setiap tahunnya mengalami pluktuatif, yang tertinggi pada tahun 2019 sebesar 96,40 % dan terendah pada tahun 2022 sebesar 96,72%.

Tabel 2.55 Persentase Penduduk Bekerja Kabupaten Way Kanan Tahun 2018-2022

Uraian	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Penduduk yang Bekerja (%)	95,55	96,40	96,20	96,64	96,72

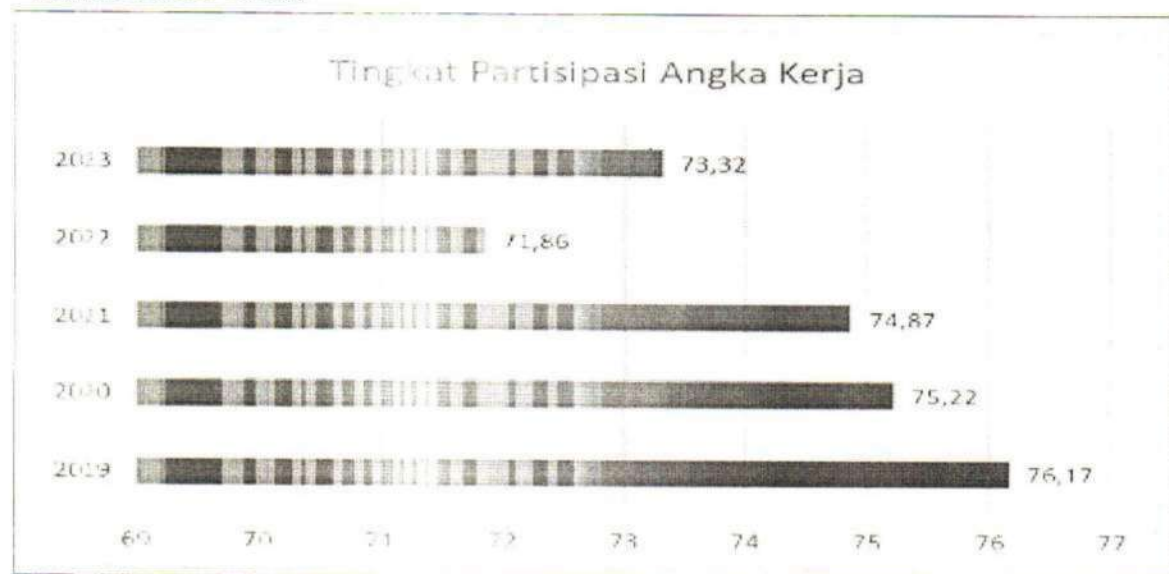
Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi Tahun 2023

2.3.2.2 Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Banyaknya penduduk produktif (15-64 tahun) disuatu wilayah sangat menentukan rasio ketergantungan penduduk diwilayah tersebut. Semakin kecil persentase penduduk usia produktif maka semakin besar penduduk yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif tersebut.

2.3.2.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Indikator TPAK digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh tingkat kegiatan masyarakat terhadap angka pesersediaan tenaga kerja.

Gambar 2.37 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Way Kanan Tahun 2019-2023



Sumber Data: Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2023

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Way Kanan tahun 2023 adalah 73,32 persen artinya dari 100 penduduk usia kerja sekitar 73 orang diantaranya termasuk dalam angkatan kerja, dengan tingkat pengangguran terbuka (persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja) yang dimiliki adalah sebesar 3,28 persen di Kabupaten Way Kanan.

Tabel 2.56 Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Way Kanan Tahun 2019-2023

KELOMPOK UMUR	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
	LAKI- LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI- LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI- LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
15 – 19	19.972	17.323	37.204	19.895	19.033	38.928	19.731	18.847	38.578	19.641	18.739	38.380	18.768	18.441	37.209
20 – 24	20.093	17.828	37.921	19.582	19.125	38.707	19.357	18.851	38.208	19.154	18.596	37.750	20.051	19.477	39.528
25 – 29	18.906	16.828	35.734	20.299	19.135	39.434	20.222	19.045	39.267	20.188	18.991	39.179	18.977	18.045	37.022
30 – 34	17.332	16.461	33.793	20.858	19.692	40.550	20.846	19.668	40.514	20.830	19.634	40.464	19.415	18.589	38.004
35 – 39	16.202	15.820	32.022	18.970	17.558	36.528	19.076	17.670	36.746	19.228	17.825	37.053	20.714	19.637	40.351
40 – 44	15.733	15.890	31.623	16.909	16.149	33.058	17.077	16.330	33.407	17.237	16.500	33.737	19.558	18.061	37.619
45 – 49	14.897	14.782	29.679	14.547	13.840	28.387	14.827	14.145	28.972	15.132	14.468	29.600	16.190	15.903	32.093
50 – 54	12.580	12.419	24.999	12.197	11.966	24.163	12.483	12.292	24.775	12.796	12.646	25.442	14.025	13.358	27.383
55 – 59	11.067	10.186	21.253	10.601	10.307	20.908	10.902	10.674	21.576	11.216	11.044	22.260	10.802	11.274	22.076
60 – 64	8.427	7.445	15.872	8.399	7.861	16.260	8.681	8.208	16.889	8.989	8.596	17.585	9.517	9.620	19.137
65 +	5.687	5.014	10.701	13.870	12.453	26.323	14.496	13.135	27.631	15.165	13.875	29.040	17.033	15.517	32.550
Jumlah	160.896	149.996	310.892	176.127	167.119	343.246	177.698	168.865	346.563	179.576	170.914	350.490	185.050	177.922	362.972

Sumber: Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2024

2.3.2.4 Sumber Daya Manusia Pertanian (Kelompok Tani)

Tabel 2.57 Jumlah Kelompok Tani Per Kecamatan di Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

NO	KECAMATAN	JUMLAH POKTAN	JUMLAH KELOMPOK TANI (POKTAN)			
			PEMULA	LANJUT	MADYA	UTAMA
1	BAHUGA	120	56	61	3	0
2	BANJIT	237	155	82	0	0
3	BARADATU	197	161	34	2	0
4	BLAMBANGAN UMPU	308	267	39	2	0
5	BUAY BAHUGA	132	91	37	4	0
6	BUMI AGUNG	136	22	112	2	0
7	GUNUNG LABUHAN	176	166	10	0	0
8	KASUI	156	109	47	0	0
9	NEGARA BATIN	268	182	84	2	0
10	NEGERI AGUNG	136	118	18	0	0
11	NEGERI BESAR	128	88	40	0	0
12	PAKUAN RATU	250	88	161	1	0
13	REBANG TANGKAS	92	7	85	0	0
14	WAY TUBA	136	108	25	3	0
	TOTAL	2472	1618	835	19	0

Sumber : Data Diolah, Dinas TPHP Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

2.3.2.5 Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan dihitung dengan perbandingan jumlah penduduk usia < 15 tahun dan > 64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun, sedangkan yang dikategorikan sebagai penduduk usia non produktif adalah penduduk berusia dibawah 15 tahun (karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya) dan penduduk berusia diatas 65 tahun karena umumnya sudah melewati masa pensiun.

Tabel 2.57 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Way Kanan Tahun 2017-2021

Indikator	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Rasio Ketergantungan (%)	50,33	50,15	49,98	48,44

Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2022

Dari tahun ke tahun, angka *dependency ratio* menunjukkan penurunan, yang berarti bahwa semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

2.3.3.1. Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik

Transportasi menjadi hal yang sangat penting dalam pembangunan suatu wilayah, baik pembangunan di sektor ekonomi, sosial, maupun pendidikan. Transportasi yang baik tentunya akan menekan biaya produksi, memudahkan akses dalam mendapatkan barang ataupun menjual barang,serta memperlancar mobilisasi penduduk yang pada akhirnya akan menggerakkan roda ekonomi suatu daerah. Perkembangan panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2023 yaitu sepanjang 1.055,9 Km dimana panjang jalan Kabupaten tanpa Panjang Jalan Provinsi dan Jalan Negara sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Way Kanan, Nomor : B.142/IV.08-WK/HK/2023 Tentang Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten. Adapun panjang jalan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.58 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Way Kanan Tahun 2018-2023

Indikator	Tahun					
	22018	22019	22020	2021 ¹⁾	2022	2023
Panjang jalan dalam kondisi baik (Km)	604,42	607,22	607,22	464,21	303,24	233,35
Panjang jalan dalam kondisi Sedang (Km)	310,63	327,10	327,10	752,64	462,42	163,42
Panjang jalan dalam kondisi Rusak Ringan(Km)	588,09	559,90	559,90	835,64	223,15	119,61

Indikator	Tahun					
	22018	22019	22020	2021*)	2022	2023
Panjang jalan dalam kondisi Rusak Berat (Km)	506,15	515,67	515,67	300,41	1 021,08	539,52
Jumlah/Total (Km)	2009,89	2009,89	2009,29	2 352,90	2 009,90	1.055,9

Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2024

*) Panjang Jalan Kabupaten tanpa Panjang Jalan Provinsi dan Jalan Negara

1. Panjang Jalan Menurut Pemerintah Yang Berwenang di Kabupaten Way Kanan

Total panjang jalan di Kabupaten Way Kanan pada tahun 2023 sepanjang 1,398,90 Km, terdiri dari Jalan Negara sepanjang 81,90 Km, Jalan Provinsi sepanjang 261,10 Km dan Jalan Kabupaten Sepanjang 1.055,90 Km. Perkembangan panjang jalan menurut Pemerintah yang berwenang dari tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.59 Panjang Jalan Menurut Pemerintah yang Berwenang di Kabupaten Way Kanan Tahun 2018-2023

Jenis Jalan	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jalan Negara (Km)	81,9	81,9	81,9	81,9	81,9	81,9
Jalan Provinsi (Km)	261,10	261,10	261,10	261,10	261,10	261,10
Jalan Kabupaten (Km)	2.009,89	2.009,89	2.009,89	2.009,89	2.009,89	1.055,90
Jumlah/Total (Km)	2.352,89	2.352,89	2.352,89	2.352,89	2.352,89	1.398,90

Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2015-2016, Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2024

2. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Di Kabupaten Way Kanan

Total panjang jalan Menurut Permukaan di Kabupaten Way Kanan pada tahun 2023 sepanjang 1.055,90 Km, terdiri dari Jalan diaspal sepanjang 522,93 Km, Jalan Krikil sepanjang 185,92 Km, Jalan Tanah sepanjang 77,20, Jalan Beton sepanjang 14,09 Km, Jalan Lapen sepanjang 255,76 Perkembangan panjang jalan menurut jenis permukaan dari tahun 2018- 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.60 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan di Kabupaten Way Kanan Tahun 2018-2023

Jenis Permukaan	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aspal/ Paved (Km)	1046,89	1071,70	1145,60	1145,60	607,64	522,93
Kerikil/ Gravel (Km)	4,20	4,80	544,90	544,90	453,72	185,92

Tanah/ Soil (Km)	706,95	686,01	270,80	270,80	390,28	77,20
Beton/Concrete (Km)	-	-	-	-	37,29	14,09
LAPEN/Macadam (Km)	-	-	-	-	520,96	255,76
Lainnya (KM)	251,86	247,39	48,60	52,94	-	-
Jumlah/Total (Km)	2009,89	2009,89	2009,89	2009,89	2 009,90	1.055,90

Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2024

*) Panjang Jalan Kabupaten tanpa Panjang Jalan Provinsi dan Jalan Negara

2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

2.3.4.1 Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran). Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Perkembangan ICOR Kabupaten Way Kanan, dapat dilihat pada gambar berikut.

Tabel 2.61 Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kabupaten Way Kanan Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
PDRB (ADHK 2010) (Miliar Rp)	9.573,82	9.462,31	9.736,50	10 165,60	10.635,97
Perubahan (Miliar Rp)	470,94	(111,51)	274,19	429,10	470,37
PMTB (ADHK 2010) (Miliar Rp)	3.218,43	3.119,84	3.229,96	3 343,65	3.479,85
ICOR	6,83	(27,98)	11,78	7,79	7,40

Sumber: PDRB Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 *Angka sementara

**Angka sangat sementara () Bernilai negatif

Berdasarkan penghitungan pada tabel terlihat bahwa besaran ICOR tahun 2019-2023 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2020 angka ICOR Kabupaten Way Kanan bertanda negatif sebesar -27,98. Artinya, *output* di tahun 2020 lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini akibat adanya pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, tidak terkecuali Kabupaten Way Kanan. Kondisi ekonomi pada saat itu mengalami penurunan. Penanaman barang modal baru pada tahun 2020 belum menghasilkan *output* secara optimal atau dapat dikatakan investasi yang ditanamkan belum/tidak efesien. Berdasarkan nilai ICOR, dapat dikatakan bahwa perekonomian Way Kanan di tahun 2020 kurang

efesien dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan nilai ICOR yang bertanda positif sebesar 11,78.

Pemulihan perekonomian terus berlangsung hingga tahun 2023, terlihat dari nilai ICOR Kabupaten Way Kanan yang masih sangat membutuhkan banyak investasi untuk mendongkrak perekonomian yang berdampak kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Way Kanan kaya akan potensi sumber daya alam. Namun, pemanfaatannya masih kurang optimal dikarenakan kurangnya investasi yang masuk di Way Kanan. Investasi di semua sektor seperti industri, pariwisata, angkutan dan pertanian selain mampu meningkatkan produksi juga menyerap tenaga kerja.

2.3.4.2Perkembangan UMKM di Kabupaten Way Kanan

Peran UMKM terhadap perekonomian sangat besar, karena UMKM mampu menyerap tenaga kerja yang berdampak pada investasi. Di Kabupaten Way Kanan jumlah perkembangan jumlah UMKM di Kabupaten Way Kanan terus meningkat pada tahun 2019 jumlah UMKM sebanyak 6.131,- unit menjadi 57.876,-. Diharapkan dengan tumbuhnya UMKM ini dapat berdampak pada investasi didaerah.

Tabel 2.62 Perkembangan Jumlah UMKM Kabupaten Way Kanan Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	Jumlah				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	BAHUGA	179	847	431	431	1181
2	BANJIT	710	2139	2280	2280	4306
3	BARADATU	296	3582	3278	3278	14999
4	BLAMBANGAN UMPU	1144	8163	4960	4960	9499
5	BUAY BAHUGA	257	1878	1076	1075	2095
6	BUMI AGUNG	378	1817	1412	1412	2050
7	GUNUNG LABUHAN	398	2476	2205	2205	4523
8	KASUI	824	2788	2462	2462	1711
9	NEGARA BATIN	777	1828	1040	1040	1422
10	NEGERI AGUNG	187	3055	3325	3325	6603
11	NEGERI BESAR	244	1431	1219	1219	737
12	PAKUAN RATU	186	1469	2174	2174	1068
13	REBANG TANGKAS	350	1588	1612	1612	1594
14	WAY TUBA	201	1424	1350	1350	921
15	UMPU SEMENGUK			1902	1902	5167
Jumlah		6.131	34.485	30.726	30.725	57.876

Sumber: Way Kanan Dalam Angka 2024

Dari sisi permodalan dan kelembagaan, perlunya dukungan pemerintah terhadap UMKM juga dapat meningkatkan peran ekonomi rakyat sebagai kekuatan dan ketahanan ekonomi daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal ini dapat dilakukan dengan penguatan kelembagaan koperasi di Kabupaten Way Kanan. Berikut disajikan data keragaan koperasi di Kabupaten Way Kanan.

Tabel 2.63 Data Keragaan Koperasi di Kabupaten Way Kanan Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Koperasi Aktif	83	99	111	120	119
Koperasi Sehat				24	12
RAT	52	42	42	28	-

Sumber: Way Kanan Dalam Angka 2024

2.3.4.3 Angka Kriminalitas Yang Dilaporkan

Kriminalitas adalah segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku serta norma-norma sosial dan agama. Angka kriminalitas merupakan suatu angka yang menunjukkan kejadian kriminalitas yang terjadi pada suatu waktu dan daerah tertentu. Tindak kejahatan/kriminalitas dapat terjadi karena adanya kepincangan sosial, tekanan mental, dan kebencian. Selain itu juga karena adanya perubahan masyarakat dan kebudayaan yang cepat tetapi tidak dapat diikuti oleh seluruh anggota masyarakat, sehingga tidak terjadi penyesuaian yang sempurna.

Tabel 2.63 Jumlah Kriminalitas (*Crime Total*) yang dilaporkan Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Angka Kriminalitas yang di Laporkan	429	425	351	425

Sumber : Statistik Keamanan Provinsi Lampung Tahun 2019-2023

Dalam rentang tahun 2017-2022, angka kriminalitas sebanyak 494 kasus pada tahun 2017 hingga 425 kasus pada tahun 2022, artinya angka kriminalitas cenderung mengalami penurunan.

Tabel 2.64 Tingkat Resiko Terkena Kejahatan (*Crime Rate*) di Kabupaten Way Kanan Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tingkat Resiko Terkena Kejahatan	111,78	68,37	95,31		74,29	88,69

Sumber : Statistik Keamanan Provinsi Lampung Tahun 2017-2022

Setiap penduduk memiliki resiko terkena tindak kejahatan. Semakin besar resiko yang dimiliki penduduk menggambarkan bahwa semakin tidak aman suatu wilayah. Pada tahun 2022 terlihat bahwa Way Kanan memiliki crime rate sebesar 88,69 yang berarti bahwa setiap 100.000 orang penduduk di Kabupaten Way Kanan ada sebanyak 89 orang memiliki resiko terkena tindak kriminalitas. Indeks Daya Saing Daerah.

Pada tahun 2022 Indeks Daya Saing Daerah sebesar 2,67 poin masih berada di bawah Provinsi Lampung sebesar 3,02 dimana Kabupaten Way Kanan masih perlu upaya meningkatkannya.

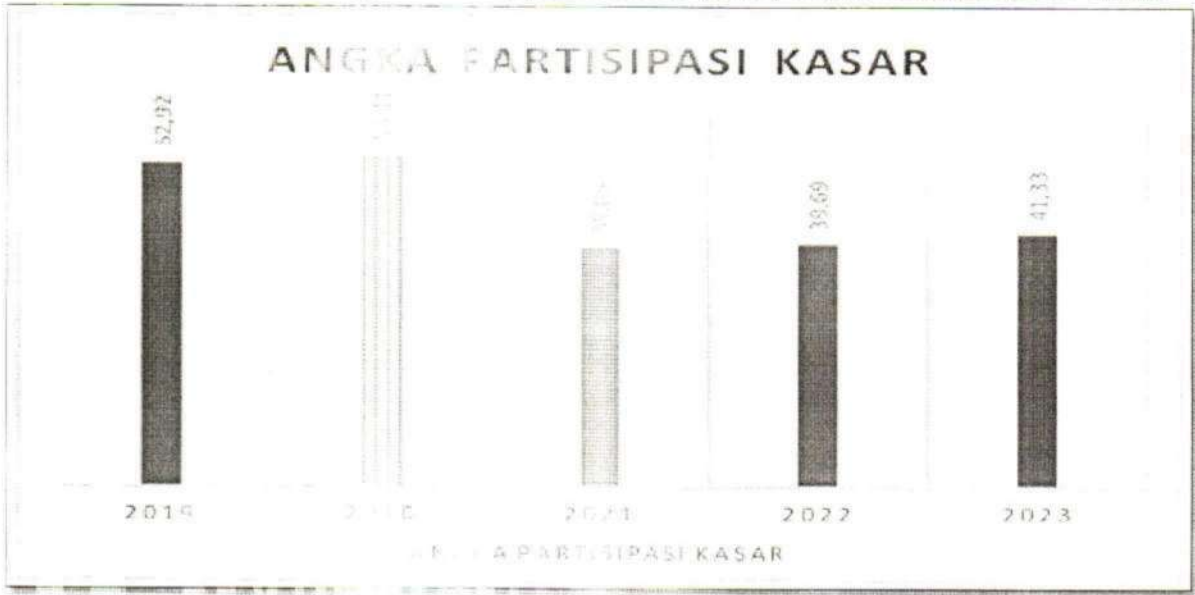
2.4 Aspek Pelayanan Umum
2.4.1 Fokus Urusan Layanan Wajib
2.4.1.1 Pendidikan

Kinerja pembangunan bidang urusan Pendidikan yang dicapai Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018-2023 dapat dilihat dari pencapaian terhadap indikator berikut ini:

A. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan PAUD merupakan gambaran jumlah penduduk yang sedang mengikuti pendidikan PAUD dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah PAUD, perkembangan APK PAUD Kabupaten Way Kanan Tahun 2019-2023 berfluktuatif dimana Pada tahun 2019 sebesar 52,92 turun menjadi 39,69 pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023 naik kembali menjadi 41,33

Gambar 2.38 Angka Partisipasi Kasar (APK) Paud Tahun 2019-2023

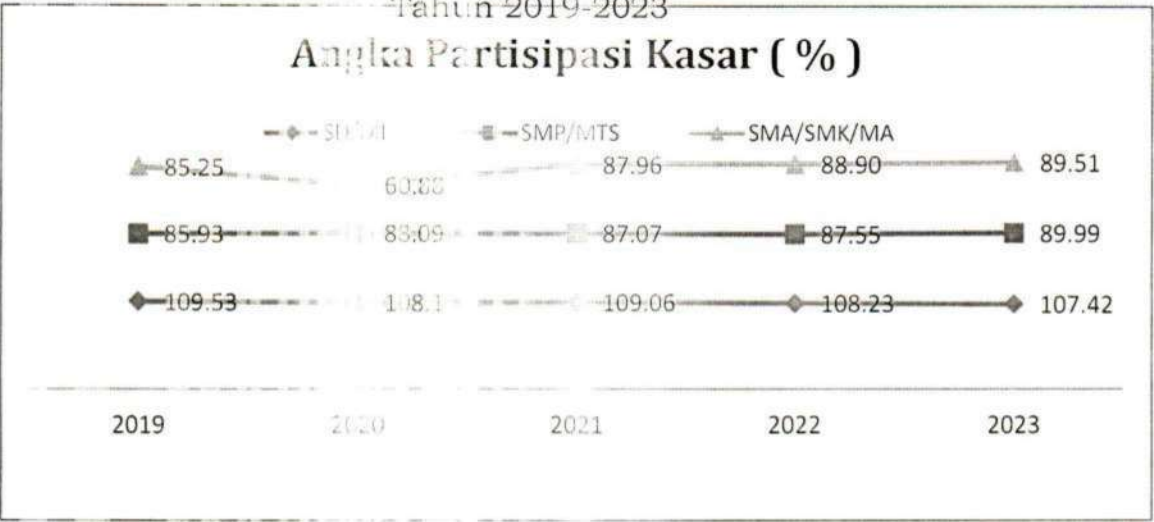


Sumber : Dinas Pendidikan Dalam Angka Tahun 2019-2023

B. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Sekolah merupakan gambaran jumlah penduduk yang sedang mengikuti pendidikan Sekolah dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah, gambaran umum APK Kabupaten Way Kanan Tahun 2018-2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.38 APK Pendidikan di Kab. Way Kanan Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kabupaten Way Kanan Tahun 2024

a. Sekolah Dasar (SD)/MI

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Sekolah Dasar merupakan gambaran jumlah penduduk yang sedang mengikuti pendidikan jenjang Sekolah Dasar dibandingkan dengan jumlah penduduk usia Sekolah Dasar. Perkembangan APK SD Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 s.d 2023 mengalami pluktuatif. Pada tahun 2019 sebesar 109,53, kemudian pada tahun 2020 turun menjadi 108,1 dan di tahun 2023 menjadi 107,42.

b. Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan gambaran jumlah penduduk yang sedang mengikuti pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama dibandingkan dengan jumlah penduduk usia Sekolah Menengah Pertama. perkembangan APK SMP Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 s.d 2023 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2019 sebesar 85,93 dan pada tahun 2023 menjadi sebesar 89,99.

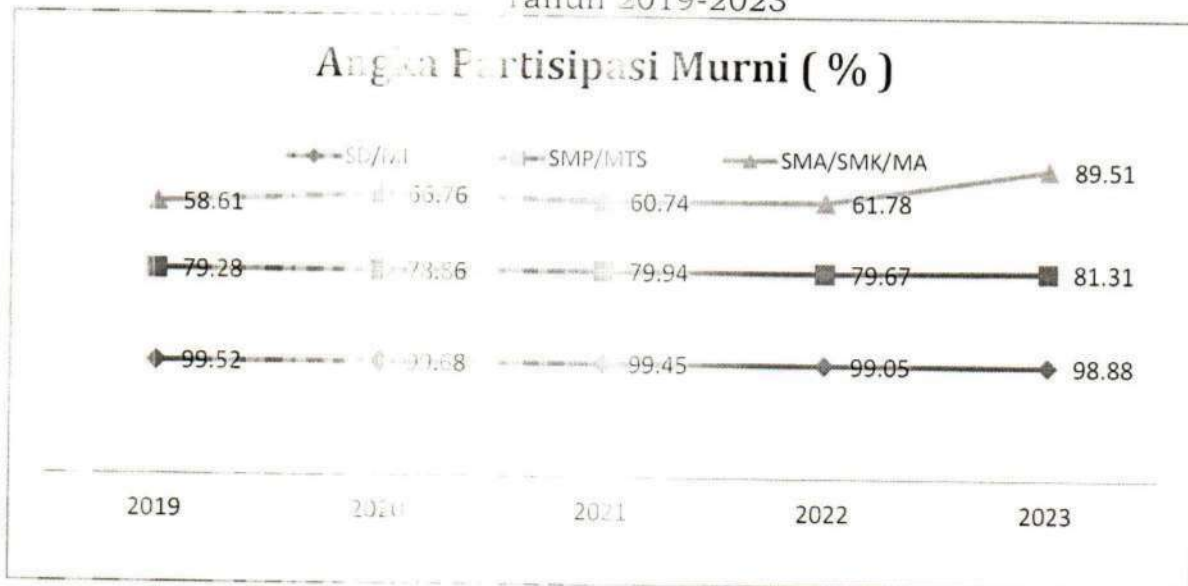
c. Sekolah Menengah Atas (SMA)

Pada periode tahun 2019 s.d 2023, APK SMA mengalami angka Fluktuatif, pada tahun 2019 sebesar 85,25 persen, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 60,88 persen, kemudian tahun 2023 menjadi 89,51 persen.

d. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan menggambarkan jumlah penduduk usia sekolah yang mengikuti jenjang pendidikan sekolah, yang dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah. gambaran umum APM Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 s.d 2023 sebagai berikut:

Gambar 2.39 APM Pendidikan di Kabupaten Way Kanan
Tahun 2019-2023



Sumber: Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2024

1. Sekolah Dasar (SD)

Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Sekolah Dasar (SD) menggambarkan jumlah penduduk usia sekolah dasar yang mengikuti jenjang pendidikan sekolah dasar, yang dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah dasar, perkembangan APM SD Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 sampai dengan 2023 mengalami Fluktuatif. Pada tahun 2019 sebesar 99,52 persen terus mengalami kenaikan hingga tahun 2020 sebesar 99,68, namun kemudian mengalami penurunan hingga tahun 2023 menjadi 98,88 persen.

2. Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Untuk Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) menggambarkan jumlah penduduk usia Sekolah Menengah Pertama yang mengikuti jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

Perkembangan APM SMP Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 sampai dengan 2023 mengalami Fluktuatif dimana pada tahun 2019 sebesar 58,61 persen terus mengalami pluktuatif pada tahun 2020 menurun 66,76 dan kemudian pada tahun 2023 sebesar 89,51 persen.

3. Sekolah Menengah Atas (SMA)

Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) menggambarkan jumlah penduduk usia Sekolah Menengah Atas yang mengikuti jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas. Pada tingkat SMA/SMK/ sederajat mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2019 sebesar 57,63 persen terus mengalami kenaikan hingga tahun 2020 sebesar 66,76 persen, namun pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi sebesar 60,74 dan naik kembali pada tahun 2022 menjadi sebesar 61,78 persen.

e. Angka Putus Sekolah (APS)

Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI, dan SMP/MTs dapat di lihat pada gambar berikut:

Tabel 2.64 Angka Putus Sekolah (APS) Tahun 2019-2023

Tahun	Jenjang Sekolah Dasar (SD)		Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)	
	Jumlah Siswa	Angka Putus Sekolah	Jumlah Siswa	Angka Putus Sekolah
2019	50.240	3	16.937	9
2020	49.810	3	16.783	8
2021	48.651	7	17.837	2
2022	48.294	2	18.234	3
2023	47.946	8	18.748	7

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan, Data Dapodik Tahun 2024 (Dapodik)

Jumlah Angka putus sekolah pada tingkat & jenjang SD mengalami fluktuatif, pada tahun 2019 Angka Putus Sekolah sebanyak 3 Orang, kemudian pada tahun 2021 sebanyak 7 (tujuh) orang dan tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 3 orang. Sedangkan untuk Jenjang SMP pada tahun 2019 sebanyak 9 orang mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi 3 orang.

f. Angka Kelulusan (AK)

Jumlah lulusan pada jenjang SD pada tahun 2020 sebesar 100 persen. Kemudian pada tahun 2023 pada jenjang SD dari jumlah siswa kelas 6 sebanyak 8.315 siswa hanya sebanyak 8.288 siswa yang dinyatakan lulus atau sebesar 99,7 persen. Pada jenjang SMP pada tahun 2022 dari total siswa 5.882 sebanyak 5.798 siswa yang lulus atau sebesar 98,6 % dan pada tahun 2023 dari 5.710 siswa yang duduk di jenjang SMP dinyatakan lulus sebesar 100%.

Tabel 2.65 Kelulusan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Way Kanan Tahun 2020-2023

TAHUN PELAJARAN (TP)	Sekolah Dasar (SD)		Sekolah Menengah Pertama	
	Jumlah Siswa Kelas	Kelulusan	Jumlah Siswa kelas 9	Kelulusan
TP 2019/2020	-	-	5.285	5,256
TP 2020/2021	-	-	-	-
TP 2021/2022	-	7.794	-	5.657

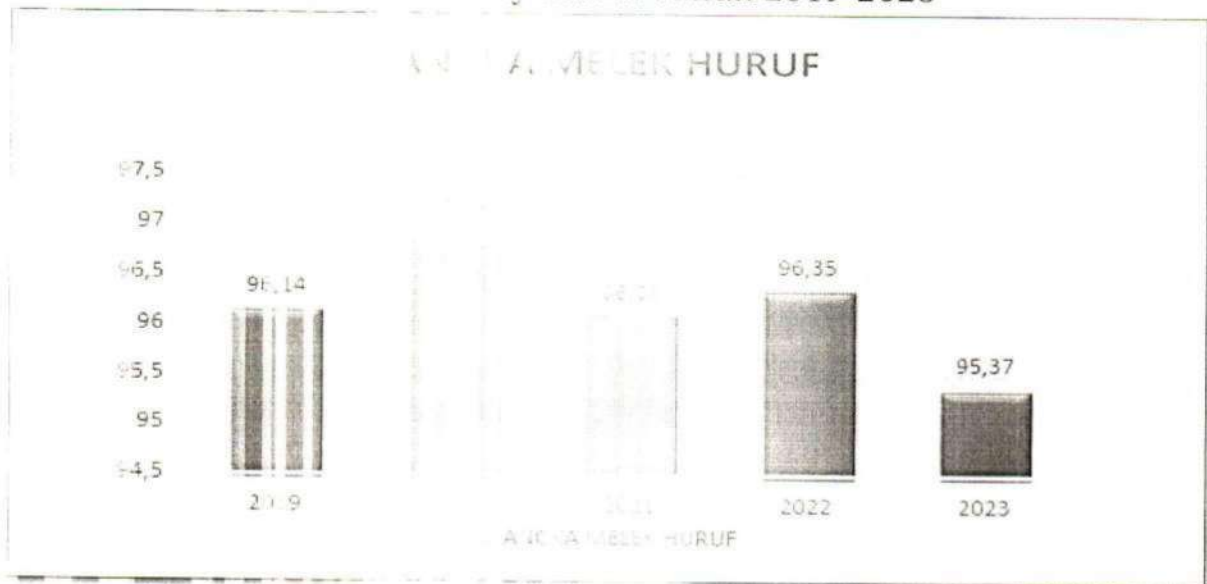
TAHUN PELAJARAN (TP)	Sekolah Dasar (SD)		Sekolah Menengah Pertama	
	Jumlah Siswa Kelulusan	Kelulusan	Jumlah Siswa kelas 9	Kelulusan
TP 2022/2023	-	-	5.882	5.798
TP 2023/2024	8.315	8.288	5.710	5.710

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024

g. Penduduk Yang Berusia > 15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)

Tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Way Kanan secara umum dapat terukur melalui indikator tertentu, salah satu diantaranya adalah angka melek huruf. Angka melek huruf adalah angka yang dipakai untuk menyatakan persentase penduduk usia > 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis. Pada tahun 2018 angka melek huruf di Kabupaten Way Kanan mencapai 95,78 persen, mengalami kenaikan hingga pada tahun 2020 menjadi 96,90 persen, dan pada tahun 2021 turun menjadi 96,68 persen. Dan kembali naik pada tahun 2022 menjadi sebesar 96,35 persen. Perkembangan angka melek huruf setiap tahunnya, dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2.40 Perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Way Kanan Tahun 2019-2023



Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2024

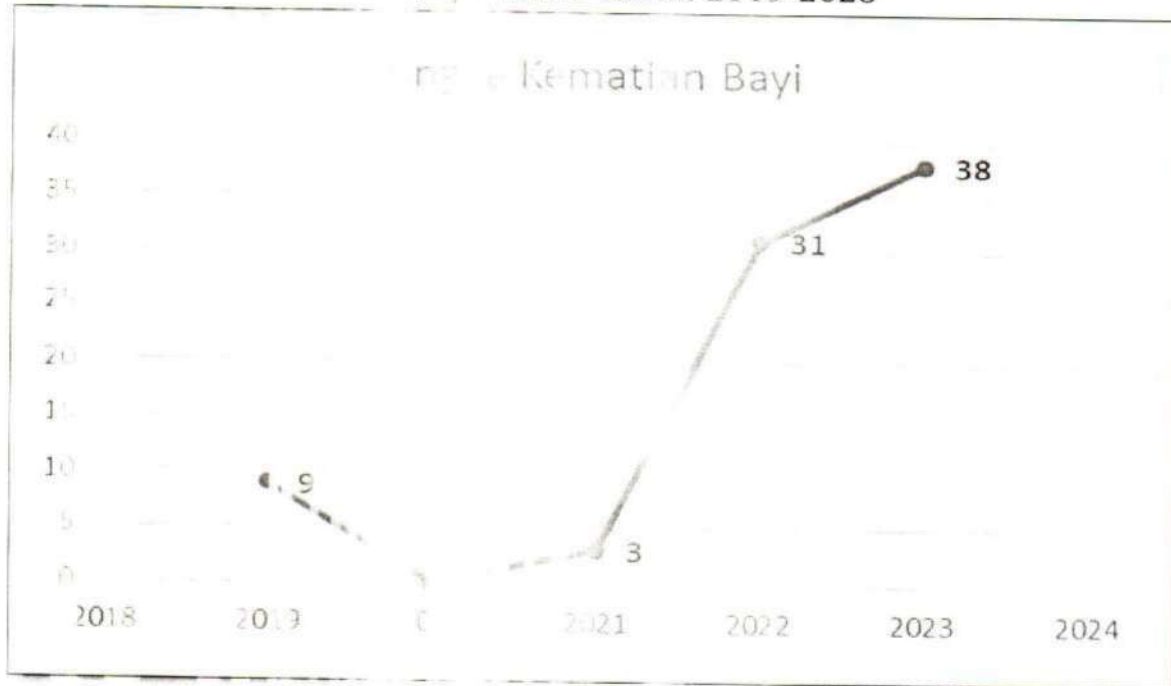
2.4.1.2 Kesehatan

Capaian pembangunan bidang Kesehatan yang dicapai Pemerintah Kabupaten Way Kanan dapat dilihat dari pencapaian terhadap indikator berikut ini:

A. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah penduduk yang meninggal sebelum mencapai usia 14 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Bayi merupakan kondisi yang rentan baik terhadap kesakitan maupun kematian. Angka kematian bayi di Kabupaten Way Kanan terus mengalami penurunan. Pada tahun 2018 sebanyak terdapat 10 kasus sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan yang signifikan terdapat 9 kasus pada tahun 2020 terdapat 0 kasus, serta pada tahun 2022 terdapat 31 kasus dan pada tahun 2023 Angka Kematian Bayi naik menjadi 38 kasus. Berikut ini gambaran kematian kematian bayi.

Gambar 2.41 Jumlah Kasus Kematian Bayi Di Kabupaten Way Kanan Tahun 2019-2023



Sumber Data: Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

B. Angka Kematian Balita

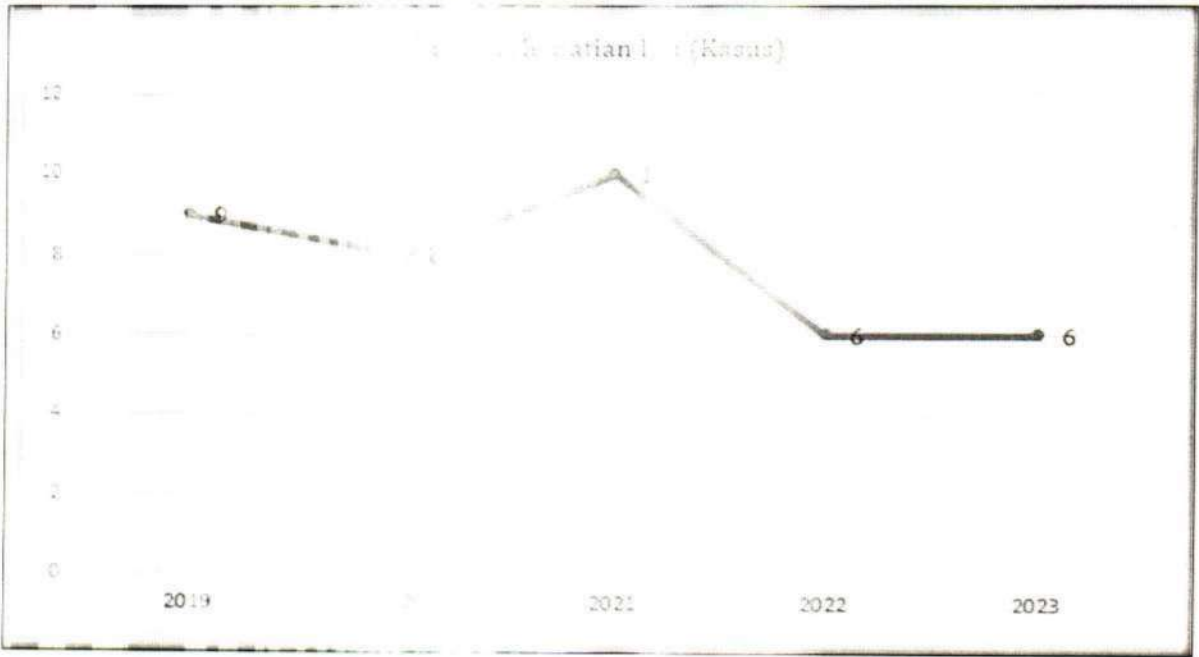
Angka Kematian Balita adalah jumlah kematian anak yang berumur <5 tahun per 1000 kelahiran hidup. Berdasarkan data yang diperoleh diketahui pada tahun 2016 kematian balita tidak didapatkan laporan kematian balita. Pada tahun 2017 tidak didapatkan kematian pada balita, kemudian pada tahun 2018 terdapat jumlah kematian balita sebanyak 13 kasus terdiri dari Neonatal (0-28 hari) 8 kasus, Bayi (0-11 bulan) 4 kasus, Anak balita (12-59 bulan) 1 kasus dan pada tahun 2019 terdapat 9 kasus terdiri dari Neonatal (0-28 hari) 7 kasus, Bayi (0-11 bulan) 2 kasus, tidak ada kasus pada anak balita (12-59 bulan). pada tahun 2023 tidak terdapat kasus kematian balita di Kabupaten Way Kanan.

C. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu juga menjadi salah satu indikator penting dari derajat kesehatan masyarakat. AKI menggambarkan jumlah wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (baik termasuk kecelakaan / kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Berdasarkan grafik terdapat 6 kasus kematian ibu tahun 2023 dibawah ini dapat diketahui bahwa jumlah kasus kematian ibu mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 yaitu dari 9 kasus menjadi 6 kasus.

Gambar 2.4. Kasus Kematian Ibu Kabupaten Way Kanan Tahun 2019-2023



Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan, Tahun 2023

Bila dilihat Penyebab kasus kematian ibu di Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 disebabkan oleh perdarahan, kelainan jantung dan pembuluh darah dan lain-lain.

D. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang di Tangani

Tabel 2.65 Jumlah Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Tahun 2019-2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan	354	861	803	851	644

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan pada tahun 2019 sebanyak 851 kasus, dan pada tahun 2023 sebanyak 644 kasus.

E. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Tabel 2.66 Jumlah Cakupan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2019-2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	8.009	7.781	8.679	8.521	7.566

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

Pelayanan kesehatan ibu antenatal care dapat dipantau melalui pelayanan kunjungan ibu hamil (K1) yang cakupannya dilihat dari akses dan pelayanan kesehatan ibu hamil yang sedikit empat kali (K4) dengan kualitas frekuensi sekali pada triwulan pertama, sekali pada triwulan kedua, dan dua kali pada triwulan ketiga.

Pada tahun 2023, jumlah kunjungan bumil K4 sebanyak 7.566 orang. Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan pada tahun 2019 sebanyak 8.009 orang dan jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Way Kanan tahun 2022 terdapat sebanyak 8.521 orang.

F. Jumlah Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan neonatal (KN) merupakan persentase neonatal (bayi kurang dari satu bulan yang memperoleh pelayanan kesehatan minimal 2 kali dari tenaga kesehatan, satu kali pada umur 0-7 hari dan satu kali pada umur 8-28 hari). Jumlah kunjungan neonatus lengkap di Kab. Way Kanan tahun 2023 sebanyak 7.581. Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.67 Jumlah Kunjungan Bayi Tahun 2019-2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah kunjungan bayi	8.069	8.069	8.069	7.249	7.581

Sumber Data : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

G. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Program Imunisasi merupakan salah satu upaya untuk melindungi penduduk terhadap penyakit tertentu. Beberapa penyakit menular yang termasuk ke dalam penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) antara lain : Difteri, Tetanus, Hepatitis B, Radang selaput otak, radang paru-paru, pertusis dan polio. Cakupan UCI (Universal Child Immunization) tahun 2022 di Kab. Way Kanan adalah seluruh 227 dari 227 desa/kelurahan (100 %) dengan cakupan imunisasi dasar lengkap sebanyak 7,559 bayi. Pencapaian UCI pada dasarnya merupakan pemenuhan terhadap cakupan imunisasi secara lengkap pada sekelompok bayi jika cakupan UCI dikaitkan dengan batasan suatu wilayah tertentu. Berarti dalam wilayah tersebut tergambar besarnya tingkat kekebalan masyarakat (*herd immunity*) terhadap penularan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Hal ini disebabkan oleh Adanya keterlambatan logistic ketersediaan vaksin di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Kementerian Kesehatan untuk bayi dan Balita.

Tabel 2.68 Kampung/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Tahun 2019-2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah kampung/kelurahan kategori UCI	227	227	227	207	227

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

H. Cakupan Balita Gizi Buruk yang dapat Perawatan

Kondisi gizi buruk berakibat buruk dan berakibat parah dari proses terjadinya kekurangan gizi menjadi gangguan persentase balita gizi buruk merupakan persentase balita dalam kategori gizi buruk (berat badan sangat kurang) terhadap jumlah keseluruhan balita. Kondisi ini dapat dilihat dari keadaan tubuh anak atau bayi berdasarkan berat badan menurut umur. Untuk status gizi balita secara sederhana dapat dilakukan dengan melakukan perbandingan antara berat badan menurut umur dengan panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Bila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, maka anak tersebut status gizi baik. Bila sedikit berada di bawah

standar maka disebut berstatus gizi kurang. Sedangkan jika jauh di bawah standar dikatakan berstatus gizi buruk.

Tabel 2.69 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan 2019-2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan(%)	100	100	100	100	100

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

Semua balita berstatus gizi buruk di Kabupaten Way Kanan dari tahun 2019 sampai tahun 2023 mendapatkan perawatan yaitu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sebanyak 14 balita.

I. Cakupan Penemuan Dan Pengobatan Penderita Penyakit TBC, BTA

Tuberkulosis merupakan salah satu masalah kesehatan global yang memerlukan perhatian khusus. Tuberkulosis adalah penyakit saluran nafas dalam, yang menyerang paru-paru. Bakteri TB yang terinfeksi dan mengancam nyawa jika tidak diterapi dengan tuntas.

Jumlah penderita TB BTA (+) yang ditemukan dan diobati di Kabupaten Way Kanan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.70 Jumlah Penderita Penyakit TB BTA Tahun 2019-2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah penemuan dan pengobatan kasus penderita penyakit TB BTA	750	529	557	582	416

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

Tabel 2.71 Cakupan Penemuan dan Pengobatan Penderita Penyakit TB BTA Tahun 2019-2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan penemuan dan pengobatan kasus penderita penyakit TB BTA (%)	126	81,01	100	111,5	123,9

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, persentase keberhasilan pengobatan TBC di Kabupaten Way Kanan, yaitu tahun 2019-2023 sudah mencapai rata-rata > 90%. Kegiatan untuk menemukan dan mengobati penderita TB BTA (+) sampai sembuh serta melaporkan kasus TB BTA (+) perlu ditingkatkan pelaksanaannya untuk menurunkan angka morbiditas TBC dan mencegah penularan TB BTA (+) dapat tercapai.

J. Penemuan Kasus Penyakit TB BTA (+) di Kabupaten Way Kanan Tahun 2019-2023

Berdasarkan data di atas, terdapat 10 penemuan kasus TB BTA (+) di Kabupaten Way Kanan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.72 Jumlah Per e
Tahun 2019-20

NO.	JENIS PENYAKIT	2019	2020	2021	2022	2023
1	PENYAKIT TEKANAN DARAH TINGGI	23.192	14.228	13.650	11.528	8.747
2	PENYAKIT PADA SYSTE M OTOT DAN JARINGAN PENGIKAT	21.133	9.586	8.627		2.862
3	INFEKSI AKUT LAIN PADA SALURAN NAFAS BAGIAN ATAS	21.094	25.702	32.177	33.488	14.980
4	DIARE	15.110	1.081	3.559		3.404
5	PENYAKIT LAIN PADA SALURAN NAFAS BAGIAN ATAS	13.112	7.923	116		
6	INFEKSI PENYAKIT USUS YANG LAIN	33.43	19.617	10.990		
7	ASMA	12.111	4.777	3.636	2.765	
8	PENYAKIT KULIT ALERGI	3.714				
9	PENYAKIT MATA, LAIN-LAIN					
10	PENYAKIT KULIT INFEKSI	12.11	1.571	1.585		
11	PENYAKIT LAINNYA/radang sendi termasuk rematik / <i>Al. ser System Disease Gastritis/</i>	21.148		19.725		22.230

Sumber : Kabupaten Way Kana

Penanganan penyakit
harus terus dilakukan baik
cara meningkatkan pelayan

K. Cakupan Penanganan Per

DBD adalah penyakit
yang masukperedaran darah
misalnya Aedes aegypti atau
paling banyak ditemukan
virus dengue setelah menghi
Sesudah masa inkubasi vi
terinfeksi dapat menanai
digitnya.

11. Kasus Penyakit di Kabupaten Way Kanan

2019	2020	2021	2022	2023
23.192	14.228	13.650	11.528	8.747
21.133	9.586	8.627		2.862
21.094	25.702	32.177	33.488	14.980
15.110	1.081	3.559		3.404
13.112	7.923	116		
33.43	19.617	10.990		
12.111	4.777	3.636	2.765	
3.714				
12.11	1.571	1.585		
21.148		19.725		22.230

Angka Tahun 2023

pemberantasannya di Kabupaten Way Kanan
upaya preventif, kuratif dan promotif dengan
pada masyarakat.

11.1.1. Penanganan Penyakit DBD

akut yang disebabkan oleh virus dengue,
melalui gigitan nyamuk dari genus Aedes,
terutama Aedes aegypti. Aedes aegypti adalah vektor yang
akan penularan ini, nyamuk dapat membawa
orang-orang telah terinfeksi virus tersebut.
nyamuk selama 8-10 hari, nyamuk yang
virus dengue tersebut ke manusia sehat yang

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) kasusnya cenderung meningkat dan semakin luas penyebarannya serta berpotensi menimbulkan KLB. Angka Kesakitan (IR) selama tahun 2019–2023 cenderung mengalami penurunan yg signifikan dibandingkan tahun 2022 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.73 Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) Tahun 2019-2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah penemuan dan penanganan Kasus penderita penyakit DBD	114	141	54	114	56

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2022, WKDA 2024

L. Sistem Perlindungan Sosial

Untuk mengakhiri segala bentuk kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Way Kanan memberikan sejumlah program kesejahteraan sosial terutama dibidang kesehatan dan ketenagakerjaan. Pada Tahun 2022 penerima bantuan berjumlah 383.130 jiwa, dengan rincian Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN adalah 248.913 Jiwa (64,97 %), Peserta PBI APBD sebanyak 34.472 Jiwa (9 %), Peserta Pekerja bukan penerima upah (PBPU)/mandiri sebanyak 45,309 Jiwa (12,31 %), Pekerja Penerima Upah sebanyak 37,997 (13,05 %) Peserta bukan pekerja sebanyak 2,040 Jiwa(0,67 %). dan Pada Tahun 2023 penerima bantuan berjumlah 472.097 jiwa, dengan rincian Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN adalah 290.831 Jiwa (61,60 %), Peserta PBI APBD sebanyak 83.623 Jiwa (17,71 %), Peserta Pekerja bukan penerima upah (PBPU)/mandiri sebanyak 46.675 Jiwa (9,84 %), Pekerja Penerima Upah sebanyak 46.675 (9,88 %) Peserta bukan pekerja sebanyak 4.504 Jiwa(0,95 %), Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.74 sedangkan untuk Kepesertaan Jaminan Kesehatan/ *Universal Health Coverage* (UHC) Kabupaten Way Kanan tahun 2024 sebesar 99% .

Tabel 2.74 Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk Kabupaten Way Kanan Tahun 2019-2023

No	Jenis Jaminan Kesehatan	Peserta Jaminan Kesehatan				
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Jaminan Kesehatan Nasional					
1.1	Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN	226,002	229,821	186.931	248.913	290.831
1.2	PBI APBD	32,949	47,732	41,736	34.472	83.623
1.3	Pekerja penerima upah (PPU)	27,708	37,997	27,127	47.160	46,464
1.4	Pekerja bukan penerima upah (PBPU)/mandiri	42,791	45,309	43,085	50.007	46,675
1.5	Bukan pekerja (BP)	1848	2.040	1,375	2.578	4,504
2	SUB JUMLAH NON PBI					
3	Jamkesda					

No	Jenis Jaminan Kesehatan	Peserta Jaminan Kesehatan				
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
4	Asuransi Swasta					
5	Asuransi Perusahaan					
JUMLAH		331.298	317.590	300.254	383.130	472.097

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

M. Angka Kejadian Covid-19 Di Kabupaten Way Kanan (S.D Bulan Januari 2022)

Tabel 2.75 Kasus Covid-19 di Kabupaten Way Kanan

No	Kecamatan	Kasus Konfirmasi Covid-19	Selesai Isolasi	Kasus Kematian
1	Blambangan Umpu	119	106	13
2	Baradatu	130	121	9
3	Gunung Labuhan	48	43	5
4	Negeri Agung	50	47	3
5	Pakuan Ratu	25	21	4
6	Negara Batin	30	27	3
7	Negeri Besar	4	4	0
8	Way Tuba	56	53	3
9	Bumi Agung	63	59	4
10	Buay Bahuga	28	27	1
11	Bahuga	16	15	1
12	Kasui	49	44	5
13	Banjit	136	129	7
14	Rebang Tangkas	22	18	4
15	Umpu Semenguk	85	79	6
Total		861	793	68

Sumber : Gugus Tugas Covid-19 Kab. Way Kanan

Tabel 2.76 Kasus Covid-19 di Kabupaten Way Kanan, Provinsi, Nasional dan Global

AREA	POSITIF	SEMBUH	MENINGGAL
Global	245.373.039	240.393.618	4.979.421
Nasional	4.243.835	4.088.138	143.388
Lampung	49.541	45.142	3.811
Way Kanan	861	793	68

Sumber : Gugus Tugas Covid-19

2.4.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

A. Pekerjaan Umum

Kinerja pembangunan bidang pekerjaan umum Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan tahun 2022 dapat dilihat dari pencapaian terhadap indikator berikut ini:

1. Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Tabel 2.77 Capaian Jaringan irigasi dalam kondisi baik Tahun 2020-2023

Indikator	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Persentase	26	28,5	28,86	35,32
D.I	37	45	18	10

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

Daerah Irigasi Pada tahun 2020 jaringan irigasi dalam kondisi baik sebesar 26 persen atau sebanyak 37 DI, kemudian tahun 2021 menjadi 28,5 persen dan pada tahun 2023 menjadi 35,32 atau Daerah Irigasi sebanyak 10.

B. Jaringan Irigasi

Potensi Lahan Persawahan di Kabupaten Way Kanan didukung oleh banyaknya sungai-sungai yang ada, seperti Way Umpu dengan panjang sungai 100 Km dengan DAS 1.179 Km², Way Besai dengan panjang sungai 113 Km dengan DAS seluas 870 Km², Way Tahmi panjang 60 Km dengan DAS 550 Km², Saluran Cannal Komering panjang 35 Km (wilayah Way Kanan). Penanganan Jaringan irigasi teknis di Kabupaten Way Kanan pada kondisi saat ini baru memanfaatkan Way Umpu sebagai sumber air irigasi meliputi wilayah 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Banjit dan Kecamatan Baradatu dengan masing-masing luas persawahan fungsional 4.064 Ha dan 3.413 Ha.

Kabupaten Way Kanan merupakan lumbung padi yang potensial untuk dikembangkan kedepan dalam upaya perkuatan pangan di daerah, hal ini dapat kita tinjau dari potensi-potensi jaringan irigasi yang ada di Kabupaten ini baik yang dikelola secara optimal maupun yang belum tertangani secara Optimal oleh Kabupaten seperti Daerah Irigasi (DI) Komering , karena sebagian irigasi ini masuk daerah Kabupaten Way Kanan dengan luas lahan terairi kurang lebih 2.456 Ha dari lahan baku 5.136 Ha yang terletak pada Kecamatan Bumi Agung seluas 860 Ha dan sisanya terletak pada Kecamatan Buay Bahuga dan Bahuga. Selain DI Komering, Kabupaten Way Kanan memiliki DI Way Umpu dan Way Neki dengan data- data sebagai berikut :

DI Way Umpu

- Type bendung : Bangunan Sadap /River Weir
- Lokasi : Desa Rantau Temiang Kecamatan Banjit
- Tahun Bangun : 1977
- Tahun Operasional : 1982
- Perencana : Nippon Koei
- Pelaksana Pembangunan :
- Lahan Rencana : 12.500 Ha
- Lahan Baku : 5.013 Ha
- Lahan Olahan : 7.487 Ha
- Lokasi Lahan Olahan : Kecamatan Banjit : 4.064 Ha,

Kecamatan Baradatu : 3.413 Ha

- Debit Rencana (Q) : 12.442 l/dt
- Luas Basah (L) : 956,0 m
- Saluran Primer dibagi 2 (dua) Saluran yaitu :
- Bangunan Neki (BN)
- Luas Lahan Olahan : 5.238 Ha

- Debit Rencana (Q) : 7.805 l/dt
- Lokasi Lahan terairi : Kec. Banjit 2.021 Ha, Kec. Baradatu 3.217 Ha
- Panjang Saluran Primer : 28 Km
- Bangunan Rantau Temiang (BRT)
- Luas Lahan Olahan : 2.249 Ha
- Debit Rencana (Q) : 3.351 l/dt
- Lokasi Lahan terairi : Kec. Banjit 2.043, Kec. Baradatu 206 Ha
- Panjang Saluran Primer : 6,3 Km

DI Way Neki

- Type bendung : Bangunan Sadap kecil /Weir
- Lokasi : Desa Jukuh Batu
- Tahun Bangun : 1982
- Tahun Operasional : 1982
- Perencana : Nippon Koei
- Pelaksana Pembangunan : PT.***..
- Lahan Baku : - Ha
- Lahan Olahan : 229 Ha
- Lokasi Lahan Olahan : Kecamatan Banjit : 229 Ha
- Debit Rencana (Q) : 500 l/dt

Untuk itu Pemerintah Provinsi Lampung melalui Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji- Sekampung pada tahun 2006 telah melakukan study dan kajian. Kajian terhadap optimalisasi permasalahan pada DI Way Umpu sesuai dengan kewenangannya, sehingga disimpulkan sebagai optimalisasi lahan persawahan yang ada dengan menambah suplay air dari Way Besai /Way Besai river weir and suplection cannal yang terletak pada Umbul Nanas yang terhubung pada BN 5-6 di Kecamatan Banjit.

Data-data sebagai berikut :

- Type bendung : Bangunan Sadap / Way Besai River Weir
- Lokasi : Umbul Nanas Kec. Banjit
- Perencana : Nippon Koei
- Panjang Saluran Primer : 6,7 Km
- Lebar Lahan Pembesian : 100 mtr
- Sasaran : BN 5 - BN 6 Saluran Primer Way Umpu
- Type sasaran : Penambahan Debit / Suplay Cannal
- Debit Rencana : 500 lt/det.

Dimensi Rencana :

- Dimensi Bangunan Sadap / River wier
 - Bentang Sungai : 60 Meter
 - Bangunan Pelimpas : Tinggi 7 Meter
 - Pintu Air :
- Dimensi Saluran Primer / Suplection Cananal

Type Saluran : Saluran Terbuka & Talang Ar : 3.540 Ha Qr : 6,03

m³/det b : 3,20 m

h : 1,5 m m : 0

k : 70

v : 1,303 m/s l : 0,00050 w : 0,75 m

Way Besai river weir and Suplection Cannal ini adalah secercah harapan bagi Kabupaten Way kanan untuk menjadi daerah lumbung padi terbesar diprovinsi Lampung dalam rangka mendukung program nasional mencapai swasembada pangan nasional dengan perkuatan swasembada pangan didaerah yang merupakan tanggung jawab bersama baik itu pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagai upaya memenuhi Standar Optimalisasi Kebutuhan Hidup Masyarakat guna meningkatkan tarap hidup yang layak dan mensejahteraan masyarakat.

Perhatian Pemerintah pusat dalam upaya realisasi sangat diharapkan, mengingat kewenangan kabupaten hanya terbatas pada pengelolaan jaringan

irigasi dengan luasan < 1.000 Ha, disisi lain dukungan Pemerintah propinsi dan segenap stake holder sangat diharapkan dalam upayarealisasipembangunan ini, karena pertimbangan keuangan Kabupaten serta kewenangan penangan tidak memungkinkan untuk dapat merealisasikan harapan masyarakat ini.

Rumah Tangga Bersanitasi di Kabupaten Way Kanan SPAL adalah Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL) terpadu. Dalam sistem pembuangan limbah cair seperti ini, air limbah ruta tidak ditampung dalam tangka atau wadah semacamnya, tetapi langsung dialirkan ke suatu tempat pengolahan limbah cair.

Tabel 2.78 Persentase Rumah Tangga menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja Kabupaten Way Kanan Tahun 2019-2023

No	Tahun	Tempat Pembuangan Akhir Tinja		Jumlah
		Tangki septik/IPAL/ SPAL	Lainnya	
1	2019	23,89	76,11	100
2	2020	42.84	57.16	100
3	2023	33,53	66,47	100

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab. Way Kanan Tahun 2016-2020, 2023

Berdasarkan tabel 2,78 bahwa data tempat pembuangan akhir tinja seperti Tangki septik/IPAL/SPAL mengalami fluktuatif. Di tahun 2019 Tangki septik/IPAL/SPAL sebesar 23.89 persen kemudian pada tahun 2023 sebesar 33,53 persen begitu juga lainnya, Tahun 2019 sebesar 76 persen kemudian di tahun 2023 sebesar 66,47 persen. Kemudian untuk persentase rumah tangga menurut Sumber Air Minum dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.79 Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum Kabupaten Way Kanan Tahun 2019-2023

Sumber Air Minum	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Air Kemasan Bermerk, Air Isi Ulang	-	2,32	2,89	1,99	-
Ledeng meteran, ledeng eceran	-	0,87	0,41	0,17	1,22
Sumur Bor/Pompa	22,45	27,74	31,22	33,00	31,51
Sumur Terlindung/Sumur tak terlindung	16,46	20,82	28,81	28,16	60,54
Mata Air Terlindung/Mata Air Tak Terlindung	58,98	47,68	32,26	32,81	4,11
Air Permukaan, Air Hujan, lainnya, Tidak Memasak	-	2,89	0,53	2,00	2,62

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab. Way Kanan Tahun 2023 Statistik Kesejahteraan Rakya provinsi Lampung 2020-2022

Data tabel menunjukkan bahwa persentase rumah tangga menurut sumber air minum Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 yaitu ledeng eceran 1,22, sumur bor /pompa sebesar 31,51, sumur terlindung 60,54 dan air permukaan, air hujan, lainnya sebesar 2,2. Dari data tersebut terlihat adanya peningkatan dari tahun ketahun. Hal ini berarti bahwa secara positif persentase rumah tangga mengalami peningkatan yang signifikan.

D. Penataan Ruang

Sesuai dengan konsep pengembangan tata ruang wilayah Kabupaten Way Kanan, maka strategi pengembangan adalah pemerataan pelayanan dan penjalaran fungsi-fungsi pusatpusat pelayanan. Oleh karena itu perlu pembentukan pusat-pusat yang mampu memberikan pelayanan secara optimal ke seluruh wilayah. Rencana Pengembangan Sistem Pusat-Pusat Pelayanan (Pusat Kegiatan) di wilayah Kabupaten Way Kanan diarahkan untuk meningkatkan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menyangkut pemenuhan kebutuhan masyarakat termasuk dalam penyediaan sarana dan prasarana utama penunjang yang pengadaannya dikelola secara terpadu. Penerapan kebijaksanaan setiap sistem kegiatan pembangunan berbeda-beda tergantung dari kebutuhan tiap-tiap wilayah.

Arahan pengembangan pusat kegiatan dilakukan melalui pengembangan pusat-pusat permukiman baik pusat permukiman perkotaan maupun perdesaan untuk melayani kegiatan ekonomi, pelayanan pemerintahan dan pelayanan jasa, bagi kawasan permukiman maupun daerah sekitarnya. Pusat-pusat kegiatan ditujukan untuk melayani perkembangan berbagai usaha atau kegiatan dan permukiman masyarakat dalam wilayahnya dan wilayah sekitarnya. Identifikasi kegiatan lokal di Kabupaten Way Kanan yang dapat dijadikan acuan pengembangan PKWp, PKLp, PPK, dan PPL dapat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.80 Deskripsi Kegiatan Lokal di Kabupaten Way Kanan
Tahun 2011-2031

Kegiatan	Deskripsi
Kawasan Sawah Irigasi	Irigasi teknis hanya terdapat di Kecamatan Banjit, Baradatu, Kasui, Way Tuba, Bahuga, BuayBahuga, danBumiAgung
Industri skala kabupaten dan beberapa kecamatan	<ul style="list-style-type: none">• Industri pengolahan tebu, dan pabrik gula di Kec. Pakuan Ratu• Industri pengolahan Kelapa Sawit di Kec. Bumi Agung• Industri Pengalengan Buah Nanas di Kec. Pakuan Ratu• Industri Batu Belah di Kec. Gunung Labuhan

Kegiatan	Deskripsi
Pusat pengelolaan air bersih	<ul style="list-style-type: none"> • IKK Kasui. • IKK Baradatu. • IKK Banjit. • IKK Blambangan Umpu. • Kecamatan Bumi Agung. • IKK Gunung Labuan.
Pasar skala kawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Banjit, Baradatu, dan Kasui
Simpul transportasi skala kabupaten dan beberapa kecamatan:	
1. Bandar Udara	<ul style="list-style-type: none"> • Pangkalan Udara Gatot Subroto di Kec. Way Tuba
2. Terminal	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana pengembangan terminal di Kec. Pakuan Ratu, dan Way Tuba
Kawasan Wisata	<ul style="list-style-type: none"> • wisata agro perkebunan karet, kopi, kakao, coklat, ladang kelapa sawit di kecamatan Blambangan Umpu, Kasui Banjit, Baradatu, Bahuga, dan Pakuan Ratu.

Sumber: RTRW Kabupaten Way Kanan 2011-2031

Dengan pertimbangan tersebut, maka rencana PKWp, PKLp, PPK, dan PPL di Kabupaten Way Kanan Tahun 2010-2030 dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.81 PKWp, PKLp, PPK, dan PPL di Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2031

No	Nama Kota	Hierarki	Fungsi Utama
1	Perkotaan Blambangan Umpu di Kec. Blambangan Umpu	PKWp	<ul style="list-style-type: none">• Pusat pemerintahan kabupaten,• Perdagangan• Pertanian• Industri Agro
2	Perkotaan Tiuh Balak Pasar di Kec. Baradatu	PKLp	<ul style="list-style-type: none">• Pusat pemerintahan kecamatan• Pertanian• Perdagangan• Pusat koleksi dan distribusi
3	Perkotaan Pasar Banjit di Kec. Banjit	PPK	<ul style="list-style-type: none">• Pusat Pemerintahan kecamatan• Pertanian• Perdagangan• Pusat koleksi dan distribusi
4	Perkotaan Jaya Tinggi di Kec. Kasui	PPK	<ul style="list-style-type: none">• Pusat Pemerintahan kecamatan• Pertanian• Perdagangan• Pusat koleksi dan distribusi
5	Desa Way Tuba di Kec. Way Tuba	PPL	<ul style="list-style-type: none">• Pusat Pemerintahan kecamatan• Industri agro
6	Desa Pakuan Ratu di Kec. Pakuan Ratu	PPL	<ul style="list-style-type: none">• Pusat Pemerintahan kecamatan• wisata
7	Desa Bumi Agung di Kec. Bumi Agung	PPL	<ul style="list-style-type: none">• Pusat Pemerintahan kecamatan• Industri agro

Sumber: RTRW Kabupaten Way Kanan 2011-2031

Pembangunan bidang tata ruang di Kabupaten Way Kanan khususnya ruang terbuka hijau baru mencapai 20%.

2.4.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kinerja pembangunan bidang perumahan yang dicapai Pemerintah Kabupaten Way Kanan dapat dilihat dari pencapaian terhadap indikator berikut ini:

A. Pengelolaan Air Bersih Dan Sanitasi Layak

Kelengkapan fasilitas pokok suatu rumah tinggal akan menentukan kualitas dan kenyamanan dari rumah tinggal tersebut. Fasilitas pokok yang penting agar suatu rumah menjadi nyaman dan sehat untuk ditinggali adalah tersedianya air minum layak. Air bersih (dalam hal ini air minum layak) dan sanitasi layak termasuk dalam infrastruktur fisik untuk layanan dasar, guna

menunjang aktivitas kehidupan masyarakat. Saat ini, penyediaan air minum dan sanitasi layak belum menjangkau seluruh masyarakat Kabupaten Way Kanan. Rumah Tangga pengguna air bersih di Tahun 2023 atau sebanyak 551 Rumah Tangga, turun dibandingkan dari Tahun 2018 sebanyak 930 Rumah Tangga.

Tabel 2.82 Banyaknya Rumah Tangga Pengguna Air Bersih dan Banyaknya Air Bersih yang disalurkan di Kabupaten Way Kanan Tahun 2018-2023

NO	Keterangan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Pelanggan(Rumah Tangga)	930	558	558	550	550	551
2.	Air yang Disalurkan (M3)	134.070	130.440	123.182	114.060	82.075	75.574

Sumber: Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2024

Sejalan dengan peningkatan cakupan sanitasi layak, Pemerintah menggalakkan Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) atau Open Defecation Free (ODF). Open Defecation Free (ODF) merupakan suatu kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan dengan desa/kelurahan yang 100% masyarakatnya telah buang air besar di jamban sehat. Kabupaten Way Kanan melakukan percepatan menjadi kabupaten yang meraih status “Bebas Buang Air Besar Sembarangan” pada tahun 2019. Terdapat pengaruh yang cukup signifikan antara pelaksanaan program ODF dengan penurunan perilaku Buang Air Bebas Sembarangan (BABS). Permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam pemenuhan cakupan air minum dan sanitasi layak yaitu : (1) Penyediaan pasokan air bersih baik, (2) Sistem penyediaan air minum dan sanitasi, (3) Penurunan kualitas sumber air baku, (4) Kesadaran masyarakat akan kualitas lingkungan masih kurang (5) Peningkatan laju pertumbuhan penduduk yang belum diikuti dengan peningkatan penyediaan sarana prasarana pembuangan air limbah.

Lingkungan Sehat Perumahan dilaksanakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Pekerjaan Umum dengan sasaran pembangunan daerah yang masih kekurangan sarana sanitasi dasar serta perilaku BABS masyarakat, yakni : Pembangunan MCK Kombinasi + IPAL di 14 (empat belas) kampung.

Sumber daya air memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pengembangan kawasan industri dan pengembangan potensi pertanian di Kabupaten Way Kanan. Pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air meliputi sistem wilayah sungai, sistem jaringan irigasi, sistem pengelolaan air baku untuk air minum dan industri serta sistem pengendalian banjir. Pemenuhan kebutuhan akan ketersediaan air baku di Kabupaten Way Kanan untuk memenuhi kebutuhan domestik, perkotaan, pertanian dan industri; Pemanfaatan dan pengelolaan air tanah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung kegiatan perekonomian dengan prioritas untuk kebutuhan pokok rumah tangga, pemukiman, pertanian dan industri. Pengembangan sistem air minum pada pengelolaan sumber air yang ada, pemanfaatan sumber air baku dan peningkatan jaringan distribusi.

Pengembangan jaringan air baku dan air minum pada wilayah Way Talang Mangga di Kasui, Way Nencar di Way Tuba, Way Nangayu di Banjit, Way Menanga Siamang, Way Tahmi di Rebang Tangkas, Way Umpu. Pemanfaatan sumber- sumber air baku permukaan dan air tanah mencakup pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air baku untuk air minum dan industri di Kabupaten Way Kanan. Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku pada tahun 2017 dilaksanakan dengan pembuatan

sumur-sumur air bawah tanah/ bor pada areal permukiman serta daerah-daerah dengan kategori rawan air pada 10 (sepuluh) kecamatan, pembangunan SPAM sebanyak 8 kampung di 7(tujuh) kecamatan, serta Pembangunan Jaringan SR SPAM di 1 (satu) kampung di kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan terletak pada Wilayah Sungai Mesuji Tulang Bawang yang merupakan wilayah sungai lintas provinsi yang menjadi wewenang Pemerinah Pusat. Pengelolaan sumberdaya air Kabupaten Way Kanan merupakan bagian dari (enam) daerah aliran sungai (DAS) yaitu Way Kanan, Way Pisang, Way Umpu, Way Besai, Way Giham, dan Way Tahmi.

Kabupaten Way Kanan memiliki beberapa wilayah sungai yang berpotensi menjadi sumber penyediaan air bersih, yaitu wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai strategi nasional, wilayah sungai kabupaten/kota dan wilayah sungai yang melayani kawasan strategi kabupaten sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, sedangkan daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Way Kanan berada pada 51 (Lima puluh satu) daerah irigasi.

B. Persentase Air Minum yang Dilakukan Pemeriksaan

Jumlah sarana air minum yang memenuhi syarat tahun 2019 terdapat 37 (66,1%) dari jumlah sarana air minum 91. Jumlah sarana air minum di IKL ada 70 (76,9%), Jumlah sarana air minum dengan resiko rendah+sedang terdapat 60 (85,7%) dan Jumlah sarana air minum yang di ambil sampel ada 56 (61,5%).

C. Akses Terhadap Jamban Sehat

Adapun Penduduk dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (Jamban Sehat) terdapat pada tabel berikut.

Tabel 2.83 Penduduk dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi yang Layak (Jamban Sehat) Menurut Kecamatan, dan Puskesmas Kabupaten Way Kanan Tahun 2017-2021

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	SHARING/KOMUNAL		JAMBAN SEHAT SEMI PERMANEN (JSSP)		JAMBAN SEHAT PERMANEN (JSP)		KK/PENDUDUK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG LAYAK (JAMBAN SEHAT)	
		JUMLAH SARANA	JUMLAH KK/ PENDUDUK PENGGUNA	JUMLAH SARANA	JUMLAH KK/ PENDUDUK PENGGUNA	JUMLAH SARANA	JUMLAH KK/ PENDUDUK PENGGUNA	JUMLAH	%
2017	441.922	42	2.236	27.740	107.273	48.327	189.630	299.139	68
2018	446.113	44	2.425	38.455	108.833	48.889	191.823	303.081	67,9
2019	450.109	4.853	18.618	32.109	124.210	78.640	307.281	450.109	100,0
2020	473.575	2.281	3.460	27.515	30.446	84.017	88.469	122.375	100,0
2021	476.870	2,160	3,198	26,795	31,611	87,436	91,122	125,931	100,0

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2017- 2021

Berdasarkan data tabel Jumlah penduduk (KK) dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (Jamban Sehat) tahun 2021 sebanyak 125,931 (100,0%) dari 125,931 KK. Jumlah Sarana Sharing Komunal 2,160 dari jumlah KK 3,198, Jumlah Jamban Sehat Semi Permanen (JSSP) 26,795 dari jumlah KK 31,611 dan Jumlah Jamban Sehat Permanen (JSP) 87,436 dari jumlah KK 88.469.

2.4.1.5 Tempat-Tempat Umum Sehat

Jumlah tempat-tempat umum yang memenuhi syarat di Kabupaten Way Kanan tahun 2019 ada 1.609 buah (62.6%), Jumlah sarana Sekolah Dasar (SD) 257 buah (72.4%) dari 355 buah SD yang diperiksa, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sebanyak 70 (69,3%) buah dari 101 SLTP yang diperiksa, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sebanyak 58 (69%) dari 84 SLTA yang diperiksa, sedangkan tempat-tempat umum di sarana 126ana nada yang memenuhi syarat adalah Puskesmas terdapat 19 (100%) PKM dari 19 PKM yang ada, Rumah Sakit 4 RS (100%) dari 4 RS yang ada, sedangkan untuk Tempat Ibadah terdapat 1.175 (60,1%) dari 1.955 Tempat Ibadah yang ada dan untuk Pasar terdapat 26 (48,1%) dari 54 Pasar yang ada.

Pada tahun 2020 Jumlah tempat-tempat umum yang memenuhi syarat ada 1.224 buah (61.8%), Jumlah sarana pendidikan sekolah dasar (SD) 251 buah (72.3%) dari 347 buah SD yang diperiksa, sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) sebanyak 92 (81,4%) buah dari 113 SLTP yang sekolahpdiperiksa, sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) sebanyak 54 (78,3%) dari 69 SLTA yang diperiksa, sedangkan tempat-tempat umum di sarana Kesehatan yang memenuhi syarat adalah Puskesmas terdapat 62 buah (83,8%) dari 74 buah TTU yang ada, Rumah Sakit 5 buah (100%) dari 5 buah TTU yang ada, sedangkan untuk Tempat Ibadah terdapat 734 (56,1%) dari 1.309 Tempat Ibadah yang ada dan untuk Pasar terdapat 26 (40,6%) dari 64 Pasar yang ada.

2.4.1.6 Desa yang Melaksanakan STBM

Desa di Kabupaten Way Kanan pada tahun 2021 Jumlah Desa di Kabupaten Way Kanan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) ada 227 desa (100%) dan yang melaksanakan Stop BABS (SBS) ada 227 desa (100%) dari 227 jumlah desa yang ada di Kabupaten Way Kanan.

Tabel 2.84 Desa Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Kabupaten Way Kanan Tahun 2018-2022

NOTAHUN		JUMLAH DESA/ KELURAHAN	SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)					
			DESA MELAKSANAKAN STBM		DESA STOP BABS (SBS)		DESA STBM	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	2018	227	226	99,6	123	54,19	-	0,00
2	2019	227	227	100	227	100	-	0,00
3	2020	227	227	100	227	100	-	0,00
4	2021	227	227	100	227	100	0,00	0,00

Sumber : Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2022

2.4.1.7 Lingkungan Permukiman Kumuh

Sebaran perumahan dan pemukiman kumuh di Kabupaten Way Kanan sesuai dengan SK-Kumuh yang dikeluarkan oleh Bupati Way Kanan Nomor B.130/III.10-WK/HK/2014 tentang Kawasan Kumuh di Kabupaten Way Kanan. Adapun Kawasan kumuh ini tersebar di 7 Kecamatan antara lain : Kecamatan Blambangan Umpu Desa Lembasung terletak di RW 1 dengan Luasan ± 1.392 Ha, Kecamatan Baradatu Kampung Tiuh Balak Pasar terletak di RW 2 dengan Luasan ± 2.161 Ha, Kecamatan Banjit Kampung Pasar Banjit memiliki luasan ± 1.630, Kecamatan Kasui Kampung Kasui Pasar terletak di RW 2 dengan luasan ±7.271, Kecamatan Negara Batin Kampung Sri Menanti dengan luasan ± 7.121 Ha, Kecamatan Pakuan Ratu Kampung Pakuan Ratu terletak di RW 4 dengan

luasan ± 3.364 Ha, dan Kecamatan Negeri Besar Kampung Kiling-Kiling terletak di dusun 4 memiliki luasan ± 11.423 Ha. Namun, permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dalam pemenuhan rumah layak huni adalah (1) Penyediaan sarana dasar seperti rumah layak huni, dengan dilengkapi fasilitas sanitasi, air bersih layak, dan listrik; (2) Ketimpangan kebutuhan dan ketersediaan rumah (Backlog); (3) Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada masyarakat miskin masih cukup besar dan (4) Terdapatnya Kawasan Permukiman Kumuh.

2.4.1.8 Rumah Layak Huni

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni dan terjangkau didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Way Kanan didasarkan pada hasil dari kegiatan analisis pada tahap sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, wilayah Kabupaten Way Kanan secara umum menunjukkan permasalahan perumahan dan permukiman, lebih banyak menunjukkan permasalahan kualitas, terutama dalam hal permasalahan kualitas fisik. Dalam hal ini, kegiatan perbaikan atau peningkatan kualitas perumahan dan permukiman ini diprioritaskan bagi kawasan yang mengidentifikasi kondisi-kondisi sebagai berikut :

1. Mayoritas kondisi umum lingkungannya kumuh dan tidak layak huni.
2. Terkait/ menjadi bagian dari upaya penanggulangan kejadian luar biasa.
3. Tingkat kepadatan tinggi dengan tingkat pelayanan prasarana dan sarana dasar yang tidak memadai (kualitas maupun kuantitasnya)
4. Memerlukan upaya revitalisasi atau re-fungsionalisasi karena keuntungan yang akan diperoleh, melalui program konsolidasi lahan.

Tabel 2.85 Banyaknya Perumahan Rakyat Menurut Kategori Rumah Per Kecamatan Tahun 2020

Nama Kecamatan	Permanen	Semi Permanen	Sederhana	Jumlah
Banjit	2.737	4.184	6.316	13.237
Baradatu	3.042	2.826	2.909	8.759
Gunung Labuhan	2.434	2.552	2.567	7.553
Kasui	2.204	2.780	3.268	8.252
Rebang Tangkas	2.215	1.341	2.792	6.348
Blambangan Umpu	6.470	30.022	21.165	57.657
Way Tuba	2.096	2.790	2.437	7.323
Negeri Agung	4.340	3.872	1.773	9.985
Bahuga	916	1.031	1.440	3.364
Buay Bahuga	1.826	2.552	1.191	5.569
Bumi Agung	3.312	1.823	1.970	7.150
Pakuan Ratu	7.235	2.045	1.017	10.297
Negara Batin	4.290	1.320	4.249	9.591
Negei Besar	1.458	1.564	2.055	5.076

Jumlah	44.575	60.702	55.149	150.176
--------	--------	--------	--------	---------

Sumber : Kecamatan Dalam Angka Kabupaten Way Kanan, 2021

Tingkat kemiskinan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat kemiskinan maka semakin besar pula keinginan masyarakat untuk mencari penghidupan yang lebih layak dengan merantau ke daerah lain. Namun tingginya persaingan antar etnis pendatang membuat sebagian pendatang tidak dapat memperoleh akomodasi yang layak atau biasa disebut dengan perumahan tidak layak huni (RTLH). Meningkatnya jumlah pendatang juga menyebabkan pemerintah sebagai salah satu penyedia perumahan masyarakat tidak mampu menyediakan perumahan bagi seluruh pendatang yang ada, sehingga mengakibatkan bertambahnya jumlah penghuni kamp kerja paksa yang ada. Berikut jumlah dan sebaran RTLH di wilayah Kabupaten Way Kanan.

Tabel 2.86 Data Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Way Kanan

Kecamatan	Jumlah RTLH
Bahuga	157
Banjit	1557
Baradatu	492
Blambangan Umpu	622
Umpu Semenguk	608
Buay Bahuga	12
Bumi Agung	326
Gunung Labuhan	439
kasui	1286
Negara Batin	123
Negeri Agung	404
Negeri Besar	234
Pakuan Ratu	349
Rebang Tangkas	174
Way Tuba	619
Total	7402

2.4.1.9. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

A. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten

Kebakaran merupakan bencana yang lebih banyak disebabkan oleh kelalaian manusia (human error) dengan dampak kerugian harta benda, stagnasi atau terhentinya usaha, terhambatnya perekonomian dan pemerintahan bahkan korban jiwa. Data menunjukkan kejadian kebakaran yang menimpa bangunan perumahan/permukiman penduduk pada umumnya terbakar habis karena menggunakan bahan/elemen yang mudah terbakar. Sedangkan pada bangunan gedung dengan rangka beton masih meninggalkan sisa rangka fisik. Berikut data cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten Way Kanan tahun 2019-2023.

Tabel 2.86 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Way Kanan Tahun 2019-2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	0.00066588	0.00066588	0.00066588	0.00066588	0.00066588

Sumber : BPBD Kabupaten Way Kanan Tahun 2024

B. SOSIAL

Keberhasilan pembangunan bidang sosial yang dicapai Pemerintah Kabupaten Way Kanan dapat dilihat dari pencapaian terhadap indikator berikut ini:

2.4.1.10. Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Dewasa ini masalah PMKS khususnya anak jalanan, gepeng, gelandangan psikotik dan WTS kesemuanya membutuhkan perhatian yang intensif dan segera agar tidak berkembang makin mencemaskan. PMKS jalanan memiliki mobilitas yang sangat tinggi, seringkali terjadi lintas kota-kabupaten sehingga sulit bisa terselesaikan hingga tuntas jika hanya menggantungkan pada komitmen politik satu-dua daerah saja.

Tabel 2.87 Jumlah Penyandang PMKS Kabupaten Way Kanan Tahun 2019-2023

No	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	2019	2020	2021	2022	2023
1	Anak balita terlantar	178	165	-		
2	Anak terlantar	195	54	139	174	174
3	Anak Berhadapan dengan Hukum	19	13	1	18	18
4	Anak jalanan	11	11	-		
5	Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)	296	256	256	209	209
6	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan	7	61	29	32	32
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	6	1	-	4	4
8	Lanjut Usia Terlantar	7144	19.933	27.997	27.998	27.998
9	Penyandang Cacat / Disabilitas	2434	2.027	2.102	1.893	1.893
10	Tuna Susila	7	7	-		
11	Gelandangan	10	22	-	4	4
12	Pengemis	17	17	-	9	9

No	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	2019	2020	2021	2022	2023
13	Pemulung	138	138	43	4	4
14	Kelompokminoritas	13	13	-		
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	55	55	-	168	168
16	Orang Dengan HIV / AIDS(ODHA)	-	-	-		
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	27	46	2	67	67
18	Korban trafficking	5	5	-		
19	KorbanTindak Kekerasan	7	7	-		
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	-	-	-		
21	Korban Bencana Alam	-	13.826	50	15	15
22	Korban Bencana Sosial	-	23	-		
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	944	949	949	13.741	13.741
24	Fakir Miskin	53.027	54.952	99.974	99.803	95.923
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	-	56	-	30	30
26	Komunitas Adat Terpencil	46	-	-		
Jumlah		64.586	92.637	131. 542	144.294	140,414

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 Ket :(*) Data bulan Juni 2020

Permasalahan PMKS terbanyak di Kabupaten Way kanan yaitu fakir miskin, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, dan Korban Bencana Alam. Data PMKS di Kabupaten Way kanan mengalami peningkatan selama periode 2019- 2023. Jumlah PMKS tertinggi sebesar 144.294 orang pada Tahun 2022. Kategori PMKS yang memiliki jumlah tertinggi selama periode tahun 2019- 2023 adalah fakir miskin.

Tabel 2.88 Jumlah Penerima PKH Kabupaten Way Kanan Tahun 2018-2022

NO	KECAMATAN	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	BAHUGA	490	552	585	653	631
2	BANJIT	3.155	3.054	3.131	3.141	3.082
3	BARADATU	1.735	1.738	1.745	1.828	1.958
4	BLAMBANGAN UMPU	3.107	3.342	3.333	3.721	1.876
5	BUAY BAHUGA	563	593	623	685	694
6	BUMI AGUNG	1.044	1.148	935	1.099	975

NO	KECAMATAN	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
7	GUNUNG LABUHAN	1.967	1.991	1.761	1.912	1.997
8	KASUI	2.312	2.211	1.926	2.237	2.247
9	NEGARA BATIN	1.942	1.963	1.827	2.029	2.081
10	NEGERI AGUNG	1.658	1.627	1.607	1.757	1.859
11	NEGERI BESAR	697	794	795	837	761
12	PAKUAN RATU	1.779	1.794	2.016	2.287	2.312
13	REBANG TANGKAS	1.665	1.793	1.629	1.850	1.725
14	WAY TUBA	1.100	1.150	1.156	1.336	1.346
15	UMPU SEMENGUK					2.126
Jumlah		23.214	23.750	23.069	25.372	25.670

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

Jumlah peserta program keluarga harapan pada tahun 2018 sebesar 23.214 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sampai dengan tahun 2022 peserta Program Keluarga Harapan meningkat menjadi 25.670 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

A. Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental Serta Lanjut Usia yang tidak Potensial yang telah Menerima Jaminan Sosial

Jumlah penyandang cacat baik fisik dan mental Tahun 2019 sebanyak 2.027 yang telah ditangani sebanyak 356 orang (17%) berupa Pelatihan Ketrampilan Menjahit, Ketrampilan Service Handphone, Ketrampilan Perbengkelan Bagi Penyandang Disabilitas Dan Pemberian Bantuan Hibah Berupa Mesin Jahit, Pemberian Bantuan Tali Asih, Pemberian Bantuan Kasur Dan Selimut Serta Sembako, Alat Bantu Disabilitas Kursi Roda, Tongkat Kruk Unit Dan Alat Bantu Dengar, dan Kaki Palsu. Jumlah lanjut usia terlantar tahun 2019 sebanyak 19.933 lansia terlantar. lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial yang tertangani oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan sampai dengan tahun 2019 sebanyak 240 (1,2%) lansia berupa pemberian tali asih, serta Pelatihan Seni Membatik Bagi 120 (0,6%) Lanjut Usia Produktif.

B. Sistem Perlindungan Sosial

Untuk mengakhiri segala bentuk kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Way Kanan memberikan sejumlah program kesejahteraan sosial terutama dibidang kesehatan dan ketenagakerjaan. Pada Tahun 2020 Kabupaten Way Kanan persentase cakupan jaminan Kesehatan sebesar 80,60 % dengan rincian Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN adalah 229,821 Jiwa (51,1 %), Peserta PBI APBD sebanyak 47,732 Jiwa (10,6 %), Peserta Pekerja bukan penerima upah (PBPU)/mandiri sebanyak 45,309 Jiwa (10,1 %), Pekerja Penerima Upah sebanyak 37,997 (8,4 %) Peserta bukan pekerja sebanyak 2,040 Jiwa (0,5 %). Sementara pada Tahun 2019 Kabupaten Way Kanan persentase cakupan jaminan Kesehatan sebesar 69,57 % dengan rincian Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN adalah 226.002 Jiwa (47,46 %), Peserta PBI APBD sebanyak 32.949 Jiwa (6,91 %), Peserta Pekerja bukan penerima upah (PBPU)/mandiri sebanyak 42.791 Jiwa (8,9 %), Pekerja Penerima Upah sebanyak 22.708 (5,8%) Peserta bukan pekerja sebanyak 1.848 Jiwa (0,3 %) sedangkan Cakupan Jaminan Kesehatan tahun 2018 adalah meningkat menjadi 59,9 % dengan rincian Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN adalah 177.786 Jiwa (41,07 %), Peserta PBI APBD sebanyak 10.789 Jiwa (2,49 %), Peserta Pekerja bukan penerima upah (PBPU)/mandiri sebanyak (9%),

Peserta Pekerja penerima upah (PPU) sebanyak (5,9 %), dan peserta Bukan pekerja (BP) sebanyak: (0,4 %). Untuk tahun 2017 terjadi peningkatan kepesertaan BPJS kesehatan PBI APBD sebanyak 22.160 Jiwa dan Peningkatan Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN sebesar 48.216 Jiwa.

2.4.1.11 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

1, Indeks Reformasi birokrasi

Tujuan dari Evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan public yang semakin membaik. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di Kabupaten Way Kanan. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Way Kanan pada Tahun 2023 adalah 60,52 atau katagori “B”, terinci sebagai berikut:

Tabel 2.89 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Way Kanan

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Reformasi Birokrasi	-	51,13	51,43	55,49	55,56
Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	55,09	57,64	58,62	60,06	60,52
Tingkat Akuntabilitas Kinerja	CC	CC	CC	B	B

Sumber: Kementerian PANRB Tahun 2023

2. Indeks SPBE

Dilakukan Penilaian Indeks SPBE adalah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel di daerah.

Tabel 2.90 Indeks SPBE Kabupaten Way Kanan

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks SPBE	-	2,05	2,10	2,24	3,08

Sumber: Hasil Penilaian MINTA 1 B 2020-2023

3. Indeks Inovasi Daerah

Inovasi Daerah di kabupaten Way Kanan masih terus didorong agar dapat membantu daerah untuk meningkatkan produktivitas dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara lebih efisien dan efektif. Berikut nilai indeks inovasi daerah di Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2023.

Tabel 2.91 Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021-2023

Uraian	2021	2022	2023
Indeks Inovasi Daerah	Inovatif (52,08)	Inovatif (56,19)	Inovatif (53,35)

Sumber: Hasil Penilaian Kementerian Dalam Negeri 2021-2023

2.5 Evaluasi hasil RPJPD 2005-2025

2.5.1 Periode I RPJPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2010

Pada periode I RPJPD Kabupaten Way Kanan (2005-2010) Berdasarkan hasil sinkron dengan RPJPD Kabupaten Way Kanan, capaian Kinerja Makro selama 2005-2009 pada indikator IPM, Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita mengalami

peningkatan. Namun pada akhir periode 2010 capaian kinerja akhir makro mengalami beberapa perubahan perhitungan dengan metode baru yakni IPM meliputi dimensi pendidikan, pengetahuan indikatornya menjadi EYS dan EMS, agregasinya berubah menjadi rata-rata ukur (rata-rata geometrik) sedangkan pada pertumbuhan ekonomi mulai tahun 2010 perhitungan PDRB berubah tahun dasar menjadi 2010 sama dengan 100. Adapun capaian Indikator Kinerja Makro periode I RPJPD kabupaten Way Kanan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.89 Capaian Indikator Kinerja Makro 2005- 2010

Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan (2005)	2006	2007	2008	2009	Capaian Kinerja Akhir Periode 2010
Indeks Pembangunan Manusia	67.41	63.03	68.46	68.96	69.46	61,27
Angka Kemiskinan (%)	27.57	25.18	25.96	25.96	25.96	18.81
Angka Pengangguran (%)	8.81	N/A	N/A	6.33	5.07	3.96
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4.13	4.04	5.52	4.74	5.08	4.84
PDRB Per Kapita (Rp.)	3.818.014	4.548.347	5.746.540	7.090.249	6.359.839	14.765.327

Sumber: BPS Kabupaten Way Kanan 2005-2010

Berdasarkan tabel 2.89 perkembangan Indeks pembangunan manusia pada periode I RPJMD Kabupaten 2005-2010 setiap tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2006 nilai IPM sebesar 68.98. Nilai IPM tersebut menunjukkan adanya peningkatan dibanding dengan tahun 2007 yang nilai IPMnya sebesar 68.46. Terjadinya peningkatan nilai IPM Kabupaten Way Kanan tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan indeks kelangsungan hidup dan indeks daya beli.

Peringkat Nilai IPM Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 secara nasional berada pada urutan 315 diantara 526 Kabupaten/Kota. Peringkat tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2006 dan 2007 dimana IPM kabupaten way kanan berada diposisi masing-masing 283 dan 306. Meskipun perkembangan IPM Kabupaten Way Kanan mengalami peningkatan, akan tetapi dalam skala regional Provinsi Lampung IPM Kabupaten Way Kanan menempati peringkat ke 7 dari 10 Kabupaten.

Disisi lain pertumbuhan ekonomi riil kabupaten Way Kanan pada tahun 2006 adalah sebesar 4,04 persen, kemudian tahun 2007 meningkat menjadi 5,52 sedangkan di tahun 2008 menurun menjadi 4,74. jika dilihat pertumbuhan selama 2000-2007 atau selama 8 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi riil terus menerus mengalami kenaikan. Terjadinya peningkatan ini menggambarkan bahwa secara makro kondisi perekonomian di Kabupaten Way Kanan cukup aman dan stabil serta prospektif, walaupun terjadi fluktuasi di beberapa sub sektor, fluktuasi tersebut menggambarkan kondisi perekonomian yang dinamis dan cukup menjanjikan bagi dunia usaha terutama di sektor pertanian dimana di Kabupaten Way Kanan masih tersedia lahan yang cukup luas.

Kemudian perkembangan PDRB Kabupaten Way Kanan dari tahun 2006-2008 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2006 PDRB perkapita Kabupaten way Kanan sebesar Rp. 4.268.231,- sedangkan 2007 adalah Rp. 4.946.306,- atau mengalami kenaikan sebesar 15,9 persen. Pertumbuhan ini sedikit lebih kecil

apabila dibandingkan dengan pertumbuhan yang ada pada tahun 2008 yang sebesar Rp. 5.531.372,-.

2.5.2 Periode ke II RPJPD Tahun 2010-2015

Tabel 2.90 Capaian Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Way Kanan Tahun 2010-2015

Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan (2010)	2011	2012	2013	2014	Capaian Kinerja Akhir Periode(2015)
Indeks Pembangunan Manusia	61.27	62.74	62.79	63.92	64.32	65,18
Angka Kemiskinan (%)	18.81	16.53	16.54	15.36	15.03	14.61
Angka Pengangguran (%)	3.96	3.49	3.36	4.19	3.35	3.53
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4.84	5.31	5.55	5.28	5.67	5.27
PDRB Per Kapita (Rp.)	14.765.327	16.557.781	17.881.722	19.158.225	21.392.143	23.244.789

Sumber: BPS Kabupaten Way Kanan 2010-2015

Perkembangan IPM Kabupaten Way Kanan setiap tahunnya menunjukkan adanya peningkatan, berdasarkan tabel diatas bahwa nilai IPM pada tahun 2014 meningkat sebesar 64.32 bila dibandingkan dengan tahun 2010 yang hanya sebesar 61.27. hal ini menunjukkan bahwa nilai IPM Kabupaten Way Kanan Tingkat pencapaiannya semakin baik.

Disisi lain, Pertumbuhan ekonomi Way Kanan secara umum terus meningkat, hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang terus membaik dari tahun 2011 sebesar 5.31 persen, meningkat menjadi 5.67 pada tahun 2014. Terdapat fluktuatif dalam perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Way Kanan, hal tersebut dipengaruhi pertumbuhan nasional serta rendahnya harga komoditas unggulan daerah.

Kemudian perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Way Kanan mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai dengan 2014. Nilai PDRB Perkapita pada tahun 2010 sebesar Rp. 14.765.327 menjadi Rp. 21.392.143,- di tahun 2014. Hal ini menunjukkan tingkat pembangunan dan pendapatan rata-rata penduduk semakin baik.

2.5.3 Periode ke III RPJPD Tahun 2016-2020

Adapun capaian makro pembangunan Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.91 Capaian Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021

Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan (2015)	2016	2017	2018	2019	2020	Capaian Kinerja Akhir Periode (2021)
Indeks Pembangunan Manusia	65.18	65.9	66.97	66.63	67.19	67.44	67.57
Angka Kemiskinan (%)	14.61	14.38	13.06	13.52	13.07	12.9	13.09
Angka Pengangguran (%)	3.53	3.53	4.28	4.45	3.6	3.56	3.36
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.27	5.2	5.11	5.21	5.17	-1.16	2.9
PDRB Per Kapita (Rp.)	23.244.780	25.229.677	27.000.047	29.264.425	31.022.091	29.594.040	30.746.033

Sumber: BPS Kabupaten Way Kanan 2016-2021

IPM Kabupaten Way Kanan sejak tahun 2016-2020 secara signifikan mengalami peningkatan yang dimulai dari 65,74 (2016) menjadi 67,44 (2020), namun angka IPM Way Kanan masih berada dibawah rata-rata Provinsi sebesar 69,69 dan Nasional sebesar 71,94. Walaupun capaian kinerja IPM periode III RPJMD mengalami peningkatan sebesar 2,56 poin. Indeks Pembangunan Manusia Way Kanan pada tahun 2020 masih dibawah 70, atau berstatus *SEDANG*. Hanya empat Kabupaten/Kota dengan IPM diatas 70,00 yaitu: Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Pangelegen, dan Kabupaten Lampung Tengah. Sementara Kabupaten Way Kanan berada di urutan peringkat ke- sembilan dari lima belas Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.

2.5.4 Periode ke IV RPJMD Kabupaten Way Kanan 2021-2023

Selanjutnya pada perkembangan terhadap angka Kemiskinan di Kabupaten Way Kanan, tingkat kemiskinan mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 12.9 persen. Hal ini disebabkan karena adanya covid-19 dan pemulihan pasca covid pada pencapaian angka kemiskinan sehingga terjadi penurunan yang sedikit melambat. Adapun sasaran indikator pada periode IV terdapat dalam tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.92 Capaian Indikator Makro Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2023

Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan (2020)	2021	2022	2023
Indeks Pembangunan Manusia	67,44	69.46	69.92	70,51
Angka Kemiskinan (%)	12,90	13.09	11.76	11,02
Angka Pengangguran (%)	3,56	3.36	3.28	3,07

Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan (2020)	2021	2022	2023
Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1.16	2.90	4.41	4,63
PDRB Per Kapita (Rp.)	29.594.040	30.641.179	33.315.086	35.579.572

Sumber: BPS Kabupaten Way Kanan 2021-2023

Perkembangan indikator Makro Kabupaten Way Kanan selama tahun 2020 -2023 dan capaian tahun berjalan dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Indeks pembangunan manusia sampai dengan tahun 2023 dapat dicapai sebesar 70.51 walaupun masih berada di bawah provinsi akan tetapi IPM menunjukkan tren positif di Kabupaten Way Kanan.
2. Penurunan angka kemiskinan dapat ditekan sebesar 1.33 persen pada tahun berjalan, yang semula pada awal 2020 sebesar 12.9 Persen menjadi 11.02 persen pada tahun 2023.
3. Angka pengangguran turun dari 3.56 persen tahun 2020 menjadi 3.07 persen di Tahun 2023. Hal ini ditandai dengan semakin membaiknya kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Way kanan pasca covid-19 dan pertumbuhan ekonomi.
4. PDRB Per Kapita meningkat dari tahun 2020 sebesar Rp. 29.594.040,- menjadi Rp. 35.579.572,-

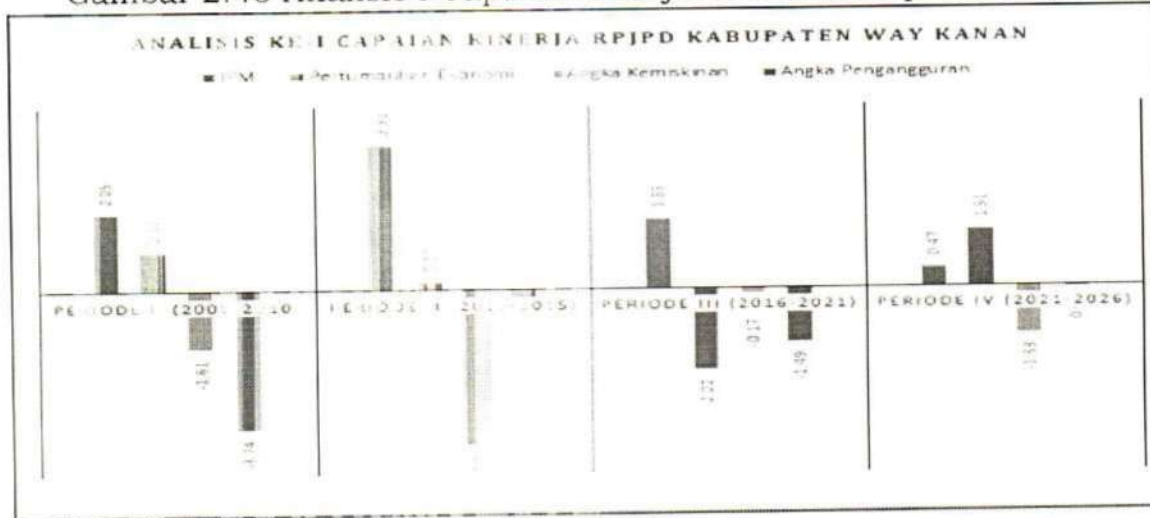
2.5. Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025

Sebagaimana perlu diketahui bahwa dokumen RPJPD Kabupaten Way Kanan yang disusun pada tahun 2005 yang dalam proses penyusunannya masih menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara serta Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sedangkan proses evaluasinya mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Namun demikian hal tersebut tidak menjadikan kendala dalam pengukuran capaian indikator sasaran pokok, dikarenakan indikator sasaran telah bersifat kuantitatif atau dapat dihitung.

Berdasarkan hasil pengamatan dalam pengumpulan dan pengolahan data, ditemukan beberapa indikator yang sulit dilakukan pengukuran dan indikator yang tidak memenuhi unsur SMART (Spesific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Bounds) juga ditemukan target-target kinerja yang ditetapkan perlu dirasionalisasi kembali, termasuk bukan kewenangan daerah sesuai dengan pembagian kewenangan daerah serta beberapa target kinerja yang ditetapkan terlalu optimisi (terlampau tinggi).

Evaluasi RPJPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2025 (tahun efektif 2005 -2025) ini dilaksanakan dengan mengacu 4 periode RPJMD, yaitu Periode ke-1 RPJMD Tahun 2005-2010, Periode ke-2 RPJMD tahun 2010- 2015, Periode ke-3 RPJMD tahun 2016-2021, dan Periode ke-4 RPJMD Tahun 2021-2026. Untuk Periode RPJMD Tahun 2016-2021 menggunakan data tahun 2020/2021 dan untuk RPJMD Tahun 2021-2026 menggunakan data tahun 2022-2023. Adapun analisis data terhadap sasaran makro RPJPD Kabupaten Way Kanan Periode I sampai Periode IV digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2.43 Analisis I Capaian Kinerja RPJPD Kabupaten Way Kanan



Sumber: Data Diolah, BPS Kabupaten Way Kanan 2005-2023

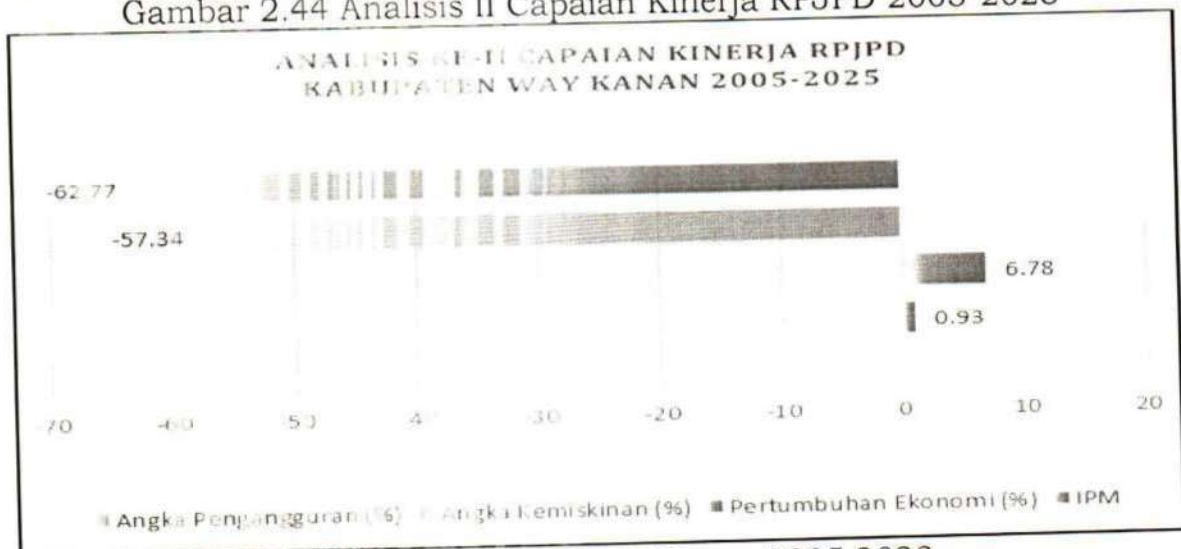
Berdasarkan analisa data capaian RPJPD Kabupaten Way Kanan 2005-2025 meliputi: Pertama, pada periode RPJMD 2005-2010 bahwa terjadi kenaikan atau peningkatan IPM hanya sebesar 2.05, hal ini lebih rendah jika dibandingkan dengan adanya peningkatan IPM pada periode II sebesar 3.91. Namun demikian capaian kinerja IPM pada periode III terjadi penurunan sebanyak 1.83 poin, hal ini disebabkan karena adanya covid-19 sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi minus diiringi dengan peningkatan kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka.

Kedua, bahwa analisa data menunjukkan peningkatan pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuatif, hal ini karna adanya pengaruh global yang berimbas pada sektor pertanian dan adanya aktivitas ekonomi masyarakat yang rendah akan tetapi dalam perkembangannya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Way Kanan relatif stabil.

Ketiga angka kemiskinan Kabupaten Way Kanan relatif membaik sampai tahun 2022, hal ini disebabkan adanya penurunan tingkat kemiskinan sebesar 1.33 persen pasca covid-19, dan inilah yang menjadi tolok ukur masyarakat terhadap keberhasilan pembangunan Kabupaten Way Kanan.

Keempat, angka pengangguran di Kabupaten Way Kanan relatif stabil dengan terjadinya penurunan angka pengangguran per tahunnya, hal ini dapat dilihat pada RPJMD periode III (2016-2021) saat covid-19 melanda, penurunan angka pengangguran hanya sebesar 1,49 bahkan penurunan tersebut cenderung lebih besar daripada periode II. Kemudian pada periode IV sampai dengan tahun 2022 angka pengangguran di Kabupaten Way Kanan dicapai sebesar 3,28 persen.

Gambar 2.44 Analisis II Capaian Kinerja RPJPD 2005-2025



Sumber: Data Diolah, BPS Kabupaten Way Kanan 2005-2023

Berdasarkan analisis dan hasil sinkronisasi data dengan BPS Kabupaten Way Kanan maka analisis II dapat digambarkan kinerja tahun berjalan sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada awal periode 2005 sebesar 67.41 sampai dengan capaian tahun 2023 yaitu sebesar 70.51, Indeks pembangunan manusia di Kabupaten Way Kanan menunjukkan arah yang positif.
2. Angka Kemiskinan selama periode I sampai periode IV RPJPD menunjukkan penurunan dari tahun 2005 sebesar 27.57 persen menjadi sebesar 11,02 persen pada tahun 2023. hal ini berarti bahwa keberhasilan penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Way Kanan dapat ditekan dengan adanya upaya-upaya penguatan program pengentasan kemiskinan di daerah.
3. Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Way Kanan selama periode 2005-2025 tahun berjalan menunjukkan peningkatan yang relatif stabil. Hal ini dapat dianalisis dari tahun 2005 pertumbuhan ekonomi sebesar 4.13 dan capaian tahun berjalan sebesar 4.41 atau terjadi peningkatan sebesar 6.78 persen.

Sejak tahun 2015, PDRB diestimasi menggunakan tahun dasar 2010 (2010=100) menggantikan tahun dasar sebelumnya, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar 2010 merupakan upaya untuk mengimplementasikan *System of National Accounts (SNA)* 2008. Penggunaan kedua tahun dasar tersebut berdampak pada besaran maupun struktur PDRB, serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDB/PDRB tersebut.

Perekonomian Kabupaten Way Kanan untuk pertama kalinya sejak tahun 2010 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,16 persen setelah selama satu dasawarsa lamanya mampu mencatatkan pertumbuhan positif diatas 5 persen. Segala bentuk kebijakan pemerintah untuk meminimalisir penyebaran virus Covid-19 mulai dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), bekerja dari rumah (*Work From Home/WFH*), belajar dari rumah, pelarangan mudik, dan pembatasan transportasi menekan perekonomian Indonesia termasuk perekonomian Kabupaten Way Kanan.

Pada periode tahun 2018 - 2023 PDRB Way Kanan atas dasar harga berlaku meningkat cukup signifikan terkecuali tahun 2020. Pada tahun 2020 dan 2021, akibat adanya wabah Covid-19 PDRB atas dasar harga berlaku hanya meningkat sebesar 38,48 dan 624,12 miliar rupiah. Peningkatan ini dipengaruhi oleh perubahan harga dan perubahan volume.

4. Angka Pengangguran pada periode I-IV RPJPD Kabupaten Way Kanan mengalami penurunan dari tahun 2005 sebesar 8.81 persen sampai dengan tahun berjalan sebesar 3,28.

2.6 Trend Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

2.6.1 Analisis Proyeksi Kependudukan

2.6.1.1 Perkembangan Jumlah Penduduk 2025-2045

Tabel 2.92 Jumlah Penduduk Menurut Jumlah Kelamin, Kepadatan Penduduk dan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	Laju Pertumbuhan (%)	Total (Jiwa)
		Laki-Laki	Perempuan			
1	Banjit	24.596	23.323	144,51	1,02	47.919

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	Laju Pertumbuhan (%)	Total (Jiwa)
		Laki-Laki	Perempuan			
2	Baradatu	23.068	22.338	298,66	1,19	45.406
3	Gunung Labuhan	16.063	15.623	275,00	1,13	31.686
4	Kasui	17.262	16.332	223,56	0,77	33.594
5	Rebang Tangkas	12.409	11.691	116,32	0,87	24.100
6	Blambangan Umpu	19.549	18.527	106,63	1,95	38.076
7	Way Tuba	13.733	13.159	130,39	1,55	26.892
8	Negeri Agung	19.665	18.618	68,00	0,56	38.283
9	Umpu Semenguk	17.381	16.530	101,34	1,41	33.911
10	Bahuga	6.259	6.052	89,07	1,17	12.311
11	Buay Bahuga	11.206	10.823	215,89	0,79	22.029
12	Bumi Agung	15.008	14.349	222,82	0,70	29.357
13	Pakuan Ratu	23.645	22.367	79,28	1,27	46.012
14	Negara Batin	19743	18.877	110,85	2,12	38.620
15	Negeri Besar	11.061	10.516	59,54	1,57	21.577
Way Kanan		250.648	239.125	124,89	1,22	489.773

Sumber: Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2024

2.6.1.1.1 Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.93 Proyeksi Penduduk Kabupaten Way Kanan Menurut Jenis Kelamin 2025-2045

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Laki	250.648	256.84	269.92	281.67	293.42	306.15
Perempuan	239.125	246.48	261.85	276.14	290.43	304.42
Jumlah	489.773	503.31	531.76	557.81	583.86	610.57

Sumber: Hasil Proyeksi Susenas, dan Data diolah 2023

Hasil proyeksi penduduk Kabupaten Way Kanan 2025-2045 menunjukkan bahwa perkembangan penduduk usia produktif mengalami peningkatan atau bonus demografi diperiode I RPJMD 2025-2030 sebesar 66,91persen.

Hal ini tentunya harus seimbang dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. besaran usia produktif ini harus diantisipasi secara positif terutama dengan adanya kebutuhan sarana dan prasana selama 20 tahun ke depan. Untuk itu perlu strategi atau upaya langkah-langkah efektif dan efisien

yang dilakukan pemerintah daerah dalam pembangunan berkelanjutan menuju indonesia emas 2045.

Namun demikian perkembangan jumlah penduduk pada kelompok umur dan jenis kelamin 15-64 tahun berpengaruh positif terhadap kenaikan penduduk perempuan pada usia produktif. Hal berarti penduduk perempuan juga punya kesempatan yang sama dalam berkontribusi dan bersaing pasar kerja.

Disisi lain pertumbuhan penduduk usia lanjut pada periode pertama RPJMD hanya sebesar 12,80 persen, jika dilihat dengan persentase tersebut, diasumsikan penduduk usia lanjut dapat menikmati hasil dimasa tuanya seharusnya sudah sejahtera dalam perkembangan pembangunan yang dirasakan. Akan tetapi pada periode ini penduduk usia lanjut tidak banyak mengalami perubahan signifikan.

Dalam potret perkembangannya bahwa kenaikan jumlah penduduk yang besar diatas 65 persen merupakan tantangan daerah dan kekuatan dalam menyelesaikan persoalan daerah, dimana terdapat bonus demografi yang harus diambil manfaat positifnya bagi kemajuan daerah terutama sektor pertanian yang menjadi kekuatan daerah dalam kemajuan wilayah kabupaten Way Kanan.

2.6.1.1.2 Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Adapun proyeksi penduduk menurut kelompok umur sebagai berikut.

Tabel 2.94 Proyeksi Penduduk Kabupaten Way Kanan Menurut Kelompok Umur Tahun 2025-2045

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
0-14 Tahun	131.257	132.48	131.07	127.30	121.6	119.1
15-64 Tahun	321.450	336.80	357.25	377.50	390.7	405.2
> 65 Tahun	29.040	34.05	43.46	53.01	71.56	86.27

Sumber: Hasil Proyeksi Susenas, dan Data diolah 2023

Proyeksi penduduk berdasarkan kelompok umur 0-14 mengalami penurunan pada periode IV RPJPD 2025-2045, karena pertumbuhan penduduk yang lebih besar ada pada kelompok umur 15-64 Tahun, keadaan ini salah satunya disebabkan isu bonus demografi yang ada di indonesia. Selain itu kesiapan daerah akan adanya dampak tersebut perlu dioptimalkan. Perlunya sumber manusia handal berkualitas dan kompeten menjadi tolok ukur dalam pembangunan daerah di masa mendatang. Untuk itu sumber daya manusia daerah mempunyai peran penting dalam good governance.

Perkembangan ini juga perlu di perkuat dengan adanya tata kelola pemerintahan yang baik, perkuatan ekonomi daerah serta konektivitas infrastruktur dan tata kelola lingkungan.

Tabel 2.95 Proyeksi Penduduk Kabupaten Way Kanan Menurut Komposisi Umur 2025-2045

Komposisi Umur (%)	2025	2030	2040	2045
0-14	27.53	26.32	24.65	22.82
15-64	66.95	66.91	67.18	67.68

Komposisi Umur (%)	2025	2030	2040	2045
65+	5.52	6.76	8.17	9.50
Dependency Ratio (%)	49.38	49.45	48.85	47.76

Sumber: Hasil Proyeksi 2020-2035 Susenas, Data Proyeksi.

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk kabupaten Way Kanan menurut komposisi umur dapat disimpulkan bahwa penduduk menjadi kekuatan dan potensi sekaligus tantangan dalam membangun daerah kabupaten Way Kanan. Oleh karena itu pemetaan selama 5 tahun mendatang menitik beratkan pada SDM yang dapat menjadi isu utama dalam tahapan dan pembangunan RPJPD.

2.6.2 Proyeksi Sarana dan Prasarana 2025-2045

2.6.2.1 Kebutuhan Air Minum

Tabel 2.96 Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Way Kanan Tahun 2024-2045

No.	Uraian	Satuan	Tahun			
			2024	2029	2034	2045
1	Kebutuhan Puncak	ltr/det	84,6	120,73	157,45	179,91
2	TOTAL KEBUTUHAN AIR MINUM	ltr/det	107,45	158,84	211,75	243,46
3	Total Air Buangan	ltr/org/hr	11,24	15,22	18,72	18,39

Sumber: Hasil Proyeksi Data diolah, Dinas PUPR

Perhitungan kebutuhan air minum diatas didasarkan pada jumlah penduduk, jumlah dan jenis kegiatan perkotaan yang memerlukan air, dan standar pemakaian air. Kebutuhan air terdiri dari domestik dan non domestik. Kebutuhan domestik adalah kebutuhan yang berdasarkan jumlah penduduk dan pemakaian air per orang. Kebutuhan non domestik adalah kebutuhan air untuk kegiatan penunjang kota, yang terdiri dari kegiatan komersial yang berupa industri, perkantoran, dan lain-lain, maupun kegiatan sosial seperti sekolah, rumah sakit dan tempat ibadah.

Kebutuhan air minum akan dihitung berdasarkan area pelayanan, jumlah penduduk pada area pelayanan, proyeksi jumlah penduduk hingga tahun periode perencanaan dan koefisien tertentu (cakupan pelayanan, koefisien kebocoran, faktor hari maksimum dan faktor puncak). Bila melihat proyeksi jumlah penduduk kabupaten hingga tahun 2040, maka dapat dikategorikan bahwa Kebutuhan air untuk wilayah ini dibagi dalam dua wilayah yaitu wilayah perkotaan dan wilayah perdesaan.

Sesuai dengan kriteria perencanaan, maka proyeksi kebutuhan air kabupaten dihitung berdasarkan kriteria, sebagai berikut :

- 1) Konsumsi pemakaian air : wilayah perkotaan = 100 lt/org/hari; wilayah perdesaan = 60 lt/org/hari.
- 2) Kebutuhan Non Domestik diambil 15% dari kebutuhan domestik
- 3) Kehilangan air diambil 15% dari total kebutuhan dom + non dom.
- 4) Kebutuhan air rata-rata adalah total seluruh kebutuhan termasuk domestik, non domestik dan kehilangan air.
- 5) Faktor hari maksimum diambil 1.15 dan faktor jam puncak 1.75

2.6.2.2 Proyeksi Kebutuhan Listrik

Proyeksi kebutuhan listrik untuk kebutuhan saran prasarana dibedakan menjadi dua: proyeksi kebutuhan listrik domestik dan kebutuhan listrik non domestik. Tentunya kebutuhan ini didapat berdasarkan data jumlah rumah dan

penduduk. Pada tahun awal RPJPD periode I kebutuhan sebesar 50.331.000 Watt untuk listrik domestik sedangkan listrik non domestik sebesar 19.241.400 Watt. Kebutuhan listrik ini diperkirakan meningkat pada akhir periode untuk listrik domestik sebesar 61.057.000 Watt. Adapun kebutuhan proyeksi listrik sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.97 Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Way Kanan
Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Listrik				
		2025	2030	2035	2040	2045
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
Jumlah Penduduk	481,036.00	503,310.00	531,760.00	557,810.00	58,386.00	610,570.00
Jumlah Rumah	7,150.00	99,634.00	107,246.00	110,388.00	124,870.00	130,878.00
Proyeksi						
Kebutuhan Listrik Domestik (Watt)	48,103,600.00	50,331,000.00	53,176,000.00	55,781,000.00	5,838,600.00	61,057,000.00
Proyeksi Kebutuhan Listrik non Domestik (Watt)	19,241,440.00	20,132,400.00	21,270,400.00	22,312,400.00	2,335,440.00	24,422,800.00

Sumber: Hasil Proyeksi Data diolah, Dinas PUPR

2.6.2.3 Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan

Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan persampahan Kabupaten Way Kanan yang meliputi timbulan sampah yang di proyeksikan sampai akhir periode atau sampai tahun 2045.

Tabel 2.98 Proyeksi Timbulan Sampah Kabupaten Way Kanan
Tahun 2025-2045

Tahun	Data Timbulan Sampah EksistingTon/Th	Status
2019	65.902,00	Eksisting
2020	70.036,49	Eksisting
2021	70.036,49	Eksisting
2022	70.086,13	Eksisting
2023	70.647,06	Eksisting
2024	72.379,24	Proyeksi
2025	73.262,27	Proyeksi
2026	74.156,07	Proyeksi
2027	75.060,77	Proyeksi
2028	75.976,51	Proyeksi

2029	76.903,43	Proyeksi
2030	77.841,65	Proyeksi
2031	78.791,32	Proyeksi
2032	79.752,57	Proyeksi
2033	80.725,55	Proyeksi
2034	81.710,40	Proyeksi
2035	82.707,27	Proyeksi
2036	83.716,30	Proyeksi
2037	84.737,64	Proyeksi
2038	85.771,44	Proyeksi
2039	86.817,85	Proyeksi
2040	87.877,03	Proyeksi
2041	88.949,13	Proyeksi
2042	90.034,31	Proyeksi
2043	91.132,72	Proyeksi
2044	92.244,54	Proyeksi
2045	93.369,93	Proyeksi

Proyeksi kebutuhan pengelolaan persampahan terdiri dari uraian proyeksi timbulan sampah dan target penanganan sampah. Timbulan sampah merupakan volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis dan sumber sampah di wilayah oleh karena itu dalam proyek timbulan sampah, berdasarkan proyeksi 2025 timbulan sampah akan mencapai sebesar 73.262,27 Ton/Th dan capaian akhir periode IV tahun 2045 sebesar 93.369,93 Ton/Th.

Tabel 2.99 Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Sampah Kabupaten Way Kanan

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Proyeksi Timbulan Sampah (ton/tahun)	70.647,06	73.262,27	77.841,65	82.877,03	87.877,03	93.369,93

2.6.2.4. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Tabel 2.100 Proyeksi Fasilitas Kesehatan Kabupaten Way Kanan 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan					Total
		2025	2030	2035	2040	2045	
Proyeksi Fasilitas Kesehatan							
Rumah Sakit	2 unit	2	0	0	1	0	3
Puskesmas	20 unit	20	3	3	3	3	32
Puskesmas Pembantu	63 Unit	63	44	55	51	10	162

Sumber: Hasil Proyeksi Data diolah, Dinas Kesehatan

Kebutuhan fasilitas kesehatan bagi masyarakat sangat diperlukan terutama rumah sakit dan puskesmas, pada tempat inilah kebermanfaatan akan pembangunan dapat dirasakan. Untuk itu proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan dapat digambarkan melalui adanya penambahan rumah sakit baru seiring dengan kenaikan jumlah penduduk dan puskesmas pada tiap wilayah. Untuk proyeksi fasilitas kesehatan ada 2 rumah sakit dan 20 unit puskesmas pada tahun 2025 sedangkan akhir tahun 2045 kebutuhan jumlah rumah sakit di kabupaten way kanan sebanyak 1 unit rumah sakit sedangkan untuk kebutuhan jumlah puskesmas kabupaten way kanan membutuhkan penambahan sebanyak 12 unit puskesmas pada akhir RPJPD.

2.6.2.5. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Kebutuhan Fasilitas Pendidikan sangat diperlukan karena akan menunjang kinerja urusan pendidikan untuk itu perlu dilakukan proyeksi kebutuhan fasilitas selama periode I- IV dalam tahapan RPJPD kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2045.

Tabel 2.101 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Way Kanan 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan					
		2025	2030	2035	2040	2045	
Jumlah Penduduk	Usia 0-14 Tahun	27.53	26.32	24.65	22.82	20.99	19.16
	Usia 15-64	66.95	66.91	67.18	67.68	68.18	68.68
Proyeksi Fasilitas Pendidikan							
TK	Jumlah Sekolah TK/PAUD	341	345	350	355	360	365
	Jumlah Kebutuhan Tenaga Guru	954	1100	1200	1300	1400	1500
SD/MI	Jumlah Sekolah SD	318	319	322	325	328	331
	Jumlah Kebutuhan Tenaga Guru	3726	3926	4126	4226	4326	4426
SMP/MTs	Jumlah Sekolah SMP	94	96	98	100	102	104
	Jumlah Kebutuhan Tenaga Guru	1337	1437	1537	1637	1737	1837

Sumber: Hasil Proyeksi Data diolah, Dinas Pendidikan 2023

Proyeksi Kebutuhan fasilitas pendidikan berdasarkan jumlah penduduk masih didominasi oleh kebutuhan usia 6-14 Tahun dan usia 15-64 Tahun. Kenaikan terhadap fasilitas pendidikan tentu berpengaruh pada tenaga kependidikan. Dimana ada permintaan tenaga pengajar juga disebabkan adanya jumlah tenaga guru yang pensiun dan kebutuhan tenaga pengajar di daerah. Untuk itu dalam mengantisipasi hal tersebut, maka dilakukan proyeksi yang tidak hanya pada fasilitas pendidikan, akan tetapi juga kebutuhan tenaga pengajarnya baik dari PAUD, SD, SMP/MTs.

2.6.2.6 Kebutuhan Air Bersih

Penyediaan air bersih dengan sistem perpipaan di Kabupaten Way Kanan dikelola oleh PDAM Kabupaten wilayah perencanaan, sedangkan untuk kebutuhan air bersih untuk non-perpipaan pelayanannya dilakukan secara komunal pada tiap rumah tangga. Kebutuhan air bersih untuk wilayah Kabupaten Way Kanan akan direncanakan bersumber dari air tanah, kebutuhan air bersih juga terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di wilayah perencanaan. Berdasarkan Permen PU Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyediaan Air Bersih berikut adalah hasil analisis jumlah kebutuhan air bersih di Kabupaten Way Kanan pada tahun 2043 dengan memakai asumsi sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil proyeksi pada tahun 2043 Kabupaten Way Kanan memiliki penduduk sejumlah 654.400 jiwa hal ini menyebabkan pada tahun 2043 Kabupaten Way Kanan termasuk kedalam kategori kota besar;
2. Tingkat pelayanan air bersih kawasan sebesar 90%;
3. Kebutuhan Sambungan Rumah (SR) sebanyak 80% dengan kebutuhan air 170 liter/jiwa/hari dan Hidran Umum (HU) sebanyak 20% dengan kebutuhan air 30 liter/jiwa/hari;
4. Kebutuhan air non domestik sebanyak 25% dari jumlah total kebutuhan air domestik;
5. Faktor kebocoran air sebesar 20% dari jumlah kebutuhan air domestik dan non domestik;
6. Debit harian maksimum sebesar 150% dari jumlah total air yang disalurkan;
7. Total kebutuhan air baku sebesar 110% dari debit harian maksimum;
8. Kebutuhan volume reservoir memiliki debit puncak sebesar 180% terhadap jumlah total air yang disalurkan.

Tabel 2.102 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

No	Kecamatan	Penduduk Tahun 2023	SR 170 L/O/H	HU 30 L/O/H	Domestik	Non Domestik 25%	Kebocoran 20%	Total
1	Banjit	47,433	5,080,074	384,207	5,464,282	1,366,070.40	1,366,070	8,196,422
2	Baradatu	44,872	4,805,791	363,463	5,169,254	1,292,313.60	1,292,314	7,753,882
3	Gunung Labuhan	31,332	3,355,657	253,789	3,609,446	902,361.60	902,362	5,414,170
4	Kasui	33,338	3,570,500	270,038	3,840,538	960,134.40	960,134	5,760,806
5	Rebang Tangkas	23,892	2,558,833	193,525	2,752,358	688,089.60	688,090	4,128,538
6	Blambangan Umpu	37,347	3,999,864	302,511	4,302,374	1,075,593.60	1,075,594	6,453,562
7	Way Tuba	26,482	2,836,222	214,504	3,050,726	762,681.60	762,682	4,576,090
8	Negeri Agung	38,070	4,077,297	308,367	4,385,664	1,096,416.00	1,096,416	6,578,496
9	Bahuga	12,169	1,303,300	98,569	1,401,869	350,467.20	350,467	2,102,803
10	Buay Bahuga	21,857	2,340,885	177,042	2,517,926	629,481.60	629,482	3,776,890
11	Bumi Agung	29,152	3,122,179	236,131	3,358,310	839,577.60	839,578	5,037,466
12	Pakuan Ratu	45,437	4,866,303	368,040	5,234,342	1,308,585.60	1,308,586	7,851,514
13	Negara Batin	37,820	4,050,522	306,342	4,356,864	1,089,216.00	1,089,216	6,535,296
14	Negeri Besar	21,243	2,275,125	172,068	2,447,194	611,798.40	611,798	3,670,790
15	Umpu Semenguk	33,480	3,585,708	271,188	3,856,896	964,224.00	964,224	5,785,344
TOTAL								83,622,067
Liter/Detik								1.393

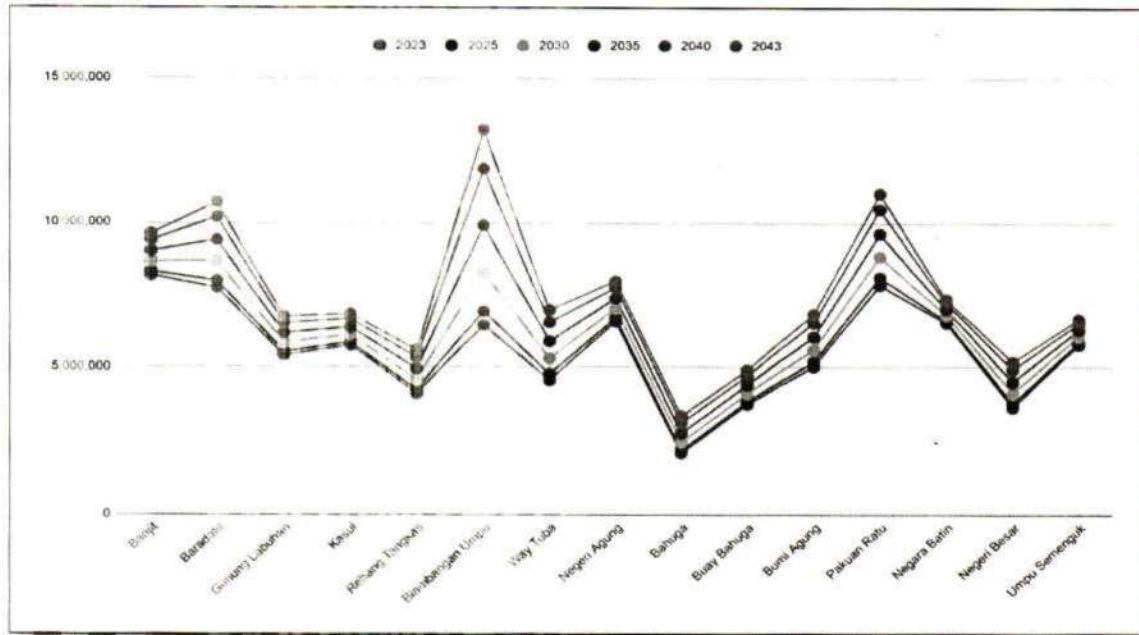
Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 2.103 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Way Kanan Tahun 2043

No	Kecamatan	Penduduk Tahun 2043	SR 170 L/O/H	HU 30 L/O/H	Domestik	Non Domestik 25%	Kebocoran 20%	Total
1	Banjit	55,746	5,970,397	451,543	6,421,939	1,605,484.80	1,605,485	9,632,909
2	Baradatu	61,972	6,637,201	501,973	7,139,174	1,784,793.60	1,784,794	10,708,762
3	Gunung Labuhan	39,107	4,188,360	316,767	4,505,126	1,126,281.60	1,126,282	6,757,690
4	Kasui	39,601	4,241,267	320,768	4,562,035	1,140,508.80	1,140,509	6,843,053
5	Rebang Tangkas	32,342	3,463,828	261,970	3,725,798	931,449.60	931,450	5,588,698
6	Blambangan Umpu	76,447	8,187,474	619,221	8,806,694	2,201,673.60	2,201,674	13,210,042
7	Way Tuba	40,395	4,326,305	327,200	4,653,504	1,163,376.00	1,163,376	6,980,256
8	Negeri Agung	46,274	4,955,945	374,819	5,330,765	1,332,691.20	1,332,691	7,996,147
9	Bahuga	19,567	2,095,626	158,493	2,254,118	563,529.60	563,530	3,381,178
10	Buay Bahuga	28,442	3,046,138	230,380	3,276,518	819,129.60	819,130	4,914,778
11	Bumi Agung	39,565	4,237,412	320,477	4,557,888	1,139,472.00	1,139,472	6,836,832
12	Pakuan Ratu	63,714	6,823,769	516,083	7,339,853	1,834,963.20	1,834,963	11,009,779
13	Negara Batin	42,604	4,562,888	345,092	4,907,981	1,226,995.20	1,226,995	7,361,971
14	Negeri Besar	30,103	3,224,031	243,834	3,467,866	866,966.40	866,966	5,201,798
15	Umpu Semenguk	38,521	4,125,599	312,020	4,437,619	1,109,404.80	1,109,405	6,656,429
TOTAL								113,080,320
Liter/Detik								1.884

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Gambar 2.45 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Way Kanan Tahun 2023-2043



Sumber: Hasil Analisis, 2023

Sistem jaringan perpipaan harus memperhatikan beberapa hal agar hasil pengembangan mendapatkan hasil yang optimum, antara lain:

1. Menghindari belokan tajam (Horizontal atau Vertikal) dan siphon;
2. Menghindari tempat-tempat yang memungkinkan terjadinya kontaminasi selama pengaliran;
3. Jalur pipa sebaiknya ditempatkan pada tanah milik pemerintah atau mengikuti jalan umum;
4. Menghindari lokasi rawan bencana yang dapat menyebabkan perubahan tekanan dari luar terhadap pipa agar tidak cepat mengalami kerusakan;
5. Memperhatikan koordinasi terhadap beberapa pihak untuk masalah galian atau bongkar-pasang akibat adanya pembangunan oleh instansi terkait.

Pengelolaan sistem jaringan air bersih hingga akhir tahun harus mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPA) eksisting hingga mencapai kapasitas maksimum;
2. Pembuatan waduk dan perluasan area tangkapan (catchment area) pada DAS sungai sebagai penampung air hujan skala besar yang berpotensi untuk dijadikan sebagai sumber air baku.

2.6.2.7 Kebutuhan Tempat Tinggal

Untuk memastikan setiap warga memiliki akses ke hunian yang layak dan terjangkau, diperlukan perencanaan yang matang dalam menghadapi kebutuhan rumah di suatu daerah. Dalam jangka waktu tertentu, proyeksi kebutuhan rumah di masa depan harus diperhitungkan secara cermat, mencakup berbagai aspek seperti pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan perbaikan kualitas hunian.

Perencanaan ini melibatkan identifikasi wilayah-wilayah yang memerlukan prioritas pembangunan, memperkirakan jumlah rumah yang dibutuhkan, serta memastikan penyebaran pembangunan yang merata sesuai dengan perkembangan ekonomi dan demografi. Dengan demikian, potensi kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan hunian dapat diminimalkan, sehingga setiap lapisan masyarakat dapat tinggal di rumah yang memadai, aman, dan nyaman.

Selain itu, penting untuk mempertimbangkan aspek keberlanjutan dalam pembangunan perumahan, termasuk infrastruktur pendukung, akses terhadap fasilitas umum, dan lingkungan yang sehat. Dengan pendekatan yang holistik

dan terarah, pemerintah daerah dapat merumuskan strategi yang efektif untuk memenuhi kebutuhan rumah di masa depan, memastikan bahwa masyarakat mendapatkan hunian yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tabel Luasan Lahan untuk Rumah dan PSU Tahun 2023-2043 di Tiap Kecamatan Kabupaten Way Kanan sebagai berikut.

Tabel 2.104 Luasan Lahan rumah dan PSU 2023-2043

No	Kecamatan	Kondisi																	
		2023			2025			2030			2035			2040			2043		
		Rumah (Unit)	Lahan PSU (Ha)	Lahan (Ha)	Rumah (Unit)	Lahan PSU (Ha)	Lahan (Ha)	Rumah (Unit)	Lahan PSU (Ha)	Lahan (Ha)	Rumah (Unit)	Lahan PSU (Ha)	Lahan (Ha)	Rumah (Unit)	Lahan PSU (Ha)	Lahan (Ha)	Rumah (Unit)	Lahan PSU (Ha)	Lahan (Ha)
1	Banjit	9487	15.05	228.63	9641	15.88	232.35	10038	16.44	241.92	10452	17.02	251.89	10882	17.62	262.27	11149	17.95	268.70
2	Baradatu	8974	14.95	216.28	9269	15.35	223.38	10048	16.43	242.16	10893	17.58	262.52	11808	18.84	284.58	12394	19.87	298.71
3	Gunung Labuhan	6266	11.15	151.02	6407	11.33	154.40	6772	11.83	163.20	7158	12.40	172.50	7566	12.95	182.33	7821	13.29	188.50
4	Kasui	6668	11.70	160.69	6783	11.86	163.48	7082	12.27	170.67	7393	12.69	178.18	7718	13.14	186.01	7920	13.42	190.88
5	Rebang Tangkas	4778	6.99	115.16	4925	7.19	118.70	5313	7.72	128.03	5730	8.29	138.10	6181	8.90	148.97	6468	9.29	155.89
6	Blambangan Umpu	7469	12.81	180.01	8024	13.54	193.38	9598	15.66	231.31	11480	18.16	276.67	13732	21.40	330.94	15289	23.47	368.47
7	Way Tuba	5296	8.16	127.64	5525	8.47	133.15	6140	9.31	147.97	6824	10.24	164.45	7583	11.27	182.76	8079	11.95	194.70
8	Negeri Agung	7614	13.04	183.50	7764	13.25	187.11	8152	13.80	196.47	8560	14.35	206.29	8988	14.95	216.61	9255	15.33	223.04
9	Bahuga	2434	3.58	58.65	2552	3.74	61.51	2874	4.18	69.26	3236	4.68	77.99	3644	5.23	87.83	3913	5.60	94.31
10	Buay Bahuga	4371	6.23	105.35	4488	6.38	108.16	4793	6.81	115.52	5120	7.25	123.39	5468	7.73	131.78	5688	8.03	137.09
11	Bumi Agung	5830	9.85	140.51	6011	10.09	144.87	6488	10.74	156.37	7003	11.43	168.77	7559	12.17	182.17	7913	12.64	190.70
12	Pakuan Ratu	9087	15.16	219.01	9400	15.57	226.54	10229	16.70	246.51	11131	17.91	268.26	12113	19.46	291.91	12743	20.31	307.10
13	Negara Batin	7564	12.79	182.29	7655	12.92	184.48	7886	13.26	190.05	8124	13.60	195.80	8370	13.96	201.71	8521	14.18	205.35
14	Negeri Besar	4249	7.68	102.39	4399	7.85	106.03	4800	8.31	115.68	5237	8.80	126.21	5714	9.32	137.70	6021	9.66	145.10

Keterangan atas tabel di atas:	Rata-rata jumlah penduduk setiap unit	: 5 jiwa/rumah
RM (Rumah Mewah)	Proporsi RM:RSD:RS:RSS	: 10%:20%:40%:30%
RSD (Rumah Sedang)	Luas kavling rumah sangat sederhana	: 70 m ²
RS (Rumah Sederhana)	Luas kavling rumah sederhana	: 200 m ²
RSS (Rumah Sangat Sederhana)	Luas kavling rumah sedang	: 400 m ²
	Luas kavling rumah mewah	: 600 m ²

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kebutuhan lahan permukiman tahun 2043 = 3154.21 ha. Proporsi kebutuhan rumah tahun 2043 = 13088.RM, 26176. RSD, 52352. RS, dan 39264. RSS. Jadi total rumah yang dibutuhkan berdasarkan jumlah penduduk di tiap lima tahunnya yaitu 130878 rumah.

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

2.7.1 Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan strategis adalah wilayah yang memiliki peran penting dalam pembangunan karena potensi ekonominya, sosial, budaya, atau lingkungannya. Pengembangan kawasan ini membutuhkan perencanaan terpadu untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif, serta sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan pengelolaan yang tepat, kawasan strategis dapat menjadi pusat aktivitas ekonomi yang mendorong pertumbuhan regional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

2.7.1.1 Kawasan Strategi dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
2. Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten;
3. Memiliki potensi ekspor;
4. Memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah;
5. Didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
6. Ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal;
7. Ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi;
8. Memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi;
9. Memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
10. Memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Kawasan strategis ini ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
11. Kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah Kabupaten;
12. Memiliki pusat pengembangan produk unggulan; dan/atau
13. Memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.

Berdasarkan kriteria diatas maka Penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Way Kanan, terdiri dari:

1. Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Way Tuba adalah mewujudkan sebagai perkotaan transmigrasi yang didukung kegiatan perdagangan, pertanian berkelanjutan yang berada di Kecamatan Blambangan Umpu dan Kecamatan Way Tuba. Arah pengembangan Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Way Tuba adalah pengembangan perdagangan, jasa, permukiman dan industri
2. Kawasan Agropolitan Baradatu ditetapkan di Kecamatan Baradatu untuk mewujudkan Kawasan Agropolitan yang didukung kegiatan perdagangan, jasa, pertanian. Arah pengembangan Kawasan Agropolitan Baradatu adalah pengembangan perdagangan, jasa, industri dan pertanian berkelanjutan.
3. Kawasan Agropolitan Pakuan Ratu ditetapkan di Kecamatan Pakuan Ratu untuk mewujudkan Kawasan Agropolitan yang didukung kegiatan perdagangan, jasa, pertanian. Arah pengembangan Kawasan Agropolitan Pakuan Ratu adalah pengembangan perdagangan, jasa, industri dan pertanian berkelanjutan.

2.7.1.2. Kawasan Strategi dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya dengan kriteria sebagai berikut:

1. Merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau cagar budaya baik yang terletak di daratan dan/atau di perairan;

2. Memiliki pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya;
3. Merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
4. Merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
5. Merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya; dan/atau
6. Memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya.

Berdasarkan kriteria diatas maka Penetapan kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial budaya berada di Kampung Wisata Lestari Gedung Batin di Kecamatan Umpu Semenguk. Tujuan penentapan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya adalah untuk menjaga kelestarian adat budaya lokal dan menjaga situs-situs bersejarah.

2.7.1.3. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
2. Merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
3. Memberikan perlindungan keseimbangan neraca air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
4. Memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
5. Menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
6. Memiliki pusat kegiatan pada kawasan rawan bencana dan mempunyai risiko bencana alam; dan/atau
7. Sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Berdasarkan kriteria diatas maka Penetapan kawasan strategis Kabupaten sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ditetapkan untuk perlindungan keanekaragaman hayati dan aset nasional yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan fauna yang hampir punah yang harus dilindungi dan dilestarikan. Penetapan kawasan strategis Kabupaten sudut kepentingan lingkungan hidup berada di Taman Wisata Alam Curup Gangsa di Kecamatan Kasui. Adapun indikasi Program Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.105 Indikasi Program Kawasan Strategis Kabupaten

Program	Lokasi	Sumber Pendanaan
A. Kawasan Strategi dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi		
1. Pengembangan kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Way Kanan	Kecamatan Blambangan Umpu dan Kecamatan Way Tuba	APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten
2. Pengembangan Kawasan Agropolitan Baradatu	Kecamatan Baradatu	APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten
3. Pengembangan Kawasan Agropolitan Pakuan Ratu	Kecamatan Pakuan Ratu	APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten

penimbang mempunyai total nilai (skor) 125-174. Berdasarkan hasil rencana luas hutan produksi tetap seluas 3 (tiga) Ha di Kecamatan Rebang Tangkas.

2. Hutan Produksi Tetap

Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng lapngan, kelas tanah dan kelas intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai total nilai (skor) kurang dari 124. Berdasarkan hasil rencana luas hutan produksi tetap di Kabupaten Way Kanan yaitu 53.746 (lima puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh enam) hektar yang terdapat di Kecamatan Blambangan Umpu, Kecamatan Negara Batin, Kecamatan Way Tuba, Kecamatan Negeri Besar, Kecamatan Pakuan Ratu, Kecamatan Rebang Tangkas dan Kecamatan Umpu Semenguk.

2.7.2.2. Kawasan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Way Kanan meliputi kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura dan kawasan perkebunan.

1. Kawasan Tanaman Pangan

Kawasan tanaman pangan meliputi kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah dan kawasan pertanian tanaman pangan lahan kering dengan luas kurang lebih 97.899 (sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan) hektare.

a. Pertanian Tanaman Pangan Pada Lahan Basah

Pertanian lahan basah adalah sistem usaha tani dengan menggunakan irigasi ataupun sistem tadah hujan.

b. Pertanian Tanaman Pangan Pada Lahan Kering

Dalam ilmu pertanian jenis pertanian ini dikenal dengan pertanian tanpa genangan atau unirrigated land, seperti tanaman palawija, kacang-kacangan, jagung dan lain-lain (Tejoyuwono, 1989).

Secara eksisting jenis tanaman pangan di Kabupaten Way Kanan tersebar diseluruh kecamatan.

2. Kawasan Pertanian Hortikultura

Ciri khas dari pertanian hortikultura ini adalah tanaman lahan kering yang bernilai ekonomi tinggi (Tejoyuwono, 1989), seperti sayur- sayuran. Komoditas pertanian hortikultura yang terdapat di Kabupaten Way Kanan adalah:

a. Sayur-sayuran: cabe, kacang panjang, terong, dan ketimun

b. Buah-buahan: mangga, pisang, pepaya dan nanas Pengembangan pertanian hortikultura diarahkan di Kecamatan Banjit, Kecamatan Baradatu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kecamatan GunungLabuhan, Kecamatan Kasui, Kecamatan Negeri Besar, Kecamatan Rebang Tangkas dan Kecamatan Umpu Semenguk. Luas rencana peruntukan kawasan pertanian hortikultura adalah 20.858 (dua puluh ribu delapan ratus lima puluh delapan) hektare.

Sektor perkebunan selama ini mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Way Kanan. Sub-sektor perkebunan terus dikembangkan dengan melibatkan perkebunan rakyat dan perkebunan skala besar. Luas kawasan peruntukan perkebunan kurang lebih 99.365 (sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima) hektare.

Beberapa tanaman yang perkebunan yang bersifat kerakyatan yaitu perkebunan kopi, lada, kakao, kelapa dalam, dan tebu, sementara perkebunan skala besar diarahkan untuk tanaman tebu, karet, dan kelapa sawit yang produktivitasnya cukup tinggi. Secara signifikan pengembangan komoditas perkebunan ini diarahkan untuk pengembangan kegiatan industri yang pada akhirnya bermuara pada kebijakan ekonomi kerakyatan.

2.7..2.3 Kawasan Perikanan

Kawasan perikanan di Kabupaten Way Kanan berupa perikanan budidaya. Adapun untuk menetapkan kawasan perikanan, digunakan pendekatan kesesuaian lahan untuk kawasan budidaya air tawar, yaitu:

1. Kelerengan lahan < 8 %
2. Persediaan air cukup
3. Jauh dari sumber pencemaran, baik pencemaran domestik maupun industri.
4. Kualitas air baik (memenuhi kriteria kualitas air untuk budidaya perikanan).

Selain melihat kriteria kesesuaian lahan di atas, maka fakta mengenai produktivitas dan jumlah petani ikan juga dipertimbangkan. Kawasan peruntukan perikanan budidaya berupa budidaya pembibitan dan budidaya pembesaran dengan luas rencana peruntukan kawasan perikanan adalah 5.550 (lima ribu lima ratus lima puluh) hektare, berada di Kecamatan Kecamatan Bahuga, Kecamatan Banjit, Kecamatan Baradatu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kecamatan Buay Bahuga, Kecamatan Banjit, Kecamatan Baradatu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kecamatan Bumi Agung, Kecamatan Gunung Labuhan, Kecamatan Kasui, Kecamatan Negara Batin, Kecamatan Negeri Besar, Kecamatan Umpu Semenguk dan Kecamatan Way Tuba.

Perikanan Kabupaten Way Kanan dibedakan berdasarkan jenis komoditi perikanan. Di Kabupaten Way Kanan terdapat 2 jenis komoditas utama perikanan. Berikut Kami sampaikan data perikanan di Kabupaten Way Kanan dari Tahun 2019 sampai dengan 2023.

Tabel 2.106 Produksi Perikanan Kabupaten Way Kanan

No	Uraian	Produksi (Ton)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Produksi Budidaya	1.619,43	1.710,95	1.809,12	1.884,66	1.933,47
2	Produksi Tangkap	197,73	198,71	201,59	203,12	201,65
3	Total Produksi	1.817,16	1.909,66	2.010,71	2.087,78	2.135,12

Sumber : Dinas Perikanan Tahun 2023

Pada data produksi perikanan tangkap yang mengalami peningkatan ditunjang oleh 192 Orang Nelayan Penangkapan PUD (Perairan Umum Daerah) dan 5 POKMASWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas) yang tersebar di Kabupaten Way Kanan. Pengembangan usaha perikanan tangkap akan optimal jika didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, antara lain mencakup: kapal dan alat tangkap, pelabuhan perikanan beserta fasilitasnya; serta perlu ditingkatkan Integrasi dan konektivitas antar pelabuhan perikanan belum optimal, termasuk sistem data dan informasi.

Data produksi perikanan budidaya yang mengalami peningkatan di setiap tahunnya ditunjang oleh 1 UPT Balai Benih dan 64 POKDAKAN (Kelompok Pembudidaya Ikan) yang tersebar di Kabupaten Way Kanan. Pengembangan usaha perikanan tangkap akan optimal jika didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, antara lain mencakup: peningkatan produksi benih unggul dan berkualitas, pengembangan komoditas unggulan. Komoditas unggulan adalah sebagai berikut : ikan lele, ikan nila, ikan mas, ikan gurame, ikan patin, ikan baung dan ikan lainnya yang tersebar di Kabupaten Way Kanan.

2.7..2.4 Kawasan Pertambangan dan Energi

Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan didasarkan pada lokasi usaha tambang yang ada di Kabupaten Way Kanan. Kawasan pertambangan dan energi berupa:

1. Kawasan Pertambangan Mineral Logam

Kawasan pertambangan mineral bukan logam berada di Kecamatan Banjit, Kecamatan Baradatu, Kecamatan Kasui dan Kecamatan Umpu Semenguk dengan luas 3.642 (tiga ribu enam ratus empat puluh dua) Hektare.

2. Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam

Kawasan Pertambangan mineral bukan logam berada di Kecamatan Gunung Labuhan, Kecamatan Baradatu, Kecamatan Way Tuba dan Kecamatan Umpu Semenguk dengan luas 55 (lima puluh lima) Hektare.

2.7.2.5 Kawasan Peruntukan Industri

Mengingat semakin terbatasnya luas lahan untuk kegiatan usaha pertanian serta perlunya peningkatan SDM masyarakat. Kawasan Industri ditetapkan seluas kurang lebih 1.351 (seribu tiga ratus lima puluh satu) hektare berada di Kecamatan Way Tuba dan Kecamatan Bumi Agung.

2.7.2.6 Kawasan Pariwisata

Kawasan pariwisata di Kabupaten Way Kanan terdiri dari objek pariwisata sebagai berikut:

1. Bendungan Irigasi Way Umpu, berada di Kecamatan Banjit
2. Bendungan Way Mencar, berada di Kecamatan Way Tuba
3. Curup Bukit Duduk, berada di Kecamatan Banjit
4. Curup Cangkah Kidau, berada di Kecamatan Kasui
5. Curup Jepun, berada di Kecamatan Umpu Semenguk
6. Curup Kereta, berada di Kecamatan Umpu Semenguk
7. Curup Layang-layang, berada di Kecamatan Kasui
8. Curup Pinang Indah, berada di Kecamatan Rebang Tangkas
9. Curup Putri Malu, berada di Kecamatan Banjit
10. Curup Semarang, berada di Kecamatan Baradatu
11. Curup Susukan, berada di Kecamatan Kasui
12. Curup Way Bujukan, berada di Kecamatan Rebang Tangkas
13. Kampung Wisata Gedung Batin, berada di Kecamatan Umpu Semenguk
14. Pemandian Air Panas Serasan, berada di Kecamatan Banjit
15. Suplesi Way Besai, berada di Kecamatan Banjit
16. Taman Wisata Alam Curup Gangsa, berada di Kecamatan Kasui.

2.7.2.7 Kawasan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman di Kabupaten Way Kanan akan dikembangkan pada kawasan-kawasan yang berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, kawasan hutan dan kawasan rawan bencana serta memiliki daya dukung yang kuat untuk kegiatan permukiman. Dalam menentukan kawasan peruntukan permukiman, digunakan pendekatan kesesuaian lahan permukiman, lokasi permukiman eksisting, kebutuhan minimal lahan permukiman, serta alokasi lahan untuk peruntukan lainnya.

1. Ditinjau Dari Lokasi Sebaran Permukiman Eksisting

Seiring dengan perkembangan kegiatan ekonomi yang relatif cukup pesat pada pusat-pusat kecamatan, khususnya di Kecamatan Kasui, Banjit dan Baradatu yang terletak di sebelah selatan pusat kota Blambangan Umpu serta Kecamatan Buay Bahuga yang terletak di sebelah utara Blambangan Umpu. Kecenderungan masyarakat untuk mendirikan permukiman di sekitar kawasan tersebut diantaranya disebabkan oleh tingkat aksesibilitas pada kawasan tersebut relatif cukup mudah dan tingkat pelayanan fasilitas yang lebih baik dibandingkan kecamatan lainnya.

2. Alokasi Lahan Budidaya Terbangun Untuk Permukiman

Alokasi lahan budidaya terbangun, yang meliputi bangunan Sarana Perkotaan, infrastruktur jalan, kawasan industri. Diasumsikan alokasi lahan terbangun untuk permukiman mencapai $\pm 40-45\%$ dari luas potensi lahan terbangun.

3. Kebutuhan Minimal Lahan Permukiman

Dengan memperhitungkan proyeksi penduduk hingga tahun 2031 dan klasifikasi lahan perumahan untuk rumah besar ($900 \text{ m}^2/\text{persil}$), sedang ($500 \text{ m}^2/\text{persil}$), dan kecil ($100 \text{ m}^2/\text{persil}$), maka dapat dihitung luas kebutuhan minimal lahan permukiman.

Dengan mempertimbangkan ketiga hal di atas, maka kawasan peruntukan permukiman di Kabupaten Way Kanan terbagi menjadi kawasan peruntukan permukiman perkotaan dan kawasan peruntukan permukiman perdesaan.

1. Kawasan Permukiman Perkotaan

Memiliki luas kurang lebih 18.884 (delapan belas ribu delapan ratus delapan puluh empat) hektare, yang tersebar di Kecamatan Bahuga, Kecamatan Banjit, Kecamatan Baradatu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kecamatan Bumi Agung, Kecamatan Kasui, Kecamatan Negara Batin, Kecamatan Negeri Agung, Kecamatan Negeri Besar, Kecamatan Pakuan Ratu, Kecamatan Rebang Tangkas, Kecamatan Way Tuba, Kecamatan Umpu Semenguk.

2. Kawasan Permukiman Perdesaan

Memiliki luas kurang lebih 16.594 (enam belas ribu lima ratus sembilan puluh empat) hektare yang terdapat di seluruh kecamatan.

2.7.2.8 Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Pertahanan dan Keamanan merupakan Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya. Untuk Kawasan Pertahanan dan Keamanan, Lingkup Pertahanan merupakan kewenangan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) sedangkan untuk lingkup keamanan merupakan kewenangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Lapangan Udara Angkatan Darat (Lanudad) Gatot Soebroto dideliniasi sebagai Kawasan pertahanan dan keamanan dengan memiliki luas kurang lebih 382 (tiga ratus delapan puluh dua) hektare berada di Kecamatan Way Tuba. Berdasarkan lokasi objek pertahanan dan keamanan terdiri dari:

1. Komando Distrik Militer 0427/Way Kanan, berada di Kecamatan Blambangan Umpu;
2. Kepolisian Resor Way Kanan, berada di Kecamatan Umpu Semenguk;
3. Komando Rayon Militer 427-01/Pakuan Ratu, berada di Kecamatan Pakuan Ratu;
4. Komando Rayon Militer 427-02/Kasui, berada di Kecamatan Kasui;
5. Komando Rayon Militer 427-03/Blambangan Umpu, berada di Kecamatan Blambangan Umpu;
6. Komando Rayon Militer 427-04/ Bahuga, berada di Kecamatan Buay Bahuga;
7. Komando Rayon Militer 427-05/Banjit, berada di Kecamatan Banjit;

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Berdasarkan *PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 1 TAHUN 2017 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan* ditetapkan seluas 18.784 Ha dan sedang ada penyesuaian kembali yang belum ditetapkan mengenai luasan LP2B. Sedangkan Luas kawasan KP2B di Kabupaten Way Kanan kurang lebih 24.376 (dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh enam) hektare yang tersebar pada peruntukan kawasan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di seluruh kecamatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.107 Kawasan KP2B yang Bertampalan dengan Kawasan Rencana Pola Ruang

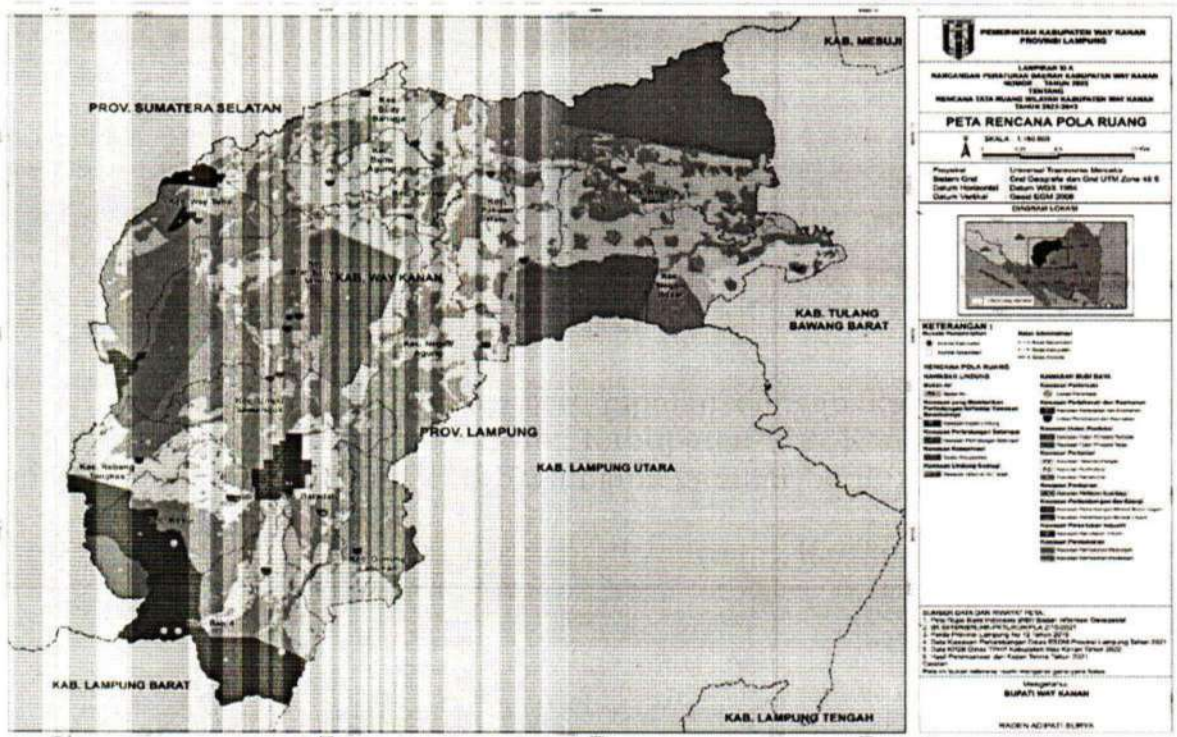
Kecamatan	Rencana Pola Ruang diatasnya	Luas (Ha)
Bahuga	Kawasan Perkebunan	306,48

Kecamatan	Rencana Pola Ruang diatasnya	Luas (Ha)
	Kawasan Tanaman Pangan	2.007,94
Banjit	Kawasan Hortikultura	94,75
	Kawasan Perkebunan	46,03
	Kawasan Tanaman Pangan	4.811,65
Baradatu	Kawasan Hortikultura	30,99
	Kawasan Perkebunan	86,58
	Kawasan Tanaman Pangan	2.328,14
Blambangan Umpu	Kawasan Hortikultura	1,09
	Kawasan Perkebunan	7,45
	Kawasan Tanaman Pangan	1.138,45
Buay Bahuga	Kawasan Perkebunan	10,80
	Kawasan Tanaman Pangan	2.415,77
Bumi Agung	Kawasan Perkebunan	9,10
	Kawasan Tanaman Pangan	2.149,14
Gunung Labuhan	Kawasan Perkebunan	31,77
	Kawasan Tanaman Pangan	77,28
Kasui	Kawasan Hortikultura	27,71
	Kawasan Perkebunan	69,68
	Kawasan Tanaman Pangan	182,14
Negara Batin	Kawasan Perkebunan	39,60
	Kawasan Tanaman Pangan	3.352,51
Negeri Agung	Kawasan Perkebunan	16,10
	Kawasan Tanaman Pangan	240,07
Negeri Besar	Kawasan Hortikultura	14,55
	Kawasan Perkebunan	5,73
	Kawasan Tanaman Pangan	403,41
Pakuan Ratu	Kawasan Perkebunan	1.253,79
	Kawasan Tanaman Pangan	2.812,64
Rebang Tangkas	Kawasan Hortikultura	73,87
	Kawasan Perkebunan	80,48
	Kawasan Tanaman Pangan	53,89
Umpu Semenguk	Kawasan Hortikultura	3,41
	Kawasan Perkebunan	6,72
	Kawasan Tanaman Pangan	57,17
Waytuba	Kawasan Perkebunan	0,88
	Kawasan Tanaman Pangan	127,90
Jumlah		24.375,66

Sumber: Dinas TPHP Kabupaten Way Kanan, 2023

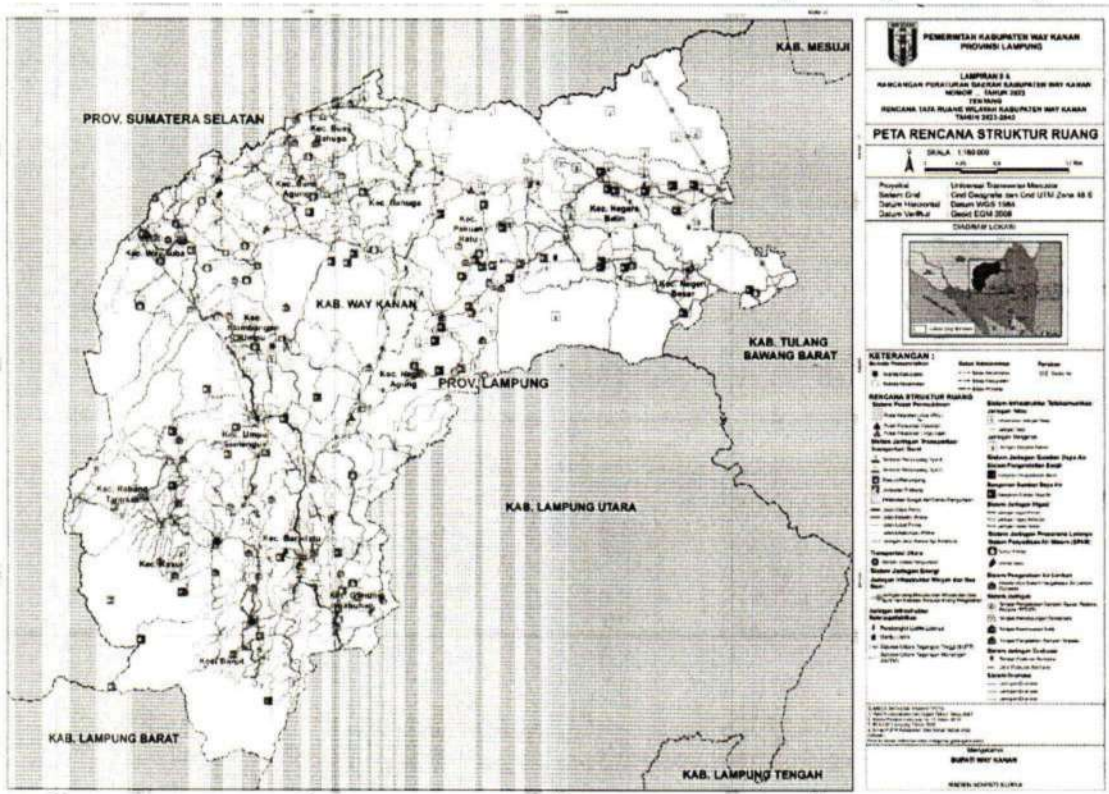
Dari Kawasan KP2B yang bertampalan dengan kawasan rencana pola ruang maka peta rencana pola ruang Kabupaten Way Kanan dan pola struktur ruang Kabupaten Way Kanan sebagaimana gambar berikut.

Gambar 2.47 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Way Kanan



Sumber : Hasil Analisis TIM Penyusun RTRW Kabupaten Way Kanan 2023-2043

Gambar 2.48 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Way Kanan



Sumber : Hasil Analisis TIM Penyusun RTRW Kabupaten Way Kanan 2023-2043

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

3.1 Permasalahan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan permasalahan yang harus dihadapi suatu wilayah dan harus dimitigasi risikonya dalam mencapai tujuan pembangunan. Tujuan utama pembangunan adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Penduduk Kabupaten Way Kanan pada tahun 2023 mencapai 489.773 jiwa dengan jumlah penduduk usia produktif (15 - 64 tahun) mencapai 66,95%. Besarnya penduduk usia produktif ini menunjukkan Kabupaten Way Kanan sedang mengalami Bonus Demografi namun potensi ini belum optimal dimanfaatkan. Hal ini terlihat dari pendapatan perkapita pada tahun 2023 yang baru mencapai Rp.35.579.572,- masih jauh dari pendapatan perkapita Provinsi Lampung sebesar Rp.48.194.215,- maupun PDB perkapita yang sudah mencapai Rp 75 juta. Oleh karena itu perlu upaya yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan kesejahteraan seiring dengan upaya mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Pendapatan utama masyarakat Way Kanan berasal dari lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi rata-rata selama 6 tahun terakhir (2018-2023) mencapai 35,23% terhadap perekonomian daerah dengan tenaga kerja yang bekerja dilapangan usaha ini tahun 2023 mencapai 145.021 jiwa (56,65%) yang didukung dengan keberadaan lahan pertanian yang cukup luas mencapai 63,5% dari luas wilayah Kabupaten Way Kanan yang terdiri dari kawasan tanaman pangan seluas 97.899 ha, kawasan hortikultura seluas 20.858 ha, kawasan perkebunan seluas 99.365 ha, dan kawasan perikanan seluas 5.500 ha. Dalam rangka perlindungan kawasan pertanian telah ditetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan seluas 24.376 ha.

Selain itu untuk pengembangan pertanian juga didukung oleh sumberdaya air yang memadai dari 6 sungai besar yang ada serta didukung keberadaan 2 Daerah Irigasi (DI) yaitu Perjaya dan Way Umpu.

Berikutnya lapangan usaha industri pengolahan adalah lapangan usaha kedua terbesar yang berkontribusi dalam perekonomian daerah yaitu dalam 6 tahun terakhir (2018-2023) rata-rata mencapai 22,18% dengan tenaga kerja yang bekerja dilapangan usaha ini tahun 2023 mencapai 26.646 jiwa (10,41%). Dua lapangan usaha ini merupakan lapangan usaha andalan Kabupaten Way Kanan karena berkontribusi besar terhadap perekonomian daerah.

Ada beberapa permasalahan utama yang menjadi faktor penghambat yang jika ditangani dengan baik dapat memaksimalkan potensi daerah yang ada sehingga kondisi ideal dapat tercapai, yaitu:

1. Aspek Perekonomian:

Perekonomian berbasis sumberdaya alam terutama pertanian dan industri pengolahan yang merupakan penopang utama perekonomian daerah belum dikelola secara optimal, hal ini ditunjukkan oleh :

- Pertumbuhan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan ini dalam 6 tahun terakhir (2018-2023) rata-rata tumbuh rendah yaitu hanya 1,16%, demikian juga dengan lapangan usaha industri pengolahan dalam 6 tahun terakhir (2018-2023) rata-rata tumbuh rendah yaitu hanya 2,97%.
- Tingkat kemiskinan di Kabupaten Way Kanan beberapa tahun terakhir terus menurun, pada tahun 2021 sebesar 13,09% menurun menjadi 11,76% pada tahun 2022, selanjutnya pada tahun 2023

menurun menjadi 11,02%, dan pada tahun 2024 kembali menurun menjadi 10,43%. Namun penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian pada tahun 2023 masih cukup besar yaitu mencapai 50,25%.

- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2023 sebesar 73,32% dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,07%
- Kelembagaan petani yang belum optimal hal ini terlihat pada tahun 2022 belum adanya kelompok tani utama dan hanya ada 19 kelompok tani madya dari total 2.847 kelompok tani yang ada,
- Kelembagaan Koperasi juga belum optimal yang pada tahun 2023 hanya ada 119 koperasi aktif dan 12 koperasi sehat.
- Jumlah UMKM pada tahun 2023 baru mencapai 57.876 UMKM.
- kurang dimanfaatkannya teknologi informasi.
- Infrastruktur wilayah merupakan penunjang utama pengembangan perekonomian daerah namun kondisi saat ini masih belum sesuai harapan, hal ditandai dengan persentase jalan mantap baru mencapai 33,65% tahun 2023.

2. Aspek Sumberdaya Manusia:

Sumberdaya manusia merupakan penggerak utama pembangunan daerah namun kualitas sumberdaya manusia yang ada belum optimal, yang ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Way Kanan pada tahun 2023 mencapai 70,51 poin dengan kategori tinggi namun angka rata-rata lama sekolah hanya 7,74 tahun, harapan lama sekolah baru mencapai 12,43 tahun, masih adanya persoalan stunting dengan angka prevalensi stunting masih sebesar 22,7%, dan masih adanya persoalan gender dengan indeks ketimpangan gender masih sebesar 0,554 poin.

3. Aspek Lingkungan:

Pembangunan daerah harus selaras dengan upaya pelestarian lingkungan hidup namun saat ini masih terjadi degradasi lingkungan hidup, yang ditunjukkan oleh:

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Way Kanan pada tahun 2023 baru mencapai 70,51 poin dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 76,07 poin, Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 72,01 poin, dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) sebesar 58,19 poin.
- Terdapat 31 kampung rawan bencana banjir yang memerlukan perhatian khusus dari pihak *stakeholders* yang ada sebagai bentuk upaya mitigasi bencana di Kabupaten Way Kanan.

4. Aspek Pemerintahan:

Pembangunan daerah yang baik perlu didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik namun saat ini belum optimal, hal ini ditunjukkan oleh:

- Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) tahun 2023 baru mencapai 55,56 poin dengan kategori CC, dengan nilai SAKIP mencapai 60,52 poin kategori B;
- Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mencapai nilai 3,08 kategori baik;
- Indeks Inovasi Daerah (IID) mencapai nilai 53,35 poin kategori inovatif.

3.2 Isu Strategis Daerah

Terkait upaya pengembangan potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ada beberapa isu-isu strategis daerah yang berdampak luas dan memiliki konsekuensi jauh ke depan yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan biaya yang makin besar untuk itu perlu dilakukan mitigasi risiko. Isu utama baik peluang dan tantangan dalam pengembangan potensi daerah terutama pertanian, perikanan, peternakan, serta industri pengolahan dalam pembangunan Kabupaten Way Kanan pada periode 2025-2045, yaitu:

1. Tantangan:

➤ Krisis Pangan

- Semakin meningkatnya jumlah penduduk dunia tidak diiringi dengan peningkatan produksi pangan yang memadai (teori Malthus) sehingga pada masa depan ancaman kekurangan pangan semakin meningkat.
- Organisasi Pangan Dunia (FAO) memperkirakan tahun 2050 mendatang dunia akan menghadapi potensi bencana kelaparan, yang disebabkan oleh perubahan iklim.
- Disisi lain, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memperkirakan pada 2063 tak ada lagi profesi petani. Hal ini seiring dengan terus menurunnya pekerja di sektor pertanian akibat enggan generasi muda untuk menjadi petani dan terus menurunnya luas lahan pertanian.

Melihat kondisi ini tentunya sangat mengkhawatirkan bagi Indonesia termasuk Kabupaten Way Kanan, apalagi pangan merupakan kebutuhan dasar setiap warga.

➤ Perubahan Iklim

Akibat kencangnya laju perubahan iklim, seluruh negara di dunia saat ini mengalami dampak perubahan iklim dengan tingkat yang berbeda-beda, seperti cuaca ekstrem, bencana alam, penurunan keanekaragaman hayati, kenaikan muka air laut, krisis air, gangguan di sektor pertanian dan ketahanan pangan jadi ancaman di depan mata.

➤ Krisis Air Global

Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa dunia dalam bahaya krisis air global. Laporan bersama Bank Dunia dan PBB menyatakan saat ini 40 persen populasi dunia mengalami kelangkaan air. Laporan yang disusun berdasarkan penelitian selama dua tahun tersebut mengatakan 700 juta orang akan menderita akibat kelangkaan air parah pada 2030.

➤ Proporsi Anggaran APBD untuk Urusan Pilihan Minim

Proposi anggaran untuk urusan pilihan termasuk pertanian dan industri pengolahan sangat terbatas

2. Peluang:

Untuk mengembangkan perekonomian daerah ada beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan yaitu:

- Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 830/Kpts/RC.040/12/2016 Tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional, yang menetapkan Kabupaten Way Kanan sebagai lokasi pengembangan komoditas padi, ubi kayu, tebu, kopi, lada, dan sapi potong.

- Keberadaan Bandara Gatot Subroto dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan perekonomian daerah
- Keberadaan Bendung Way Umpu, dan Bendung Perjaya serta Suplesi Way Besai untuk pengembangan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan.
- Keberadaan sarana kereta api yang ditopang dengan keberadaan 5 stasiun kereta api untuk menggerakkan perekonomian daerah.
- Keberadaan Lembaga Penelitian dan Universitas dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan sumberdaya manusia di Kabupaten Way Kanan dalam mengembangkan produk unggulan pertanian, perikanan, peternakan dan industri pengolahan.
- Keberadaan perusahaan swasta nasional dalam mengembangkan dan memberdayakan masyarakat Kabupaten Way Kanan
- Keberadaan Pemerintah Daerah Sekitar dimanfaatkan untuk kerjasama antar daerah dalam mengembangkan produk unggulan daerah dan perekonomian daerah.
- Pertumbuhan permintaan bahan makanan organik di dunia terus meningkat dari tahun ke tahun, termasuk di Indonesia. Pertumbuhannya mencapai 15-20 persen, didorong peningkatan daya beli masyarakat. Alasan konsumen memilih produk organik menurut riset adalah ingin hidup lebih sehat. Karena ada kelebihan produk organik dibandingkan produk non-organik, yaitu bebas pestisida dan bebas GMO (genetically modified food). Hal ini bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan produk organik di Kabupaten Way Kanan.
- Kecenderungan wisata mengarah kepada pariwisata berkelanjutan pasca-pandemi virus corona (Covid-19). Selain itu ada kecenderungan masyarakat lebih ingin merencanakan liburan ke destinasi wisata domestik, ketimbang vakansi keluar negeri ketika pandemi mereda. Artinya, ada kecenderungan masyarakat untuk mengobati bosan dengan melakukan perjalanan ke tujuan yang lebih dekat dengan rumah atau hanya sekadar staycation di sebuah hotel. Hal ini bisa dimanfaatkan dengan mengembangkan wisata terutama wisata agro di Kabupaten Way Kanan.
- Revolusi Industri 4.0 memiliki potensi untuk meningkatkan tingkat pendapatan global dan meningkatkan kualitas hidup populasi di seluruh dunia. Sampai saat ini, mereka yang telah memperoleh hasil maksimal darinya adalah konsumen yang mampu membeli dan mengakses dunia dan layanan digital. Di masa depan, inovasi teknologi juga akan mengarah pada keajaiban sisi penawaran, dengan keuntungan efisiensi dan produktivitas jangka panjang. Biaya transportasi dan komunikasi akan turun, logistik dan rantai pasokan global akan menjadi lebih efektif, dan biaya perdagangan akan berkurang, yang semuanya akan membuka pasar baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada saat yang sama, seperti yang ditunjukkan oleh ekonom Erik Brynjolfsson dan Andrew McAfee, revolusi dapat menghasilkan ketimpangan yang lebih besar, khususnya dalam potensinya untuk mengganggu pasar tenaga kerja.
- Impor produk pertanian yang selama ini belum bisa dipenuhi dengan produksi dalam negeri pun mengalami kendala, karena perubahan kebijakan dari negara-negara eksportir yang berusaha untuk menyimpan hasil produksi untuk kebutuhan dalam negeri mereka.

BAB IV VISI MISI DAERAH

4.1 Visi Indonesia dan Provinsi Lampung 2025 2045

Visi Indonesia

Visi Indonesia Emas 2045 adalah “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Negara Nusantara artinya negara kepulauan yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional, dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia. Berdaulat yang dicapai melalui ketahanan, kesatuan, mandiri, dan aman. Maju tercermin dari berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil. Berkelanjutan melalui pembangunan yang lestari dan seimbang antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan dicerminkan oleh lompatan besar meliputi 5 (lima) sasaran visi yaitu (i) Pendapatan per Kapita setara negara maju (GNI per kapita sebesar USD 30.300, kontribusi PDB Maritim mencapai 17,5 persen, serta PDB Industri 28 persen); (ii) Kemiskinan menuju Nol Persen (tingkat kemiskinan pada kisaran 0,5 - 0,8 persen) dan ketimpangan berkurang (Rasio Gini 0,290 - 0,320 dan peningkatan Kontribusi PDRB KTI menjadi 26 persen); (iii) Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional yang meningkat (Global Power Index masuk 15 besar dunia); (iv) Daya Saing Sumber Daya Manusia juga terus meningkat (skor HCI menjadi 0,73); dan (v) Intensitas Emisi GRK menurun menuju Emisi Nol Netto (*net zero emission*) dengan tingkat penurunan mencapai 93,5 persen.

Visi Provinsi Lampung 2025

“LAMPUNG 2045 “SEJAHTERA, MAJU, MERATA DAN BERKELANJUTAN ”

4.2 Visi Kabupaten Way Kanan 2025-2045

Dengan mempertimbangkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Indonesia 2025-2045 : “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”, dan Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung 2025-2045 “Lampung 2045 Sejahtera, Maju, Merata, Dan Berkelanjutan”, serta mencermati potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi daerah, maka Visi Rencana Pembangunan Kabupaten Way Kanan 2025-2045 adalah:

“Way Kanan Maju dan Berkelanjutan”.

Maju : Berarti kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Way Kanan semakin baik yang ditunjukkan oleh (1) Tingkat Pendapatan Per Kapita sebesar 98,69-110,50 Juta rupiah; (2) Indeks Pembangunan Manusia mencapai 79,00-80,00 poin; (3) Tingkat Kemiskinan sebesar 0,8-1,0 persen; (4) Indeks Gini sebesar 0,204-0,200; (5) Indeks Daya Saing Daerah mencapai 3,85-4,00;

Berkelanjutan : Berarti semakin baik kualitas lingkungan hidup yang ditunjukkan oleh Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 75,17 poin.

Untuk mewujudkan visi tersebut dengan memperhatikan potensi daerah, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Way Kanan ada 2 (dua) lapangan usaha andalan masyarakat yang dapat dikembangkan yaitu (1) lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, dan (2) lapangan usaha industri pengolahan. Hal ini selaras dengan Tujuan Penataan Ruang Wilayah

berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Way Kanan 2023-2043 yaitu mewujudkan ruang yang kondusif, produktif, berkualitas dan berkelanjutan dalam rangka pemerataan pembangunan wilayah dengan mendorong pembangunan sektor pertanian dan industri yang berbasis pertanian.

Tabel 4.1 Sasaran Visi Kabupaten Way Kanan 2025-2045

SASARAN VISI		INDIKATOR VISI		CAPAIAN 2023	BASELINE 2025	SASARAN POKOK			
						2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1	Pendapatan Perkapita Dalam Kategori Tinggi	1.	PDRB per kapita (Rp Juta)	35,68	40,62	44,62-45,62	56,44-57,44	73,30-74,30	98,69-110,50
		2.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,63	4,9	5,5	6	6,5	7
		3.	Kontribusi PDRB Industri (%)	20,54	22,26-23,18	23-24	25-26	27-28	29,15-29,87
		4.	Pertumbuhan Ekonomi Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	0,01	1,5	2,5-3,0	3,5-4,0	4,5-5,0	5,5-6,0
		5.	Indeks Ekonomi Biru	N/A	23,43	33,50-35,00	43,50-45,00	53,00-55,00	65,16
2.	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Rendah	1.	Tingkat Kemiskinan (%)	11,02	9,92	7,0-6,0	4,5-4,0	2,5-2,0	0,8-1,0
		2.	Rasio Gini (Indeks)	0,281	0,267	0,267-0,264	0,248-0,244	0,228-0,224	0,204-0,200
		3.	Persentase Desa Mandiri (%) (Indeks Desa Bappenas)	0,095	2,262	5,2-7,2	10,2-12,2	15,2-17,2	21,267
	Daya Saing Daerah	1.	Indeks Daya Saing Daerah	N/A	3,05-3,07	3,20-3,30	3,45-3,55	3,65-3,75	3,85-4,00
		2.	Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Provinsi (%)	3,89	3,89	3,90	3,91	3,92	3,93
4.	Kualitas Sumber Daya Manusia yang Meningkat	1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,51	71,61	73,01-73,51	75,51-76,01	78,01-78,51	79,00-80,00
		2.	Indeks Modal Manusia	0,52	0,54	0,57	0,60	0,63	0,68
5.	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	1.	Penurunan Emisi GRK Kumulatif (ton CO2e)	N/A	232.154,08	307.154,08	382.154,08	457.154,08	534.741,82
		2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,51	70,93	71,78	72,84	73,90	75,17

4.3 Misi Kabupaten Way Kanan 2025-2045

Misi merupakan rumusan umum tentang upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah. Secara keseluruhan, misi RPJPD dapat berfungsi sebagai alat untuk mendukung mitigasi risiko, namun bukan merupakan langkah mitigasi risiko itu sendiri. Pelaksanaan yang tepat dari misi tersebut, bersama dengan langkah-langkah manajemen risiko lainnya, sangat penting untuk mengurangi dampak risiko dalam pembangunan daerah.

Misi dalam RPJPD harus mampu menaungi berbagai tema pembangunan dalam 4 tahap (per lima tahunan) selama 20 tahun ke depan dengan mempertimbangkan misi RPJPN 2025-2045 dan misi RPJPD Provinsi Lampung 2025-2045.

Adapun Misi Kabupaten Way Kanan meliputi:

- (1) Transformasi Sosial Berkesinambungan: Menuju Sumber Daya Manusia Unggul dan Produktif Didukung Ketahanan Sosial, Sarana Prasarana Berkualitas dan Ramah Lingkungan;
- (2) Transformasi Ekonomi Berkesinambungan: Menuju Ekonomi Inklusif Didukung Keamanan Daerah Yang Tangguh, Stabilitas Ekonomi, Pembangunan Kewilayahan Yang Merata dan Berkeadilan serta Sarana Prasarana Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan;
- (3) Transformasi Tata Kelola Berkesinambungan;
- (4) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Berkesinambungan.

4.3.1 Misi 1. Transformasi Sosial Berkesinambungan: Menuju Sumber Daya Manusia Unggul dan Produktif Didukung Ketahanan Sosial, Sarana Prasarana Berkualitas dan Ramah Lingkungan;

Misi ini selaras dengan RPJPN 2025-2045 pada misi 1, 5, 7, dan 8

MISI RPJPD KABUPATEN WAY KANAN 2025-2045		MISI RPJPN 2025-2045	
1	Transformasi Sosial Berkesinambungan: Menuju Sumber Daya Manusia Unggul dan Produktif Didukung Ketahanan Sosial, Sarana Prasarana Berkualitas dan Ramah Lingkungan	1	Mewujudkan Transformasi Sosial
		5	Memantapkan Ketahanan Sosial dan Ekologi
		7	Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
		8	Mewujudkan kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas

Transformasi sosial berkesinambungan adalah proses perubahan nilai, norma, sikap, perilaku, dan struktur sosial masyarakat yang dilakukan secara berkesinambungan yang akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Transformasi sosial melibatkan berbagai aspek, seperti budaya, agama, politik, hukum, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan media. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia unggul dan produktif dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia yang pada tahun 2023 sebesar 70,51 poin diharapkan meningkat menjadi 79,00-80,00 poin pada tahun 2045.

Transformasi sosial juga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, seperti dinamika masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, globalisasi, dan tantangan zaman.

Kabupaten Way Kanan sebagai salah satu wilayah di Provinsi Lampung memiliki potensi dan tantangan dalam melakukan transformasi sosial. Oleh karena itu, diperlukan strategi dan kebijakan yang tepat untuk mendorong transformasi sosial di Kabupaten Way Kanan.

Dalam mewujudkan transformasi sosial berkesinambungan ada beberapa sasaran yang akan dicapai yaitu:

- 1. Kesehatan untuk semua
- 2. Pendidikan yang berkualitas dan merata
- 3. Perlindungan sosial yang adaptif
- 4. Beragama maslahat dan berkebudayaan maju
- 5. Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan Masyarakat inklusif

Selain itu transformasi sosial berkesinambungan perlu didukung ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.

4.3.2 Misi 2. Transformasi Ekonomi Berkesinambungan: Menuju Ekonomi Inklusif Didukung Keamanan Daerah Yang Tangguh, Stabilitas Ekonomi, Pembangunan Kewilayahan Yang Merata dan Berkeadilan serta Sarana Prasarana Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan;
Misi ini selaras dengan RPJPN 2025-2045 pada misi 2, 4, 6, 7, dan 8

MISI RPJPD KABUPATEN WAY KANAN 2025-2045		MISI RPJPN 2025-2045	
2	Transformasi Ekonomi Berkesinambungan: Menuju Ekonomi Inklusif Didukung Keamanan Daerah Yang Tangguh, Stabilitas Ekonomi, Pembangunan Kewilayahan Yang Merata dan Berkeadilan serta Sarana Prasarana Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	2	Mewujudkan Transformasi Ekonomi
		4	Memantapkan Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah
		6	Mewujudkan pembangunan kewilayahan
		7	Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
		8	Mewujudkan kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas

Transformasi ekonomi adalah proses perubahan struktur, pola, dan kualitas perekonomian suatu wilayah yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah. Transformasi ekonomi melibatkan berbagai faktor, seperti sumber daya alam, modal, tenaga kerja, teknologi, inovasi, kebijakan, dan institusi. Transformasi ekonomi juga didorong oleh dinamika permintaan dan penawaran pasar, baik lokal, nasional, maupun global.

Perekonomian Kabupaten Way Kanan ditopang oleh 2 (dua) lapangan usaha andalan yaitu (1) lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, dan (2) lapangan usaha industri pengolahan, yang dalam 6 tahun terakhir (2018-2023) berkontribusi terhadap perekonomian daerah rata-rata mencapai 57,41%. Hal ini didukung oleh tenaga kerja yang bekerja dilapangan usaha ini tahun 2023 mencapai 145.021 jiwa (56,65%) yang didukung dengan keberadaan lahan pertanian yang cukup luas yaitu 223.622 ha (63,49% dari luas wilayah) dan sumberdaya air yang memadai dari 6 sungai besar yang ada serta didukung keberadaan 2 Daerah Irigasi (DI) yaitu Perjaya dan Way Umpu. Transformasi ekonomi ini didorong untuk meningkatkan kinerja lapangan usaha andalan Kabupaten Way Kanan dengan meningkatkan produktivitas pertanian dan industri pengolahan.

Pengembangan kedua lapangan usaha ini juga selaras tujuan penataan ruang Kabupaten Way Kanan sebagaimana tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Way Kanan 2023-2043 yaitu

”Penataan Ruang Wilayah bertujuan mewujudkan ruang yang kondusif, produktif, berkualitas dan berkelanjutan dalam rangka pemerataan pembangunan Wilayah dengan mendorong pembangunan sektor pertanian dan industri yang berbasis pertanian”.

Dalam upaya mewujudkan misi tersebut, maka diperlukan strategi dan kebijakan yang tepat untuk mendorong transformasi ekonomi di Kabupaten Way Kanan yang berkelanjutan dan inklusif. Tujuan dari misi ini adalah meningkatkan perekonomian daerah dengan indikator Pendapatan Per Kapita yang pada tahun 2023 baru sebesar Rp. 35.579,572,- diharapkan mencapai kisaran Rp. 98,69 juta-110,50 juta pada tahun 2045.

Dalam mewujudkan transformasi ekonomi berkesinambungan ada beberapa sasaran yang akan dicapai yaitu:

- 1. Meningkatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
- 2. Transformasi Digital
- 3. Integrasi Ekonomi Domestik dan Regional
- 4. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
- 5. Stabilitas Ekonomi
- 6. Daya Saing Daerah

4.3.3 Misi 3. Transformasi Tata Kelola Berkesinambungan;
Misi ini selaras dengan RPJPN 2025-2045 pada misi 3 dan 8

MISI RPJPD KABUPATEN WAY KANAN 2025-2045		MISI RPJPN 2025-2045	
3	Transformasi Tata Kelola Berkesinambungan	3	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola
		8	Mewujudkan kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas

Transformasi tata kelola pemerintahan adalah proses perbaikan sistem, struktur, dan kultur penyelenggaraan pemerintahan yang akan berdampak pada peningkatan kualitas, efektivitas, dan efisiensi pelayanan publik serta mewujudkan good governance dalam pemerintahan Kabupaten Way Kanan. Transformasi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik di dalam maupun di luar pemerintahan, yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan publik. Transformasi ini juga didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat mempercepat, mempermudah, dan memperluas akses informasi dan layanan publik bagi masyarakat.

Tujuan transformasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta partisipasi dan kesejahteraan masyarakat. Secara lebih sederhana transformasi tata kelola pemerintahan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas birokrasi di Kabupaten Way Kanan dengan indikator capaian indeks reformasi birokrasi tahun 2023 baru mencapai 55,56 poin kategori CC diharapkan mencapai kisaran >95-100 poin pada tahun 2045.

Dalam mewujudkan transformasi tata kelola berkesinambungan ada beberapa sasaran yang akan dicapai yaitu:

- 1. Regulasi Tata Kelola yang berintegritas dan adaptif
- 2. Meningkatnya Stabilitas Tramtibunlinmas

4.3.4 Misi 4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Berkesinambungan.
Misi ini selaras dengan RPJPN 2025-2045 pada misi 5 dan 8

MISI RPJPD KABUPATEN WAY KANAN 2025-2045		MISI RPJPN 2025-2045	
4	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Berkesinambungan	5	Memantapkan Ketahanan Sosial dan Ekologi
		8	Mewujudkan kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup adalah salah satu misi pembangunan daerah Kabupaten Way Kanan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Lingkungan hidup yang sehat dan lestari merupakan faktor penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, namun saat ini dunia sedang menghadapi ancaman serius perubahan iklim. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup yang melibatkan semua pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Tujuan misi ini adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2023 sebesar 70,51 poin dan diharapkan meningkat menjadi 75,17 poin pada tahun 2045.

Dalam mewujudkan kualitas lingkungan hidup ada beberapa sasaran yang akan dicapai yaitu:

1. Meningkatnya Lingkungan Hidup berkualitas
2. Meningkatnya Rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan
3. Meningkatnya pengelolaan sampah
4. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

5.1 Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan "Way Kanan Maju Dan Berkelanjutan" perlu rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi dalam bentuk arah kebijakan.

Permasalahan mendasar pembangunan daerah adalah belum optimalnya kualitas sumberdaya manusia yang ada, yang merupakan penggerak utama pembangunan daerah. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi daerah terutama pertanian dan industri pengolahan sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat belum optimal.

Selain itu daerah juga perlu mengantisipasi tantangan berupa krisis pangan yang diperkirakan oleh Organisasi Pangan Dunia (FAO) pada tahun 2050 mendatang dunia akan menghadapi potensi bencana kelaparan yang disebabkan oleh perubahan iklim. Oleh karena itu pembangunan daerah harus fokus pada pengembangan potensi daerah terutama pertanian dan industri pengolahan sebagai unggulan daerah untuk menopang ketersediaan pangan serta selaras dengan upaya pelestarian lingkungan hidup untuk mengantisipasi perubahan iklim. Hal ini juga perlu didukung dengan transformasi tata kelola pemerintahan yang semakin baik.

Untuk itu perlu upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kompetensi sumberdaya manusia sehingga mampu mengelola potensi sumberdaya alam yang ada secara lestari yang diharapkan mampu mendorong peningkatan daya saing daerah menuju keunggulan daerah. Oleh karena itu maka Arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Way Kanan 2025-2045 terbagi menjadi 4 (empat) tahapan yaitu:

1. Periode 2025-2029 : Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia;
 2. Periode 2030-2034 : Meningkatkan Kompetensi Sumberdaya Manusia;
 3. Periode 2035-2039 : Meningkatkan Daya Saing Daerah; dan
 4. Periode 2040-2045 : Meningkatkan Keunggulan Daerah.
-
1. Arah kebijakan RPJPD Periode 2025-2029 adalah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
Sumberdaya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan daerah karena memiliki peran ganda sebagai objek dan subjek pembangunan. Saat ini kondisi sumberdaya manusia belum optimal baik dari segi pendidikan maupun kesehatan, hal ini terlihat dari angka rata-rata lama sekolah hanya 7,74 tahun pada tahun 2023 kemudian prevalensi stunting juga masih cukup tinggi yaitu sebesar 22,7%. Untuk itu pada periode ini perlu upaya menyiapkan pondasi yang kuat dengan melakukan peningkatan kualitas sumberdaya manusia sehingga mampu menjadi pelaku pembangunan yang produktif dengan memanfaatkan potensi daerah yang ada.
 2. Arah kebijakan RPJPD Periode 2030-2034 adalah meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia
Seiring dengan terus melakukan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pada periode ini mulai difokuskan upaya meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan sumberdaya manusia dalam mengelola dan memanfaatkan potensi daerah yang ada yaitu pertanian dan industri pengolahan.

3. Arah kebijakan RPJPD Periode 2035-2039 adalah meningkatkan daya saing daerah
- Setelah masyarakat Kabupaten Way Kanan sudah memiliki kemampuan mengolah dan mengelola potensi daerah yang ada, maka daerah diharapkan lebih berdaya saing dengan sudah adanya sektor unggulan yang dikembangkan yaitu pertanian dan industri pengolahan.
- Untuk itu pada periode ini diharapkan kemampuan daerah semakin membaik dalam mengoptimalkan potensinya untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan persaingan dengan daerah lain. Hal ini didukung dengan kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim investasi, dan sumberdaya manusia yang semakin baik.
4. Arah kebijakan RPJPD Periode 2040-2045 adalah meningkatkan keunggulan daerah
- Pada periode ini diharapkan potensi daerah yaitu pertanian dan industri pengolahan dapat menjadi unggulan daerah dan mensejahterakan masyarakat.

VISI	ARAH KEBIJAKAN			
	2025-2029	2030-3034	2035-2039	2040-2045
Way Kanan Maju dan Berkelanjutan	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia	Meningkatkan daya saing daerah	Meningkatkan keunggulan daerah

5.2 Sasaran Pokok Daerah

Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Way Kanan 2025-2045 pada dasarnya merupakan fokus kebijakan lima tahunan yang memberi panduan tahapan pencapaian indikator kinerja sasaran pokok daerah. Sasaran pokok pembangunan ini dirinci berdasarkan prioritas masing-masing misi pada setiap tahapan pembangunan. Untuk itu sesuai dengan misi maka akan dilakukan upaya transformasi sosial berkesinambungan, transformasi ekonomi berkesinambungan, transformasi tata kelola berkesinambungan, dan upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup berkesinambungan, dengan sasaran pokok sebagai berikut:

1. Transformasi sosial berkesinambungan dilakukan dengan sasaran pokok yaitu:
 - a. kesehatan untuk semua;
 - b. pendidikan berkualitas dan merata;
 - c. perlindungan sosial yang adaptif;
 - d. keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif; dan
 - e. beragama maslahat dan berkebudayaan maju.
2. Transformasi ekonomi berkesinambungan dilakukan dengan sasaran pokok yaitu:
 - a. IPTEK, Inovasi, dan produktivitas ekonomi;
 - b. transformasi digital;
 - c. integrasi ekonomi domestik dan global;
 - d. perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
 - e. stabilitas ekonomi makro daerah; dan
 - f. daya saing daerah.
3. Transformasi tata kelola berkesinambungan dilakukan dengan sasaran pokok yaitu:
 - a. regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif; dan
 - b. hukum berkeadilan, demokrasi substansial dan stabilitas trantibum linmas daerah.

4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup berkesinambungan dilakukan dengan sasaran pokok yaitu:
 - a. lingkungan hidup berkualitas; dan
 - b. resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.

Sasaran pokok RPJPD Kabupaten Way Kanan 2025-2045 sesuai dengan arah kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Pokok Periode 2025-2029

Fokus kebijakan pada periode lima tahun pertama RPJPD 2025-2029 adalah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, dengan sasaran pokok sebagai berikut:

- 1.1 Sasaran Pokok Transformasi Sosial

Sasaran pokok kesehatan untuk semua diwujudkan dengan (1) umur harapan hidup tahun 2025 diperkirakan mencapai 74,57 tahun meningkat menjadi 75,49 tahun pada tahun 2029, (2) angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup tahun 2025 diperkirakan mencapai 154 menurun menjadi 80 pada tahun 2029, (3) prevalensi *stunting* pada balita tahun 2025 diperkirakan mencapai 18,8% menurun menjadi 14,2% pada tahun 2029, (4) cakupan penemuan kasus tuberkulosis (*case detection rate*) tahun 2025 diperkirakan mencapai 60% meningkat menjadi 70% pada tahun 2029, (5) angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*) tahun 2025 diperkirakan mencapai 90% meningkat menjadi 92% pada tahun 2029, dan (6) cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional tahun 2025 diperkirakan mencapai 98% diharapkan dapat bertahan 98% di tahun 2029.

Sasaran pokok pendidikan berkualitas dan merata diwujudkan dengan (1) persentase kabupaten yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk (a) literasi membaca dengan merujuk capaian Provinsi Lampung tahun 2025 diperkirakan mencapai 6,67-13,33 meningkat menjadi 30,00-40,00 pada tahun 2029 dan (b) untuk numerasi dengan merujuk capaian Provinsi Lampung tahun 2025 diperkirakan mencapai 0,00-6,67 meningkat menjadi 20,00-30,00 pada tahun 2029, (2) persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk (a) literasi membaca dengan merujuk capaian Provinsi Lampung tahun 2025 diperkirakan mencapai 30,75-32,75 meningkat menjadi 35,00-45,00 pada tahun 2029, dan (b) untuk numerasi dengan merujuk capaian Provinsi Lampung tahun 2025 diperkirakan mencapai 20,35-22,35 meningkat menjadi 30,00-45,00 pada tahun 2029, (3) rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun tahun 2025 diperkirakan mencapai 7,97-7,98 tahun meningkat menjadi 8,01-8,50 tahun pada tahun 2029, dan (4) harapan lama sekolah tahun 2025 diperkirakan mencapai 12,70 tahun meningkat menjadi 12,71-13,00 tahun pada tahun 2029.

Sasaran pokok perlindungan sosial yang adaptif diwujudkan dengan (1) tingkat kemiskinan tahun 2025 diperkirakan mencapai 9,92% menurun menjadi 7,0%-6,0% pada tahun 2029, (2) cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan tahun 2025 diperkirakan mencapai 22,44% meningkat menjadi 26,69% pada tahun 2029, dan (3) persentase penyandang disabilitas bekerja tahun 2025 diperkirakan mencapai 22,00% meningkat menjadi 30,00-35,00% pada tahun 2029.

Sasaran pokok keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif diwujudkan dengan (1) indeks pembangunan keluarga tahun 2025 diperkirakan mencapai 61,31 meningkat menjadi 64,11 pada tahun 2029, (2) indeks perlindungan anak tahun 2025 diperkirakan mencapai 62-63 meningkat menjadi 65-67 pada tahun 2029, (3) indeks ketimpangan gender (IKG) tahun 2025 diperkirakan mencapai 0,52 menurun menjadi 0,49 pada tahun 2029.

Sasaran pokok beragama maslahat dan berkebudayaan maju diwujudkan dengan (1) indeks pembangunan kebudayaan (IPK) dengan merujuk capaian

Provinsi Lampung tahun 2025 diperkirakan mencapai 59,10-59,12 meningkat menjadi 59,50-62,00 pada tahun 2029, dan (2) indeks kerukunan umat beragama (IKUB) tahun 2025 diperkirakan mencapai 74,07-74,13 meningkat menjadi 76,07-77,95 pada tahun 2029.

1.2 Sasaran Pokok Transformasi Ekonomi

Sasaran pokok iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi diwujudkan dengan (1) rasio PDRB industri pengolahan tahun 2025 diperkirakan mencapai 22,26-23,18% meningkat menjadi 24,41-25,32% pada tahun 2029, (2) rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum tahun 2025 diperkirakan mencapai 0,93% meningkat menjadi 1,22% pada tahun 2029, (3) laju pertumbuhan PDRB pertanian, kehutanan, dan perikanan tahun 2025 diperkirakan mencapai 1,5% meningkat menjadi 2,5-3,0% pada periode 2025-2029, (4) rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB tahun 2025 diperkirakan mencapai 0,15% meningkat menjadi 0,21% pada tahun 2029, (5) tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2025 diperkirakan mencapai 2,77-3,00% menurun menjadi 2,21-2,50% pada tahun 2029, (6) tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan tahun 2025 diperkirakan mencapai 54,95% meningkat menjadi 55% pada tahun 2029, (7) indeks inovasi daerah tahun 2025 diperkirakan mencapai 54,55 meningkat menjadi 56,95 pada tahun 2029.

Sasaran pokok transformasi digital diwujudkan dengan (1) rasio PDRB informasi dan komunikasi tahun 2025 diperkirakan mencapai 4,3% meningkat menjadi 4,7-5,0% pada tahun 2029, (2) laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha informasi dan komunikasi tahun 2025 diperkirakan mencapai 8% meningkat menjadi 8,3-8,5% pada tahun 2029.

Sasaran pokok integrasi ekonomi domestik dan global diwujudkan dengan (1) pembentukan modal tetap bruto terhadap PDRB tahun 2025 diperkirakan mencapai 32,01% meningkat menjadi 32,01-33,25% pada tahun 2029, (2) ekspor barang dan jasa terhadap PDRB tahun 2025 diperkirakan mencapai 35,00-37,00% meningkat menjadi 37,00-38,50% pada tahun 2029.

Sasaran pokok perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi diwujudkan dengan (1) kontribusi PDRB kabupaten terhadap provinsi tahun 2025 diperkirakan mencapai 3,89% meningkat menjadi 3,90% pada tahun 2029, dan (2) persentase desa mandiri tahun 2025 diperkirakan mencapai 2,262% meningkat menjadi 5,2-7,2% pada tahun 2029.

Sasaran pokok stabilitas ekonomi makro daerah diwujudkan dengan (1) rasio pajak daerah terhadap PDRB tahun 2025 diperkirakan mencapai 0,230% meningkat menjadi 0,231% pada tahun 2029, (2) tingkat inflasi tahun 2025 diperkirakan mencapai 3,05-3,7% dan relatif stabil di angka 2,5-3,5% pada tahun 2029.

Sasaran pokok daya saing daerah diwujudkan dengan indeks daya saing daerah tahun 2025 diperkirakan mencapai 3,05-3,07 meningkat menjadi 3,20-3,30 pada tahun 2029.

1.3 Sasaran Pokok Transformasi Tata Kelola

Sasaran pokok regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif diwujudkan dengan (1) indeks reformasi hukum tahun 2025 diperkirakan mencapai 58 meningkat menjadi 59-65 pada tahun 2029, (2) indeks reformasi birokrasi tahun 2025 diperkirakan mencapai 60 meningkat menjadi 65-70 pada tahun 2029, (3) indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) tahun 2025 diperkirakan mencapai 3,11 meningkat menjadi 3,15 pada tahun 2029, (4) indeks pelayanan publik tahun 2025 diperkirakan mencapai 3,50 meningkat menjadi 3,75 pada tahun 2029, (5) nilai survei penilaian integritas tahun 2025 diperkirakan mencapai 71,86 meningkat menjadi 78,56 pada tahun 2029, (6) nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2025 diperkirakan mencapai 61,05 meningkat menjadi 65-70 pada tahun 2029.

Sasaran pokok hukum berkeadilan, demokrasi substansial dan stabilitas trantibum linmas daerah diwujudkan dengan (1) tingkat kriminalitas tahun 2025 diperkirakan mencapai 70 menurun menjadi 68 pada tahun 2029, (2) proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya tahun 2025 diperkirakan mencapai 71,7% meningkat menjadi 75,7% pada tahun 2029, (3) indeks demokrasi Indonesia tahun 2025 merujuk data Provinsi Lampung diperkirakan mencapai 79,36-81,00 meningkat menjadi 82,00-83,00 pada tahun 2029.

1.4 Sasaran Pokok Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran pokok lingkungan hidup berkualitas diwujudkan dengan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) tahun 2025 diperkirakan mencapai 70,93 meningkat menjadi 71,78 pada tahun 2029.

Sasaran pokok resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim diwujudkan dengan indeks risiko bencana pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 108-96 menurun menjadi 96-86 pada tahun 2029.

2. Sasaran Pokok Periode 2030-2034

Fokus kebijakan pada periode lima tahun kedua RPJPD 2030-2034 adalah meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia, dengan sasaran pokok sebagai berikut:

2.1 Sasaran Pokok Transformasi Sosial

Sasaran pokok kesehatan untuk semua diwujudkan dengan (1) umur harapan hidup tahun 2029 diperkirakan mencapai 75,49 tahun meningkat menjadi 76,64 tahun pada tahun 2034, (2) angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup tahun 2029 diperkirakan mencapai 80 menurun menjadi 70 pada tahun 2034, (3) prevalensi *stunting* pada balita tahun 2029 diperkirakan mencapai 14,2% menurun menjadi 11,7% pada tahun 2034, (4) cakupan penemuan kasus tuberkulosis (*case detection rate*) tahun 2029 diperkirakan mencapai 70% meningkat menjadi 78,70% pada tahun 2034, (5) angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*) tahun 2029 diperkirakan mencapai 92% meningkat menjadi 94% pada tahun 2034, dan (6) cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional tahun 2029 diperkirakan mencapai 98% meningkat menjadi 98,5% di tahun 2034.

Sasaran pokok pendidikan berkualitas dan merata diwujudkan dengan (1) persentase kabupaten yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk (a) literasi membaca dengan merujuk capaian Provinsi Lampung tahun 2029 diperkirakan mencapai 30,00-40,00 meningkat menjadi 41,00-50,00 pada tahun 2034 dan (b) untuk numerasi dengan merujuk capaian Provinsi Lampung tahun 2029 diperkirakan mencapai 20,00-30,00 meningkat menjadi 31,00-40,00 pada tahun 2034, (2) persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk (a) literasi membaca dengan merujuk capaian Provinsi Lampung tahun 2029 diperkirakan mencapai 35,00-45,00 meningkat menjadi 46,00-56,00 pada tahun 2034, dan (b) untuk numerasi dengan merujuk capaian Provinsi Lampung tahun 2029 diperkirakan mencapai 30,00-45,00 meningkat menjadi 46,00-50,00 pada tahun 2034, (3) rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun tahun 2029 diperkirakan mencapai 8,01-8,50 tahun meningkat menjadi 8,51-9,00 tahun pada tahun 2034, dan (4) harapan lama sekolah tahun 2029 diperkirakan mencapai 12,71-13,00 tahun meningkat menjadi 13,01-13,50 tahun pada tahun 2034.

Sasaran pokok perlindungan sosial yang adaptif diwujudkan dengan (1) tingkat kemiskinan tahun 2029 diperkirakan mencapai 7,0%-6,0% menurun menjadi 4,5%-4,0% pada tahun 2034, (2) cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan tahun 2029 diperkirakan mencapai 26,69% meningkat menjadi 30,00%-40,00% pada tahun 2034, dan (3) persentase penyandang disabilitas

bekerja tahun 2029 diperkirakan mencapai 30,00-35,00% meningkat menjadi 36,00-46,00% pada tahun 2034.

Sasaran pokok keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif diwujudkan dengan (1) indeks pembangunan keluarga tahun 2029 diperkirakan mencapai 64,11 meningkat menjadi 67,61 pada tahun 2034, (2) indeks perlindungan anak tahun 2029 diperkirakan mencapai 65-67 meningkat menjadi 69-71 pada tahun 2034, (3) indeks ketimpangan gender (IKG) tahun 2029 diperkirakan mencapai 0,49 diharapkan menurun menjadi 0,37 pada tahun 2034.

Sasaran pokok beragama maslahat dan berkebudayaan maju diwujudkan dengan (1) indeks pembangunan kebudayaan (IPK) dengan merujuk capaian Provinsi Lampung tahun 2029 diperkirakan mencapai 59,50-62,00 meningkat menjadi 63,00-65,00 pada tahun 2034, dan (2) indeks kerukunan umat beragama (IKUB) tahun 2029 diperkirakan mencapai 76,07-77,95 meningkat menjadi 78,07-79,95 pada tahun 2034.

2.2 Sasaran Pokok Transformasi Ekonomi

Sasaran pokok iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi diwujudkan dengan (1) rasio PDRB industri pengolahan tahun 2029 diperkirakan mencapai 24,41-25,32% meningkat menjadi 26,71-27,54% pada tahun 2034, (2) rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum tahun 2029 diperkirakan mencapai 1,22% meningkat menjadi 1,41% pada tahun 2034, (3) laju pertumbuhan PDRB pertanian, kehutanan, dan perikanan periode tahun 2025-2029 diperkirakan mencapai 2,5-3,0% meningkat menjadi 3,5-4,0% pada periode 2030-2034, (4) rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB tahun 2029 diperkirakan mencapai 0,21% meningkat menjadi 0,26% pada tahun 2034, (5) tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2029 diperkirakan mencapai 2,21-2,50% menurun menjadi 2,01-2,17% pada tahun 2034, (6) tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan tahun 2029 diperkirakan mencapai 55% meningkat menjadi 61% pada tahun 2034, (7) indeks inovasi daerah tahun 2029 diperkirakan mencapai 56,95 meningkat menjadi 60,45 pada tahun 2034.

Sasaran pokok transformasi digital diwujudkan dengan (1) rasio PDRB informasi dan komunikasi tahun 2029 diperkirakan mencapai 4,7-5,0% meningkat menjadi 5,5-6,0% pada tahun 2034, (2) laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha informasi dan komunikasi tahun 2029 diperkirakan mencapai 8,3-8,5% meningkat menjadi 8,7-9,0% pada tahun 2034.

Sasaran pokok integrasi ekonomi domestik dan global diwujudkan dengan (1) pembentukan modal tetap bruto terhadap PDRB tahun 2029 diperkirakan mencapai 32,01-33,25% meningkat menjadi 33,25-33,50% pada tahun 2034, (2) ekspor barang dan jasa terhadap PDRB tahun 2029 diperkirakan mencapai 37,00-38,50% meningkat menjadi 38,50-40,00% pada tahun 2034.

Sasaran pokok perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi diwujudkan dengan (1) kontribusi PDRB kabupaten terhadap provinsi tahun 2029 diperkirakan mencapai 3,90% meningkat menjadi 3,91% pada tahun 2034, dan (2) persentase desa mandiri tahun 2029 diperkirakan mencapai 5,2-7,2% meningkat menjadi 10,2-12,2% pada tahun 2034.

Sasaran pokok stabilitas ekonomi makro daerah diwujudkan dengan (1) rasio pajak daerah terhadap PDRB tahun 2029 diperkirakan mencapai 0,231% bertahan 0,232% pada tahun 2034, (2) tingkat inflasi tahun 2029 diperkirakan mencapai 2,5-3,5% relatif stabil di angka 2,0-3,0% pada tahun 2034.

Sasaran pokok daya saing daerah diwujudkan dengan indeks daya saing daerah tahun 2029 diperkirakan mencapai 3,20-3,30 meningkat menjadi 3,45-3,55 pada tahun 2034.

2.3 Sasaran Pokok Transformasi Tata Kelola

Sasaran pokok regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif diwujudkan dengan (1) indeks reformasi hukum tahun 2029 diperkirakan mencapai 59-65 meningkat menjadi 66-71 pada tahun 2034, (2) indeks reformasi birokrasi tahun 2029 diperkirakan mencapai 65-70 meningkat menjadi 75-80 pada tahun 2034, (3) indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) tahun 2029 diperkirakan mencapai 3,15 meningkat menjadi 3,20 pada tahun 2034, (4) indeks pelayanan publik tahun 2029 diperkirakan mencapai 3,75 meningkat menjadi 4,00 pada tahun 2034, (5) nilai survei penilaian integritas tahun 2029 diperkirakan mencapai 78,56 meningkat menjadi 81,56 pada tahun 2034, (6) nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2029 diperkirakan mencapai 65-70 meningkat menjadi 75-80 pada tahun 2034.

Sasaran pokok hukum berkeadilan, demokrasi substansial dan stabilitas trantibum linmas daerah diwujudkan dengan (1) tingkat kriminalitas tahun 2029 diperkirakan mencapai 68 menurun menjadi 65 pada tahun 2034, (2) proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya tahun 2029 diperkirakan mencapai 75,7% meningkat menjadi 80,7% pada tahun 2034, (3) indeks demokrasi Indonesia tahun 2029 merujuk data Provinsi Lampung diperkirakan mencapai 82,00-83,00 meningkat menjadi 84,00-85,00 pada tahun 2034.

2.4 Sasaran Pokok Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran pokok lingkungan hidup berkualitas diwujudkan dengan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) tahun 2029 diperkirakan mencapai 71,78 meningkat menjadi 72,84 pada tahun 2034.

Sasaran pokok resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim diwujudkan dengan indeks risiko bencana pada tahun 2029 diperkirakan mencapai 96-86 menurun menjadi 86-81 pada tahun 2034.

3. Sasaran Pokok Periode 2035-2039

Fokus kebijakan pada periode lima tahun ketiga RPJPD 2035-2039 adalah meningkatkan daya saing daerah, dengan sasaran pokok sebagai berikut:

3.1 Sasaran Pokok Transformasi Sosial

Sasaran pokok kesehatan untuk semua diwujudkan dengan (1) umur harapan hidup tahun 2034 diperkirakan mencapai 76,64 tahun meningkat menjadi 77,79 tahun pada tahun 2039, (2) angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup tahun 2034 diperkirakan mencapai 70 menurun menjadi 60 pada tahun 2039, (3) prevalensi *stunting* pada balita tahun 2034 diperkirakan mencapai 11,7% menurun menjadi 8,9% pada tahun 2039, (4) cakupan penemuan kasus tuberkulosis (*case detection rate*) tahun 2034 diperkirakan mencapai 78,70% meningkat menjadi 88,00% pada tahun 2039, (5) angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*) tahun 2034 diperkirakan mencapai 94% meningkat menjadi 96% pada tahun 2039, dan (6) cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional tahun 2034 diperkirakan mencapai 98,5% meningkat menjadi 99% di tahun 2039.

Sasaran pokok pendidikan berkualitas dan merata diwujudkan dengan (1) persentase kabupaten yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk (a) literasi membaca dengan merujuk capaian Provinsi Lampung tahun 2034 diperkirakan mencapai 41,00-50,00 meningkat menjadi 51,00-60,00 pada tahun 2039 dan (b) untuk numerasi dengan merujuk capaian Provinsi Lampung tahun 2034 diperkirakan mencapai 31,00-40,00 meningkat menjadi 41,00-50,00 pada tahun 2039, (2) persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk (a) literasi membaca dengan merujuk capaian Provinsi Lampung

tahun 2034 diperkirakan mencapai 46,00-56,00 meningkat menjadi 56,00-65,00 pada tahun 2039, dan (b) untuk numerasi dengan merujuk capaian Provinsi Lampung tahun 2034 diperkirakan mencapai 46,00-50,00 meningkat menjadi 51,00-55,00 pada tahun 2039, (3) rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun tahun 2034 diperkirakan mencapai 8,51-9,00 tahun meningkat menjadi 9,51-9,91 tahun pada tahun 2039, dan (4) harapan lama sekolah tahun 2034 diperkirakan mencapai 13,01-13,50 tahun meningkat menjadi 13,51-13,91 tahun pada tahun 2039.

Sasaran pokok perlindungan sosial yang adaptif diwujudkan dengan (1) tingkat kemiskinan tahun 2034 diperkirakan mencapai 4,5%-4,0% menurun menjadi 2,5%-2,0% pada tahun 2039, (2) cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan tahun 2034 diperkirakan mencapai 30,00%-40,00% meningkat menjadi 41,00%-55,00% pada tahun 2039, dan (3) persentase penyandang disabilitas bekerja tahun 2034 diperkirakan mencapai 36,00-46,00% meningkat menjadi 47,00-52,00% pada tahun 2039.

Sasaran pokok keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif diwujudkan dengan (1) indeks pembangunan keluarga tahun 2034 diperkirakan mencapai 67,61 meningkat menjadi 71,11 pada tahun 2039, (2) indeks perlindungan anak tahun 2034 diperkirakan mencapai 69-71 meningkat menjadi 73-76 pada tahun 2039, (3) indeks ketimpangan gender (IKG) tahun 2034 diperkirakan mencapai 0,37 diharapkan menurun menjadi 0,36 pada tahun 2039.

Sasaran pokok beragama maslahat dan berkebudayaan maju diwujudkan dengan (1) indeks pembangunan kebudayaan (IPK) dengan merujuk capaian Provinsi Lampung tahun 2034 diperkirakan mencapai 63,00-65,00 meningkat menjadi 66,00-68,00 pada tahun 2039, dan (2) indeks kerukunan umat beragama (IKUB) tahun 2034 diperkirakan mencapai 78,07-79,95 meningkat menjadi 80,07-81,00 pada tahun 2039.

3.2 Sasaran Pokok Transformasi Ekonomi

Sasaran pokok iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi diwujudkan dengan (1) rasio PDRB industri pengolahan tahun 2034 diperkirakan mencapai 26,71-27,54% meningkat menjadi 27,84-28,39% pada tahun 2039, (2) rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum tahun 2034 diperkirakan mencapai 1,41% meningkat menjadi 1,71% pada tahun 2039, (3) laju pertumbuhan PDRB pertanian, kehutanan, dan perikanan periode tahun 2030-2034 diperkirakan mencapai 3,5-4,0% meningkat menjadi 4,5-5,0% pada periode 2035-2039, (4) rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB tahun 2034 diperkirakan mencapai 0,26% meningkat menjadi 0,31% pada tahun 2039, (5) tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2034 diperkirakan mencapai 2,01-2,17% menurun menjadi 1,63-1,69% pada tahun 2039, (6) tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan tahun 2034 diperkirakan mencapai 61% meningkat menjadi 63,7% pada tahun 2039, (7) indeks inovasi daerah tahun 2034 diperkirakan mencapai 60,45 meningkat menjadi 61,45 pada tahun 2039.

Sasaran pokok transformasi digital diwujudkan dengan (1) rasio PDRB informasi dan komunikasi tahun 2034 diperkirakan mencapai 5,5-6,0% meningkat menjadi 6,5-7,0% pada tahun 2039, (2) laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha informasi dan komunikasi tahun 2034 diperkirakan mencapai 8,7-9,0% meningkat menjadi 9,3-9,5% pada tahun 2039.

Sasaran pokok integrasi ekonomi domestik dan global diwujudkan dengan (1) pembentukan modal tetap bruto terhadap PDRB tahun 2034 diperkirakan mencapai 33,25-33,50% meningkat menjadi 33,50-34,75% pada tahun 2039, (2) ekspor barang dan jasa terhadap PDRB tahun 2034 diperkirakan mencapai 38,50-40,00% meningkat menjadi 40,41-41,50% pada tahun 2039.

Sasaran pokok perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi diwujudkan dengan (1) kontribusi PDRB kabupaten terhadap provinsi tahun 2034 diperkirakan mencapai 3,91% meningkat menjadi 3,92% pada tahun 2039, dan (2) persentase desa mandiri tahun 2034 diperkirakan mencapai 10,2-12,2% meningkat menjadi 15,2-17,2% pada tahun 2039.

Sasaran pokok stabilitas ekonomi makro daerah diwujudkan dengan (1) rasio pajak daerah terhadap PDRB tahun 2034 diperkirakan mencapai 0,232% bertahan 0,233% pada tahun 2039, (2) tingkat inflasi tahun 2034 diperkirakan mencapai 2,0-3,0% relatif stabil di angka 1,5-3,1% pada tahun 2039.

Sasaran pokok daya saing daerah diwujudkan dengan indeks daya saing daerah tahun 2034 diperkirakan mencapai 3,45-3,55 meningkat menjadi 3,65-3,75 pada tahun 2039.

3.3 Sasaran Pokok Transformasi Tata Kelola

Sasaran pokok regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif diwujudkan dengan (1) indeks reformasi hukum tahun 2034 diperkirakan mencapai 66-71 meningkat menjadi 72-78 pada tahun 2039, (2) indeks reformasi birokrasi tahun 2034 diperkirakan mencapai 75-80 meningkat menjadi 85-90 pada tahun 2034, (3) indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) tahun 2034 diperkirakan mencapai 3,20 meningkat menjadi 4,00 pada tahun 2039, (4) indeks pelayanan publik tahun 2034 diperkirakan mencapai 4,00 meningkat menjadi 4,25 pada tahun 2039, (5) nilai survei penilaian integritas tahun 2034 diperkirakan mencapai 81,56 meningkat menjadi 85,56 pada tahun 2039, (6) nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2034 diperkirakan mencapai 75-80 meningkat menjadi 85-90 pada tahun 2039.

Sasaran pokok hukum berkeadilan, demokrasi substansial dan stabilitas *trantibum linmas* daerah diwujudkan dengan (1) tingkat kriminalitas tahun 2034 diperkirakan mencapai 65 menurun menjadi 63 pada tahun 2039, (2) proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya tahun 2034 diperkirakan mencapai 80,7% meningkat menjadi 85,7% pada tahun 2039, (3) indeks demokrasi Indonesia tahun 2034 merujuk data Provinsi Lampung diperkirakan mencapai 84,00-85,00 meningkat menjadi 86,00-87,00 pada tahun 2039.

3.4 Sasaran Pokok Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran pokok lingkungan hidup berkualitas diwujudkan dengan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) tahun 2034 diperkirakan mencapai 72,84 meningkat menjadi 73,9 pada tahun 2039.

Sasaran pokok resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim diwujudkan dengan indeks risiko bencana pada tahun 2034 diperkirakan mencapai 86-81 menurun menjadi 81-76 pada tahun 2039.

4. Sasaran Pokok Periode 2040-2045

Fokus kebijakan pada periode lima tahun keempat RPJPD 2035-2039 adalah meningkatkan keunggulan daerah, dengan sasaran pokok sebagai berikut:

4.1 Sasaran Pokok Transformasi Sosial

Sasaran pokok kesehatan untuk semua diwujudkan dengan (1) umur harapan hidup tahun 2039 diperkirakan mencapai 77,79 tahun meningkat menjadi 79,17-80,00 tahun pada tahun 2045, (2) angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup tahun 2039 diperkirakan mencapai 60 menurun menjadi 50 pada tahun 2045, (3) prevalensi *stunting* pada balita tahun 2039 diperkirakan mencapai 8,9% menurun menjadi 4,7% pada tahun 2045, (4) cakupan penemuan kasus tuberkulosis (*case detection rate*) tahun 2039 diperkirakan mencapai 88,00% meningkat menjadi 90,00-95,00% pada tahun

2045, (5) angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*) tahun 2039 diperkirakan mencapai 96% meningkat menjadi 98% pada tahun 2045, dan (6) cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional tahun 2039 diperkirakan mencapai 99% meningkat menjadi 100% di tahun 2045.

Sasaran pokok pendidikan berkualitas dan merata diwujudkan dengan (1) persentase kabupaten yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk (a) literasi membaca dengan merujuk capaian Provinsi Lampung tahun 2039 diperkirakan mencapai 51,00-60,00 meningkat menjadi 66,67-73,33 pada tahun 2045 dan (b) untuk numerasi dengan merujuk capaian Provinsi Lampung tahun 2039 diperkirakan mencapai 41,00-50,00 meningkat menjadi 60,00-66,67 pada tahun 2045, (2) persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk (a) literasi membaca dengan merujuk capaian Provinsi Lampung tahun 2039 diperkirakan mencapai 56,00-65,00 meningkat menjadi 68,61-70,61 pada tahun 2045, dan (b) untuk numerasi dengan merujuk capaian Provinsi Lampung tahun 2039 diperkirakan mencapai 51,00-55,00 meningkat menjadi 58,49-60,49 pada tahun 2045, (3) rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun tahun 2039 diperkirakan mencapai 9,51-9,91 tahun meningkat menjadi 10,01-11,00 tahun pada tahun 2045, dan (4) harapan lama sekolah tahun 2039 diperkirakan mencapai 13,51-13,91 tahun meningkat menjadi 13,95-14,00 tahun pada tahun 2045.

Sasaran pokok perlindungan sosial yang adaptif diwujudkan dengan (1) tingkat kemiskinan tahun 2039 diperkirakan mencapai 2,5%-2,0% menurun menjadi 1,0%-0,8% pada tahun 2045, (2) cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan tahun 2039 diperkirakan mencapai 41,00%-55,00% meningkat menjadi 56,00%-70,00% pada tahun 2045, dan (3) persentase penyandang disabilitas bekerja tahun 2039 diperkirakan mencapai 47,00-52,00% meningkat menjadi 53,00-55,00% pada tahun 2045.

Sasaran pokok keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif diwujudkan dengan (1) indeks pembangunan keluarga tahun 2039 diperkirakan mencapai 71,11 meningkat menjadi 75,31 pada tahun 2045, (2) indeks perlindungan anak tahun 2039 diperkirakan mencapai 73-76 meningkat menjadi 78-81 pada tahun 2045, (3) indeks ketimpangan gender (IKG) tahun 2039 diperkirakan mencapai 0,36 diharapkan menurun menjadi 0,34 pada tahun 2045.

Sasaran pokok beragama maslahat dan berkebudayaan maju diwujudkan dengan (1) indeks pembangunan kebudayaan (IPK) dengan merujuk capaian Provinsi Lampung tahun 2039 diperkirakan mencapai 66,00-68,00 meningkat menjadi 68,96-69,11 pada tahun 2045, dan (2) indeks kerukunan umat beragama (IKUB) tahun 2039 diperkirakan mencapai 80,07-81,00 meningkat menjadi 81,24-81,94 pada tahun 2045.

4.2 Sasaran Pokok Transformasi Ekonomi

Sasaran pokok iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi diwujudkan dengan (1) rasio PDRB industri pengolahan tahun 2039 diperkirakan mencapai 27,84-28,39% meningkat menjadi 29,15-29,87% pada tahun 2045, (2) rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum tahun 2039 diperkirakan mencapai 1,71% meningkat menjadi 2,00% pada tahun 2045, (3) laju pertumbuhan PDRB pertanian, kehutanan, dan perikanan periode tahun 2035-2039 diperkirakan mencapai 4,5-5,0% meningkat menjadi 5,5-6,0% pada periode 2040-2045, (4) rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB tahun 2039 diperkirakan mencapai 0,31% meningkat menjadi 0,35% pada tahun 2045, (5) tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2039 diperkirakan mencapai 1,63-1,69% menurun menjadi 1,00-1,51% pada tahun 2045, (6) tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan tahun 2039 diperkirakan mencapai 63,7%

meningkat menjadi 65,9% pada tahun 2045, (7) indeks inovasi daerah tahun 2039 diperkirakan mencapai 61,45 meningkat menjadi 62,65 pada tahun 2045.

Sasaran pokok transformasi digital diwujudkan dengan (1) rasio PDRB informasi dan komunikasi tahun 2039 diperkirakan mencapai 6,5-7,0% meningkat menjadi 7,5-8,0% pada tahun 2045, (2) laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha informasi dan komunikasi tahun 2039 diperkirakan mencapai 9,3-9,5% meningkat menjadi 9,7-10,0% pada tahun 2045.

Sasaran pokok integrasi ekonomi domestik dan global diwujudkan dengan (1) pembentukan modal tetap bruto terhadap PDRB tahun 2039 diperkirakan mencapai 33,50-34,75% meningkat menjadi 34,75-36,00% pada tahun 2045, (2) ekspor barang dan jasa terhadap PDRB tahun 2039 diperkirakan mencapai 40,41-41,50% meningkat menjadi 41,50-42,00% pada tahun 2045.

Sasaran pokok perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi diwujudkan dengan (1) kontribusi PDRB kabupaten terhadap provinsi tahun 2039 diperkirakan mencapai 3,92% meningkat menjadi 3,93% pada tahun 2045, dan (2) persentase desa mandiri tahun 2039 diperkirakan mencapai 15,2-17,2% meningkat menjadi 21,267% pada tahun 2045.

Sasaran pokok stabilitas ekonomi makro daerah diwujudkan dengan (1) rasio pajak daerah terhadap PDRB tahun 2039 diperkirakan mencapai 0,233% bertahan 0,234% pada tahun 2045, (2) tingkat inflasi tahun 2039 diperkirakan mencapai 1,5-3,1% relatif stabil di angka 1,0-3,0% pada tahun 2045.

Sasaran pokok daya saing daerah diwujudkan dengan indeks daya saing daerah tahun 2039 diperkirakan mencapai 3,65-3,75 meningkat menjadi 3,85-4,00 pada tahun 2045.

4.3 Sasaran Pokok Transformasi Tata Kelola

Sasaran pokok regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif diwujudkan dengan (1) indeks reformasi hukum tahun 2039 diperkirakan mencapai 72-78 meningkat menjadi 80-85 pada tahun 2045, (2) indeks reformasi birokrasi tahun 2039 diperkirakan mencapai 85-90 meningkat menjadi 95-100 pada tahun 2045, (3) indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) tahun 2039 diperkirakan mencapai 4,00 meningkat menjadi 5,00 pada tahun 2045, (4) indeks pelayanan publik tahun 2039 diperkirakan mencapai 4,25 meningkat menjadi 4,50 pada tahun 2045, (5) nilai survei penilaian integritas tahun 2039 diperkirakan mencapai 85,56 meningkat menjadi 86,56 pada tahun 2045, (6) nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2039 diperkirakan mencapai 85-90 meningkat menjadi 95-100 pada tahun 2045.

Sasaran pokok hukum berkeadilan, demokrasi substansial dan stabilitas trantibum linmas daerah diwujudkan dengan (1) tingkat kriminalitas tahun 2039 diperkirakan mencapai 63 menurun menjadi 60 pada tahun 2045, (2) proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya tahun 2039 diperkirakan mencapai 85,7% meningkat menjadi 89,08% pada tahun 2045, (3) indeks demokrasi Indonesia tahun 2039 merujuk data Provinsi Lampung diperkirakan mencapai 86,00-87,00 meningkat menjadi 87,01-90,00 pada tahun 2045.

4.4 Sasaran Pokok Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran pokok lingkungan hidup berkualitas diwujudkan dengan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) tahun 2039 diperkirakan mencapai 73,9 meningkat menjadi 75,17 pada tahun 2045.

Sasaran pokok resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim diwujudkan dengan indeks risiko bencana pada tahun 2039 diperkirakan mencapai 81-76 menurun menjadi 76-71 pada tahun 2045.

RPJPD KABUPATEN WAY KANAN 2025-2045

MISI 1 :

Transformasi Sosial Berkesinambungan: Menuju Sumber Daya Manusia Unggul dan Produktif Didukung Ketahanan Sosial, Sarana Prasarana Berkualitas dan Ramah Lingkungan

SASARAN POKOK /INDIKATOR		BASELINE 2025	ARAH KEBIJAKAN			
			2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
			Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia	Meningkatkan Kompetensi Sumberdaya Manusia	Meningkatkan Daya Saing Daerah	Meningkatkan Keunggulan Daerah
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET
S01	Kesehatan untuk semua					
1.	Usia Harapan Hidup (Tahun)	74,57	75,49	76,64	77,79	79,17-80,00
2.	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 kelahiran hidup)	154	80	70	60	50
3.	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	18,8	14,2	11,7	8,9	4,7
4.	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (<i>case detection rate</i>) (%)	60,00	70,00	78,70	88,00	90,00 – 95,00
5.	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	90	92	94	96	98
6.	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98	98	98,5	99	100
S02	Pendidikan Berkualitas yang Merata					
1.	Persentase Kabupaten yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk :					
	Literasi Membaca*	6,67 - 13,33	30,00-40,00	41,00-50,00	51,00-60,00	66,67 - 73,33
	Numerasi*	0,00 - 6,67	20,00-30,00	31,00-40,00	41,00-50,00	60,00 - 66,67
2.	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:					
	Literasi Membaca*	30,75-32,75	35,00-45,00	46,00-56,00	56,00-65,00	68,61-70,61
	Numerasi*	20,35-22,35	30,00-45,00	46,00-50,00	51,00-55,00	58,49-60,49

3.	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	7,97-7,98	8,01-8,50	8,51-9,00	9,51-9,91	10,01-11,00
4.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,70	12,71-13,00	13,01-13,50	13,51-13,91	13,95-14,00
S03	Perlindungan Sosial yang Adaptif					
1.	Tingkat Kemiskinan (%)	9,92	7,0-6,0	4,5-4,0	2,5-2,0	1,0-0,8
2.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	22,44	26,69	30,00-40,00	41,00-55,00	56,00-70,00
3.	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja (%)*	22,00	30,00-35,00	36,00-46,00	47,00-52,00	53,00-55,00
S04	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif					
1.	Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)	61,31	64,11	67,61	71,11	75,31
2.	Indeks Perlindungan Anak	62-63	65-67	69-71	73-76	78-81
3.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,49	0,49	0,37	0,36	0,34
S05	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju					
1.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)*	59,10 - 59,12*	59,50-62,00	63,00-65,00	66,00-68,00	68,96 - 69,11
2.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	74,07 - 74,13	76,07-77,95	78,07-79,95	80,07-81,00	81,24 - 81,94
MISI 2 :						
Transformasi Ekonomi Berkesinambungan: Menuju Ekonomi Inklusif Didukung Keamanan Daerah Yang Tangguh, Stabilitas Ekonomi, Pembangunan Kewilayahan Yang Merata dan Berkeadilan serta Sarana Prasarana Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan						
S06	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi					
1.	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	22,26-23,18	24,41-25,32	26,71-27,54	27,84-28,39	29,15-29,87
2.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	0,93	1,22	1,41	1,71	2,00
3.	Laju Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan (%)	1,5	2,5-3,0	3,5-4,0	4,5-5,0	5,5-6,0
4.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,15	0,21	0,26	0,31	0,35
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,77-3,00	2,21-2,50	2,01-2,17	1,63-1,69	1,00-1,51
6.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	54,95	55	61	63,7	65,9

7.	Indeks Inovasi Daerah	54,55	56,95	60,45	61,45	62,65
S07	Transformasi Digital					
1.	Rasio PDRB Informasi dan Komunikasi (%)	4,3	4,7-5,0	5,5-6,0	6,5-7,0	7,5-8,0
2.	Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi (%)	8	8,3-8,5	8,7-9,0	9,3-9,5	9,7-10,0
S08	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global					
1.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	32,01	32,01-33,25	33,25-33,50	33,50-34,75	34,75-36,00
2.	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	35,00-37,00	37,00-38,50	38,50-40,00	40,41-41,50	41,50-42,00
S09	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi					
1.	Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Provinsi (%)	3,89	3,90	3,91	3,92	3,93
2.	Persentase Desa Mandiri (%)	2,262	5,2-7,2	10,2-12,2	15,2-17,2	21,267
S10	Stabilitas Ekonomi Makro Daerah					
1.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,230	0,231	0,232	0,233	0,234
2.	Tingkat Inflasi (%)	3,05-3,7	2,5-3,5	2,0-3,0	1,5-3,1	1,0-3,0
S11	Daya Saing Daerah					
1.	Indeks Daya Saing Daerah	3,05-3,07	3,20-3,30	3,45-3,55	3,65-3,75	3,85-4,00
MISI 3 : Transformasi Tata Kelola Berkesinambungan						
S12	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif					
1.	Indeks Reformasi Hukum	58	59-65	66-71	72-78	80-85
2.	Indeks Reformasi Birokrasi	60	65-70	75-80	85-90	95-100
3.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,11	3,15	3,20	4,00	5,00
4.	Indeks Pelayanan Publik	3,50	3,75	4,00	4,25	4,5

5.	Survei Penilaian Integritas	71,86	78,56	81,56	85,56	86,56
6.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (poin)	61,05	65-70	75-80	85-90	95-100
S13	Hukum Berkeadilan, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Trantibum Linmas Daerah					
1.	Tingkat Kriminalitas (Rasio)	70	68	65	63	60
2.	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)*	71,7 **	75,7	80,7	85,7	89,08
3.	Indeks Demokrasi Indonesia*	79,36-81,00 (sedang)	82,00-83,00	84,00-85,00	86,00-87,00	87,01 – 90,00 (tinggi)
MISI 4 :						
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Berkesinambungan						
S14	Lingkungan Hidup Berkualitas					
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	70,93	71,78	72,84	73,9	75,17
S15	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim					
1.	Indeks Risiko Bencana	108 - 96	96-86	86 - 81	81- 76	76-71

BAB VI PENUTUP

Visi rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Way Kanan 2025-2045 adalah "Way Kanan Maju dan Berkelanjutan". Untuk memastikan tercapainya target pembangunan daerah tersebut perlu dilakukan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Rencana Pembangunan jangka panjang ini dijabarkan kedalam rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis perangkat daerah maupun rencana pembangunan tahunan daerah. Untuk itu agar seluruh stakeholders terkait dapat bersama-sama membangun daerah dengan berpedoman atau mengacu pada dokumen RPJPD ini.

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19850624 201001 1 012